

Renewable Energy For A Better Future

Energi Terbarukan untuk Masa Depan yang Lebih Baik



SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Disclaimer

“

Laporan Tahunan ini memuat proyeksi, rencana bisnis, penerapan strategi, dan kebijakan yang disusun berdasarkan analisis terhadap kondisi terkini serta perhitungan mengenai kondisi yang akan datang. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki nilai risiko serta ketidakpastian yang dapat mengakibatkan perbedaan antara informasi yang dilaporkan dengan perkembangan aktual. Perseroan tidak menjamin bahwa informasi-informasi yang akan disajikan dalam laporan ini akan membawa hasil yang seluruhnya sesuai dengan yang diharapkan.

Laporan ini memuat kata "Perseroan", "Perusahaan", "Arkora Hydro", dan "PT Arkora Hydro" yang mengacu pada PT Arkora Hydro Tbk. Kata-kata ganti tersebut digunakan demi kemudahan penyebutan.

This Annual Report contains projections, business plans, implementation of strategies, and policies that are prepared based on an analysis of current conditions and calculations regarding future conditions. Such statements carry risks and uncertainty that may result in discrepancies between the reported information and actual developments. The Company does not guarantee that the information presented in this report will bring results that are entirely as expected.

This report contains the word "the Company", "Arkora Hydro", and "PT Arkora Hydro" which refer to PT Arkora Hydro Tbk. These words are used at times for the convenience of referring to PT Arkora Hydro Tbk.

”

TENTANG LAPORAN TAHUNAN

About the Annual Report

Laporan ini merupakan Laporan Tahunan PT Arkora Hydro Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, yang sekaligus merupakan Laporan Tahunan pertama yang dipublikasikan oleh Perseroan. Laporan ini disusun dengan mengacu pada ketentuan yang termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021. Di samping itu, laporan ini juga dilengkapi dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal independen dan ditandatangani oleh Direksi, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, laporan ini disajikan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, serta dipublikasikan dalam format cetak dan elektronik dengan menggunakan jenis dan ukuran teks yang sesuai.

This report is the Annual Report of PT Arkora Hydro Tbk for the fiscal year ended on December 31, 2021, which is also the first Annual Report published by the Company. This report is prepared by referring to the provisions contained in the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 and Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021. In addition, this report is also accompanied by a Financial Statement that has been audited by an independent external auditor and signed by the Board of Directors, in accordance with the provisions of Law No. 40 of 2007.

In compliance with the prevailing regulations, this report is presented in 2 (two) languages, namely in Indonesian Language and English, and is published in print and electronic formats using appropriate type and size of text.



ARKORA HYDRO

Renewable Energy For A Better Future

Energi Terbarukan untuk Masa Depan yang Lebih Baik

PT Akora Hydro Tbk hadir dengan tujuan mempercepat perkembangan energi terbarukan di Indonesia melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) aliran sungai langsung (*run-of-river*), terutama di daerah terpencil yang belum memiliki pasokan listrik. Penggunaan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) dipilih oleh Arkora Hydro dalam menjalankan operasional bisnisnya karena tidak dapat dipungkiri, manfaat EBT sangatlah penting untuk mewujudkan ketahanan energi di masa depan.

Di samping itu, pemanfaatan EBT dinilai lebih ramah lingkungan karena mampu mengurangi pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan jika dibandingkan dengan energi tak terbarukan. Artinya, EBT yang dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alami tidak akan habis jumlahnya dan dapat bersifat berkelanjutan apabila dikelola dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa EBT sebagai energi yang berkelanjutan (*sustainable energy*).

Arkora Hydro sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik melalui sumber energi baru dan terbarukan (EBT) berkomitmen, bersama masyarakat membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pemanfaatan EBT.

PT Akora Hydro Tbk is present with the aim of accelerating the development of renewable energy in Indonesia through the construction of run-of-river Hydro Powerplant (HPP), especially in remote areas that are yet to have electricity supply. Arkora Hydro favors new and renewable energy sources (NRE) in carrying out its business operations as it is undeniable that the benefits of NRE are really crucial to realize energy security in the future.

Moreover, the use of NRE is considered more environmentally friendly as it can minimize environmental pollution and environmental damage when compared to non-renewable energy. This means that NRE is produced from energy resources that naturally will not run out in quantity and can be sustainable if managed properly. Therefore, it can be said that NRE is a sustainable energy.

Arkora Hydro as a company engaged in power generation through new and renewable energy sources (NRE) is committed, together with the community, to building a better future for all Indonesian people through the use of NRE.



Daftar Isi

Table of Content



01

Kilas Kinerja Performance Highlight

Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Data Highlights	6
Grafik Ikhtisar Keuangan Chart of Financial Highlights	8
Ikhtisar Saham Share Highlights	9
Informasi Terkait Suspensi, Delisting, dan Relisting Saham Information on Suspension, Delisting, and Relisting of Shares	9
Informasi Terkait Aksi Korporasi Information on Corporate Action	9
Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi Information on Bonds, Sukuk, and/or Convertible Bonds	9
Peristiwa Penting 2021 Significant Events in 2021	10



02

Laporan Manajemen Management Report

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report	12
Laporan Direksi Board of Directors Report	20



03

Profil Perusahaan Company Profile

Identitas Perusahaan Corporate Identity	32
Sekilas Tentang Arkora Hydro Arkora Hydro at A Glance	33
Jejak Langkah Milestones	35
Bidang Usaha Line of Business	36
Visi dan Misi Vision and Mission	38
Nilai-Nilai Budaya Perusahaan Corporate Cultural Values	39
Keanggotaan Asosiasi Industri Industry Association Membership	40
Struktur Organisasi Organizational Structure	40
Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	41
Profil Manajemen Management Profile	41
Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition	46
Informasi Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, atau Ventura Bersama Information on Subsidiaries, Associates, or Joint Ventures	49
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Professionals and Institutions	56
Wilayah Operasional Operational Area	58
Sumber Daya Manusia Human Resources	60



04

Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

Tinjauan Ekonomi Makro Macroeconomic Overview	64
--	----



05

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Tinjauan Industri Industry Overview	65	Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance	90
Tinjauan Operasional Operational Overview	66	Penerapan Prinsip Tata Kelola di Perusahaan Implementation of Governance Principles In The Company	90
Tinjauan Per Segmen Operasi Overview Per Operating Segment	67	Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola di Perusahaan Legal Basis for Implementing Corporate Governance	91
Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektabilitas Piutang Solvency and Collectability Rate	71	Struktur Tata Kelola Governance Structure	92
Rasio-Rasio Keuangan Perusahaan Company Financial Ratios	72	Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Shareholders and General Meeting Of Shareholders	93
Struktur Modal Perusahaan Capital Structure	72	Dewan Komisaris Board of Commissioners	95
Ikatan Material untuk Investasi Barang dan Modal Material Commitments for Capital and Goods Investment	73	Direksi Board of Directors	100
Realisasi Investasi Barang dan Modal Realization of Goods and Capital Investment	73	Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Remuneration Policy of the Board of Commissioners and Board of Directors	104
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Facts and Information Subsequent to Accountant Report Date	74	Pengungkapan Hubungan Afiliasi Affiliation Disclosure	105
Kebijakan Dividen Dividend Policy	77	Komite Audit Audit Committee	106
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, Debt/Capital Restructuring	79	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	108
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Restructuring	80	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	111
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 Comparison between Realized Performance with 2021 Targets and 2022 Projections	82	Unit Audit Internal Internal Audit Unit	113
Perubahan Peraturan Perundang- undangan yang Berpengaruh Signifikan Changes in the Laws and Regulations with Significant Effect	82	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	116
Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Berpengaruh Signifikan Changes in Accounting Policy that Significantly Impact the Company	83	Akuntan Publik Public Accountant	116
Aspek Pemasaran Marketing Aspect	84	Sistem Manajemen Risiko Risk Management System	116
Prospek Usaha Business Prospect	84	Kode Etik Code Of Conduct	119
		Perkara Penting Legal Cases	119
		Sanksi Administratif Administrative Sanctions	120
		Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data	120
		Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	122
		Kebijakan Anti Korupsi dan Kebijakan Anti Gratifikasi Anti-Corruption Policy and Anti- Gratification Policy	



06

Laporan Keberlanjutan Sustainability Report

Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy	128
Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan Sustainability Aspect Performance Highlights	130
Tata Kelola Keberlanjutan Sustainable Governance	131
Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance	133
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan Responsibility On Sustainable Product/ Service Development	142
Referensi Silang GRI Standard Cross Reference GRI Standard	144
Referensi SEOJK No. 16/ SEOJK.04/2021: Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Reference On Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies	147
Lembar Umpan Balik Feedback Form	163
Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya Response To Feedback On The Previous Year Report	165
Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan dan Keberlanjutan 2021 PT Arkora Hydro Tbk The Board of Commissioners' and The Board of Directors' Statement of Responsibility for the 2021 Annual Report and Sustainability Report of PT Arkora Hydro Tbk	166

07

Laporan Keuangan Financial Report



ARKORA HYDRO

KILAS KINERJA

Performance Highlights



01

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Key Financial Data Highlights

LAPORAN LABA RUGI

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS

Dalam ribuan rupiah / In thousands of rupiah.

Uraian / Description	2021	2020	2019
Pendapatan / Revenues	198.393.420	52.094.112	145.119.210
Beban Pokok Pendapatan / Cost of Revenues	(89.276.247)	(22.944.234)	(95.435.095)
Laba Kotor / Gross Profit	109.117.174	29.149.878	49.684.115
Laba (Rugi) Sebelum Pajak / Profit (Loss) Before Tax	75.470.963	(25.834.511)	12.413.934
Manfaat (Beban) Pajak / Tax Benefit (Expenses)	(25.740.620)	2.872.939	(21.413.934)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Net Profit (Loss) for the Year	49.730.343	(22.961.572)	(8.618.425)
Laba (rugi) yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk / Net Income (Loss) Attributable to Owners of the Company	48.959.115	(22.628.491)	(8.605.691)
Laba (rugi) yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali / Net Income (Loss) Attributable to Non-Controlling Interest	771.228	(333.080)	(12.734)
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Income (Loss) for the Year	50.310.798	(21.020.822)	(8.529.078)
Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk / Comprehensive Income (Loss) Attributable to Owners of the Company	49.488.547	(20.764.793)	(8.541.220)
Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-pengendali / Comprehensive Income (Loss) Attributable to Non-Controlling Interest	822.251	(256.030)	12.142
Laba (Rugi) Per Saham / Earnings (Loss) per Share	17	(8)	(4)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Dalam ribuan rupiah / In thousands of rupiah.

Uraian / Description	2021	2020	2019
Aset Lancar / Current Assets	53.834.676	49.791.152	19.432.711
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	634.779.071	510.797.090	514.381.968
Jumlah Aset / Total Assets	688.613.747	560.588.242	533.814.679
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	167.047.861	18.123.235	42.167.985
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	350.540.265	421.750.185	349.911.049
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	517.588.126	439.873.420	392.079.034
Ekuitas / Equity	171.025.620	120.714.822	141.735.645

“

Dengan fokus yang kuat pada pembangunan pembangkit dan peningkatan keunggulan operasional, Perseroan terus mengupayakan terwujudnya keberlanjutan dalam seluruh aspek bisnis.

With a strong focus on power plant development and increasing operational excellence, the Company continuously strives for sustainability in all aspects of the business.

”



RASIO-RASIO KEUANGAN

FINANCIAL RATIOS

Uraian / Description	2021	2020	2019
Rasio Usaha / Business Ratio			
Gross Profit Margin	55,32%	55,96%	34,24%
Return on Asset	7,19%	-4,10%	-1,61%
Return on Equity	29,07%	-19,02%	-6,08%
Rasio Likuiditas / Liquidity Ratio			
Rasio Lancar / Current Ratio	31,16%	274,74%	46,08%
Rasio Solvabilitas / Solvency Ratio			
Liabilitas terhadap Aset / Liabilities to Asset Ratio	0,75x	0,78x	0,73x
Liabilitas terhadap Ekuitas / Liabilities to Equity Ratio	3,05x	3,64x	2,77x

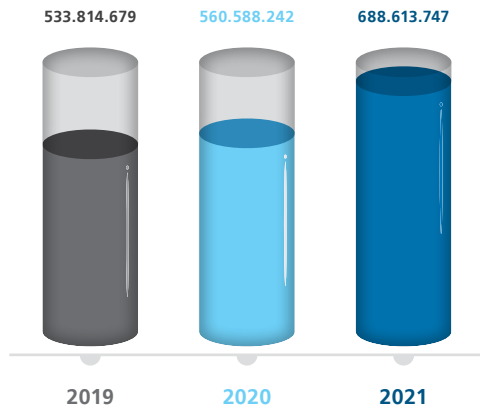
GRAFIK IKHTISAR KEUANGAN

Chart of Financial Highlights

Jumlah Aset

Total Assets

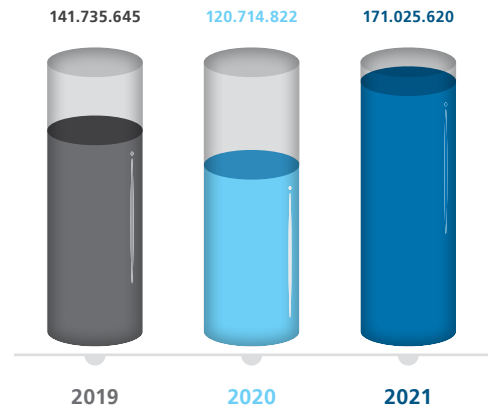
(Dalam ribuan rupiah / In thousands of rupiah)



Jumlah Ekuitas

Total Equity

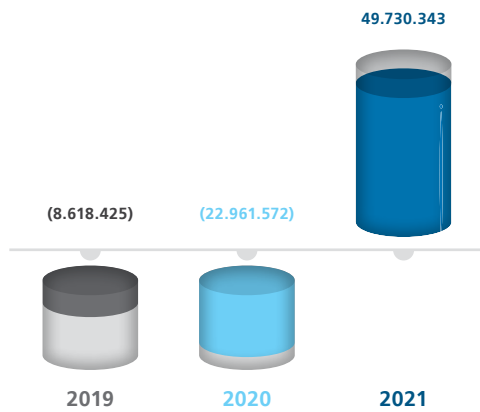
(Dalam ribuan rupiah / In thousands of rupiah)



Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

Net Profit (Loss) for the Year

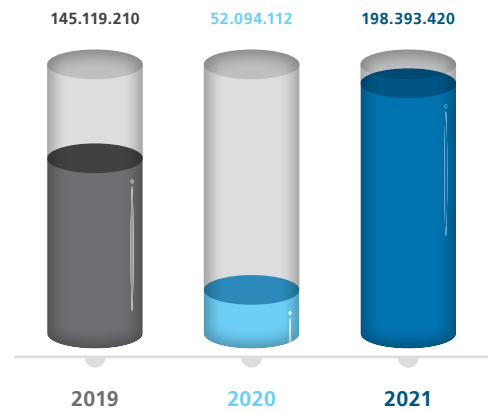
(Dalam ribuan rupiah / In thousands of rupiah)



Pendapatan

Revenues

(Dalam ribuan rupiah / In thousands of rupiah)



IKHTISAR SAHAM

Share Highlights

Hingga 31 Desember 2021, Arkora Hydro belum melakukan penawaran umum saham perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Oleh sebab itu, tidak terdapat informasi mengenai harga dan volume transaksi saham per triwulan serta grafik pergerakan saham untuk disajikan pada bagian ini.

As of December 31, 2021, Arkora Hydro has not made an Initial Public Offering (IPO). Therefore, there is no information regarding the price and volume of stock transactions per quarter as well as stock movement charts to be presented in this section.

INFORMASI TERKAIT SUSPENSI, *DELISTING*, DAN *RELISTING* SAHAM

Information on Suspension, Delisting, and Relisting of Shares

Hingga 31 Desember 2021, Arkora Hydro tidak pernah menerima sanksi apa pun termasuk sanksi yang memberi pengaruh secara signifikan terhadap aktivitas perdagangan saham di bursa efek mana pun.

As of December 31, 2021, Arkora Hydro has never received any sanctions including sanctions that significantly affect stock trading activities on any stock exchange.

INFORMASI TERKAIT AKSI KORPORASI

Information on Corporate Action

Hingga 31 Desember 2021, Arkora Hydro tidak melakukan aksi korporasi apa pun.

As of December 31, 2021, Arkora Hydro did not take any corporate action.

INFORMASI OBLIGASI, SUKUK, DAN/ATAU OBLIGASI KONVERSI

Information on Bonds, Sukuk, and/or Convertible Bonds

Hingga 31 Desember 2021, Arkora Hydro tidak pernah menerbitkan obligasi, sukuk, dan obligasi konversi.

Arkora Hydro did not issue any bonds, sukuk, and convertible bonds as of December 31, 2021.

PERISTIWA PENTING 2021

Significant Events in 2021



April / April

01

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), peningkatan jalan Desa Panjaoka, Poso, Sulawesi Tengah. / Implementation of the Social and Environmental Responsibility (TJSL) program, road improvement in Panjaoka Village, Poso, Central Sulawesi.

Mei / May

02

Pelaksanaan program TJSL, pemasangan PJU Desa Kuku. / Implementation of the TJSL program, installation of the Kuku Village PJU.

Oktober / October

03

Pelaksanaan program TJSL, pembangunan rabat beton Desa Panawa, Garut, Jawa Barat. / Implementation of the TJSL program, construction of concrete rebates in Panawa Village, Garut, West Java.



ARKORA HYDRO

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report



2022

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Report

Arya Pradana Setiadharna
Komisaris Utama
President Commissioner



“

Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab terhadap fungsi pengawasan, Dewan Komisaris melakukan *monitoring* terhadap tindak lanjut kinerja Direksi atas saran, rekomendasi, serta nasihat yang diberikan, untuk kemudian dilakukan proses evaluasi.

As a form of implementation of the responsibility for the supervisory function, the Board of Commissioners monitors the follow-up to the performance of the Board of Directors on the suggestions, recommendations, and advice given, to then carry out an evaluation process.

”

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Honorable Shareholders and Stakeholders,

Kami memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya PT Arkora Hydro Tbk mampu melewati tahun 2021 yang penuh dengan berbagai tantangan akibat pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia. Di tengah perekonomian yang masih memasuki era pemulihan, Perusahaan berhasil menjadikan tantangan sebagai peluang sehingga Perseroan berhasil mencatatkan kinerja yang dapat tetap terjaga dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari sejumlah capaian keuangan dan operasional yang terpenuhi secara baik sesuai target jangka pendek dan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021. Pencapaian-pencapaian tersebut merupakan langkah penting bagi Perseroan guna mendukung pertumbuhan usaha Perusahaan secara jangka panjang sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Mewakili Dewan Komisaris, pada kesempatan ini perkenankan Kami menyampaikan laporan pengawasan pengelolaan Perseroan untuk tahun buku 2021.

SITUASI PEREKONOMIAN TAHUN 2021

Kondisi perekonomian dunia di tahun 2021 masih dalam tren pemulihan meskipun menunjukkan perlambatan akibat penyebaran kasus Covid-19 yang kembali meningkat di berbagai negara pada triwulan III tahun 2021. Mengacu pada laporan *World Economic Outlook* (WEO) oleh International Monetary Fund (IMF) edisi Januari 2022 mencatat pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 mencapai 5,9% atau lebih rendah 0,1% dari perkiraan yang diumumkan pada Juli lalu. Penurunan proyeksi 2021 tersebut seiring adanya penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal III 2021 akibat merebaknya kasus positif varian Delta di seluruh dunia.

First of all, let us express our praise and gratitude to the Almighty God for His blessings that PT Arkora Hydro Tbk was able to get through the challenging year 2021 caused by the ongoing Covid-19 around the world. In the midst of the recovering economy, the Company has succeeded in seizing opportunities from such challenges so that the Company was able to record a performance that can be maintained properly. This can be seen from a number of financial and operational achievements that have been well met according to the short-term and long-term targets set in the 2021 Company Work Plan and Budget (RKAP). These achievements are crucial for the Company to support its business growth in the long-term in accordance with the vision and mission that has been set.

On behalf of the Board of Commissioners, on this occasion, please allow us to submit a supervisory report on the management of the Company for the 2021 fiscal year.

ECONOMIC CONDITION IN 2021

The condition of the global economy in 2021 was still in a recovery trend despite indicating a slowdown due to the spread of Covid-19 cases which has resurged in various countries in the third quarter of 2021. Referring to the January 2022 edition of *World Economic Outlook* (WEO) by the International Monetary Fund (IMF), global economic growth in 2021 reached 5.9% or 0.1% lower than the forecast announced last July. The decline in the 2021 projection was in line with the decline in Gross Domestic Product (GDP) in the third quarter of 2021 due to the spread of positive cases of the Delta variant around the world.

Kendati demikian, pertumbuhan di Kawasan Asean-5 justru diprediksi mengalami tren peningkatan. Selain Indonesia, Malaysia diperkirakan mengalami tren peningkatan, yaitu 3,5% di 2021, 5,7% di 2022, dan 5,7% di 2023. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di tahun 2021 mencapai 4,9% (yoy), Tiongkok tumbuh 4,9% (yoy), Jepang tumbuh 1,4% (yoy), Korea Selatan tumbuh 4,0% (yoy), sementara Singapura tumbuh 7,1% (yoy), di mana seluruhnya tumbuh lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pemulihan ekonomi global rupanya berdampak pada peningkatan harga komoditas terutama harga komoditas energi, khususnya gas alam dan batu bara. Hal itu menyebabkan terjadinya lonjakan biaya input pada sektor industri.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan berlangsung lebih seimbang, sehingga tidak hanya bertumpu pada pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, namun juga disertai dengan perbaikan ekonomi Eropa, Jepang, dan India.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi juga dialami Indonesia yang pada triwulan III tahun 2021 mencapai 3,5% (yoy). Sementara pada triwulan IV tahun 2021, perekonomian Indonesia masih melanjutkan pemulihan, meski belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Bank Indonesia dalam laporannya menyatakan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2021 mencapai 3,69% (yoy), jauh meningkat dibanding pencapaian pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI

Sepanjang tahun 2021 Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sekaligus peninjauan secara berkala atas kinerja keuangan dan operasional Perusahaan yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah sesuai dengan aspirasi pemegang saham. Hasil dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja Perseroan dan isu-isu penting yang memiliki pengaruh terhadap operasional Perusahaan, dijadikan dasar bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pemberian nasihat kepada Direksi. Sejalan dengan hal itu, Dewan Komisaris secara konsisten mengikuti perkembangan sejumlah isu penting yang mencakup bidang ekonomi, lingkungan, sosial serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang dinilai dapat memberikan dampak terhadap aktivitas bisnis yang dijalankan Perseroan.

Nevertheless, growth in the Asean-5 Region is predicted to experience an increase. Aside from Indonesia, Malaysia is predicted to experience an increase of 3.5% in 2021, 5.7% in 2022, and 5.7% in 2023. Meanwhile, the 2021 economic growth in other countries such as the United States, China, Japan, South Korea, and Singapore were recorded at 4.9% (yoy), 4.9% (yoy), 1.4% (yoy), 4.0% (yoy), and 7.1% (yoy) respectively in which all experienced a slower growth compared to the previous quarter. The global economic recovery also impacted the increasing commodity prices, especially energy commodity prices for natural gas and coal. This caused a spike in input costs in the industrial sector.

Bank Indonesia estimated that global economic growth to be more balanced, so that it would not rely only on economic recovery from the United States (US) and China, but also economic recovery in Europe, Japan, and India.

Indonesia also experienced a slowdown in economic growth in the third quarter of 2021 which reached 3.5% (yoy). Meanwhile, in the fourth quarter of 2021, the Indonesian economy continued to recover, despite not recording a significant growth. Bank Indonesia in its report stated that overall national economic growth in 2021 reached 3.69 % (yoy), much higher than the achievement in 2020 which experienced a growth contraction of 2.07 %.

BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT

Throughout 2021, the Board of Commissioners has carried out the function of supervising and providing advice as well as periodic reviews of the Company's financial and operational performance which is oriented towards increasing added value in accordance with the aspirations of the shareholders. The results of the implementation of the supervisory function on the Company's performance and important issues impacting the Company's operations are used as the basis for the Board of Commissioners in carrying out the function of providing advice to the Board of Directors. Therefore, the Board of Commissioners consistently follows the development of a number of important issues covering the economic, environmental, social fields as well as developments in laws and regulations which are considered to have an impact on the business activities carried out by the Company.

Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab terhadap fungsi pengawasan, Dewan Komisaris melakukan *monitoring* terhadap tindak lanjut kinerja Direksi atas saran, rekomendasi, serta nasihat yang diberikan, untuk kemudian dilakukan proses evaluasi. Mengacu pada hasil *monitoring* terhadap kinerja Direksi, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi beserta jajaran terkait telah menjalankan kebijakan dan strategi yang diperlukan secara efektif dan menyeluruh dalam menghadapi berbagai tantangan selama tahun 2021.

Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, meski dihadapkan dengan berbagai kendala akibat pandemi Covid-19 dan perekonomian yang masih memasuki tahap pemulihan. Kinerja Direksi mampu membawa Perusahaan bertahan dalam menghadapi tantangan sehingga berhasil mencapai target yang telah ditetapkan oleh para Pemegang Saham. Hal itu tercermin pada hasil performa Perseroan yang mampu mencatatkan perolehan pendapatan usaha sebesar Rp198,39 miliar, naik 280,23% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp52,09 miliar. Sementara bila dibandingkan dengan target RKAP 2021 mengalami kenaikan sebesar 113%. Peningkatan tersebut mendorong peningkatan laba bersih Perseroan yang mencapai Rp49,73 miliar atau penurunan kerugian sebesar 316,58% dibanding tahun 2020, dan naik 110,5% bila dibandingkan dengan target.

Sementara dari sisi produksi, PT Arkora Hydro Tbk di tahun 2021 telah mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas 17,4 MW yang sudah beroperasi dan 10 MW sedang dalam tahap konstruksi.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI

Keberhasilan PT Arkora Hydro Tbk dalam menjaga performa kinerja keuangan Perusahaan di tahun 2021 salah satunya disebabkan oleh pelaksanaan implementasi strategi dan kebijakan yang efisien dan akurat dan sejalan dengan perkembangan usaha yang terjadi di sepanjang tahun. Dewan Komisaris mendukung pelaksanaan strategi dan kebijakan tersebut dengan menjalankan peran pengawasan dan memberikan rekomendasi terbaik untuk menunjang optimalisasi strategi tersebut.

Untuk mencapai hasil yang lebih optimal di tahun-tahun mendatang, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk melakukan menjalankan strategi-strategi untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan, antara lain:

As a form of implementation of the responsibility for the supervisory function, the Board of Commissioners monitors the follow-up to the performance of the Board of Directors on the suggestions, recommendations, and advice given, to then carry out an evaluation process. Referring to the results of monitoring the performance of the Board of Directors, the Board of Commissioners considers that the Board of Directors and related ranks have implemented the necessary policies and strategies effectively and comprehensively in facing various challenges throughout 2021.

The Board of Directors have implemented their duties and responsibilities appropriately, despite the various challenges faced due to the Covid-19 pandemic and the recovering economy. The performance of the Board of Directors was able to bring the Company to overcome such challenges so as to achieve the targets set by the Shareholders. This is reflected in the results of the Company's performance which was able to record revenues of Rp198.39 billion, an increase of 280.23% compared to 2020 at Rp52.09 billion. Meanwhile, compared to the 2021 RKAP target, this figure increased by 113%. Such increase boosted the Company's net profit which reached Rp49.73 billion or a decrease in losses of 316.58% compared to 2020, and an increase/decrease of 110.5% compared to the target.

Meanwhile, in terms of production, PT Arkora Hydro Tbk in 2021 has managed Hydro Powerplant (HPP) with capacity of 17.4 MW which is already in operation and 15.4 MW which is under construction.

SUPERVISION OF IMPLEMENTATION

The success of PT Arkora Hydro Tbk in maintaining the Company's financial performance in 2021 was due to the implementation of efficient and accurate strategy and policy that was in line with business developments that occurred throughout the year. The Board of Commissioners supported the implementation of these strategies and policies by carrying out a supervisory role and providing the best recommendations to support the optimization of these strategies.

To achieve more optimal results in the coming years, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to carry out the following strategies to achieve sustainable growth:

- a. Membina hubungan baik dengan pelanggan utama Perseroan.
- b. Menunjuk jasa-jasa profesional pendukung proyek pembangkit listrik Perseroan yang kompeten dan berpengalaman.
- c. Memperoleh pendanaan yang kompetitif serta meminimalisir risiko keuangan selama pengerjaan proyek.
- d. Sumber daya keuangan merupakan aspek yang cukup krusial dalam proyek pembangkit listrik Perseroan.
- e. Melakukan ekspansi dan diversifikasi usaha.

FREKUENSI PEMBERIAN NASIHAT

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas, Dewan Komisaris senantiasa memberikan arahan, masukan, dan rekomendasi dalam pengelolaan usaha Perseroan kepada Direksi melalui forum-forum formal maupun informal yang diselenggarakan secara berkala.

Sementara dalam hal penilaian kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris, PT Arkora Hydro tidak melakukan penilaian komite-komite dikarenakan pembentukan Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan pada tanggal 4 Maret 2022.

PENERAPAN GCG DAN PENGELOLAAN TJSL

Perseroan memahami pentingnya melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dengan mengacu pada peraturan yang berlaku terutama terkait dengan kebijakan Pemerintah yang memberi dampak langsung kepada Perusahaan. Di tahun 2021 Perusahaan telah menerapkan secara baik. Sebagai langkah penyempurnaan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perusahaan membentuk Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 4 Maret 2022. Dewan Komisaris berharap penerapan *best practices Good Corporate Governance* (GCG) untuk menciptakan timbal balik yang positif, terutama terkait efektivitas dan efisiensi yang akan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dapat dilakukan secara optimal di tahun 2022.

Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk senantiasa mengusahakan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG secara berkelanjutan di tahun-tahun mendatang, agar aspek tata kelola, manajemen risiko, dan pemenuhan kepatuhan dapat terpenuhi seluruhnya dengan lebih optimal.

- a. Fostering good relations with the Company's main customers.
- b. Appoint competent and experienced professional services for supporting the Company's power plant projects.
- c. Obtain competitive funding and minimize financial risk during project work.
- d. Financial resources are a crucial aspect in the Company's power plant projects.
- e. Expansion and business diversification.

FREQUENCY OF ADVICE

In order to improve quality growth, the Board of Commissioners always provides direction, input, and recommendations in managing the Company's business to the Board of Directors through formal and informal forums that are held regularly.

Meanwhile, in terms of evaluating the performance of the committees under the Board of Commissioners, PT Arkora Hydro did not evaluate the committees due to the establishment of the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee on March 4, 2022.

IMPLEMENTATION OF GCG AND MANAGEMENT OF TJSL

The Company is aware of the importance of implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) by referring to applicable regulations, especially those related to Government policies with direct impact on the Company. In 2021, the GCG has been well implemented by the Company. As an effort to improve the best practices of Good Corporate Governance, the Company has established the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee on March 4, 2022. The Board of Directors hopes that the best practices of Good Corporate Governance (GCG) is able to create positive impacts, especially regarding effectiveness and efficiency that will provide added value for all stakeholders for being implemented optimally in 2022.

The Board of Commissioners encourages the Board of Directors to continuously strive to improve the quality of the implementation of GCG in a sustainable manner in the coming years, so that aspects of governance, risk management, and compliance can be fulfilled more optimally.

Dalam pengelolaan SDM, Perusahaan senantiasa melakukan peningkatan keterampilan semua insan Perusahaan dengan memberikan berbagai pelatihan. Untuk tahun 2021 Perusahaan telah melakukan pelatihan pengembangan kapasitas pekerja sebanyak 2 (dua) kali.

Di samping melakukan pemenuhan tanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi karyawan, Perseroan juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan sosial dengan secara konsisten melakukan *Corporate Social and Environmental Responsibility* (TJSL) setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Perusahaan merealisasikan biaya sebesar Rp669 juta, meningkat 166,53% dibanding tahun 2020 yang sebesar Rp251 juta. Dewan Komisaris akan terus mendukung pelaksanaan pemenuhan komitmen ini dengan memberikan pengawasan pada penyelenggaraan program dan pemberian masukan.

PROSPEK USAHA PERUSAHAAN 2022

Dewan Komisaris menilai bahwa RKAP 2022 yang telah disusun oleh Direksi telah sesuai dengan kondisi Perusahaan. Dewan Komisaris meyakini bahwa dengan kemampuan yang mumpuni dan strategi-strategi inovatif yang akan diterapkan oleh Perusahaan akan membawa Perseroan mampu menjadikan tantangan di tahun 2021 sebagai peluang sehingga PT Arkora Hydro dapat meraih pertumbuhan laba yang positif di tahun 2022.

Memasuki tahun 2022, tepatnya pada 8 Juli 2022, PT Arkora Hydro Tbk telah berhasil merealisasikan rencananya untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode ARKO melalui mekanisme penawaran umum perdana saham atau *Initial Public Offering* (IPO). Perseroan menawarkan sebanyak 579,90 juta saham baru dengan harga penawaran Rp268 hingga Rp310 per saham. Dengan harga penawaran tersebut, Perseroan mengincar dana segar antara Rp165,85 miliar sampai dengan Rp179,77 miliar.

Rencananya, Perusahaan akan menggunakan dana hasil IPO tersebut untuk dua keperluan, yaitu pertama, sekitar 63% digunakan untuk tambahan investasi pada Anak Perusahaan yang akan dimaksimalkan untuk pengembangan proyek-proyek Energi Baru dan Terbarukan (EBT) ke depannya, yaitu 54% di PT Arkora Hydro Sulawesi (AHS), 29% di PT Arkora Energi Baru, dan 17% di PT Arkora Tenaga Matahari. Kedua, sekitar 37% akan digunakan untuk pelunasan kewajiban jangka pendek.

In HR management, the Company always improves the skills of all Company personnel by providing various trainings. For 2021, the Company has conducted 2 (two) trainings on capacity building.

In addition to fulfilling its responsibilities for employee competency development, the Company also brings positive impact on the environment and society by consistently conducting Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL) every year. In 2021 the Company realized a total cost of Rp669 million, an increase of 166.53% compared to 2020 at Rp251 million. The Board of Commissioners will continue to support the implementation of the fulfillment of this commitment by providing supervision and input on the program implementation.

2022 BUSINESS PROSPECTS

The Board of Commissioners considers that the 2022 RKAP that has been prepared by the Board of Directors is in accordance with the Company's conditions. The Board of Commissioners believes that with excellent capabilities and innovative strategies that will be implemented by the Company, the Company will be able to turn the challenges in 2021 as opportunities so that PT Arkora Hydro can achieve positive profit growth in 2022.

On July 8, 2022, PT Arkora Hydro Tbk has successfully realized its plan to be listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with the ticker code ARKO through the Initial Public Offering (IPO). The Company offered 579.90 million new shares at an offering price of Rp268 to Rp310 per share. With such offering price, the Company was targeting fresh funds ranging from Rp165.85 billion to Rp179.77 billion.

The Company plans to use the proceeds from the IPO for two purposes. The first is to allocate around 63% for additional investment in Subsidiaries to be maximized for the development of New and Renewable Energy (NRE) projects in the future, namely 54% for PT Arkora Hydro Sulawesi (AHS), 29% for PT Arkora Energi Baru, and 17% for PT Arkora Tenaga Matahari. The second is to allocate around 37% to pay off the current liabilities.

Untuk mengembangkan bisnis Perusahaan, ke depannya PT Arkora Hydro akan tetap mengembangkan portofolio pembangkit listrik tenaga air di Indonesia dengan cara organik dan akuisisi. Perseroan menargetkan mempunyai 200 MW dalam pembangkit listrik tenaga air hingga 2025 mendatang.

Dewan Komisaris yakin, Perusahaan dapat merealisasikan rencana bisnis yang telah ditetapkan karena Perseroan memiliki prospek usaha yang baik, terlebih saat ini pemerintah berkomitmen untuk menekan *emission carbon*. Pemerintah telah mencanangkan transformasi Indonesia menuju energi baru dan terbarukan berbasis teknologi hijau. Oleh karenanya, pemerintah membuka peluang investasi sebesar-besarnya di sektor EBT. PT Arkora Hydro Tbk melihat kondisi tersebut sebagai peluang emas untuk dapat meraih pertumbuhan bisnis yang berkualitas dan mengembangkan usaha Perusahaan.

PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan *Whistleblowing System* (WBS) sangat penting dilakukan bagi keberlangsungan usaha, karena WBS memiliki peran sebagai sistem yang membantu Perusahaan dalam mendeteksi dini potensi pelanggaran dan kecurangan yang mungkin terjadi dalam aktivitas usaha, yang dapat membawa dampak negatif bagi Perusahaan.

Sebagai bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk selalu melakukan fungsi kontrol dalam Perusahaan dengan mengembangkan WBS. Dalam penerapannya, Perseroan menjalankan sistem pelaporan pelanggaran secara bijaksana dan adil.

Keseriusan Perusahaan dalam menjalankan penerapan WBS di lingkungan Perusahaan dapat terbukti dari tidak adanya laporan pengaduan yang ditemukan oleh Perusahaan di tahun 2021. Keberhasilan tersebut membuktikan bahwa Perusahaan dapat mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, nyaman, aman, dan kondusif sehingga seluruh insan Perusahaan dapat bekerja dengan efektif, efisien, dan optimal.

Dewan Komisaris selaku pengawas akan selalu mendukung peningkatan kualitas penerapan WBS sehingga Perusahaan dapat mendeteksi permasalahan yang mungkin terjadi dan segera mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut.

To develop the Company's business in the future, PT Arkora Hydro will continue to develop its hydropower portfolio in Indonesia by organic means and acquisitions. The Company targets to have 200 MW in hydroelectric power plant by 2025.

The Board of Commissioners believes that the Company is able to realize the business plan that has been set because as the Company has good business prospects, especially now that the government is committed to reducing carbon emissions with the announcement of Indonesia's transformation towards new and renewable energy based on green technology and open maximum investment opportunities in the NRE sector. PT Arkora Hydro Tbk sees this condition as a great opportunity to be able to achieve quality business growth and develop the Company's business.

IMPLEMENTATION OF WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Board of Commissioners considers that the implementation of the Whistleblowing System (WBS) to be highly significant for business continuity as its role to assist the Company in early detection of potential violations and fraud that may occur in business activities, which can have a negative impact on the Company.

As part of the implementation of Good Corporate Governance, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to always carry out control functions within the Company by developing WBS. In its implementation, the Company operates a whistleblowing system in a wise and fair manner.

The Company's commitment in implementing the WBS within the Company can be seen from the absence of complaint reports in the Company. This success proves that the Company is able to create a healthy, comfortable, safe, and favorable work environment so that all Company personnel can work effectively, efficiently, and optimally.

The Board of Commissioners as supervisor will always support to improve the quality of WBS implementation so that the Company can detect problems that may occur and immediately find solutions to such problems.

INFORMASI PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. Berikut komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2021:

INFORMATION ON CHANGES IN BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

Throughout 2021, there were no changes in the composition of the Board of Commissioners. Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2021 is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Periode Jabatan / Term of Office
Arya Pradana Setiadharna	Komisaris Utama / President Commissioner	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020	5 tahun / 5 years
Abhay Narayan Pande	Komisaris / Commissioner	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020	5 tahun / 5 years
Drs. Indarto S.H	Komisaris / Commissioner	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020	5 tahun / 5 years

APRESIASI KAMI

Dewan Komisaris memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direksi, segenap insan PT Arkora Hydro, dan seluruh pemegang saham, mitra kerja, konsumen, serta pemangku kepentingan yang telah bekerja keras, terutama di tengah masa yang penuh tantangan akibat pandemi Covid-19, sehingga Perusahaan dapat menjaga kinerjanya. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan, dukungan, dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Kami yakin di masa mendatang dapat memberikan pencapaian kinerja yang lebih baik.

OUR APPRECIATION

The Board of Commissioners would like to extend our highest appreciation to the Board of Directors, all personnel of PT Arkora Hydro, and all shareholders, business partners, consumers, and stakeholders for their hard work, especially in the middle of the challenging times of the Covid-19 pandemic, so that the Company was able maintain its performance. We would also like to express our deepest gratitude for the trust, support, and cooperation that has been well established so far. We believe that in the future we will be able to realize better performance achievements.

Atas nama Dewan Komisaris PT Arkora Hydro Tbk /
On Behalf of the Board of Commissioners of PT Arkora Hydro Tbk

Arya Pradana Setiadharna

Komisaris Utama / President Commissioner

Abhay Narayan Pande

Komisaris / Commissioner

Drs. Indarto S.H

Komisaris / Commissioner

LAPORAN DIREKSI

Board of Director Report

Aldo Henry Artoko
Direktur Utama
President Director



“

Dari sisi keuangan, Perseroan berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang positif, dengan perolehan pendapatan usaha sebesar Rp198,39 miliar, naik 280,23% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp52,09 miliar.

For the financial performance, the Company managed to record a positive financial performance with revenues of Rp198.39 billion, an increase of 280.23% compared to 2020 at Rp52.09 billion.

”

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dear Shareholders and Stakeholders,

Kami memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa sehingga Perseroan dapat menghadapi berbagai tantangan dengan baik di tengah perekonomian yang masih memasuki tahap pemulihan. Kami mengapresiasi seluruh jajaran manajemen dan karyawan Perseroan yang telah berdedikasi dan bekerja keras sehingga Perusahaan berhasil mencatatkan beberapa pencapaian yang didapatkan melalui implementasi strategi-strategi bisnis yang dirancang oleh manajemen dan seluruh insan Perusahaan. Upaya tersebut membawa Perusahaan dapat bertahan di masa yang penuh tantangan dan memberi nilai positif bagi seluruh pemangku kepentingan Perusahaan.

Mewakili jajaran Direksi, perkenankan Kami menyampaikan kinerja PT Arkora Hydro Tbk untuk tahun buku 2021, meliputi paparan kinerja, implementasi strategi dan kebijakan, kendala yang dihadapi dan solusinya, serta prospek usaha Perseroan untuk tahun mendatang.

PEMULIHAN PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONAL

Memasuki tahun 2021 perekonomian dunia maupun nasional masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pandemi Covid-19 sangat berdampak luas terhadap aspek ekonomi, kemanusiaan, dan keuangan sehingga menimbulkan resesi di berbagai negara dan ketidakpastian pasar keuangan.

Let us extend our praise and gratitude to the Almighty God for His blessings that the Company was able to successfully face various challenges amid the recovering economy. Our appreciation also goes to the entire management and employees of the Company who have given their dedication and hard work so that the Company succeeded in recording several achievements that have been obtained through the implementation of business strategies designed by the management and all of the Company's personnel. These efforts have enabled the Company to survive in challenging times and provide positive value for all of the Company's stakeholders.

On behalf of the Board of Directors, allow us to convey the performance of PT Arkora Hydro Tbk for the 2021 fiscal year, which include performance, implementation of strategies and policies, challenges faced and its solutions, as well as business prospects of the Company for the coming year.

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC RECOVERY

In 2021, the world and national economies still have not shown significant developments. The Covid-19 pandemic has had a wide impact on economic, humanitarian, and financial aspects, causing recessions in various countries and uncertainty in financial market.

Untuk menekan penyebaran Covid-19 sekaligus percepatan pemulihan ekonomi, pemerintah negara-negara di dunia melakukan mitigasi dan kerja sama guna menekan penyebaran Covid-19. Usaha tersebut rupanya belum membuahkan hasil yang optimal. Laju pertumbuhan ekonomi masih memasuki tahap pemulihan di tahun 2021, terutama Tiongkok dan Vietnam yang naik 18,30% dan 4,48% (yoy) pada triwulan I 2021.

Sementara laju kinerja ekonomi nasional menurut data Kementerian Keuangan pada triwulan IV 2021 menunjukkan penguatan pemulihan ekonomi, yang mampu bertumbuh sebesar 5,02% (yoy). Sementara Bank Indonesia mencatat secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2021 mencapai 3,69% (yoy), jauh meningkat dibanding pencapaian pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Dari sisi laju pemulihan, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level periode prapandemi.

Sedangkan untuk laju inflasi pada tahun 2021 tercatat sebesar 1,87% atau naik dari realisasi tahun 2020 yang sebesar 1,68%. Tentunya pencapaian tersebut karena koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga. Sedangkan nilai tukar Rupiah tercatat turun 0,10% ke level Rp14.270 per dolar AS pada 2021.

Sementara dari sisi sektoral, sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang dipengaruhi oleh penanganan pasien Covid-19 yang kembali mengalami peningkatan. Sedangkan dari sisi Energi dan Sumber Daya Meneral (ESDM) juga mengalami pertumbuhan.

Kementerian ESDM menyatakan bahwa di tahun 2021 ESDM memberikan sumbangsih besar terhadap pemasukan negara. Tercatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM di tahun 2021 mencapai 156% dari target, yakni sebesar Rp189,2 triliun. Kementerian SDM juga menyampaikan bahwa pada 2021, konsumsi listrik per kapita mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 1.123 kWh/kapita. Hal ini tidak terlepas dari tumbuhnya kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 74 Giga Watt (GW) di 2021 guna menjaga kebutuhan listrik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

To suppress the spread of Covid-19 as well as to accelerate economic recovery, the governments of countries around the world carried out mitigation and cooperation in preventing the spread of Covid-19. These efforts apparently have not yielded optimal results. The pace of economic growth was still in the recovery stage in 2021, especially in China and Vietnam, which rose 18.30% and 4.48% (yoy) in the first quarter of 2021.

Meanwhile, according to data from the Ministry of Finance in the fourth quarter of 2021, the pace of national economic performance showed a strengthening economic recovery, which was able to grow by 5.02% (yoy). Meanwhile, Bank Indonesia noted that the overall national economic growth in 2021 reached 3.69% (yoy), far higher than the achievement in 2020 which experienced a growth contraction of 2.07%. In terms of the recovery rate, Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) in 2021 managed to surpass the level of the pre-pandemic period.

Meanwhile, the inflation rate in 2021 was recorded at 1.87%, an increase from the realization in 2020 at 1.68%. This was realized due to good coordination between the Central Government, Regional Governments, and Bank Indonesia in maintaining price stability. Meanwhile, the Rupiah exchange rate fell by 0.10% to the level of Rp14,270 per US dollar in 2021.

In terms of sectoral perspective, the sector that experienced the highest growth occurred in the healthcare sector and social activities which were affected by the handling of resurged Covid-19 patients. In addition, the Energy and Mineral Resources (ESDM) sector also experienced growth.

The Ministry of Energy and Mineral Resources stated that in 2021 ESDM made a major contribution to state revenue. It was recorded that the realization of Non-Tax State Revenue (PNBP) in the ESDM sector in 2021 reached 156% of the target, which was Rp189.2 trillion. The Ministry of ESDM also stated that electricity consumption per capita has increased compared to the previous year, which was 1,123 kWh/capita. This was due to the growth in the installed capacity of power plants of 74 Giga Watt (GW) in 2021 to maintain electricity demand in encouraging economic growth.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PERUSAHAAN

Tahun 2021 bukanlah masa yang mudah. Berbagai tantangan dihadapi oleh Perseroan. Kendati demikian, PT Arkora Hydro Tbk dapat tetap berdiri kokoh, membuktikan ketahanannya sehingga mampu melewati berbagai kendala di sepanjang tahun 2021. Hal itu terbukti dari pencapaian kinerja operasional Perusahaan yang melebihi target Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021 yang ditetapkan oleh para Pemegang Saham.

Dari sisi keuangan, Perseroan berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang positif, dengan perolehan pendapatan usaha sebesar Rp198,39 miliar, naik 280,23% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp52,09 miliar. Sementara bila dibandingkan dengan target RKAP 2021 mengalami kenaikan sebesar 113%. Peningkatan tersebut mendorong peningkatan laba bersih Perusahaan, yang mencapai sebesar Rp49,73 miliar atau penurunan kerugian sebesar 316,58% dibanding tahun 2020, dan naik 110,5% bila dibandingkan dengan target.

Sedangkan dari sisi produksi, PT Arkora Hydro Tbk di tahun 2021 telah mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas 17,4 MW yang sudah beroperasi dan 15,4 MW sedang dalam tahap konstruksi.

PT Arkora Hydro Tbk semakin giat mengembangkan bisnisnya, karena di tahun 2022 Perseroan merencanakan pencatatan (*listing*) perdana saham di Bursa Efek. Oleh karenanya, Perusahaan melakukan sejumlah upaya agar dapat merealisasikan rencana tersebut, diantaranya, yaitu memperkuat hubungan bisnis dengan pelanggan utama Perusahaan, mencari potensi-potensi pengembangan pembangkit listrik, dan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk mendukung realisasi target yang telah ditetapkan, Direksi merumuskan kebijakan strategi bisnis dan rencana-rencana aksi prioritas berdasarkan analisa pasar dan kemampuan Perseroan yang kemudian dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan masukan dan nasihat. Secara berkala, kebijakan strategis ini akan ditinjau untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi pasar yang dinamis.

CORPORATE STRATEGIC POLICY AND STRATEGY

2021 was not an easy year as there were various challenges faced by the Company. However, PT Arkora Hydro Tbk was able to remain strong, proving its resilience to overcome various obstacles throughout 2021. This is evident from the achievement of the Company's operational performance which exceeded the target of the Company's Budget Work Plan (RKAP) in 2021 set by the Shareholders.

For the financial performance, the Company managed to record a positive financial performance with revenues of Rp198.39 billion, an increase of 280.23% compared to 2020 at Rp52.09 billion. Meanwhile, when compared to the 2021 RKAP target, there was an increase of 113%. Such increase boosted the Company's net profit which reached Rp49.73 billion or a decrease in losses of 316.58% compared to 2020, and increased 110.5% when compared to the target.

In terms of production, PT Arkora Hydro Tbk in 2021 has managed a Hydro Powerplant (HPP) with a capacity of 17.4 MW which is already in operation and 15.4 MW which is under construction.

PT Arkora Hydro Tbk strives to improve its business development as in 2022 the Company planned to list its shares on the Stock Exchange. Therefore, the Company made a number of efforts to realize this plan including the strengthening of business relations with the Company's main customer, seeking potentials of power plant development, and improving Human Resources (HR) competence.

To support the realization of the targets that have been set, the Board of Directors formulated business strategy policies and priority action plans based on market analysis and the Company's capabilities which are then consulted with the Board of Commissioners for its input and advice. The strategic policy will be reviewed regularly to be improved and adapted to dynamic market conditions.

Untuk memastikan strategi dan kebijakan strategi Perusahaan telah diimplementasikan secara optimal, Direksi secara berkala menyelenggarakan rapat dengan unit-unit terkait untuk meminta laporan pertanggungjawaban. Di samping itu, Direksi juga terjun langsung memantau proses implementasi strategi Perseroan agar dapat berjalan efisien dan efektif.

KENDALA YANG DIHADAPI DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Dalam perjalanan bisnisnya, Perusahaan sempat mengalami kendala, diantaranya meliputi:

- Ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19.
- Volatilitas nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang negara lain.
- Perkembangan infrastruktur transportasi, energi, dan infrastruktur lain.
- Kualitas Sumber Daya Manusia.

Menyikapi kendala-kendala tersebut, Perusahaan mencari berbagai terobosan dengan menerapkan sejumlah strategi, antara lain:

- a. Membina hubungan baik dengan pelanggan utama Perseroan.
Perseroan senantiasa membina hubungan baik dengan PLN sebagai pelanggan utama Perseroan. Salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan dan menjalankan kontrak yang dimiliki dengan sebaik baiknya. Dengan demikian Perseroan berharap akan mendapatkan kepercayaan dari PLN untuk dapat mengikuti tender dari proyek-proyek baru yang ditawarkan di kemudian hari. Hal tersebut diyakini akan memberikan dampak positif pada rencana jangka panjang kegiatan usaha Perseroan.
- b. Menunjuk jasa-jasa profesional pendukung proyek pembangkit listrik Perseroan yang kompeten dan berpengalaman.
- c. Memperoleh pendanaan yang kompetitif serta meminimalisir risiko keuangan selama pengerjaan proyek. Sumber daya keuangan merupakan aspek yang cukup krusial dalam proyek pembangkit listrik Perseroan. Dalam hal ini Perseroan harus memiliki pendanaan yang kompetitif dari segi jumlah, tenor, maupun suku bunga. Pendanaan tersebut terkait dengan besarnya dana yang dikeluarkan Perseroan untuk melakukan pembebasan lahan di awal pengerjaan proyek. Dengan pendanaan yang kompetitif, akan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan Perseroan.

To ensure that the Company's strategies and policies have been implemented optimally, the Board of Directors regularly holds meetings with related units to request the submission of accountability reports. In addition, the Board of Directors is also directly involved in monitoring the implementation process of the Company's strategy so that it can run efficiently and effectively.

CHALLENGES FACED AND ITS SOLUTIONS

In the course of its business, the Company had encountered a number of challenges, including:

- Economic uncertainty due to the Covid-19 pandemic.
- Volatility of the rupiah exchange rate with the currencies of other countries.
- Development of infrastructures for transportation and energy as well as other infrastructures.
- Quality of Human Resources.

In response to these challenges, the Company seeks various breakthroughs by implementing a number of strategies, which include:

- a. Fostering good relations with the Company's main customers.
The Company always maintains good relations with PLN as the Company's main customer. One of which is to provide services and carry out the ongoing contracts with the best performance. Therefore, the Company hopes to gain the trust of PLN to be able to participate in tenders for new projects offered in the future. This is expected to have a positive impact on the long-term plan of the Company's business activities.
- b. Appointing competent and experienced professional services for supporting the Company's power plant projects.
- c. Obtaining competitive funding and minimize financial risk during project work.
Financial resource is a crucial aspect in the Company's power plant projects. Thus, the Company must be in possession of competitive funding in terms of amount, tenor, and interest rate. The funding is related to the amount of funds issued by the Company to carry out land acquisition at the beginning of project. Competitive funding will bring a positive impact on the Company's financial performance.

Selain itu guna meminimalisir risiko keuangan selama pengerjaan proyek akibat pembengkakan biaya atas kegagalan rekayasa konstruksi, mundurnya jangka waktu penyelesaian, bencana alam, dan tidak beroperasi sesuai kapasitasnya pembangkit listrik, Perseroan menggunakan mekanisme "Lump Sum" yang menggunakan FIDIC *Conditions of Contract terms* untuk memastikan kontrak yang profesional dan adil dengan nilai kontrak dengan kontraktor yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian *Engineering Procurement Construction* untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air antara Anak Perusahaan dengan kontraktor. Dengan menggunakan mekanisme "Lump Sum", Perseroan membayar kontraktor sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan untuk menyelesaikan pekerjaan, dan kontraktor bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek dengan biaya tetap yang disepakati dengan risiko keuangan berada di kontraktor.

d. Melakukan ekspansi dan diversifikasi usaha.

Hal ini dilakukan dengan mencari potensi-potensi pengembangan pembangkit listrik, baik melalui perizinan baru (*greenfield project*) maupun akuisisi pembangkit listrik yang sedang dalam pengembangan/sudah berjalan (*brownfield project*). Selain itu, Perseroan juga akan terus mengembangkan entitas anak yang bergerak di bidang konsultan engineering dan pembangkit listrik tenaga surya guna melakukan diversifikasi usaha, sehingga menambah kontribusinya pada pendapatan usaha Perseroan secara keseluruhan.

PENERAPAN GCG

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan Perseroan dalam menjalankan roda bisnis. Oleh karena itu, PT Arkora Hydro memiliki prinsip kuat untuk melakukan pengelolaan SDM secara optimal sehingga dapat memiliki SDM yang kompeten, andal, unggul, dan dapat memiliki daya saing.

Dalam pelaksanaan pengelolaan SDM pada tahun 2021, Perusahaan telah melakukan 2 (dua) kali pelatihan pengembangan SDM sehingga tercipta SDM yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang andal, unggul, dan mampu bersaing.

In addition, to minimize financial risks during project due to cost overruns for construction engineering failures, delays in the completion period, natural disasters, and inability of power plant capacity operations, the Company uses a "Lump Sum" mechanism that uses FIDIC *Conditions of Contract terms* to ensure professional and fair contracts to the contract value with the contractor appointed based on the *Engineering Procurement Construction Agreement* for Hydro Powerplant between the Subsidiary and the contractor. Through the "Lump Sum" mechanism, the Company compensates the contractor based on the predetermined amount for completing the work, and the contractor is also responsible for completing the project at an agreed fixed cost with the financial risk on the contractor.

d. Expansion and business diversification.

This is carried out by seeking potentials of power plant development, either through new permits (*greenfield projects*) or acquisitions of power plants that are under development/already running (*brownfield projects*). In addition, the Company will also continue the development of its subsidiaries engaging in engineering consulting and solar power plants in carrying out business diversification so as to increase the contribution to the Company's overall operating income.

IMPLEMENTATION OF GCG

Human Resources (HR) serves as one of the factors to support the Company's success in running the business. Therefore, PT Arkora Hydro is strongly committed to carrying out an optimal HR management so as to realize competent, reliable, excellent, and competitive human resources.

In the implementation of HR management in 2021, the Company has conducted 2 (two) HR development trainings as an effort in realizing HR with skills and competencies that are reliable, excellent, and competitive.

Dalam hal pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), sepanjang tahun 2021 Perusahaan telah menjalankan prinsip GCG secara baik. Perusahaan memiliki prinsip yang teguh untuk melakukan penyempurnaan penerapan GCG. Oleh karena itu Perseroan membentuk Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 4 Maret 2022.

Perusahaan memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan bisnisnya. Perseroan menjalankan prinsip-prinsip GCG berdasarkan pedoman AD/ART Perusahaan serta peraturan Pemerintah yang berlaku, terutama yang memiliki dampak terhadap operasional usaha Perusahaan. Perusahaan meyakini bahwa dengan menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, Perseroan dapat meminimalisir risiko yang berpotensi merugikan.

TINJAUAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

PT Arkora Hydro memandang bahwa pencapaian dalam memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan terutama masyarakat dan lingkungan merupakan hal yang sama pentingnya dengan pencapaian perolehan kinerja ekonomi Perseroan. Untuk itu, Perusahaan senantiasa memegang komitmennya dalam mengutamakan pelaksanaan pemberian nilai tambah melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan atau *Corporate Social and Environmental Responsibility* secara berkala.

Di tahun 2021, program TJSL Perseroan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan penghijauan. Pada pembangunan infrastruktur, Perusahaan telah melakukan:

1. Pembangunan rabat beton jalan di Desa Panawa, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
2. Pembangunan penerangan jalan umum di Desa Kuku, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
3. Peningkatan jalan Desan Panjoka, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Sementara dalam hal upaya menjaga kelestarian lingkungan, Perseroan telah melakukan penanaman kembali 1.065 pohon di lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Perusahaan telah menjalankan seluruh kegiatan TJSL dengan baik di tahun 2021, dan telah memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan.

The Company's implementation of Good Corporate Governance (GCG) in 2021 has been carried out properly. The Company upholds the principle to improving the GCG implementation, thus, the Company has established the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee on March 4, 2022.

The Company is committed to implementing GCG principles in running its business. The Company implements GCG principles based on the Company's guidelines of bylaws as well as the applicable Government regulations, especially those with an impact on the Company's business operations. The Company believes that by running a business in accordance with GCG principles, the Company can minimize risks that have the potential to cause losses in the Company.

OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

PT Arkora Hydro considers that the achievement in providing benefits to stakeholders, especially to the community and the environment, to be just as important as achieving the Company's economic performance. To that end, the Company always holds its commitment in prioritizing the implementation of providing added value through the Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL) program periodically.

In 2021, the Company's TJSL program focused on infrastructure development and reforestation. In infrastructure development, in which the Company has carried out:

1. Construction of lean concrete for roads at Panawa Village, Garut Regency, West Java.
2. Construction of public street lighting in Kuku Village, Poso Regency, Central Sulawesi.
3. Development of village roads at Panjoka Villange, Poso Regency, Central Sulawesi.

In an effort to preserve the environment, the Company has carried out reforestation of 1,065 trees at the surrounding area of the Hydro Powerplant (HPP).

The Company's TJSL activities in 2021 has been well implemented and has provided added value to stakeholders.

PROSPEK USAHA

Indonesia menduduki peringkat ke-4 (empat) dunia dalam hal jumlah penduduk di dunia, sehingga kebutuhan energi dan kelistrikan akan menjadi sangat vital. Pada umumnya untuk menyediakan kebutuhan listrik, pemerintah Indonesia memanfaatkan fasilitas pembangkit tenaga listrik melalui PLN baik yang dimiliki langsung oleh PLN atau melalui kontrak PPA dengan pihak swasta. PT PLN (Persero) mencatat konsumsi listrik sepanjang tahun 2021 mencapai 255,1 Tera Watt hour (TWh), lebih tinggi dari penjualan listrik pada 2020 yang tercatat 241,1 TWh. Kebutuhan listrik diproyeksikan akan terjadi peningkatan secara signifikan, bahkan hingga 6 kali menjadi 1.205 TWh pada tahun 2050 untuk skenario dasar atau mencapai 1.491 TWh untuk skenario tinggi. Dari proyeksi peningkatan kebutuhan listrik tersebut, sektor Industri masih mendominasi kebutuhan listrik dengan porsi mencapai 52%, disusul dengan kebutuhan listrik dari sektor komersial yang dengan porsi mencapai 30%, sisanya adalah kebutuhan sektor rumah tangga yang mencapai 17% dan paling kecil adalah sektor transportasi yang hanya berkisar 1%.

Untuk mendukung pencapaian target elektrifikasi hingga mencapai 100% pada tahun 2030, Pemerintah mengupayakan pemanfaatan pembangkit listrik berdasarkan bauran energi fosil dan energi terbarukan. Bauran energi terbarukan yang saat ini dimanfaatkan oleh PLN terdiri dari beberapa komponen, seperti angin, tenaga surya, bioenergi, panas bumi serta tenaga air.

Kapasitas energi yang digunakan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dan sebagian besar komponen utamanya atau lebih dari 60% berasal dari tenaga air. Hingga pertengahan 2021 kapasitas pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) mengalami peningkatan hingga 217 Mega Watt (MW). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 1.478 MW dengan kenaikan rata-rata sebesar 4% per tahun

Adapun potensi dari kapasitas terpasang pembangkit listrik yang memanfaatkan energi terbarukan di Indonesia diperkirakan mencapai 417,8 GW, namun sampai dengan saat ini total utilitasnya hanya mencapai 2,5% atau 10,4 GW. Terlihat seluruh pemanfaatan potensi komponen energi tersebut masih jauh di bawah 10%. Komponen energi terbarukan yang paling mendekati 10% utilitasnya adalah panas bumi yang pemanfaatannya mencapai 2.130,7MW (8.9%), disusul Hydro (tenaga air) yang penggunaannya mencapai 6.078,4MW (8.1%).

BUSINESS PROSPECTS

Indonesia is the 4th (fourth) most populous country in the world, thus making the need for energy and electricity to be a vital aspect. In general, to provide electricity needs, the Indonesian government utilizes power plant facilities through PLN, which are either directly owned by PLN or through PPA contracts with private parties. PT PLN (Persero) noted that electricity consumption throughout 2021 reached 255.1 Tera Watt hour (TWh), an increase compared to the electricity sales in 2020 which was recorded at 241.1 TWh. The electricity demand is projected to increase significantly, up to 6 times to 1,205 TWh in 2050 for the basic scenario or reaching 1,491 TWh for the high scenario. From the projected increase in electricity demand, the industrial sector still dominates electricity demand with a portion of 52%, followed by electricity demand from the commercial sector which accounts for 30%, and household sector which reaches 17% followed by the smallest being the transportation sector of around 1%.

To support the achievement of the electrification target of up to 100% by 2030, the Government seeks to utilize power plants based on a mix of fossil energy and renewable energy. The renewable energy mix currently utilized by PLN consists of several components, such as wind, solar, bioenergy, geothermal and hydropower.

The use of energy capacity used continues to increase every year with most of its main components or more than 60% coming from hydropower. In mid-2021, the capacity of New and Renewable Energy (NRE) power plants has increased to 217 Mega Watts (MW). In the last five years, the addition of NRE generating capacity was 1,478 MW with an average increase of 4% per year

The potential of the installed capacity of power plants that utilize renewable energy in Indonesia is estimated at 417.8 GW, but as of today, the total utilization has only reached 2.5% or 10.4 GW, making the potential utilization of energy components to remain at far below 10%. The renewable energy components reaching almost 10% of its utilization is geothermal which uses 2,130.7MW (8.9%), followed by Hydropower of 6,078.4MW (8.1%).

Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pemerintah berupaya mencapai peningkatan kapasitas energi pada tahun 2025 sebesar 23%, di mana dibutuhkan lebih dari 7.000 MW kapasitas. Selain itu terdapat juga perubahan peraturan pemerintah yang memberikan sentimen positif bagi prospek usaha Perseroan, di mana berdasarkan Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No.4/2020, dinyatakan bahwa PLN dapat membeli listrik melalui mekanisme penunjukan langsung. Selain itu dengan adanya penghapusan skema *Build Own Operate Transfer* (BOOT), maka tidak ada perubahan tarif dalam metode pengoperasian proyek yang di jalankan.

PT Arkora Hydro optimis dan menilai prospek usaha pembangkit listrik tenaga air akan menjadi prioritas pembangkit tenaga listrik yang menjadi sumber utama energi dan menggantikan dominasi sumber energi dari fosil dan lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, di tahun 2022 dan di tahun-tahun mendatang Perusahaan memiliki peluang besar untuk dapat meraih pertumbuhan bisnis yang lebih berkualitas.

PELAKSANAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perusahaan selalu berusaha menjalankan prinsip-prinsip GCG secara baik. Untuk itu Perusahaan menjalankan sistem *Whistleblowing System* (WBS), sebagai sistem pelaporan pelanggaran yang mungkin terjadi dalam aktivitas usaha. Dalam penerapannya, WBS tidak hanya menjadi sarana pelaporan bagi pemangku kepentingan, namun memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi pelapor agar terhindar dari ancaman atau perlakuan yang tidak diharapkan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, setiap pengaduan yang masuk diterima oleh Perusahaan akan dianalisa dan meminta keterangan lebih lanjut kepada pelapor. Selanjutnya Perseroan akan menindaklanjuti pengaduan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Hingga kini Perusahaan senantiasa berupaya untuk menjalankan WBS secara baik sehingga pada tahun 2021 tercatat tidak ada pelaporan WBS yang ditujukan kepada Perusahaan.

In the General National Energy Plan (RUEN), the government seeks to achieve a 23% increase in energy capacity by 2025, of which means that more than 7,000 MW of capacity is required. Amendments of government regulations also positive sentiment for the Company's business prospects, including Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 4/2020, which stated that PLN can purchase electricity through a direct appointment mechanism. In addition, with the abolition of the Build Own Operate Transfer (BOOT) scheme, there will be no changes in tariffs in the operating method of ongoing projects.

PT Arkora Hydro is optimistic with the assessment that the business prospect of hydroelectric power will become a priority for power plants to become main source of energy and to replace the dominance of fossil energy sources in being an eco-friendlier option. Therefore, in 2022 and in the years to come, the Company is presented with a great opportunity to achieve higher quality business growth.

IMPLEMENTATION OF WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Company always strives to carry out the principles of GCG properly. Therefore, the Company implements the Whistleblowing System (WBS), as a system for reporting violations that may occur in its business activities. In its implementation, WBS does not only serve as a means of reporting for stakeholders, but also to provide protection and security assurance for whistleblowers to avoid threats or other unexpected treatment.

Every incoming complaint received by the Company will be analyzed and will be requested for further information to the whistleblower. Then, the Company will follow up on the complaint in accordance with the applicable Company provisions as well as the laws and regulations. To this day, the Company always strives to properly implement the WBS which is reflected in the absence of WBS reports addressed to the Company in 2021.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Sepanjang tahun 2021, komposisi Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan. Berikut komposisi Direksi Perusahaan hingga akhir tahun buku 2021:

CHANGES IN BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

Throughout 2021, there were no changes in composition of the Company's Board of Directors. The composition of the Company's Board of Directors as of the end of the fiscal year is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Periode Jabatan / Term of Office
Aldo Henry Artoko	Direktur Utama / President Director	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020	5 tahun / 5 years
Ricky Hartono	Direktur / Director	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020	5 tahun / 5 years
Ismu Nugroho	Direktur Operasional / Operations Director	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020	5 tahun / 5 years

APRESIASI

Menutup laporan ini, kami mengucapkan terima kasih yang dalam kepada seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan yang telah diberikan kepada PT Arkora Hydro Tbk. Apresiasi yang tulus juga kami berikan kepada seluruh karyawan Perseroan atas kerja keras serta dedikasi yang tinggi sepanjang 2021. Kami percaya sinergi antar karyawan yang selama ini telah terbangun akan senantiasa terjalin serta ditingkatkan pada tahun-tahun ke depan.

APPRECIATION

To conclude this report, we would like to express our profound gratitude to all stakeholders for the trust that has been given to PT Arkora Hydro Tbk. We would also like to extend our appreciation to all employees of the Company for their hard work and high dedication throughout 2021. We believe that the synergy between employees that has been built so far will continue to be established and improved in the years to come.

Atas nama Direksi PT Arkora Hydro Tbk /
On Behalf of the Board of Directors of PT Arkora Hydro Tbk

Aldo Henry Artoko
Direktur Utama / President Director

Ricky Hartono
Direktur / Director

Ismu Nugroho
Direktur Operasional / Operations Director

Halaman Ini Sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank



ARKORA HYDRO

PROFIL PERUSA- HAAN

Company
Profile



03

IDENTITAS PERUSAHAAN

Corporate Identity

Nama Perusahaan Company Name		PT ARKORA HYDRO Tbk
Modal Dasar Authorized Capital		Rp231.960.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Subscribed and Paid-up Capital		Rp57.990.000.000,-
Bidang Usaha Line of Business		Pembangkitan tenaga listrik. / Power plant
Tanggal Pendirian Date of Establishment		5 Agustus 2010 / August 5, 2010
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment		Akta Pendirian No. 15, tanggal 5 Agustus 2010 dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menkumham No. 40544.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 18 Agustus 2010. / Deed of Establishment No. 15, dated August 5, 2010 drawn up before Darmawan Tjoa, S.H., S.E. which has been approved by the Minister of Law and Human Rights (Menkumham) of the Republic of Indonesia in accordance with the Decree of the Minister of Law and Human Rights No. 40544.AH.01.01.Year 2010, dated August 18, 2010.
Kepemilikan Saham Share Ownership		PT Arkora Bakti Indonesia (60%) ACEI Singapore Holdings Private Ltd. (40%)
Jumlah Karyawan Total Employees		70 karyawan. / 70 employees.
Alamat Kantor Pusat Head Office Address		<i>Office 8 Building,</i> Lantai 21 Unit C & D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 28 SCBD Jakarta 12190, Indonesia.
Telepon Phone		021 29333 288, 021 29333 299v
Faksimili Facsimile		021 29333 298
Surat Elektronik E-mail		corporate.secretary@arkora.com
Situs Web Perusahaan Website		www.arkora-hydro.com

“

PT Arkora Hydro Tbk merupakan perusahaan yang beroperasi dalam pembangkitan tenaga listrik yang didirikan dan berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 5 Agustus 2010.

PT Arkora Hydro Tbk is a company engaged in power generation which was established and domiciled in Jakarta based on the Deed of Establishment No. 15 dated August 5, 2010.

”



SEKILAS TENTANG ARKORA HYDRO

Arkora Hydro at A Glance

PT Arkora Hydro Tbk merupakan perusahaan yang beroperasi dalam pembangkitan tenaga listrik yang didirikan dan berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 5 Agustus 2010. Akta tersebut kemudian telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. 40544.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 18 Agustus 2010. Hingga laporan ini dipublikasikan,

PT Arkora Hydro Tbk is a company engaged in power generation which was established and domiciled in Jakarta based on the Deed of Establishment No. 15 dated August 5, 2010. The deed has then been approved by the Menkumham based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights No. 40544.AH.01.01.Tahun 2010, dated August 18, 2010. Until this report was published, the Company has undergone

SEKILAS TENTANG ARKORA HYDRO

Arkora Hydro at a Glance

Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, dengan perubahan terakhir dinyatakan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 4 Maret 2022 (Akta Perseroan No. 12/2022).

Melalui dasar pendirian tersebut, Perseroan beroperasi dan secara terus-menerus berkontribusi dengan berdasar pada dedikasi yang kuat dalam pengembangan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Indonesia. Perseroan beroperasi dengan tujuan untuk mempercepat perkembangan energi terbarukan di Indonesia melalui pembangunan PLTA aliran sungai langsung (*run-of-river*), terutama pada daerah-daerah terpencil dengan permintaan yang stabil tetapi memiliki pasokan energi listrik yang tidak mencukupi. Perseroan bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk membangun masa depan yang berkelanjutan bagi kita, masyarakat Indonesia.

Manajemen Arkora Hydro terdiri dari tim insinyur ahli dengan pengalaman luas dalam bidang PLTA serta memiliki pemahaman penuh dalam mencapai kesuksesan tujuan-tujuan proyek, di samping telah menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan bisnis baik secara organik maupun anorganik. Perseroan telah mewujudkan target untuk mempunyai pembangkit listrik yang beroperasi sebesar 17,4 MW per akhir tahun 2021, dan hingga kini telah memiliki sebesar 15,4 MW meliputi sejumlah proyek pembangkit yang telah dalam tahap pembangunan. Selain itu Perseroan juga memiliki *pipeline projects* dengan total kapasitas sebesar 107,7 MW.

Dengan fokus yang kuat pada pembangunan pembangkit dan peningkatan keunggulan operasional yang dimiliki, Perseroan terus mengupayakan terwujudnya keberlanjutan dalam seluruh aspek bisnis, yaitu melalui energi yang dihasilkan, kontribusi kepada masyarakat lokal, serta penyaluran nilai ekonomi melalui pendapatan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

Hingga tahun 2021, Perseroan tidak melakukan perubahan nama perusahaan.

several amendments to the Articles of Association, with the latest amendments being restated based on the Deed of Statement of Circular Decisions of the Shareholders No. 12 dated March 4, 2022 (Company Deed No.12/2022).

Through this establishment, the Company operates and continuously contributes based on a strong dedication to the development and operation of Hydro Powerplant (HPP) in Indonesia. The Company operates with the aim of accelerating the development of renewable energy in Indonesia through the construction of run-of-river HPP, especially in remote areas with stable demand but insufficient supply of electrical energy. The Company works closely with local communities to build a sustainable future for us, the people of Indonesia.

Arkora Hydro's management consists of a team of expert engineers with extensive experience in the HPP field and full understanding of achieving project objectives successfully, as well as having demonstrated the ability to grow the business both organically and inorganically. The Company has realized its target to have a power plant operating at 17.4 MW by the end of 2021, and to date has 15.4 MW, including a number of other power plant projects that are under construction. In addition, the Company also has pipeline projects with a total capacity of 107.7 MW.

With a strong focus on power plant development and increasing operational excellence, the Company always strives for sustainability in all aspects of the business, namely through the produced energy, contributions to local communities, and the distribution of economic value through income to shareholders and stakeholders.

INFORMATION ON COMPANY NAME CHANGE

As of 2021, the Company did not change the company name.

JEJAK LANGKAH

Milestones

Perseroan didirikan dengan nama PT Arkora Hydro. • **2010**
The Company was established under the name PT Arkora Hydro.

2012 • **Memperoleh Power Purchase Agreement (PPA) pertama kali untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cikopo (7,4 MW) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN).**
Obtained the first Power Purchase Agreement (PPA) for the Cikopo Hydro Powerplant (HPP) (7.4 MW) with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN).

Dimulainya konstruksi PLTA Cikopo. • **2013**
The construction of the Cikopo HPP begins.

2014 • **Kontrak PPA ditandatangani untuk PLTA Tomasa (10 MW) dengan PLN.**
The PPA contract was signed for the Tomasa HPP (10 MW) with PLN.

Dimulainya konstruksi PLTA Tomasa. • **2016**
The construction of the Tomasa HPP begins.

2017 • **PLTA Cikopo mencapai tanggal operasi komersial.**
The Cikopo HPP reached its commercial operation date.

PLTA Cikopo dan PLTA Tomasa mendapatkan pembiayaan dari PT Indonesia Infrastructure Finance. • **2019**
Cikopo HPP and Tomasa HPP received financing from PT Indonesia Infrastructure Finance.

2020 • **PLTA Tomasa mencapai tanggal operasi komersial.**
The Tomasa HPP reached its commercial operating date.
• **Kontrak PPA ditandatangani untuk PLTA Yaentu (10 MW) dengan PLN.**
The signing of PPA contract for Yaentu HPP (10 MW) with PLN.

Dimulainya konstruksi PLTA Yaentu. • **2021**
The construction of the Yaentu HPP begins.
• **PLTA Yaentu mendapatkan pembiayaan proyek dari PT Indonesia Infrastructure Finance.**
Yaentu HPP received project financing from PT Indonesia Infrastructure Finance.

BIDANG USAHA

Line of Business

Sesuai Anggaran Dasar, Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk beroperasi pada bidang pembangkitan tenaga listrik. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan utama yaitu pembangkitan tenaga listrik, dengan kegiatan-kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

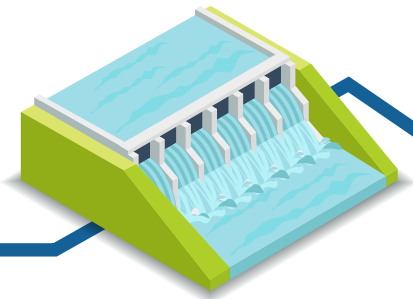
1. Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik.
2. Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
3. Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya.
4. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

In accordance with the Articles of Association, the Company was established with the aim and purpose to operate in the field of power generation. To achieve these aims and objectives, the Company carries out its main activity, namely electricity generation, with supporting business activities as follows:

1. Operation of electricity supply installations.
2. Operation of electric power utilization installations.
3. Other electric power support activities.
4. Other management consulting activities.

INFORMASI PRODUK DAN JASA

INFORMATION ON PRODUCT AND SERVICE



Mengapa PLTA Aliran Sungai Langsung (*Run-of-River*) Why Run-of-River HPP?



Tenaga air telah dipergunakan secara luas oleh masyarakat antara lain dalam pertanian, yaitu untuk menggiling gandum hingga menggerakkan mesin sederhana. Dengan latar belakang tersebut, generator listrik tenaga air kemudian mulai dikembangkan melalui pemanfaatan energi yang dihasilkan oleh pergerakan air untuk dikonversi menjadi listrik.

Hydropower has been widely used by the community, including in agriculture to grind wheat and drive simple machinery. With this background, hydroelectric generators then began to be developed by harnessing the energy generated by flowing water to be converted into electricity.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) memiliki mekanisme kerja yang sederhana, yaitu air yang mengalir melalui bendungan digunakan untuk memutar turbin dan mendorong generator penghasil listrik. Meski demikian, dalam perkembangan mutakhir, diketahui bahwa terdapat kelemahan penggunaan waduk-waduk besar sebagai PLTA berupa gangguan pada arus sungai alami, gangguan pada keanekaragaman hayati, hingga pengaruh terhadap perubahan pola cuaca.

Hydro Powerplant (HPP) works on a stunningly simple mechanism; water flowing through a dam is used to turn a turbine and drive a generator that produces electricity. However, in recent developments, it is known that there are downsides in the use of large reservoirs as HPP – upsetting the natural river flows, disorders in biodiversity, and changing weather patterns.

BIDANG USAHA

Bidang Usaha

Sebagai solusi atas persoalan tersebut, PLTA aliran sungai langsung (*run-of-river*) mempergunakan kurva alami sungai berupa air yang terus mengalir dari ketinggian menuju turbin untuk menghasilkan tenaga listrik sebelum kembali ke arus awal. Pada mekanisme tersebut, aliran alami sungai tetap terjaga dengan dampak minimal terhadap lingkungan serta emisi karbon nol.

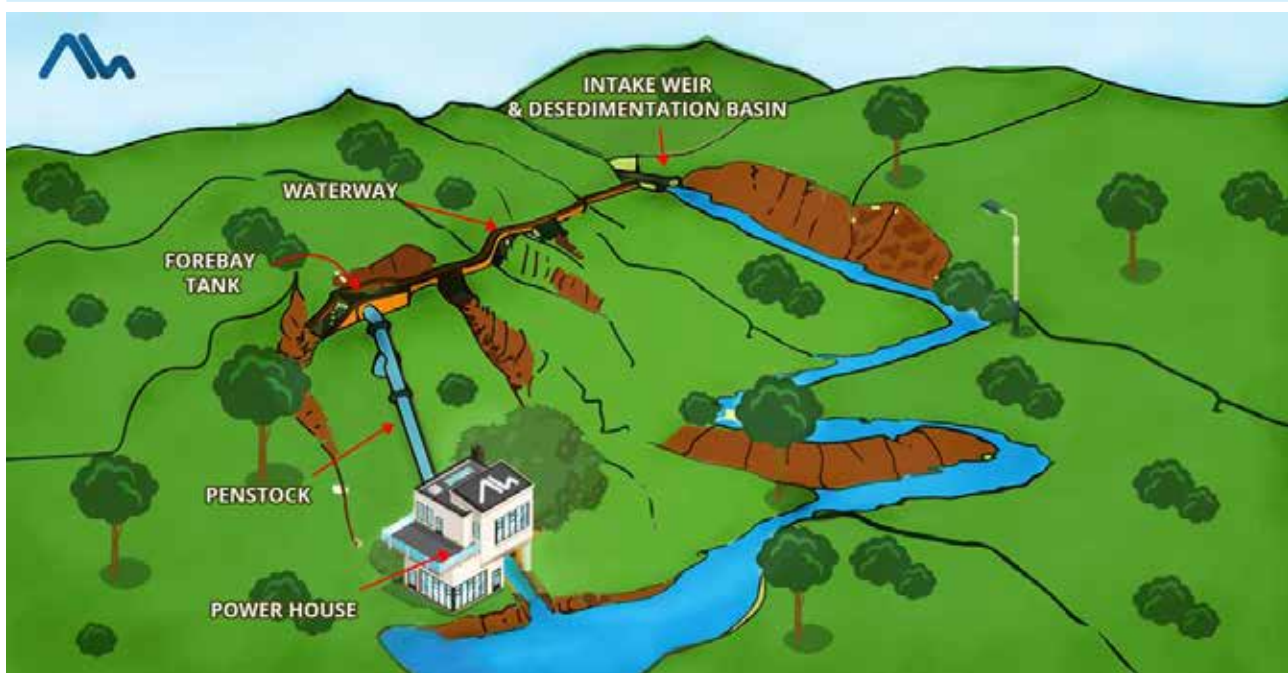
Arkora Hydro hadir untuk mengajak masyarakat bekerja sama untuk masuk ke sejumlah lokasi alam di Indonesia yang berpotensi bagi pengembangan proyek PLTA *run-of-river*. Perseroan menciptakan manfaat bersama bagi masyarakat yakni melalui penyaluran nilai ekonomi berupa pemberdayaan sosial dan lingkungan, serta penyediaan lapangan pekerjaan.

Dengan berpegang pada keyakinan akan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian penting dari visi dan misi perusahaan, Arkora Hydro berharap dapat berkontribusi secara luas dalam upaya pengembangan pembangkit listrik tenaga air sebagai sumber energi terdepan di Indonesia.

As a solution to this problem, the run-of-river HPP uses the natural curve of the river in the form of water that flows from a height to the turbine to generate electricity before reentering the initial stream. In this mechanism, the natural flow of the river stays intact with minimal impact on the environment and zero carbon emissions.

Arkora Hydro is present to invite the community to work together to tap into a number of natural locations in Indonesia that have the potential for the development of run-of-river HPP projects. The Company creates mutual benefits for the community, namely through the distribution of economic value in the form of social and environmental empowerment, as well as providing employment opportunities.

By adhering to the belief in environmental sustainability as an important part of the Company's vision and mission, Arkora Hydro hopes to contribute widely in the development of hydroelectric power plants as the leading energy source in Indonesia.



VISI DAN MISI

Vision and Mission

“

VISI

Vision

Memperluas portfolio proyek energi terbarukan kami dan menjadi pemimpin pasar pembangkit listrik dari energi terbarukan secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.

To expand our portfolio of renewable energy projects and become the market leader of renewable energy power generation while being environmentally and socially responsible.



MISI

Mission

Mengembangkan potensi energi terbarukan di Indonesia yang akan mengurangi emisi karbon dan membangun masa depan yang berkelanjutan.

To develop renewable energy potentials in Indonesia in which will reduce carbon emission and build a more sustainable future.

”

INFORMASI PERSETUJUAN MANAJEMEN PERSEROAN

Manajemen telah melakukan peninjauan dan persetujuan atas visi dan misi Perseroan.

INFORMATION ON MANAGEMENT APPROVAL

The Management has reviewed and approved the vision and mission of the Company.

NILAI-NILAI BUDAYA PERUSAHAAN

Corporate Cultural Values

Arkora Hydro menerapkan budaya perusahaan sesuai nilai-nilai yang berlaku bagi Grup Arkora, sebagai berikut:

Arkora Hydro implements corporate culture in accordance with the prevailing values for Arkora Group as follows:

Kami Mengedepankan Pentingnya Kualitas dan Keberlanjutan Proyek Kami Mengedepankan Pentingnya Kualitas dan Keberlanjutan Proyek

Kami bercita-cita memberikan solusi nilai tambah terkemuka secara proaktif, menyeluruh, dan andal, serta memberikan layanan terbaik secara profesional, hemat, dan tepat waktu.

We aspire to provide the most advanced value-added solutions that are proactive, fundamental and reliable, delivering top-notch services in the most professional, cost-effective and time-oriented manner.

Integritas Integrity

Kami selalu bertindak dengan integritas dan mematuhi standar etika dan moral tertinggi dalam segala hal yang kami lakukan. Kami menunjukkan kejujuran dan keterbukaan kepada orang lain dan diri kami sendiri dengan menegakkan transparansi, keadilan, dan kepedulian mutlak untuk kesejahteraan planet ini dan berjuang untuk kesejahteraan karyawan kami, klien kami, dan masyarakat. Kami menjalankan semua bisnis kami secara sadar dan bertanggung jawab.

We act with integrity at all times and adhere to the highest ethical and moral standards in everything we do. We demonstrate honesty and candor to others and to ourselves by enforcing transparency, fairness and absolute care for the well-being of this planet and striving for the welfare of our employees, our clients and the community. We conduct all of our business consciously and responsibly.

Sinergi Synergy

Kami bekerja dalam kesatuan, percaya akan keragaman, dan beranggapan bahwa membangun masyarakat lokal adalah kunci kesuksesan. Dengan bekerja sama dengan kelompok dan masyarakat lokal, kami saling mengembangkan satu sama lain untuk menjadi individu yang lebih baik dan sebagai pemain tim di seluruh fase proyek kami. Kerja sama timlah yang membuat impian menjadi kenyataan.

We work in unity, believe in diversity, and regard building local communities as key to success. By working together with local groups and communities, we develop one another to be better individuals and as team players throughout our entire project phases. It is the teamwork that makes the dream work.

Dedikasi Dedications

Kami berdedikasi untuk negara kami, perusahaan kami, dan lingkungan kami. Kami percaya keberhasilan perusahaan ini akan menjadi kontribusi kami bagi pertumbuhan bangsa kita. Kami berkomitmen penuh dan mendedikasikan diri kami melalui integritas dan sinergi untuk tujuan yang lebih besar dari diri kami sendiri.

We are dedicated to our country, our corporation and our environment. We believe the success of this company will be our contribution to the growth of our nation. We fully commit and dedicate ourselves through our integrity and synergy for a purpose greater than ourselves.

KEANGGOTAAN ASOSIASI INDUSTRI

Industry Association Membership

Hingga 31 Desember 2021, Arkora Hydro tidak tergabung dalam asosiasi industri apa pun.

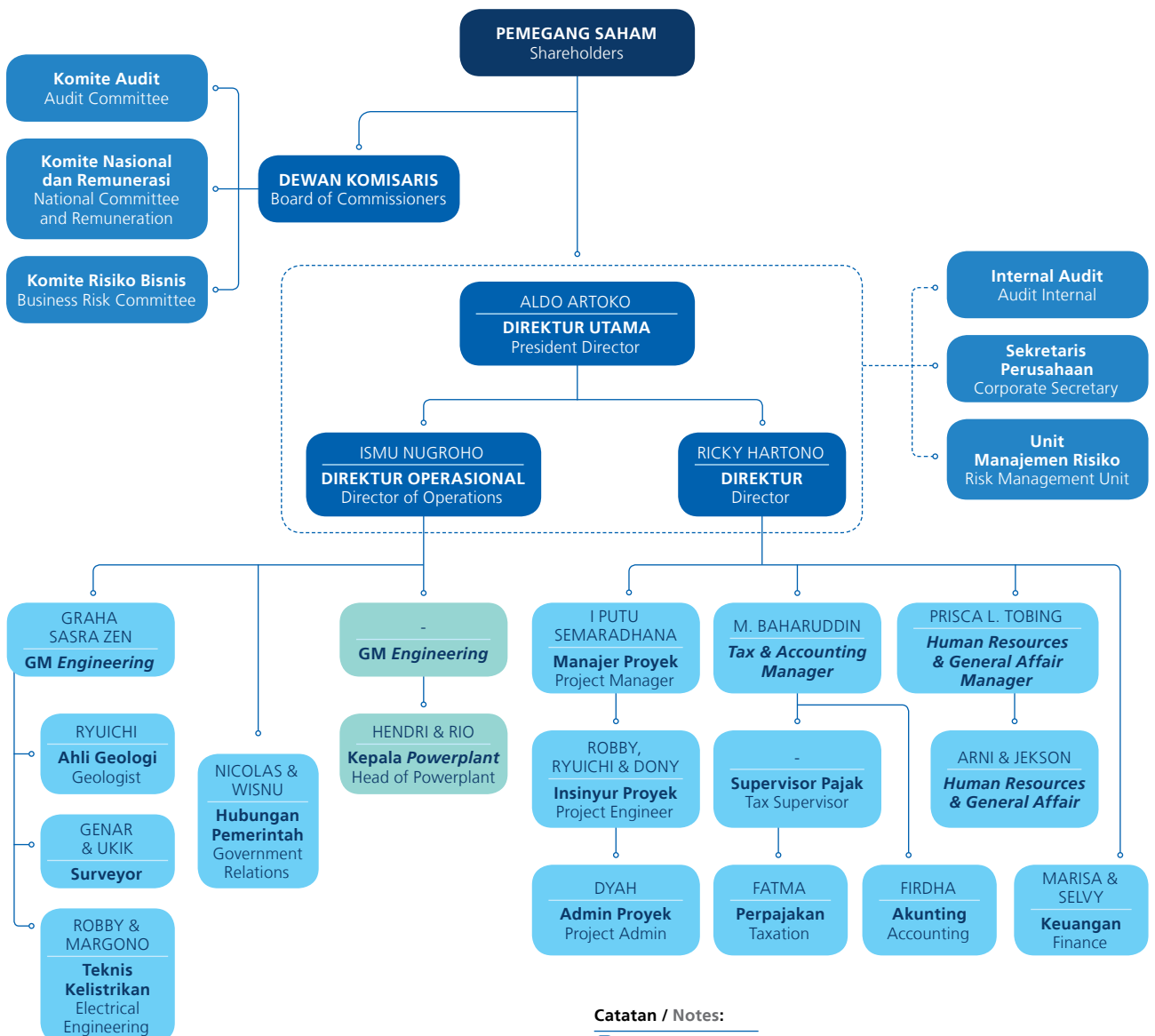
As of December 31, 2021, Arkora Hydro was not a member of any industry association.

STRUKTUR ORGANISASI

Organizational structure

Struktur organisasi Arkora Hydro per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Organizational structure of Arkora Hydro as of December 31, 2021 is as follows:



Catatan / Notes:

- : Struktur Organisasi Kantor Pusat / Head Office Organizational Structure
- : Struktur Organisasi Power Plant / Power Plant Organizational Structure

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

Company Group Structure

Struktur grup Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

The Company's group structure as of December 31, 2021 is as follows:



PROFIL MANAJEMEN

Management Profile

PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



ARYA PRADANA SETIADHARMA

Komisaris Utama
President Commissioner

Kewarganegaraan / Citizenship	: Indonesia
Usia / Age	: 38 tahun / 38 years old
Domisili / Domicile	: Jakarta Pusat / Central Jakarta
Dasar Hukum Penunjukkan / Legal Basis of Appointment	: Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020

Riwayat Pendidikan / Education

2007	Master Industrial Engineering, Purdue University. / Master's Degree in Industrial Engineering, Purdue University.
2006	Sarjana Industrial Engineering, Purdue University. / Bachelor's Degree in Industrial Engineering, Purdue University.

Riwayat Pekerjaan dan Informasi Rangkap Jabatan / Career History and Concurrent Position

2017-sekarang / 2017-present	Direktur, PT Awan Integrasi Sandidata. / Director, PT Awan Integrasi Sandidata.
2016-sekarang / 2016-present	Komisaris Utama, PT Nodeflux Teknologi Indonesia. / President Commissioner, PT Nodeflux Teknologi Indonesia.
2016-sekarang / 2016-present	Direktur, PT Qlue Performa Indonesia. / Director, PT Qlue Performa Indonesia.
2010-sekarang / 2010-present	Direktur, PT Verdanco Engineering. / Director, PT Verdanco Engineering.

PROFIL MANAJEMEN

Management Profile

Riwayat Pekerjaan dan Informasi Rangkap Jabatan / Career History and Concurrent Position

2008 – sekarang / Direktur Utama, PT Prasetia Dwidharma. /
2008-present President Director, PT Prasetia Dwidharma.

Hubungan Afiliasi / Affiliation

Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham PT Arkora Bakti Indonesia, perusahaan induk Perseroan. / He has an affiliated relationship with the shareholders of PT Arkora Bakti Indonesia, the parent company of the Company.



ABHAY NARAYAN PANDE

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan / Citizenship	:	Indonesia
Usia / Age	:	54 tahun / 54 years old
Domisili / Domicile	:	New Jersey
Dasar Hukum Penunjukkan / Legal Basis of Appointment	:	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020

Riwayat Pendidikan / Education

1993 Master of Business Administration, University of Chicago Business.
1989 Sarjana Seni, *Dartmouth Collage.* /
Bachelor's Degree in Arts, Dartmouth College.

Riwayat Pekerjaan dan Informasi Rangkap Jabatan / Career History and Concurrent Position

2016-sekarang / *Chief Investment Officer, Linnean Capital Management.*
2016-present
2013-2016 *Managing Director, American Capital LP.*
1998-2013 *Managing Director, Salmon Smith Barney.*
1993-1998 *Principal, A.T Kearney.*
1989-1991 *Analyst Consultant, Lewin Group Inc.*

Hubungan Afiliasi / Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi apa pun, baik dengan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan. / He does not have any affiliation with members of the Board of Commissioners or Board of Directors of the Company.

PROFIL MANAJEMEN

Management Profile



INDARTO

**Komisaris
Independen**
Independent
Commissioner

Kewarganegaraan / Citizenship	: Indonesia
Usia / Age	: 71 tahun / 71 years old
Domisili / Domicile	: Bogor
Dasar Hukum Penunjukkan / Legal Basis of Appointment	: Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020

Riwayat Pendidikan / Education

1995 Sarjana Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya. /
Bachelor's Degree in Law, Universitas Bhayangkara Surabaya.

Riwayat Pekerjaan dan Informasi Rangkap Jabatan / Career History and Concurrent Position

2006-2008	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), Kalimantan Timur. / Head of National Police for the region of East Kalimantan.
2004-2006	Direktur Pidana Korupsi, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri). / Director of National Police Criminal Investigation Agency for Corruption.
2002-2004	Karo Analisis, Bareskrim Polri. / Bureau Head of Analysis in Criminal Investigation Agency.
2001-2002	Kapolda, Sulawesi Tenggara. / Head of National Police for the Region of South East Sulawesi.
1999-2001	Wakil Direktur Pidana Korupsi, Komando Reserse (Koserse) Polri. / Vice Director of National Police Criminal Investigation Agency for Corruption.
1998-1999	Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) Purwakata, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Jawa Barat / Chief of City Police for Purwakarta Regency in West Java.

Hubungan Afiliasi / Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi apa pun, baik dengan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan. / He does not have any affiliation with members of the Board of Commissioners or Board of Directors of the Company.

INFORMASI PERUBAHAN KOMPOSISI MANAJEMEN

Selama tahun 2021, tidak terdapat perubahan komposisi anggota manajemen Perseroan.

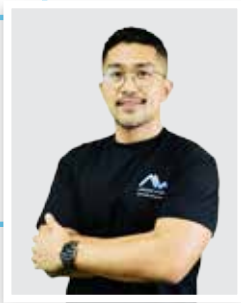
INFORMATION ON CHANGES IN MANAGEMENT

There was no change in the composition of the Company's management members throughout 2021.

PROFIL MANAJEMEN

Management Profile

PROFIL DIREKSI



ALDO HENRY ARTOKO

Direktur Utama
President Director

BOARD OF DIRECTORS PROFILE

Kewarganegaraan / Citizenship	: Indonesia
Usia / Age	: 37 tahun / 37 years old
Domisili / Domicile	: Jakarta Selatan / South Jakarta
Dasar Hukum Penunjukkan / Legal Basis of Appointment	: Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020

Riwayat Pendidikan / Education

1995	Sarjana Manufacturing Engineering and Management, University of New South Wales. / Bachelor's Degree in Manufacturing Engineering and Management, University of New South Wales.
------	--

Riwayat Pekerjaan dan Informasi Rangkap Jabatan / Career History and Concurrent Position

2010-sekarang / 2010-present	Komisaris, PT Verdanco Engineering. / Commissioner, PT Verdanco Engineering.
2010-sekarang / 2010-present	Direktur, PT Arkora Indonesia. / Director, PT Arkora Indonesia.
2008-2010	Konsultan Manajemen Proyek, PT Parsons Brinckerhoff Australia. / Project Management Consultant, PT Parsons Brinckerhoff Australia.
2007	Penilaian, Perbaikan Mesin dan Proses Produksi, Rheem Australia. / Appraisal, Machinery and Production Process Improvement, Rheem Australia.

Hubungan Afiliasi / Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi apa pun baik dengan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan. / He does not have any affiliation with members of the Board of Commissioners or Board of Directors of the Company.



RICKY HARTONO

Direktur
Director

Kewarganegaraan / Citizenship	: Indonesia
Usia / Age	: 37 tahun / 37 years old
Domisili / Domicile	: Jakarta Barat / West Jakarta
Dasar Hukum Penunjukkan / Legal Basis of Appointment	: Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020

Riwayat Pendidikan / Education

2007	Sarjana Chemical Engineering, University of Minnesota. / Bachelor's Degree in Chemical Engineering, University of Minnesota.
------	---

Riwayat Pekerjaan dan Informasi Rangkap Jabatan / Career History and Concurrent Position

2021-sekarang / 2021-present	Direktur, PT Arkora Tenaga Matahari. / Director, PT Arkora Tenaga Matahari.
---------------------------------	--

PROFIL MANAJEMEN

Management Profile

Riwayat Pekerjaan dan Informasi Rangkap Jabatan / Career History and Concurrent Position

2020-sekarang / 2020-present	Direktur, PT Arkora Energi Baru. / Director, PT Arkora Energi Baru.
2018-sekarang / 2018-present	Direktur, PT Arkora Hydro Sulawesi. / Director, PT Arkora Hydro Sulawesi.
2011-2017	<i>Business Development Manager</i> , di PT Nugraha Siti Kumala. / <i>Business Development Manager</i> , PT Nugraha Siti Kumala.
2009-2011	<i>Product Manager</i> , PT Dexa Medica.

Hubungan Afiliasi / Affiliation

Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham PT Arkora Bakti Indonesia, perusahaan induk Perseroan. / He has an affiliated relationship with the shareholders of PT Arkora Bakti Indonesia, the parent company of the Company.



ISMU NUGROHO
Direktur Operasional
Operation Director

Kewarganegaraan / Citizenship	: Indonesia
Usia / Age	: 67 tahun / 67 years old
Domisili / Domicile	: Depok
Dasar Hukum Penunjukkan / Legal Basis of Appointment	: Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020

Riwayat Pendidikan / Education

1985	Master Teknik Jalan Raya, Institut Teknologi Bandung / Master's Degree in Highway Engineering, Institut Teknologi Bandung
1983	Sarjana Teknik Sipil, Universitas Diponegoro. / Bachelor's Degree in Civil Engineering, Universitas Diponegoro.

Riwayat Pekerjaan dan Informasi Rangkap Jabatan / Career History and Concurrent Position

2007-2010	<i>Deputy Manager Engineering Hydro dan Diesel Generation</i> , PT Arkora Hydro. / <i>Deputy Manager Engineering Hydro and Diesel Generation</i> , PT Arkora Hydro.
1993-2007	<i>Project Site</i> , PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
1982-1984	<i>Project Site Engineer</i> , PT Sapto Renggo.
1981-1982	<i>Civil Construction Superintendent</i> , PT Sapto Renggo.

Hubungan Afiliasi / Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi apa pun baik dengan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan. / He does not have any affiliation with members of the Board of Commissioners or Board of Directors of the Company.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Composition

Berdasarkan Akta Perseroan No. 67/2021, komposisi pemegang saham Perseroan per 31 Desember 2021 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Based on the Company Deed No. 67/2021, the composition of the Company's shareholders as of December 31, 2021 is as follows:

Keterangan / Description	Nilai Nominal Rp50,- per lembar saham / Nominal Value Rp50 per share		Persentase Kepemilikan (%) / Ownership Percentage (%)
	Jumlah Saham / Total Shares	Jumlah Nominal (Rp) / Total Nominal (Rp)	
Modal Dasar / Authorized Capital	4.639.200.000	231.960.000.000	
Pemegang Saham / Shareholders			
PT Arkora Bakti Indonesia	695.880.000	34.794.000.000	60,00
ACEI Singapore Holdings Private Ltd.	463.920.000	23.196.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / Total Subscribed and Paid-up Capital	1.159.800.000	57.990.000.000	100,00
Saham dalam Portepel / Shares in Portfolio	3.479.400.000	173.970.000.000	

PEMEGANG SAHAM YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH PER 31 DESEMBER 2021

SHAREHOLDERS WITH 5% SHARES OR MORE AS OF DECEMBER 31, 2021

Nama / Name	Total Saham / Total Shares	Persentase Kepemilikan (%) / Ownership Percentage (%)
PT Arkora Bakti Indonesia	695.880.000	60,00
ACEI Singapore Holdings Private Ltd.	463.920.000	40,00
Jumlah / Total	1.159.800.000	100,00

KEPEMILIKAN SAHAM KURANG DARI 5% OLEH KELOMPOK MASYARAKAT

Hingga 31 Desember 2021, tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat dengan persentase kurang dari 5%.

SHARE OWNERSHIP LESS THAN 5% BY COMMUNITY

As of December 31, 2021, there were no Company shares owned by community with a percentage of less than 5%.

KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PER 31 DESEMBER 2021

Hingga 31 Desember 2021, tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki secara langsung baik oleh anggota Dewan Komisaris maupun Direksi. Kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dijelaskan sebagai berikut:

SHARE OWNERSHIP BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS AS OF DECEMBER 31, 2021

As of December 31, 2021, there were no shares of the Company which are directly owned by either the members of the Board of Commissioners or the Board of Directors. The share ownership of the Company by members of the Board of Commissioners and Board of Directors is explained as follows:

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Composition

Nama / Name	Jabatan / Position	Kepemilikan Saham / Share Ownership			
		Pribadi pada Perusahaan / Individual in the Company		Bersifat Tidak Langsung pada Perusahaan / Indirect in the Company	
		Jumlah Lembar Saham / Total Shares	Persentase Kepemilikan (%) / Ownership Percentage (%)	Jumlah Lembar Saham / Total Shares	Persentase Kepemilikan (%) / Ownership Percentage (%)
Dewan Komisaris / Board of Commissioners					
Arya Pradana Setiadharma	Komisaris Utama / President Commissioner	-	-	11.869	17,06%
Abhay Narayan Pande	Komisaris Independen / Independent Commissioner	-	-	-	-
Indarto	Komisaris Independen / Independent Commissioner	-	-	-	-
Direksi / Board of Directors					
Aldo Henry Artoko	Direktur Utama / President Director	-	-	-	-
Ricky Hartono	Direktur / Director	-	-	-	-
Ismu Nugroho	Direktur Operasional / Operation Director	-	-	5.699	8,19%

INFORMASI PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN

INFORMATION ON COMPANY SHAREHOLDER



Hingga 31 Desember 2021, pemegang saham Perseroan terdiri dari PT Arkora Bakti Indonesia dengan kepemilikan saham 60% serta ACEI Singapore Holdings Private Ltd. dengan persentase kepemilikan saham 40%. Dengan kepemilikan saham tersebut, PT Arkora Bakti Indonesia merupakan pemegang saham utama dan pengendali Perseroan.

As of December 31, 2021, the Company's shareholders consisted of PT Arkora Bakti Indonesia with 60% share ownership and ACEI Singapore Holdings Private Ltd. with a share ownership percentage of 40%. With this share ownership, PT Arkora Bakti Indonesia is the major and controlling shareholder of the Company.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Composition

Informasi singkat mengenai kedua pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Brief information on the two shareholders of the Company is as follows:

PT ARKORA BAKTI INDONESIA

PT Arkora Bakti Indonesia merupakan perusahaan yang beroperasi pada bidang usaha perdagangan. Pemegang saham PT Arkora Bakti Indonesia adalah PT Arkora Indonesia dengan persentase kepemilikan 37,5%, Arya Pradana Setiadharna dengan kepemilikan 17,06%, Ardi Dwinanta Setiadharna dengan kepemilikan 17,06%, Ismu Nugroho dengan kepemilikan 8,19%, Graha Sasra Aditya Zen dengan kepemilikan 4,31%, dan Josephine Kongoasa dengan kepemilikan 15,88%. PT Arkora Bakti Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat pada alamat Gedung Office 8 Lt 21 Unit C-D Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53. Lot 28 SCBD Jakarta Selatan. PT Arkora Bakti Indonesia didirikan pada tahun 2014 berdasarkan dasar hukum Akta Pendirian No. 35 Tanggal 12 Desember 2014.

PT Arkora Bakti Indonesia is a company that operates in the trading business sector. The shareholders of PT Arkora Bakti Indonesia are PT Arkora Indonesia with 37.5% ownership, Arya Pradana Setiadharna with 17.06% ownership, Ardi Dwinanta Setiadharna with 17.06% ownership, Ismu Nugroho with 8.19% ownership, Graha Sasra Aditya Zen with 4.31% ownership, and Josephine Kongoasa with 15.88% ownership. PT Arkora Bakti Indonesia is domiciled in South Jakarta and has its head office at Gedung Office 8 Lt 21 Unit C-D Jl. General Sudirman Kav. 52-53. Lot 28 SCBD South Jakarta. PT Arkora Bakti Indonesia was established in 2014 based on the legal basis of the Deed of Establishment No. 35 dated December 12, 2014.

ACEI SINGAPORE HOLDINGS PRIVATE Ltd.

ACEI Singapore Holdings Private Ltd. merupakan perusahaan yang beroperasi pada bidang usaha investasi. Pemegang saham ACEI Singapore Holdings Private Ltd. adalah Ironmont Hydro Pte. Ltd dengan persentase kepemilikan 40%. ACEI Singapore Holdings Private Ltd. berkedudukan di Singapura dan berkantor pusat pada alamat 50 Raffles Place #37-00 Singapore Land Tower Singapore. ACEI Singapore Holding Private Ltd. didirikan pada tahun 2015 berdasarkan dasar hukum pendirian *Accounting and Corporate Regulator Authority*.

ACEI Singapore Holdings Private Ltd. is a company that operates in the investment business sector. Shareholders of ACEI Singapore Holdings Private Ltd. is Ironmont Hydro Pte. Ltd with 40% ownership. ACEI Singapore Holdings Private Ltd. domiciled in Singapore and headquartered at 50 Raffles Place #37-00 Singapore Land Tower Singapore. ACEI Singapore Holding Private Ltd. was established in 2015 based on the legal basis of the establishment of the Accounting and Corporate Regulator Authority.

INFORMASI ENTITAS ANAK, PERUSAHAAN ASOSIASI, ATAU VENTURA BERSAMA

Information on Subsidiaries, Associates, or Joint Ventures

ENTITAS ANAK LANGSUNG

DIRECT SUBSIDIARIES

PT ARKORA SULAWESI SELATAN

Tahun Pendirian / Year of Establishment		2011
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation		2011
Kegiatan Usaha / Line of Business		Pembangkitan tenaga listrik / Power plant
Total Aset / Total Assets		Rp373.507.387.034,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage		99%
Status / Status		Beroperasi / Operating
Alamat / Address		Gedung <i>Office 8</i> Lt. 21 Unit C-D, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.





PT ARKORA HIDRO TENGGARA

Tahun Pendirian / Year of Establishment		2012
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation		2012
Kegiatan Usaha / Line of Business		Perdagangan, industri, pembangunan, jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), percetakan, pertanian, transportasi darat, dan perbengkelan. / Trade, industry, construction, services (except services in the field of law and tax), printing, agriculture, land transportation, and workshops.
Total Aset / Total Assets		Rp1.993.544.757,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage		99%
Status / Status		Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address		Gedung <i>Office 8</i> , Lt. 21 Unit C-D, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT ARJUNA HIDRO

Tahun Pendirian / Year of Establishment		2012
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation		2012
Kegiatan Usaha / Line of Business		Perdagangan, industri, pembangunan, jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), percetakan, pertanian, transportasi darat, dan perbengkelan. / Trade, industry, construction, services (except services in the field of law and tax), printing, agriculture, land transportation, and workshops.

PT ARJUNA HIDRO

Total Aset / Total Assets		Rp1.917.224.680,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage		99%
Status / Status		Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address		Gedung <i>Office 8</i> , Lt. 21 Unit C-D, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT ARKORA HIDRO PASIFIK

Tahun Pendirian / Year of Establishment		2011
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation		2011
Kegiatan Usaha / Line of Business		Pembangkitan tenaga listrik. / Power plant.
Total Aset / Total Assets		Rp1.994.970.136,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage		99%
Status / Status		Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address		Gedung <i>Office 8</i> Lt 21 Unit C-D, SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT TIRTA ENERGI LESTARI

Tahun Pendirian / Year of Establishment		2013
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation		2015
Kegiatan Usaha / Line of Business		Pembangkitan tenaga listrik. / Power plant.
Total Aset / Total Assets		Rp576.273.162,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage		99%
Status / Status		Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address		<i>Office 8 at Senopati Building</i> Lt. 21 Unit C-D, Jl. Senopati Raya No. 8 B, Lot 28 SCBD, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT ARKORA GUNA ENERGI

Tahun Pendirian / Year of Establishment		2012
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation		2012
Kegiatan Usaha / Line of Business		Perdagangan, industri, pembangunan, jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), percetakan, pertanian, transportasi darat, dan perbengkelan. / Trade, industry, construction, services (except services in the field of law and tax), printing, agriculture, land transportation, and workshops.

PT ARKORA GUNA ENERGI

Total Aset / Total Assets		Rp1.996.152.500,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage		99%
Status / Status		Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address		Gedung <i>Office 8</i> , Lt. 21 Unit C-D, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT HYDRA SULAWESI

Tahun Pendirian / Year of Establishment		2011
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation		2011
Kegiatan Usaha / Line of Business		Pembangkitan tenaga listrik. / Power plant.
Total Aset / Total Assets		Rp1.996.542.437,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage		99%
Status / Status		Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address		Gedung <i>Office 8</i> Lt 21 Unit C-D, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 SCBD Lot 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.




PT SULAWESI HIDRO MANDIRI

Tahun Pendirian / Year of Establishment		2012
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation		2012
Kegiatan Usaha / Line of Business		Perdagangan, industri, pembangunan, jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), percetakan, pertanian, transportasi darat, dan perbengkelan. / Trade, industry, construction, services (except services in the field of law and tax), printing, agriculture, land transportation, and workshops.
Total Aset / Total Assets		Rp1.928.772.181,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage		99%
Status / Status		Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address		Gedung <i>Office 8</i> Lt 21 Unit C-D, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 SCBD Lot 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT ARKORA LUWU TIMUR MANDIRI

Tahun Pendirian / Year of Establishment		2011
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation		2011
Kegiatan Usaha / Line of Business		Pembangkitan tenaga listrik. / Power plant.
Total Aset / Total Assets		Rp1.916.732.854,-

PT ARKORA LUWU TIMUR MANDIRI

Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage		99%
Status / Status		Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address		Gedung <i>Office</i> 8 Lt. 21 Unit C-D, Jl. Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.




PT ARKORA SULAWESI TENGAH

Tahun Pendirian / Year of Establishment		2012
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation		2012
Kegiatan Usaha / Line of Business		Perdagangan, industri, pembangunan, jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), percetakan, pertanian, transportasi darat, dan perbengkelan. / Trade, industry, construction, services (except services in the field of law and tax), printing, agriculture, land transportation, and workshops.
Total Aset / Total Assets		Rp1.996.152.500,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage		99%
Status / Status		Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address		Gedung <i>Office</i> 8 Lt. 21 Unit C-D, Jl. Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT ARKORA TOMONI HYDRO

Tahun Pendirian / Year of Establishment		2011
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation		2011
Kegiatan Usaha / Line of Business		Perdagangan, industri, pembangunan, jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), percetakan, pertanian, transportasi darat, dan perbengkelan. / Trade, industry, construction, services (except services in the field of law and tax), printing, agriculture, land transportation, and workshops.
Total Aset / Total Assets		Rp1.997.152.500,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage		99%
Status / Status		Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address		Gedung <i>Office</i> 8 Lt. 21 Unit C-D, Jl. Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT NOSU HYDRO

Tahun Pendirian / Year of Establishment		2011
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation		2011
Kegiatan Usaha / Line of Business		Pembangkitan tenaga listrik. / Power plant.

PT NOSU HYDRO

Total Aset / Total Assets		Rp1.856.633.863,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage		99%
Status / Status		Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address		Gedung <i>Office</i> 8 Lt. 21 Unit C-D, Jl. Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT ARKORA TENAGA MATAHARI

Tahun Pendirian / Year of Establishment		2021
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation		2021
Kegiatan Usaha / Line of Business		(i) Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya; (ii) perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya; (iii) aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya; (iv) aktivitas konsultasi manajemen lainnya; (v) instalasi listrik; (vi) pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik, (vii) konstruksi bangunan sipil elektrikal. / (i) Leasing and operating lease for mining and energy machinery and equipment; (ii) wholesale of machinery, equipment and other equipment; (iii) other electric power support activities; (iv) other management consulting activities; (v) electrical installations; (vi) operation of electrical power utilization installations, (vii) construction of electrical civil buildings.
Total Aset / Total Assets		Rp1.250.000.000,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage		99%
Status / Status		Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address		Jakarta Selatan

ENTITAS ANAK TIDAK LANGSUNG

INDIRECT SUBSIDIARIES

PT ARKORA HYDRO SULAWESI

Tahun Pendirian / Year of Establishment		2011
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation		2011
Kegiatan Usaha / Line of Business		Pembangkitan tenaga listrik. / Power plant.
Total Aset / Total Assets		Rp157.379.821.134,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage		99%
Status / Status		Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address		Gedung <i>Office</i> 8 Lt 21 Unit C-D, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 SCBD Lot 28, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT ARKORA ENERGI BARU

Tahun Pendirian / Year of Establishment		2012
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation		2012
Kegiatan Usaha / Line of Business		Pembangkitan tenaga listrik. / Power plant.
Total Aset / Total Assets		Rp1.996.152.500,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage		99%
Status / Status		Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address		Gedung <i>Office 8</i> Lt. 21 Unit C-D, Jl. Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT ARKORA ATLANTIK

Tahun Pendirian / Year of Establishment		2012
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation		2012
Kegiatan Usaha / Line of Business		Pembangkitan tenaga listrik. / Power plant.
Total Aset / Total Assets		Rp1.882.866.471,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage		99%
Status / Status		Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address		<i>Office 8 at Senopati Building</i> Lt. 21 Unit C-D, Jl. Senopati Raya No. 8 B, Lot 28 SCBD, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT ARKORA HIDRONESIA

Tahun Pendirian / Year of Establishment		2012
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation		2012
Kegiatan Usaha / Line of Business		Pembangkitan tenaga listrik. / Power plant.
Total Aset / Total Assets		Rp1.510.585.486,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage		99%
Status / Status		Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address		<i>Office 8 at Senopati Building</i> Lt. 21 Unit C-D, Jl. Senopati Raya No. 8 B, Lot 28 SCBD, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT ARKORA SULAWESI TENGGARA

Tahun Pendirian / Year of Establishment		2011
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation		2011
Kegiatan Usaha / Line of Business		Pembangkitan tenaga listrik. / Power plant.
Total Aset / Total Assets		Rp1.890.758.721,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage		99%
Status / Status		Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address		Gedung <i>Office</i> 8, Lt. 21 Unit C-D, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

PT TENGGARA HIDRO

Tahun Pendirian / Year of Establishment		2012
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation		2012
Kegiatan Usaha / Line of Business		Pembangkitan tenaga listrik. / Power plant.
Total Aset / Total Assets		Rp1.915.227.179,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage		99%
Status / Status		Belum beroperasi / Not operating yet
Alamat / Address		Gedung <i>Office</i> 8 Lt 21 Unit C-D, Jl. Senopati Raya No. 8 B, SCBD Lot 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT GRANIF KONSULTAN

Tahun Pendirian / Year of Establishment		2011
Tahun Mulai Penyertaan / Year of Participation		2012
Kegiatan Usaha / Line of Business		(i) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; dan (ii) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya / (i) YBDI Engineering Activities and Technical Consulting; and (ii) Other Management Consulting Activities
Total Aset / Total Assets		Rp312.576.330,-
Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage		75%
Status / Status		Beroperasi / Operating
Alamat / Address		Gedung <i>Office</i> 8 Lt 21 Unit C-D, Jl. Senopati Raya No. 8 B, Lot 28 SCBD, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Capital Market Supporting Professionals and Insitutions

Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm

KAP IMELDA DAN REKAN

Nama Akuntan / Accountant Name	: Theodorus Bambang Dwi K.A
Alamat KAP / KAP Address	: <i>The Plaza Office Tower, 32nd Floor,</i> Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350
Nomor STTD / STTD Number	: STTD.AP-08/PM.22/2018
Keanggotaan Asosiasi / Association Membership	: AP.1208
Tugas Pokok / Main Duty	: Melaksanakan audit berdasarkan standar <i>auditing</i> yang ditetapkan oleh IAPI. / Carry out audits based on auditing standards set by IAPI.
Periode Penugasan / Assignment Period	: Tahun buku 2021 / 2021 Fiscal Year
Biaya Audit / Audit Fee	: Rp800.000.000,-
Jasa Lain yang Diberikan / Other Services	: -

Konsultan Hukum / Legal Consultant

ARMAND YAPSUNTO MUHARAMSYAH & PARTNERS

Nama Partner / Partner Name	: Wemmy Muharamsyah, S.H., S.E., LL.M., M.L.E.
Alamat Kantor / Office Address	: <i>Generali Tower Penthouse floor</i> <i>Grand Rubina Business Park,</i> Jl. HR. Rasuna Said, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940.
Nomor STTD / STTD Number	: STTD.KH-155/PM.2/2018
Tanggal STTD / STTD Date	: 18 Mei 2018 / May 18, 2018
No. Anggota HKHPM / HKHPM Member Number	: 201520
Pedoman Kerja / Work Guideline	: Keputusan HKHPM No. Kep. 02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021, tanggal 10 November 2021, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DSHKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018. / HKHPM Decree No. Kep. 02/HKHPM/VIII/2018 dated August 8, 2018 on the Professional Standards of the Capital Market Legal Consultants Association as amended by HKHPM Decree No. KEP.03/HKHPM/XI/2021, dated November 10, 2021, HKHPM Circular No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 dated December 11, 2018 on the Interpretation of the 2018 HKHPM Professional Standards and HKHPM Circular Letter No. 191/DS-HKHPM/1218. Ref. 01/DSHKHPM/0119 dated January 7, 2019 on the Interpretation of the 2018 HKHPM Professional Standards.
Tugas Pokok / Main Duty	: Dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. / The purpose of this Public Offering is to conduct an independent legal examination in accordance with the norms or Professional Standards and the code of conduct for legal consultants and provide a legal examination report on the existing facts regarding the Company which is submitted by the Company to the Legal Consultant.

Konsultan Hukum / Legal Consultant

ARMAND YAPSUNTO MUHARAMSYAH & PARTNERS

Periode Penugasan / Assignment Period : 2021

Jasa Lain yang Diberikan / Other Services : -

Notaris / Notary

SUGIH HARYATI, S.H., M.KN.

Alamat Kantor / Office Address : Jl. RC. Veteran Raya No.11A,
Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12320.

Nomor STTD / STTD Number : STTD.N-135/PM.2/2018 tertanggal 7 Agustus 2018 /
STTD.N-135/PM.2/2018 dated August 7, 2018

No. Asosiasi / Association Number : Ikatan Notaris Indonesia Nomor 0429319840712

Pedoman Kerja / Work Guideline : Undang-Undang (UU) RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2004
tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris / Law (UU) of the Republic of Indonesia No. 2 of
2014 on Amendments to Law No. 30 of 2004 on Notary Positions and Notary Code of Conduct.

Tugas Pokok / Main Duty : Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara
lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran
Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan
Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek. / The scope of duties of a Notary as a
supporting profession in a Public Offering includes, among others, preparing and making
deeds in connection with the Public Offering, including amendments to the entire Articles of
Association of the Company, the Underwriting Agreement and the Securities Administration
Management Agreement.

Periode Penugasan / Assignment Period : 2021

Jasa Lain yang Diberikan / Other Services : -

Biro Administrasi Efek (BAE) / Share Registrar

PT ADIMITRA JASA KORPORA

Alamat Kantor / Office Address : *Kirana Boutique Office.*
RVGW+P2R, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jakarta 14240.

Nomor STTD / STTD Number : No Kep-41/D.04/2014 tertanggal 19 September 2014 /
No Kep-41/D.04/2014 dated September 19, 2014

Asosiasi / Association : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) /
Member of Indonesian Share Registrar Association (ABI)

Pedoman Kerja / Work Guideline : Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE Indonesia /
Capital Market Regulations from OJK and the Indonesian BAE Association

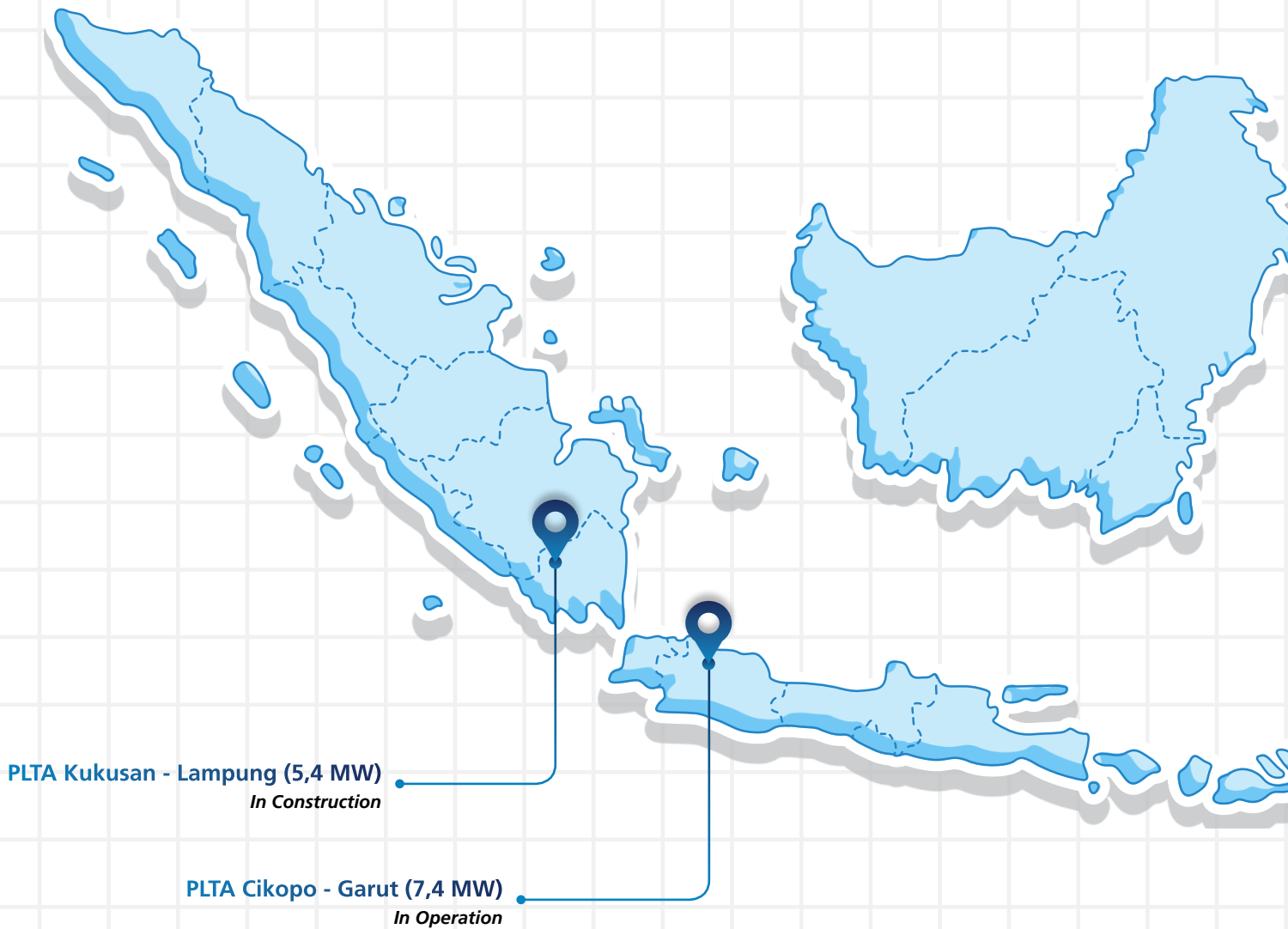
Tugas Pokok / Main Duty : Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-
data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai
ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub
Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun
Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung
jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan. / Coordinate with the
Managing Underwriter and the Allotment Manager regarding data on share subscriptions,
reports in the Initial Public Offering in accordance with applicable regulations. Coordinate
with the Allotment Manager and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia regarding allotted shares
to be distributed to Sub Securities Accounts of the Subscriber, carry out the distribution of
allotted shares and prepare a List of Shareholders resulting from the Initial Public Offering. BAE
is also responsible for issuing Collective Shares Certificate (SKS), if necessary.

Periode Penugasan / Assignment Period : 2021

Jasa Lain yang Diberikan / Other Services : -

WILAYAH OPERASIONAL

Operational Area



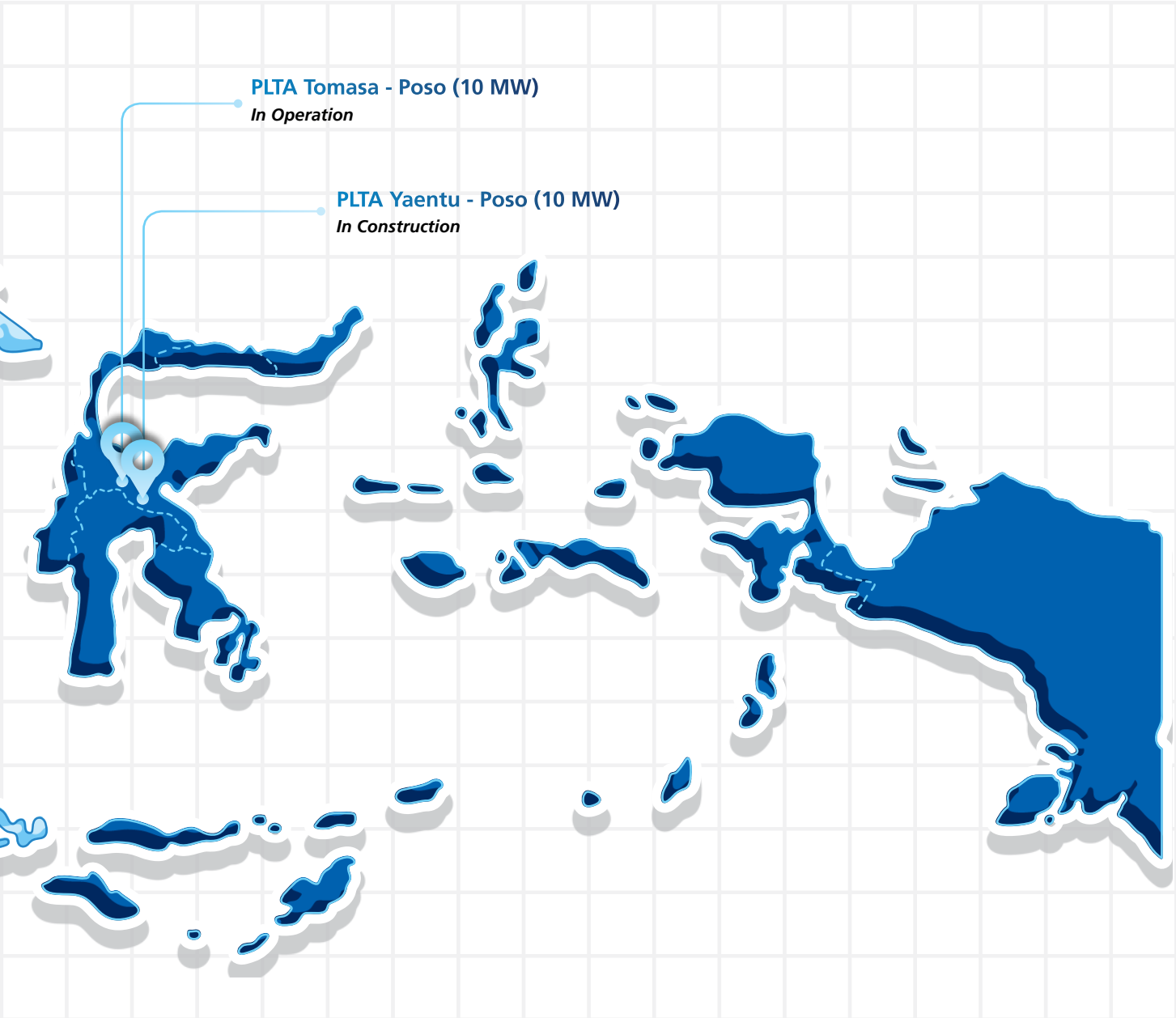
ALAMAT PLTA

HPP ADDRESS

No.	PLTA / HPP	Alamat / Address
1.	PLTA CIKOPO	Desa Panawa, Pamulihan, Garut, Jawa Barat
2.	PLTA TOMASA	Desa Kuku, Pamona Utara, Poso, Sulawesi Tengah
3.	PLTA YAENTU	Desa Kamba, Pamona Timur, Poso, Sulawesi Tengah
4.	PLTA KUKUSAN	Desa Way Panas, Wonosobo, Tanggamus, Lampung

WILAYAH OPERASIONAL

Operational Area



SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

Arkora Hydro memahami posisi penting Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai mitra strategis sekaligus pemangku kepentingan yang secara mendasar memberikan pengaruh terhadap jalannya pengelolaan dan pengembangan usaha. Lebih dari itu, pengelolaan SDM merupakan bagian penting dalam keseluruhan upaya Perseroan mencapai visi untuk tumbuh sebagai pemimpin pasar pembangkit listrik dari energi terbarukan secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Dengan pemahaman tersebut, Perseroan memiliki komitmen untuk menjalankan pengelolaan dan pengembangan usaha dengan praktik pengembangan SDM yang kuat, seiring pemenuhan hak karyawan secara menyeluruh sesuai peraturan perundang-undangan dan standar terbaik yang berlaku.

Arkora Hydro is aware of the important position of Human Resources (HR) as a strategic partner as well as a stakeholder who fundamentally influences the course of business management and development. Moreover, HR management is an important part of the Company's overall efforts to achieve its vision to grow as a market leader in power generation from renewable energy in an environmentally and socially responsible manner. With this understanding, the Company is committed to carrying out business management and development with strong HR development practices, in line with the comprehensive fulfillment of employee rights in accordance with the prevailing laws and regulations and the best standards.

KOMPOSISI KARYAWAN

Per 31 Desember 2021, Perseroan memiliki sejumlah 70 karyawan. Komposisi karyawan berdasarkan status karyawan, jenjang jabatan, jenjang usia, serta jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

EMPLOYEE COMPOSITION

As of December 31, 2021, the Company had 70 employees. The composition of employees based on employment status, position, age, and education level is as follows:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan
Employee Composition by Employment Status

Status Karyawan / Employee Status	2021	2020	2019
Tetap / Permanent	61	62	63
Tidak tetap / Non-Permanent	9	9	6
Jumlah / Total	70	71	69

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan
Employee Composition by Position

Jenjang Jabatan / Position	2021	2020	2019
General Manager	1	1	1
Manajer / Manager	2	2	2
Supervisor	4	3	4
Staf Senior / Senior Staff	2	2	2
Staf / Staff	39	33	33
Non-Staf / Non-Staff	22	21	21
Jumlah / Total	70	71	69

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia
 Employee Composition by Age Range

Jenjang Usia / Age Range	2021	2020	2019
> 55 tahun / >55 years old	3	2	2
46-55 tahun / 46-55 years old	15	14	12
31-45 tahun / 31-45 years old	35	38	38
≤30 tahun / ≤30 years old	17	17	16
<21 tahun / <21 years old	0	-	1
Jumlah / Total	70	71	69

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan
 Employee Composition by Education

Jenjang Pendidikan / Educational	2021	2020	2019
≥S1 / ≥ Bachelor's Degree	13	12	12
Diploma	7	7	6
SMA atau sederajat / Senior High School or Equivalent	22	24	23
<SMA / <Senior High School	28	28	28
Jumlah / Total	70	71	69

PROGRAM PELATIHAN KARYAWAN

Perseroan melaksanakan pengembangan SDM secara berkelanjutan dengan orientasi pada penciptaan individu-individu karyawan yang andal dan memiliki daya saing yang baik. Hal tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan karyawan dalam program-program pengembangan kompetensi, baik yang diadakan secara internal maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Informasi mengenai program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh karyawan Perseroan di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

EMPLOYEE TRAINING PROGRAM

The Company carries out sustainable human resource development with an orientation towards creating reliable and highly competitive individual employees. This is realized through employee participation in competency development programs, both held internally and through collaboration with third parties.

Information regarding the competency development program participated by the Company's employees in 2021 is as follows:

No.	Tanggal Pelatihan / Training Date	Nama/Topik Pelatihan / Name/ Topic of Training	Penyelenggara / Organizer	Peserta / Participants
1	13-15 November 2021 / November 13-15, 2021	Sertifikasi Kompetensi untuk Tenaga Teknik Kelistrikan / Competency Certification for Electrical Engineers	PT Sertifikasi Kompetensi Profesionalis Indonesia	Operator <i>Control Room</i> , Manager PLTA dan Supervisor Operasi Perseroan / Control Room Operators, HPP Managers and Company Operations Supervisors
2	13-15 November 2021 / November 13-15, 2021	Sertifikasi Kompetensi untuk Tenaga Teknik Kelistrikan / Competency Certification for Electrical Engineers	PT Sertifikasi Kompetensi Profesionalis Indonesia	Operator <i>Power House</i> dan Supervisor Operasi ASS / Power House Operators and ASS Operations Supervisors

KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Perseroan melaksanakan pemenuhan atas kesejahteraan karyawan sebagai bagian penting dalam praktik pengelolaan SDM berkelanjutan, dengan memastikan remunerasi diberikan dengan secara menyeluruh berkesesuaian terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Perseroan melalui Unit SDM menjalankan kebijakan pemberian remunerasi berdasarkan struktur jabatan dalam organisasi Perseroan, yang telah diatur melalui kebijakan internal. Terkait hal tersebut, Perseroan juga melaksanakan penyaluran upah bagi karyawan kontrak dengan memperhatikan ketentuan minimum yang ditetapkan Pemerintah, di antaranya melalui standar Upah Minimum Regional (UMR).

Sebagian bagian dari remunerasi bagi karyawan, Perseroan memberikan sejumlah tunjangan dan fasilitas meliputi Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan pajak penghasilan, tunjangan *shift*, tunjangan operasional, tunjangan telekomunikasi, serta tunjangan transportasi sesuai level jabatan karyawan.

PROGRAM PENSIUN DAN IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG

Perseroan memberikan fasilitas bagi karyawan tetap untuk dapat mempersiapkan masa pensiun melalui kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, meliputi jaminan hari tua serta jaminan pensiun bagi karyawan. Di samping itu, Perseroan memastikan seluruh karyawan telah dilindungi melalui keikutsertaan dalam program BPJS Kesehatan (sebelumnya, Jamsostek) yang melibatkan kontribusi oleh pemberi kerja maupun tiap-tiap karyawan yang dihitung berdasarkan persentase gaji pokok karyawan, sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

EMPLOYEE WELFARE

The Company carries out the fulfillment of employee welfare as a vital part of sustainable HR management practices, by ensuring that remuneration is provided in a comprehensive manner in accordance with applicable labor regulations. The Company through the HR Unit implements a policy of providing remuneration based on the position structure in the Company's organization, which has been regulated through internal policies. In this regard, the Company also distributes wages for contract employees by taking into account the minimum provisions set by the Government, including through the Regional Minimum Wage (UMR) standard.

As part of the remuneration for employees, the Company provides a number of allowances and facilities, including holiday allowances (THR), income tax allowance, shift allowance, operational allowance, telecommunications allowances, and transportation allowances according to the employee's position level.

RETIREMENT PROGRAM AND LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS

The Company provides facilities for permanent employees to be able to prepare for retirement through participation in the BPJS Ketenagakerjaan program, including old-age insurance and pension benefits for employees. Moreover, the Company ensures that all employees are protected through participation in the BPJS Kesehatan program (previously, Jamsostek) which involves contributions by the employer as well as each employee which is calculated based on the percentage of the employee's basic salary, as determined by the applicable laws and regulations.



ARKORA HYDRO

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion
& Analysis



4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

TINJAUAN EKONOMI MAKRO

Meski secara umum terjadi pemulihan dari dampak pandemi, situasi perekonomian di tahun 2021 tetap menghadirkan sejumlah tantangan, mencakup kondisi khusus pada rantai pasok serta pemberlakuan kembali kebijakan pembatasan sosial setelah menyebarnya varian baru virus Covid-19. Peningkatan permintaan pada sejumlah komoditas, terjadi seiring pemulihan aktivitas ekonomi di sejumlah kawasan. Hal tersebut terjadi pada kondisi sektor produksi di tahun 2021 yang masih mengalami hambatan, yang kemudian mengakibatkan kenaikan harga. Situasi itu terjadi pada komoditas energi, di antaranya batu bara, yang tercatat menembus harga tertinggi di bulan Oktober 2021, mencapai empat kali dibanding harga rata-rata di tahun 2020. Di samping itu, pemberlakuan kembali kebijakan pembatasan sosial terjadi di paruh kedua tahun 2021, yaitu pada bulan Juli hingga Agustus, yang menghadirkan hambatan tertentu pada sejumlah sektor industri.

Sejalan dengan itu, terjadi pemulihan pada perekonomian Indonesia di tahun 2021 yang dapat diukur melalui sejumlah indikator. Mengacu pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar 3,69%, atau lebih baik dari tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 2,07%. Pada pertumbuhan tersebut, Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI) mencatatkan pendapatan negara mencapai Rp2.003,1 triliun, atau memenuhi 114,9% terhadap target APBN 2021. Penerimaan pajak di tahun 2021 adalah sejumlah Rp1.546,5 triliun atau telah mencapai level pra-pandemi di tahun 2019 yang sejumlah Rp1.546,1 triliun. Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur pemulihan ekonomi Indonesia yaitu neraca perdagangan tahun 2021 yang surplus hingga US\$35,34 miliar, atau lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang sebesar US\$21,74 miliar.

MACROECONOMIC OVERVIEW

Despite the general recovery from the impact of the pandemic, the economic situation in 2021 still presented numerous challenges, including particular conditions in the supply chain and the re-imposition of social restriction policies after the spread of a new variant of the Covid-19. The increase in demand for a number of commodities occurred in line with the recovery in economic activity in a number of regions. Such condition occurred in the production sector in 2021 which was still experiencing obstacles, which then resulted in increased prices. This situation occurred in energy commodities, including coal, which was recorded to have reached the highest price in October 2021, reaching four times the average price in 2020. In addition, the re-imposition of the social restriction policy occurred in the second half of 2021 from July to August which presented certain obstacles to a number of industrial sectors.

In line with such condition, there was a recovery in the Indonesian economy in 2021 which can be measured through a number of indicators. Referring to official data from Statistics Indonesia (BPS), Indonesia's economic growth in 2021 was 3.69% or better than that of 2020 which contracted by 2.07%. In this growth, Indonesia through the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (RI) recorded state revenues reaching Rp2,003.1 trillion or 114.9% of the 2021 APBN target. Tax revenue in 2021 was Rp1,546.5 trillion or has reached the pre-pandemic level in 2019 which amounted to Rp1,546.1 trillion. Another indicator that can be used to measure Indonesia's economic recovery is the trade balance in 2021, which has a surplus of US\$35.34 billion or higher than that of 2020 at US\$21.74 billion.

“

Perseroan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan aktivitas operasional yang berlangsung pada 3 (tiga) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang dimiliki, yaitu PLTA 7,4 MW Cikopo, PLTA 10 MW Tomasa, serta PLTA 10 MW Yaentu.

The Company carries out business activities based on operational activities that take place at 3 (three) Hydro Powerplants (HPP), namely 7.4 MW Cikopo HPP, 10 MW Tomasa HPP, and 10 MW Yaentu HPP.

”



TINJAUAN INDUSTRI

Mengacu pada BPS, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,55% dibanding tahun sebelumnya, atau berada di atas persentase pertumbuhan ekonomi yang sebesar 3,69%. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan konsumsi listrik masyarakat Indonesia, tercermin pada pertumbuhan penjualan listrik PT PLN (Persero) sebesar 5,08% secara tahunan. Di tengah situasi tersebut, Indonesia mencatatkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) mencapai 11,5% atau setara 168,7 juta barel setara minyak (MBOE) pada akhir

INDUSTRY OVERVIEW

Referring to BPS, the Electricity and Gas Procurement business field in 2021 grew by 5.55% compared to the previous year or was above the percentage of economic growth of 3.69%. This is in line with the increase in electricity consumption of the Indonesian people as reflected in the growth of electricity sales of PT PLN (Persero) at 5.08% on an annual basis. In the midst of this situation, Indonesia recorded a mix of New Renewable Energy (EBT) reaching 11.5% or equivalent to 168.7 million barrels of oil equivalent (MBOE) at the end of 2021, based on data from the Ministry of Energy and Mineral

tahun 2021, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Catatan tersebut sekaligus memperlihatkan peningkatan baruan EBT dari tahun 2020 yang 11,2% atau setara 163,2 MBOE, sebagai indikator positif penggunaan EBT pada industri ketenagalistrikan di Indonesia per tahun 2021.

TINJAUAN OPERASIONAL

Arkora Hydro memiliki dan mengembangkan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) aliran sungai langsung (*run-of-river*) yang beroperasi di wilayah Indonesia. PLTA aliran sungai langsung merupakan jenis pembangkit listrik yang hanya memerlukan sedikit atau tanpa penyimpanan air. Hingga 31 Desember 2021, Perseroan telah mengoperasikan pembangkit dengan kapasitas 15,4 MW. Selain itu Perseroan juga memiliki *pipeline projects* dengan total kapasitas sebesar 107,7 MW. Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan portofolio pembangkit listrik air di Indonesia dengan cara organik dan akuisisi.

Uraian mengenai kapasitas produksi Perseroan di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kapasitas Produksi

Perseroan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan aktivitas operasional yang berlangsung pada 2 (dua) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang dimiliki, yaitu PLTA 7,4 MW Cikopo, dan PLTA 10 MW Tomasa, di samping memperoleh pendapatan non-operasional dari PLTA Yaentu serta komponen lainnya. Untuk tahun 2021, Perseroan mencatatkan total produksi listrik mencapai 95.740 MWh yang telah memenuhi target dalam Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021 dengan persentase 88,60%. Perincian kapasitas produksi dari masing-masing PLTA di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Resources (ESDM). Such record also shows a new increase in EBT from 2020 which was 11.2% or equivalent to 163.2 MBOE, as a positive indicator of the use of EBT in the electricity industry in Indonesia as of 2021.

OPERATIONAL OVERVIEW

Arkora Hydro owns and develops a run-of-river Hydro Powerplant (HPP) facility operating in the territory of Indonesia. Run-of-river HPP is a type of power plant that requires little to no water storage. As of December 31, 2021, the Company has operated a power plant with a capacity of 15.4 MW. In addition, the Company also has pipeline projects with a total capacity of 107.7 MW. The Company is committed to continuing to develop its portfolio of hydropower plants in Indonesia by organic means and acquisitions.

Description of the Company's production capacity in 2021 is as follows:

Production Capacity

The Company carries out business activities based on operational activities that take place at 2 (two) Hydro Powerplants (HPP), namely 7.4 MW Cikopo HPP, and 10 MW Tomasa HPP. In addition to generating non-operating revenue from Yaentu HPP and other component. For 2021, the Company recorded total electricity production at 95,740 MWh which has met the target in the 2021 Company Work Plan and Budget (RKAP) with a percentage of 88.60%. Details of the production capacity of each HPP in 2021 can be seen in the table below:

Uraian / Description	Satuan / Unit	Realisasi 2021 / 2021 Realization	Realisasi 2020 / 2020 Realization		RKAP 2021 / 2021 RKAP	
			Nominal / Nominal	Persentase Perubahan (%) / Change Percentage (%)	Nominal / Nominal	Persentase Perubahan (%) / Change Percentage (%)
Segmen Operasi / Operating Segment						
PLTA 7,4 MW Cikopo	kWh	43.115.392	36.857.136	16,98	41.927.800	102,83
PLTA 10 MW Tomasa	kWh	52.623.032	40.696.873	29,30	66.131.997	79,57
Jumlah / Total		95.738.424	77.554.009	23,45	108.059.797	88,60

TINJAUAN PER SEGMENT OPERASI

Segmen Operasi PLTA 7,4 MW Cikopo

Segmen operasi ini mengacu pada aktivitas produksi yang berlangsung pada PLTA Cikopo. PLTA Cikopo merupakan jenis PLTA aliran sungai langsung yang terletak di Garut, Jawa Barat, sekitar 220 km dari Jakarta. PLTA Cikopo telah beroperasi secara penuh pada Maret 2017 dengan kapasitas produksi sebesar 7,4 MW dan perkiraan *output* energi tahunan sebesar 52.000 MWh.

Sebagian besar wilayah tangkapan air PLTA Cikopo terletak di dalam area hutan lindung, sehingga memungkinkan terjadinya debit air yang lebih stabil sepanjang tahun. Debit yang telah ditentukan adalah 3,2 m³/detik dengan 264 m Net head.

Lokasi / Location	Jawa Barat / West Java
Kapasitas / Capacity	7,4 MW
Net Head	264 meter
Jenis Turbin / Turbine Type	Vertical Pelton Turbine
Manufaktur Turbin / Turbine Manufacture	Wasserkraft Volk AG

TINJAUAN KEUANGAN LAPORAN POSISI KEUANGAN

Uraian / Description	2021	2020	Perubahan / Change	
			Nominal / Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Aset Lancar / Current Assets	53.834.676	49.791.152	4.043.524	8,12
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	634.779.071	510.797.090	123.981.981	24,27
Jumlah Aset / Total Assets	688.613.747	560.588.242	128.025.505	22,84
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	167.047.861	18.123.235	148.924.626	821,73
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	350.540.265	421.750.185	(71.209.920)	(16,88)
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	517.588.126	439.873.420	77.714.706	17,67
Ekuitas / Equity	171.025.620	120.714.822	50.310.798	41,68

Aset

Per 31 Desember 2021, Perseroan membukukan perolehan nilai aset sejumlah Rp688,61 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar 22,84% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp560,59 miliar. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh progress pembangunan PLTA Koro Yaentu.

OVERVIEW PER OPERATING SEGMENT

7.4 MW Cikopo HPP Operation Segment

This operating segment refers to the production activities that take place at the Cikopo HPP. Cikopo HPP is a run-of-river HPP plant located in Garut, West Java, about 220 km from Jakarta. The Cikopo HPP was fully operational in March 2017 with a production capacity of 7.4 MW and an estimated annual energy output of 52,000 MWh.

Most of the water catchment areas of the Cikopo HPP are located within a protected forest area, thus allowing for a more stable water discharge throughout the year. The predetermined discharge is 3.2 m³/s with 264 m Net head.

FINANCIAL OVERVIEW STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Dalam ribuan rupiah / In thousands of rupiah

Assets

The Company's asset as of December 31, 2021 amounted to Rp688.61 billion or an increase of 22.84% compared to the previous year at Rp560.59 billion. Such increase was influenced by the progress of Koro Yaentu HPP development.

Aset Lancar

Aset lancar Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sejumlah Rp53,83 miliar, atau meningkat sebesar 8,12% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp49,79 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan piutang usaha sebesar Rp5,9 miliar.

Aset Tidak Lancar

Perseroan mencatatkan perolehan aset tidak lancar untuk tahun 2021 sejumlah Rp634,78 miliar, atau meningkat dengan persentase 24,27% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp510,80 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan finansial aset atas pembangunan PLTA Koro Yaentu.

Liabilitas

Per 31 Desember 2021, Perseroan membukukan nilai liabilitas sejumlah Rp517,59 miliar, atau meningkat sebesar 17,67% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp439,87 miliar. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan bunga pinjaman kepada pihak berelasi.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun 2021 adalah sejumlah Rp167,05 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar 821,73% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp18,12 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya pemindahan alokasi pinjaman jangka panjang ke jangka pendek yang akan dilunasi pada tahun 2022.

Liabilitas Jangka Panjang

Perseroan membukukan liabilitas jangka panjang di tahun 2021 sejumlah Rp350,54 miliar, atau mengalami penurunan sebesar 16,88% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp421.75 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pemindahan alokasi pinjaman jangka panjang ke jangka pendek yang akan dilunasi pada tahun 2022.

Ekuitas

Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sejumlah Rp171,03 miliar, atau meningkat dibanding tahun sebelumnya dengan persentase 41,68%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya peningkatan saldo laba ditahan.

Current Assets

The Company's current assets as of December 31, 2021 amounted to Rp53.83 billion, an increase of 8.12% compared to the previous year at Rp49.79 billion. Such increase was due to increase in trade accounts by Rp5.9 billion.

Non-Current Assets

The Company's non-current assets in 2021 amounted to Rp634.78 billion or an increase by 24.27% compared to the previous year at Rp510.80 billion. Such increase was due to increase in financial assets on Koro Yaentu HPP development.

Liabilities

The Company's liabilities as of December 31, 2021 amounted to Rp517.59 billion or an increase of 17.67% compared to the previous year at Rp439.87 billion. Such increase was influenced by increase in loan to related parties

Current Liabilities

The Company's current liabilities in 2021 amounted to Rp167.05 billion or an increase of 821.73% compared to the previous year at Rp18.12 billion. Such increase was due to transfer of allocation of long-term loans to short-term loans that will be paid off in 2022.

Non-Current Liabilities

The Company's non-current liabilities in 2021 amounted to Rp350.54 billion or decreased by 16.88% compared to the previous year at Rp421.75 billion. Such decrease was due to transfer of allocation of long-term loans to short-term loans that will be paid off in 2022.

Equity

The Company's equity as of 31 December 2021 amounted to Rp171.03 billion, an increase compared to the previous year by 41.68%. Such increase was influenced by increase in retained earnings.

LAPORAN LABA-RUGI

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

Dalam ribuan rupiah / In thousands of rupiah

Uraian / Description	2021	2020	Perubahan / Change	
			Nominal / Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Pendapatan / Revenues	198.393.420	52.094.112	146.299.308	280,84
Beban Pokok Pendapatan / Cost of Revenues	(89.276.247)	(22.944.234)	(66.332.013)	289,10
Laba Kotor / Gross Profit	109.117.174	29.149.878	79.967.296	274,33
Laba (Rugi) Sebelum Pajak / Profit (Loss) Before Tax	75.470.963	(25.834.511)	101.305.474	(392,13)
Manfaat (Beban) Pajak / Tax Benefit (Expenses)	(25.740.620)	2.872.939	(28.613.559)	(995,97)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Net Profit (Loss) for the Year	49.730.343	(22.961.572)	72.691.915	(316,58)
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Income (Loss) for the Year	50.310.798	(21.020.822)	71.331.620	(339,34)
Laba (Rugi) Per Saham / Earnings (Loss) per Share	17	(8)	25	(312,50)

Pendapatan

Untuk tahun 2021, Perseroan mencatatkan perolehan pendapatan sejumlah Rp198,39 miliar, atau meningkat dengan persentase 280,84% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp52,09 miliar. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya tambahan pendapatan konstruksi.

Beban Pokok Pendapatan

Perseroan membukukan beban pokok pendapatan di tahun 2021 sejumlah Rp89,28 miliar, atau meningkat dengan persentase 289,10% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp22,94 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh beban pokok atas progres konstruksi PLTA Koro Yaentu yang meningkat.

Laba Kotor

Laba kotor Perseroan untuk tahun 2021 adalah sejumlah Rp109,11 miliar, atau meningkat dengan persentase 274,33% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp29,15 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan persentase COGS lebih kecil daripada kenaikan persentase pendapatan.

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

Laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun 2021 adalah sejumlah Rp49,73 miliar, mengalami perubahan dari perolehan rugi bersih tahun berjalan pada tahun sebelumnya yang sejumlah Rp22,96 miliar. Perolehan laba bersih tersebut antara lain dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan dan penurunan beban keuangan.

Revenues

The Company's revenues in 2021 amounted to Rp198.39 billion or an increase of 280.84% compared to the previous year at Rp52.09 billion. Such increase was influenced by increase in construction income.

Cost of Revenues

The Company's cost of revenues in 2021 amounted to Rp89.28 billion or an increase of 289.10% compared to the previous year at Rp22.94 billion. Such decrease was due to increased cost of Koro Yaentu HPP construction progress.

Gross Profit

The Company's gross profit in 2021 amounted to Rp109.11 billion or an increase of 274.33% compared to the previous year at Rp29.15 billion. Such increase was due to lower COGS percentage increase compared to increase in revenue percentage.

Net Income (Loss) for the Year

The Company's net income for the year in 2021 amounted to Rp49.73 billion, a change from the net loss for the year in the previous year at Rp22.96 billion. The net profit was influenced by increase in revenues and decrease in finance cost.

LAPORAN ARUS KAS
STATEMENTS OF CASH FLOWS

Dalam ribuan rupiah / In thousands of rupiah

Uraian / Description	2021	2020	Perubahan / Change	
			Nominal / Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi / Cash from Operating Activities	25.773.152.902	10.927.191.881	14.845.961.021	135,86
Kas yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi / Cash Used in Investing Activities	(3.873.611.623)	(9.751.613.814)	5.878.002.191	(60,28)
Kas (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan / Cash (Used in) from Financing Activities	(31.046.534.882)	10.221.126.461	(41.267.661.343)	(403,75)
Kas dan Bank Akhir Tahun / Cash and Cash Equivalents at End of Year	16.168.494.520	25.315.488.123	(9.146.993.603)	(36,13)

Saldo kas dan bank akhir tahun Perseroan untuk tahun 2021 adalah sejumlah Rp16,16 miliar atau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dengan persentase 36,13%. Uraian lebih lanjut mengenai laporan arus kas Perseroan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi di tahun 2021 adalah sejumlah Rp25,77 triliun, atau mengalami peningkatan dengan persentase 135,86% dari tahun sebelumnya yang sejumlah Rp10,93 triliun. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan.

Kas dari Aktivitas Investasi

Untuk tahun 2021, Perseroan mencatatkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sejumlah Rp3,87 triliun, menurun dengan persentase 60,28% dibanding kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di tahun sebelumnya yang sejumlah Rp9,75 triliun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya penambahan pembelian aset tetap.

Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan Perseroan untuk aktivitas pendanaan di tahun 2021 adalah sejumlah Rp31,05 triliun, atau mengalami perubahan dibanding kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan di tahun sebelumnya yang sejumlah Rp10,22 triliun. Perubahan tersebut disebabkan karena di tahun 2020 ada pencairan dana dari kreditur sedangkan di tahun 2021 Perseroan tidak mendapatkan pencairan dana.

The Company's cash and cash equivalents at end of year in 2021 amounted to Rp16.16 billion or decreased compared to the previous year by 36.13%. Further description of the Company's cash flow statement for 2021 is as follows:

Cash from Operating Activities

The Company's net cash obtained from operating activities in 2021 amounted to Rp25.77 trillion or an increase of 135.86% from the previous year at Rp10.93 trillion. Such increase was influenced by increased revenues.

Cash from Investing Activities

The Company's net cash used for investing activities in 2021 amounted to Rp3.87 trillion, a decrease of 60.28% compared to net cash used for investing activities in the previous year at Rp9.75 trillion. Such decrease was influenced by the absence of fixed assets purchase.

Cash from Financing Activities

The net cash used by the Company for financing activities in 2021 amounted to Rp31.05 trillion, or a change compared to the net cash obtained from financing activities in the previous year at Rp10.22 trillion. Such change was because in 2020 there was a disbursement of funds from creditors while in 2021 the Company did not get a disbursement of funds.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTABILITAS PIUTANG

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan Perseroan dalam membayar utang-utang yang dimiliki diukur dengan menghitung rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, sedangkan rasio solvabilitas merupakan perhitungan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Uraian mengenai perhitungan kedua rasio tersebut adalah sebagai berikut.

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas mengacu pada rasio lancar, dihitung dengan membandingkan nilai aset lancar dengan liabilitas jangka pendek yang dimiliki Perseroan. Untuk tahun 2021, Perseroan memiliki rasio lancar sebesar 31,16% atau tercatat menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 274,74%. Meski demikian, hal tersebut tetap memperlihatkan kemampuan yang terjaga dari Perseroan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimiliki.

Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas diukur dengan menghitung rasio perbandingan antara liabilitas dan ekuitas (*Debt to Equity Ratio/DER*) serta perbandingan antara liabilitas dan aset (*Debt to Asset Ratio/DAR*). Untuk tahun 2021, Perseroan mencatatkan DER sebesar 3,05x, atau lebih kecil dibanding DER pada tahun sebelumnya yang sebesar 3,64x. Sementara itu, DAR Perseroan di tahun 2021 adalah sebesar 0,75x atau sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 0,78x. Hal tersebut memperlihatkan kemampuan Perseroan pada tahun 2021 yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka panjang dibanding tahun 2020.

Tingkat Kolektabilitas Piutang

Tingkat kolektabilitas piutang mengacu pada durasi pengumpulan piutang oleh Perseroan dalam satu periode tertentu. Untuk tahun 2021, pengumpulan piutang Perseroan adalah 25 hari, atau tercatat sama dibanding pengumpulan di tahun sebelumnya yang juga 25 hari. Hal tersebut sekaligus memperlihatkan kemampuan Perseroan yang terjaga dalam mempertahankan tingkat kolektabilitas piutang yang dimiliki.

SOLENCY AND COLLECTABILITY RATE

Solvency

The Company's ability to pay its debts is measured by calculating the liquidity ratio and solvency ratio. The liquidity ratio is a calculation used to measure the ability to meet short-term obligations, while the solvency ratio is a calculation to measure the ability to meet long-term obligations. The description of the calculation of the two ratios is as follows.

Liquidity Ratio

The liquidity ratio refers to the current ratio, calculated by comparing the value of current assets with the current liabilities of the Company. The Company's current ratio in 2021 was 31.16% or a decrease compared to the previous year at 274.74%. However, this still shows the maintained ability of the Company to meet its short-term obligations.

Solvency Ratio

The solvency ratio is measured by calculating the ratio between liabilities and equity (*Debt to Equity Ratio/DER*) and the ratio between liabilities and assets (*Debt to Asset Ratio/DAR*). The Company's DER in 2021 was 3.05x or smaller than the DER of the previous year at 3.64x. Meanwhile, the Company's DAR in 2021 was 0.75x or slightly decreased compared to the previous year at 0.78x. This shows the Company's good capability to meet its long-term obligations in 2021 compared to 2020.

Collectability Rate

Collectability rate refers to the duration of collection of receivables by the Company in a certain period. The collection of the Company's receivables in 2021 was 25 days or the same as collection period in the previous year at 25 days. This also shows the Company's ability to maintain the collectability of its receivables.

RASIO-RASIO KEUANGAN PERUSAHAAN

Rasio-rasio keuangan Perseroan untuk tahun 2021 beserta perbandingannya selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Uraian / Description	2021	2020	2019
Rasio Usaha / Business Ratio			
Gross Profit Margin	55,32%	55,96%	34,24%
Return on Asset	7,19%	-4,10%	-1,61%
Return on Equity	29,07%	-19,02%	-6,08%
Rasio Likuiditas / Liquidity Ratio			
Rasio Lancar / Current Ratio	31,16%	274,74%	46,08%
Rasio Solvabilitas / Solvency Ratio			
Liabilitas terhadap Aset / Debt to Asset Ratio	0,75x	0,78x	0,73x
Liabilitas terhadap Ekuitas / Debt to Equity Ratio	3,05x	3,64x	2,77x

COMPANY FINANCIAL RATIOS

The Company's financial ratios for 2021 and their comparisons for the last 3 (three) years are as follows:

STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN

CAPITAL STRUCTURE

Dalam ribuan rupiah / In thousands of rupiah

Uraian / Description	2021		2020	
	Nominal / Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)	Nominal / Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Liabilitas / Liabilities	517.588.126	75,16	439.873.420	78,47
Ekuitas / Equity	171.025.620	24,84	120.714.822	21,53
Aset / Assets	688.613.747	100	560.588.242	100

Struktur modal Perseroan merujuk pada perbandingan antara nilai liabilitas dan ekuitas pada periode tertentu. Perubahan struktur modal dari satu periode menuju periode berikutnya dapat menimbulkan pengaruh terhadap keberlangsungan serta hasil usaha Perseroan, yang kemudian berdampak terhadap nilai manfaat yang diberikan kepada pemegang saham ataupun pemangku kepentingan.

The Company's capital structure refers to the ratio between the value of liabilities and equity in a certain period. Changes in the capital structure from one period to the next period can have an impact on the sustainability and results of the Company's operations, which in turn has an impact on the value of benefits provided to shareholders or stakeholders.

Perseroan senantiasa menjalankan pengelolaan terhadap struktur modal yang dimiliki dengan tujuan untuk menciptakan dukungan yang kuat dan optimal bagi keberlangsungan usaha serta penyaluran nilai manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

The Company always manages its capital structure with the aim of creating strong and optimal support for business continuity and distribution of value benefits for shareholders and stakeholders.

Per 31 Desember 2021, struktur modal Perseroan terdiri atas nilai liabilitas dan ekuitas dengan persentase masing-masing sebesar 75,16% dan 24,84% terhadap nilai aset. Struktur tersebut memperlihatkan perubahan dibanding struktur pada tahun sebelumnya, yang terdiri atas 78,47% liabilitas dan 21,53% ekuitas. Secara umum, persentase liabilitas dan ekuitas Perseroan di tahun 2021 menunjukkan bahwa Perseroan tetap memiliki struktur modal yang kuat.

The Company's capital structure as of December 31, 2021 consisted of 75.16% liabilities and 24.84% equity of asset value. This structure shows a change compared to the structure in the previous year, which consisted of 78.47% liabilities and 21.53% equity. In general, the percentage of the Company's liabilities and equity in 2021 shows that the Company still has a strong capital structure.

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Manajemen menjalankan pengelolaan terhadap struktur modal dengan memastikan Perseroan dapat mempertahankan keberlangsungan usaha serta memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham melalui optimalisasi saldo liabilitas dan ekuitas. Selain itu, manajemen secara berkala juga melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap struktur modal Perseroan. Sebagai bagian dari proses peninjauan itu, manajemen mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Untuk tahun 2021, manajemen menetapkan rasio utang terhadap ekuitas (*Debt to Equity/DER*) Perseroan tidak melebihi 3,5x. Perseroan telah memenuhi penetapan tersebut secara baik dengan DER di tahun 2021 terealisasi sebesar 3,05x.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG DAN MODAL

Di tahun 2021, Perseroan tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal yang baru selain yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Transaksi tersebut dilakukan menggunakan mata uang rupiah.

REALISASI INVESTASI BARANG DAN MODAL

Perseroan tercatat melakukan aktivitas investasi barang modal pada aset tetap yang terbagi menjadi nilai biaya perolehan dan akumulasi penyusutan. Nilai biaya perolehan aset tetap di tahun 2021 adalah sejumlah Rp3,01 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 215,77% dibanding tahun 2020, sedangkan nilai akumulasi penyusutan di tahun 2021 adalah sejumlah Rp8,39 miliar, atau meningkat sebesar 12,41% dibanding tahun 2020.

Perincian realisasi investasi barang modal oleh Perseroan di tahun 2021 beserta perbandingannya dengan realisasi di tahun 2020 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

The management manages its capital structure by ensuring that the Company can maintain business continuity and maximize returns to shareholders through optimization of debt and equity balance. In addition, the management periodically reviews and evaluates the Company's capital structure. As part of that review process, management considers the cost of capital and associated risks.

For 2021, management has determined that the Company's Debt to Equity Ratio (DER) did not exceed 3.5x. The Company has fulfilled this determination well with the DER in 2021 realized at 3.05x.

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL AND GOODS INVESTMENT

In 2021, the Company has no material commitments for new capital goods investments other than those that have been carried out in previous years. The transaction was carried out using rupiah currency.

REALIZATION OF GOODS AND CAPITAL INVESTMENT

The Company invested in capital goods in fixed assets which are divided into acquisition cost and accumulated depreciation. The acquisition cost of fixed assets in 2021 amounted to Rp3.01 billion or an increase of 215.77% compared to 2020, while the accumulated depreciation value in 2021 amounted to Rp8.39 billion, or an increase of 12.41% compared to that of 2020.

The details of the realization of capital goods investment by the Company in 2021 and its comparison with the realization in 2020 can be seen in the table below:

Dalam rupiah / In rupiah

Uraian / Description	2021	2020	Perubahan (%)
Biaya Perolehan / At Cost			
Pemilikan langsung / Direct acquisitions			
Peralatan / Equipment	30.106.270	-	-
Kendaraan / Vehicles	71.450.000	-	-
Turbin / Turbine	3.855.257.001	-	-
Pekerjaan dalam penyelesaian / Construction in Progress			

Uraian / Description	2021	2020	Perubahan (%)
Bangunan / Building	(951.678.000)	951.678.000	(200)
Jumlah / Total	3.005.135.271	951.678.000	215,77
Akumulasi penyusutan / Accumulated depreciation			
Pemilikan Langsung / Direct acquisitions			
Peralatan / Equipment	149.299.296	191.304.923	(21,96)
Kendaraan / Vehicles	178.478.973	174.091.665	2,52
Jaringan tengah menengah / Medium voltage transmission	1.090.430.429	366.348.305	197,65
Bangunan proyek / Project building	3.788.839.411	3.522.989.411	7,55
Turbin / Turbine	3.185.906.254	3.105.588.399	2,59
Aset sewa pembiayaan / Finance leased asset			
Kendaraan / Vehicles	-	105.851.632	(100)
Jumlah / Total	8.392.954.363	7.466.174.335	12,41

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Terdapat sejumlah hal material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan tahun buku 2021, dengan uraian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 12 tertanggal 4 Maret 2022 oleh Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan memutuskan antara lain untuk:
 - a. Menyetujui pengunduran diri seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan pelepasan dan pembebasan penuh kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tindakan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris (*acquit et de charge*) sepanjang tindakan-tindakan yang dilakukannya atas nama Perseroan termuat dalam laporan keuangan dan laporan tahunan Perseroan serta telah sesuai dengan: (i) kewenangannya masing-masing, (ii) ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan (iii) peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini;
 - b. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Sirkuler ini sampai penutupan RUPS Tahunan berikutnya. Susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

MATERIAL FACTS AND INFORMATION SUBSEQUENT TO ACCOUNTANT REPORT DATE

There were material information subsequent to accountant report date for 2021 fiscal year as follows:

1. Based on Circular Resolution of Shareholders in lieu of extraordinary meeting of shareholders of the Company that was notarized through Notarial Deed No. 21 dated March 4, 2022 of Sugih Haryati S.H, M.Kn., notary in Jakarta, the Company's stockholders, among other, agreed to:
 - a. Approve the resignation of all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners and provide full release and discharge to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners from actions conducted within their capacity as members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (*acquit et de charge*) so long as the actions conducted on behalf of the Company are reflected in the Company's financial statement and annual statement and have been in accordance with: (i) their respective authority, (ii) provisions of the Articles of Association of the Company, and (iii) prevailing laws and regulations, since the date of this Circular Resolution;
 - b. Approve the appointment of the new members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, from the effective date of this Circular Resolution until the subsequent Annual GMS. The composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are as follows:

Komisaris Utama : Arya Pradana Setiadharma
 Komisaris : Abhay Narayan Pande
 Komisaris : Indarto
 Direktur Utama : Aldo Henry Artoko
 Direktur : Ismu Nugroho
 Direktur : Ricky Hartono

Jabatan Komisaris Independen mulai berlaku setelah saham-saham Perseroan tercatat di bursa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang

Pasar Modal dan peraturan bursa efek di mana saham Perseroan dicatitkan.

- c. Menyetujui pemecahan nilai saham dari sebelumnya sebesar Rp50,- per lembar saham menjadi sebesar Rp25,- per lembar saham.
- d. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan Perseroan serta menyesuaikan kegiatan usaha utama dan penunjang Perusahaan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- e. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI), menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia, serta mencatatkan saham-saham tersebut dalam daftar pemegang saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek Perusahaan.
- f. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
 - Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Arkora Hydro Tbk.
 - Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perusahaan paling banyak 773.200.000 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu) saham baru atau 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan (Saham Baru) melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dengan harga dan jumlah saham yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan suara bulat Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan

President Commissioner : Arya Pradana Setiadharma
 Commissioner : Abhay Narayan Pande
 Commissioner : Indarto
 President Director : Aldo Henry Artoko
 Director : Ismu Nugroho
 Director : Ricky Hartono

The role of Independent Commissioner shall be effective after shares of the Company is listed in the stock exchange in accordance with Capital Market prevailing laws and regulation and stock exchange regulation where shares of the Company is listed.

- c. Approve the stock split from the previous amount of Rp 50 (fifty Rupiah) per share to Rp25 (twenty-five Rupiah) per share.
- d. Approve changes in the Company's purposes and objectives and adjust the Company's main and supporting business activities in accordance with the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics No. 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields.
- e. Approve the Company's plan to conduct Initial Public Offering and list such the Company shares at PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), approve to list the Company's shares in Collective Custody that is conducted according to prevailing Capital Market laws and regulations, specifically Kustodian Sentral Efek Indonesia Regulations, as well as to list such shares in the Register of Shareholders of the Company to the Company's Securities Administration Bureau.
- f. Approve in relation to the Initial Public Offering:
 - The change of status of the Company form a private company to a public company, and approve change of the Company's name to PT Arkora Hydro Tbk;
 - The issuance of reserved shares of the Company at a maximum of 773,200,000 (seven hundred seventy three million two hundred thousand) new shares or 25% (twenty five percent) of the entire issued and paidup capital of the Company ("New Shares") through the Initial Public Offering to the public at price and amount of shares determined by the Board of Directors of the Company and the unanimous vote of the Board of Commissioners by taking into account prevailing laws and regulation

- yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan mengesampingkan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum Perdana tersebut.
 - Pencatatan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh para Pemegang Saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada BEI, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- g. Menyetujui penyisihan laba bersih untuk cadangan Perusahaan, senilai Rp2.000.000.000,-, (dua miliar rupiah) atau setara dengan 3,45% (tiga koma empat lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
2. Pada tanggal 14 Maret 2022, Perseroan, PT Asripower Prima dan pemegang saham PT Asripower Prima menandatangani Perjanjian Pemesanan Saham Bersyarat, di mana Perseroan akan memesan dan mengambil bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh PT Asripower Prima dengan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh PT Asripower Prima dan para pemegang saham PT Asripower Prima dan disetujui oleh Perseroan. Jumlah saham baru yang akan diterbitkan oleh PT Asripower Prima adalah sebanyak 34.000 lembar saham atau sebesar 54,85% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor PT Asripower Prima setelah penerbitan saham baru dengan nilai sebesar Rp34.000.000.000,-.
3. Pada tanggal 24 Maret 2022, PT Arkora Energi Baru, entitas anak, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan kapasitas 2 x 2,7 MW. Perjanjian ini berlaku selama 25 tahun sejak *Commercial Operating Date* (COD).
- including Capital Market regulations and Stock Exchange Regulations that is applicable where the Company's shares are listed.
- In relation to such decision, the Shareholders of the Company hereby further approve and states to waive their pre-emptive right to purchase the new shares to be sold in such Initial Public Offering.
 - The listing of all Company shares after the Initial Public Offering over shares offered and sold to the public through the capital market, as well as shares that are owned by the Shareholders (other than public shareholders) of the Company to BEI, as well as to approve registration of shares of the Company in Collective Custody that is conducted in accordance with prevailing Capital Market laws and regulations, specifically Kustodian Sentral Efek Indonesia Regulation.
- g. Approve the net profit allowance for the Company's reserve, in the amount of Rp 2,000,000,000 (two billion Rupiah) or equivalent to 3.45% (three point four five percent) of the total issued and paid-up capital of the Company;
2. On March 14, 2022, the Company, PT Asripower Prima and shareholders of PT Asripower Prima signed a Conditional Share Subscription Agreement, in which the Company will subscribe new shares to be issued by the PT Asripower Prima with several prerequisites that must be met by PT Asripower Prima and the shareholders of PT Asripower Prima and approved by the Company. The number of new shares to be issued by PT Asripower Prima is 34,000 shares or 54.85% of the total issued and paid-up capital of PT Asripower Prima after the issuance of new shares with a value of Rp 34,000,000,000.
3. On March 24, 2022, PT Arkora Energi Baru, a subsidiary, and PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with with capacity of 2 x 2.7 MW. The agreement is valid for 25 years from Commercial Operating Date (COD).

4. Pada tanggal 5 April 2022, IIF selaku pemberi pinjaman berjangka telah memberikan persetujuan penghapusan pembatasan pembayaran dividen Perseroan dan penghapusan pembatasan perubahan struktur permodalan Perseroan dengan syarat bahwa ABI dan ACEI secara bersama-sama tetap menjaga kepemilikannya secara langsung dalam Perusahaan lebih dari 50% dari jumlah saham Perseroan.

Pada tanggal 27 April 2022, IIF selaku pemberi pinjaman berjangka telah memberikan persetujuan pelepasan jaminan atas gadai saham Perseroan tanpa syarat apa pun. Pada tanggal 25 Mei 2022, IIF selaku pemberi pinjaman berjangka telah memberikan persetujuan penghapusan pembatasan pembayaran dividen ASS dan AHS.

5. Pada tanggal 28 April 2022, seluruh saldo piutang atas setoran modal entitas anak telah diterima pelunasannya dari Aldo Henry Artoko, Arya Pradana Setiadharna, dan Ardi Dwinanta Setiadharna.
6. Pada tanggal 24 Mei 2022, ACEI, ABI, dan Perseroan setuju untuk memperpanjang jatuh tempo surat-surat utang Tahap 1 menjadi 15 Juli 2022.
7. Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memperoleh pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam suratnya No. S-117/D.04/2022 untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 607.486.000 saham (20,74% dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham) dengan harga penawaran Rp300,- per saham. Pada tanggal 8 Juli 2022, Perseroan mendapatkan persetujuan pencatatan efek di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dari Direksi BEI.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan melaksanakan kebijakan pembagian dividen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun buku, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh ditambah cadangan wajib Perseroan.

4. On April 5, 2022, IIF as the lender of term loan (Note 15) has approved the removal of restriction on the Company's dividend payment and the removal of restriction on changes to the Company's capital structure on the condition that ABI and ACEI jointly maintain their direct ownership in the Company of more than 50 % of the total shares of the Company.

On April 27, 2022, IFF as lender of term loan has approved to release the collateral for the pledge of the Company's share without any condition.

On May 25, 2022, IIF as lender of term loan has approved the removal of restriction on the ASS and AHS' dividend payment.

5. As of April 28, 2022, all outstanding receivable for unpaid share capital to subsidiaries (Note 24b) have been received from Aldo Henry Artoko, Arya Pradana Setiadharna, and Ardi Diwnanta Setiadharna.
6. On May 24, 2022, ACEI, ABI and the Company agree to extend the maturity date of notes Phase 1 (Note 24c) to July 15, 2022.
7. On June 30, 2022, the Company received the effective statement from the Board of Commissioners of the Financial Services Authority ("OJK") in its Letter No. S117/D.04/2022 to conduct an Initial Public Offering of 607,486,000 shares (20,74% of total shares issued and fully paid-up after initial public offering) with exercise price of Rp 300 per share. On July 8, 2022, the Company received approval for the listing of its shares on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") from the Board of Directors of the IDX.

DIVIDEND POLICY

The Company implements a dividend distribution policy in accordance with applicable laws and regulations, namely based on the decisions of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) or Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM). Prior to the end of the fiscal year, interim dividends can be distributed as long as it is permitted under the Company's Articles of Association and the distribution of interim dividends does not cause the Company's net assets to be less than the issued and fully paid capital plus the Company's mandatory reserves.

Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun buku yaitu ketika terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara bersama-sama untuk pengembalian yang dimaksud, jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) untuk masa yang akan datang, mulai tahun 2023 berdasarkan dari laba bersih 2022, dan apabila Perseroan telah memiliki saldo laba positif.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan RUPS Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- Laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau akan membayar dividen atau keduanya di masa yang akan datang.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

The distribution of the interim dividend is determined based on the decision of the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners. If after the end of the fiscal year when the interim dividend distribution occurs, the Company suffers a loss, then the interim dividend that has been distributed must be returned by the shareholders to the Company. The Board of Commissioners and the Board of Directors will be jointly responsible for the return in question, if the interim dividend is not returned by the shareholders.

After the Initial Public Offering, the Company intends to pay cash dividends (Rupiah) of a maximum of 30% (thirty percent) for the future, starting in 2023 based on 2022 net income, and if the Company has positive retained earnings.

With due regard to the approval of the Company's GMS, the Company's Board of Directors may, from time to time, change the Company's dividend distribution policy. In its policy, the Board of Directors of the Company may reduce the amount of dividends to be paid or not pay dividends at all.

Future dividend payments will depend on various factors, including:

- Retained earnings, operational and financial performance, financial condition, liquidity condition, future business prospects, cash needs, business opportunities; and
- Compliance with applicable laws and regulations.

There is no guarantee that the Company will be able to pay dividends or will pay dividends or both in the future.

Dividends will be paid in Rupiah. Shareholders on the recording date will have the right to dividends in full amount and are subject to income tax applicable in the taxation provisions in Indonesia. Dividends received by shareholders from outside Indonesia will be subject to income tax in accordance with tax provisions in Indonesia.

The new shareholders from the Public Offering will have the same and equal rights as the existed shareholders of the Company, including the right to receive dividends.

Hingga 31 Desember 2021, Perseroan belum melakukan pembayaran dividen.

As of December 31, 2021, the Company has not paid dividends.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2021, tidak terdapat transaksi material dengan benturan kepentingan yang dilakukan oleh Perseroan.

Transactions Containing Conflict of Interest

There were no material transactions with conflicts of interest carried out by the Company throughout 2021.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Transactions with Related Parties

Sifat Hubungan dan Transaksi

Informasi mengenai sifat relasi dan jenis transaksi pada transaksi dengan pihak afiliasi yang dilakukan Perseroan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nature of Relationship and Transactions

Information regarding the nature of the relationship and types of transactions in transactions with affiliated parties conducted by the Company in 2021 is as follows:

Pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Relasi / Relationship with Related Parties	Transaksi / Transaction
PT Arkora Bakti Indonesia (ABI)	Entitas induk terakhir dan pemegang saham Perusahaan / Ultimate shareholder and parent of the Company	Pemberi pinjaman / Loan
ACEI Singapore Holdings Private Ltd (ACEI)	Pemegang saham Perusahaan / Shareholder of the Company	Pemberi pinjaman / Loan
PT Arkora Indonesia	Pemegang saham PT Arkora Bakti Indonesia / Shareholder of PT Arkora Bakti Indonesia	Kontraktor Pembangkit Listrik Tenaga Air di AHS dan ASS, entitas anak. / Contractor of Hydro Powerplant at AHS and ASS, subsidiaries
Graha Sasra Aditya Zen	Direktur Utama dari GK, entitas anak / President Director of GK, a subsidiary	-
Aldo Henry Artoko, Arya Pradana Setiadharma, Ardi Dwinanta Setiadharma	Manajemen kunci Perusahaan / Key management personnel	-
Aldo Henry Artoko, Rene Adhibrata, Priska Ammiliha	Pemilik saham PT Arkora Indonesia / Shareholders of PT Arkora Indonesia	Pemilik aset tertentu yang dijadikan sebagai jaminan utang bank / The owner of certain assets pledged as collateral for bank loans

Nilai Transaksi

Nilai transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan Perseroan di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Transaction Value

The value of transactions with related parties carried out by the Company in 2021 can be seen in the following table:

Pihak Berelasi / Related Parties	Dalam rupiah / In rupiah	
	2021	2020
Piutang lain-lain / Other Accounts Receivable		
Aldo Henry Artoko	181.000.000	181.000.000
Arya Pradana Setiadharma	80.000.000	80.000.000
Ardi Dwinanta Setiadharma	80.000.000	80.000.000
Lainnya / Others	2.671.988	-
Jumlah / Total	343.671.988	341.000.000

Pihak Berelasi / Related Parties	2021	2020
Pinjaman dari pihak berelasi / Loan from related parties		
Pokok pinjaman / Principal loan		
ACEI	114.152.000.000	112.840.000.000
ABI	7.000.000.000	-
Akrua bunga / Accrued interest		
ACEI	90.062.086.060	58.935.808.808
ABI	118.333.333	-
Jumlah / Total	211.332.419.393	171.775.808.808

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI

Investasi pada Entitas Anak

Perseroan melakukan investasi pada entitas anak di tahun 2021 dengan perincian sebagai berikut:

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, AND RESTRUCTURING

Investment in Subsidiaries

The Company invested in subsidiaries in 2021 with the following details:

Dalam rupiah / In rupiah

Entitas Anak / Subsidiaries	Domisili / Domicile	Jenis Usaha / Nature of Business	Persentase Pemilikan / Percentage of Ownership	Tahun Operasi Komersial / Start of Commercial Operations	Nominal / Nominal	
					2021	2020
PT Granif Konsultan	Jakarta	Jasa dan Pembangunan / Service and Development	75%	2011	600.000.000	600.000.000
PT Arkora Sulawesi Selatan	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik / Power plant	99%	2020	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Nosu Hydro	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik / Power plant	99%	Dalam tahap Pengembangan / Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Hydra Sulawesi	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik / Power plant	99%	Dalam tahap Pengembangan / Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Arkora Tomoni Hydro	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik / Power plant	99%	Dalam tahap Pengembangan / Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Arkora Luwu Timur Mandiri	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik / Power plant	99%	Dalam tahap Pengembangan / Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Arkora Hidro Pasifik	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik / Power plant	99%	Dalam tahap Pengembangan / Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Arkora Hydro Sulawesi	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik / Power plant	99%	Dalam tahap Pengembangan / Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000

Entitas Anak / Subsidiaries	Domisili / Domicile	Jenis Usaha / Nature of Business	Persentase Pemilikan / Percentage of Ownership	Tahun Operasi Komersial / Start of Commercial Operations	Nominal / Nominal	
					2021	2020
PT Arkora Hidronesia	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik / Power plant	99%	Dalam tahap Pengembangan / Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Arkora Sulawesi Tengah	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik / Power plant	99%	Dalam tahap Pengembangan / Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Sulawesi Hidro Mandiri	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik / Power plant	99%	Dalam tahap Pengembangan / Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Arkora Sulawesi Tenggara	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik / Power plant	99%	Dalam tahap Pengembangan / Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Arjuna Hidro	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik / Power plant	99%	Dalam tahap Pengembangan / Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Tenggara Hidro	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik / Power plant	99%	Dalam tahap Pengembangan / Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Arkora Energi Baru	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik / Power plant	99%	Dalam tahap Pengembangan / Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Arkora Atlantik	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik / Power plant	99%	Dalam tahap Pengembangan / Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Arkora Guna Nergi	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik / Power plant	99%	Dalam tahap Pengembangan / Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Arkora Hidro Tenggara	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik / Power plant	99%	Dalam tahap Pengembangan / Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Tirta Energi Lestari	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik / Power plant	99,60%	Dalam tahap Pengembangan / Under development stage	475.000.000	475.000.000
PT Arkora Tenaga Matahari	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik / Power plant	99%	Dalam tahap Pengembangan / Under development stage	1.249.000.000	-
Jumlah					35.984.000.000	34.735.000.000

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET TAHUN 2021 DAN PROYEKSI TAHUN 2022

Perseroan telah menetapkan target-target kinerja dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), baik RKAP tahun 2021 maupun 2022. Perbandingan realisasi kinerja Perseroan di tahun 2021 dengan target untuk tahun 2021 serta target yang ditetapkan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

COMPARISON BETWEEN REALIZED PERFORMANCE WITH 2021 TARGETS AND 2022 PROJECTIONS

The Company has set performance targets in the preparation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP), both 2021 and 2022 RKAP. Comparison of the Company's performance realization in 2021 with targets for 2021 and targets set for 2022 are as follows:

Dalam ribuan rupiah / In thousands of rupiah

Uraian / Description	Target dalam RKAP 2021 / Target in 2021 RKAP	Realisasi 2021 / Realization in 2021		Target dalam RKAP 2022 / Target in 2022 RKAP
		Nominal / Nominal	Pemenuhan (%) / Fulfilment (%)	
Pendapatan / Revenues	175.500.000	198.393.420	113,0	245.880.000
Beban Pokok Pendapatan / Cost of Revenues	(80.990.800)	(89.276.247)	110,2	(129.000.000)
Laba Kotor / Gross Profit	94.509.200	109.117.174	115,5	116.880.000
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Net Profit (Loss) for the Year	44.991.700	49.730.343	110,5	56.552.400
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Income (Loss) for the Year	45.505.200	50.310.798	110,6	54.093.600

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN

Pada tahun 2021, terdapat sejumlah perubahan peraturan perundang-undangan dengan pengaruh yang signifikan terhadap Perseroan. Perincian mengenai perubahan peraturan-perundang-undangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

CHANGES IN THE LAWS AND REGULATIONS WITH SIGNIFICANT EFFECT

There were a number of changes to laws and regulations with a significant impact on the Company in 2021. Details regarding changes to these laws and regulations can be seen in the following table:

No.	Peraturan Perundang-undangan / Laws and Regulations	Pengaruh terhadap Perseroan / Impact on the Company	Dampak terhadap Laporan Keuangan tahun 2021 / Impact on 2021 Financial Statement
1	Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) / Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP)	Identifikasi dan penyesuaian terkait penerapan perubahan undang-undang. / Identification and adjustments related to the implementation of changes to the law.	Tidak ada / None
2	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko / Government Regulation No. 5 of 2021 on Implementation of Risk-Based Licensing	Identifikasi dan penyesuaian terkait penerapan perubahan undang-undang. / Identification and adjustments related to the implementation of changes to the law.	Tidak ada / None
3	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan / Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. 7 of 2021 on Forestry Planning, Changes in Forest Area Designations and Changes in Forest Area Functions, and Use of Forest Areas	Identifikasi dan penyesuaian terkait penerapan perubahan undang-undang. / Identification and adjustments related to the implementation of changes to the law.	Tidak ada / None

No.	Peraturan Perundang-undangan / Laws and Regulations	Pengaruh terhadap Perseroan / Impact on the Company	Dampak terhadap Laporan Keuangan tahun 2021 / Impact on 2021 Financial Statement
4	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan / Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 11 of 2021 on the Implementation of Electricity Business	Identifikasi dan penyesuaian terkait penerapan perubahan undang-undang. / Identification and adjustments related to the implementation of changes to the law.	Tidak ada / None

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN

Dalam tahun berjalan, terdapat amandemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Penerapan atas PSAK revisi ini tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anak, serta tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.

- **Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 (Amandamen-amandemen atas PSAK 71 Instrumen Keuangan, PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 62 Kontrak Asuransi, dan PSAK 73 Sewa)**

Pada tahun lalu, amandemen Tahap 1 membahas permasalahan terkait Reformasi Acuan Suku Bunga - amandemen atas PSAK 71, PSAK 55, dan PSAK 60. Amandemen tersebut memodifikasi persyaratan akuntansi lindung nilai yang memperbolehkan akuntansi lindung nilai untuk dilanjutkan atas lindung nilai yang terdampak selama periode ketidakpastian sebelum item lindung nilai atau instrumen lindung nilai diubah sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga.

Amandemen Tahap 2 membahas permasalahan atas dampak dari transisi suku bunga referensi (IBOR) menjadi alternatif acuan suku bunga yang baru (juga direferensikan sebagai 'suku bunga bebas risiko atau RFRs) tanpa menyebabkan dampak akuntansi yang tidak memberikan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICY THAT SIGNIFICANTLY IMPACT THE COMPANY

In the current year, there are a number of amendments to PSAK effective for accounting period beginning on or after January 1, 2021. The adoption of these revised PSAK does not result in changes to the Group's accounting policies and has no material effect on the amounts reported for the current or prior years.

- **Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2 (Amendments to PSAK 71 Financial Instruments, PSAK 55 Financial Instruments: Recognition and Measurement, PSAK 60 Financial Instruments: Disclosures, PSAK 62 Insurance Contracts, and PSAK 73 Leases)**

In the prior year, Phase 1 amendments addressed issue related Interest Rate Benchmark Reform - Amendments to PSAK 71, PSAK 55 and PSAK 60. These amendments modify specific hedge accounting requirements to allow hedge accounting to continue for affected hedges during the period of uncertainty before the hedged items or hedging instruments are amended as a result of the interest rate benchmark reform.

Phase 2 amendments address issues of the effects of transitioning from interbank offered rates (IBOR) to alternative benchmark interest rates (also referred to as 'risk free rates' or RFRs) without giving rise to accounting impacts that would not provide useful information to users of financial statements.

ASPEK PEMASARAN

Strategi Pemasaran

Perseroan memahami bahwa pemasaran merupakan salah satu aspek yang secara mendasar penting dan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dan pengembangan usaha. Dengan berdasar pada pemahaman tersebut, Perseroan mengelola aspek pemasaran secara saksama serta terus-menerus disesuaikan dengan perkembangan kondisi pasar secara umum. Perseroan menentukan strategi-strategi pemasaran melalui proses analisis dan penelaahan terhadap faktor-faktor yang relevan, serta secara berkala melakukan evaluasi sebagai dasar pengembangan strategi mendatang.

Untuk tahun 2021, Perseroan telah menjalankan sejumlah strategi pemasaran meliputi upaya dalam menjaga tingkat pemenuhan berdasarkan kontrak kerja tahunan di samping upaya-upaya lain dalam menjaga tingkat kepuasan pelanggan utama Perseroan, yaitu PT PLN (Persero).

Pangsa Pasar

Hingga tahun 2021, pendapatan Perseroan diperoleh berdasarkan penjualan kepada PT PLN (Persero) di wilayah Indonesia, terdiri dari pendapatan jasa konstruksi dan penjualan listrik. Perseroan mengukur pangsa pasar yang dimiliki dengan cara menghitung besaran kontribusi pasokan listrik Perseroan kepada PT PLN (Persero), dibandingkan dengan keseluruhan pasokan listrik yang berasal dari PLTA. Berdasarkan cara tersebut, pangsa pasar Perseroan per tahun 2021 tercermin melalui perolehan total produksi listrik untuk periode tahun 2021, yaitu sebesar 95.740 MWh, yang sekaligus memperlihatkan signifikansi kontribusi Perseroan terhadap pemenuhan kebutuhan energi listrik PT PLN (Persero) dari sumber Energi Baru Terbarukan (EBT).

PROSPEK USAHA

Pemulihan situasi ekonomi yang terjadi di tahun 2021 diperkirakan akan mampu berlanjut meski secara terbatas di tahun 2022, seiring tantangan berupa hadirnya varian omicron Covid-19 di awal tahun serta ketegangan hingga konflik pada kawasan Eropa timur serta Asia Pasifik. Perkiraan pemulihan situasi ekonomi di tahun 2022 antara lain terlihat pada proyeksi *International Monetary Fund* (IMF) berupa pertumbuhan sebesar 3,6%, atau lebih rendah dibanding realisasi di tahun 2021 yang sebesar 6,1%. Negara-negara ekonomi besar dan berpengaruh, seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat

MARKETING ASPECT

Marketing Strategy

The Company understands that marketing is one aspect that is fundamentally important and has a significant effect on the success of business management and development. Based on this understanding, the Company manages marketing aspects carefully and is constantly adjusted to the development of general market conditions. The Company determines marketing strategies through a process of analysis and review of relevant factors, as well as periodically conducting evaluations as the basis for developing future strategies.

For 2021, the Company has implemented several marketing strategies including efforts to maintain compliance levels based on annual work contracts and other efforts to maintain the satisfaction level of the Company's main customer, namely PT PLN (Persero).

Market Share

As of 2021, the Company's revenue was generated based on sales to PT PLN (Persero) in the territory of Indonesia, consisting of revenue from construction services and electricity sales. The Company measures its market share by calculating the contribution of the Company's electricity supply to PT PLN (Persero), compared to the overall electricity supply from HPP. Based on this method, the Company's market share per 2021 was reflected through the acquisition of total electricity production for the period of 2021, which was 95,740 MWh, which also shows the significance of the Company's contribution to meeting the electricity needs of PT PLN (Persero) from New Renewable Energy (NRE) sources.

BUSINESS PROSPECT

The recovery of the economic situation in 2021 was expected to be able to continue, albeit on a limited basis in 2022, along with challenges in the form of the presence of the Covid-19 omicron variant at the beginning of the year and tensions to conflicts in the eastern Europe and Asia Pacific regions. The estimated recovery of the economic situation in 2022 can be seen in the projections of the International Monetary Fund (IMF) in the form of growth of 3.6%, or lower than the realization in 2021 which was 6.1%. Large and influential economies, such as the United States and the

Tiongkok (RRT) diproyeksi mampu tumbuh masing-masing sebesar 3,7% dan 4,4%, atau lebih rendah dibanding realisasi di tahun sebelumnya yang sebesar 5,7% dan 8,1%.

Seiring hal itu, perekonomian Indonesia diperkirakan akan mampu melanjutkan tren pemulihan secara lebih kuat dibanding tahun 2021. Hal tersebut antara lain dapat terlihat pada proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,2%, atau sejalan dengan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN 2022. Tren pemulihan diperkirakan terjadi dengan didukung penanganan pandemi oleh Pemerintah, berupa kelanjutan vaksinasi serta penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan target vaksinasi untuk mencapai tingkat kekebalan kelompok (*herd immunity*). Di samping itu, terdapat optimisme yang muncul dengan terpilihnya Indonesia untuk memimpin presidensi negara-negara *Group of 20* (G20), sebagai sentimen positif bagi perekonomian Indonesia di tahun 2021.

Industri ketenagalistrikan di Indonesia untuk tahun 2022 diperkirakan akan melanjutkan tren peningkatan pertumbuhan seperti pada tahun sebelumnya. Mengacu pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, pertumbuhan listrik Indonesia diproyeksi terealisasi sebesar 4,9% per tahun, dengan mempertimbangkan adanya penurunan *demand* pengaruh situasi pandemi Covid-19. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PLN terus mendorong tercapainya rasio elektrifikasi wilayah Indonesia mencapai 100% di tahun 2022, dari sebelumnya sebesar 99,2% per akhir tahun 2020. Di tengah situasi tersebut, bauran energi tahun 2021-2030 diproyeksi mampu dikembangkan hingga 23% pada tahun 2025 sesuai target Pemerintah, yang memperlihatkan potensi yang besar bagi Perseroan untuk berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik nasional.

Dengan memperhatikan proyeksi ekonomi tersebut, manajemen optimistis Perseroan memiliki prospek usaha yang kuat untuk tahun 2022. Kelanjutan situasi pemulihan ekonomi, baik pada skala global maupun nasional diharapkan dapat berperan sebagai kondisi eksternal yang berpengaruh bagi pencapaian kinerja Perseroan, sesuai target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2022. Manajemen melalui fungsi-fungsi terkait memastikan bahwa Perseroan memiliki sumber daya yang memadai, guna membawa Perseroan menghadapi tantangan dan peluang yang ada di tahun 2022 dengan pencapaian yang optimal.

People's Republic of China (PRC) are projected to grow by 3.7% and 4.4%, respectively, or lower than the realization in the previous year of 5.7% and 8.1%.

Along with this, the Indonesian economy is expected to be able to continue the trend of recovery stronger than in 2021. This can be seen, among others, in the World Bank projection which estimates that the Indonesian economy will be able to grow by 5.2%, or in line with the basic assumptions used in the 2022 APBN. The recovery trend is expected to occur with the support of the government's handling of the pandemic in the form of continued vaccination and the distribution of the National Economic Recovery (PEN) program, with vaccination targets to achieve herd immunity. In addition, there is optimism that emerged with the election of Indonesia to lead the presidency of the Group of 20 (G20) countries, as a positive sentiment for the Indonesian economy in 2021.

The electricity industry in Indonesia for 2022 is expected to continue the trend of increasing growth as in the previous year. Referring to the PLN 2021-2030 Electricity Supply Business Plan (RUPTL), Indonesia's electricity growth is projected to be realized at 4.9% per year, taking into account the decline in demand due to the Covid-19 pandemic situation. The Directorate General of Electricity and PLN continue to push for the electrification ratio of Indonesia to reach 100% in 2022, from 99.2% at the end of 2020. Amid this situation, the energy mix in 2021-2030 is projected to be able to be developed up to 23% by 2025 in line with the Government's target which shows great potential for the Company to contribute to meeting the national electrical energy needs.

Taking into account these economic projections, the management is optimistic that the Company has strong business prospects for 2022. The continuation of the economic recovery situation, both on a global and national scale, is expected to play a role as an external condition that affects the achievement of the Company's performance, according to the targets set out in the 2022 Company Work Plan and Budget (RKAP). Management through related functions ensures that the Company has adequate resources to bring the Company to face the challenges and opportunities that exist in 2022 with optimal achievements.

Halaman Ini Sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank



ARKORA HYDRO

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance



06

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan *sustainable*. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan untuk meningkatkan pencapaian usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan.

PT Arkora Hydro Tbk sebagai perusahaan terbuka yang bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik melalui sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang berasal dari aliran air (PLTA) menjunjung tinggi penerapan prinsip-prinsip GCG. Perusahaan memahami bahwa dengan menjalankan prinsip-prinsip GCG, Perseroan akan terhindar dari ketidakpastian dan risiko bisnis di masa mendatang, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal Perusahaan.

Penerapan prinsip GCG telah menjadi fondasi yang kuat bagi Perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Segala keputusan strategis yang dilakukan oleh Dewan Komisaris maupun Direksi selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip GCG berjalan efektif dan efisien, Perusahaan senantiasa memastikan bahwa seluruh insan PT Arkora Hydro turut menerapkan prinsip-prinsip GCG di dalam setiap kegiatan operasional Perusahaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, sistematis, dan komprehensif, Perusahaan akan tumbuh menjadi kuat, memiliki kemampuan daya saing yang tinggi dan berkelanjutan sehingga mampu untuk beradaptasi menghadapi berbagai tantangan dari lingkungan bisnis yang dinamis.

PT Arkora Hydro juga meyakini bahwa prinsip-prinsip GCG bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan Perusahaan dengan pemangku kepentingan. Pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip GCG dapat menjadi solusi yang

Good Corporate Governance (GCG) is a requirement to build a strong and sustainable company condition. Good Corporate Governance is the structure and process that is used and implemented by the Company's organs to improve business achievement and optimize the value of the Company for all stakeholders.

PT Arkora Hydro Tbk as a public company engaged in the field of power generation through New and Renewable Energy (NRE) sources from water flow (HPP) upholds the implementation of GCG principles. The Company understands that the implementation of GCG principles will avoid uncertainty and business risks in the future, both caused by internal and external factors of the Company.

The implementation of GCG principles has become a strong foundation for the Company in facing the dynamic change in business environment. All strategic decisions made by the Board of Commissioners and the Board of Directors always take into account the principles of GCG, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

To support the effective and efficient implementation of GCG principles, the Company always ensures that all personnel of PT Arkora Hydro participate in implementing GCG principles in every operational activity of the Company. By implementing GCG principles consistently, systematically, and comprehensively, the Company will grow to be strong, have high competitiveness and sustainable capabilities so that it is able to adapt to the challenges of the dynamic business environment.

PT Arkora Hydro also believes that GCG principles aim to balance the interests of the Company and stakeholders. The implementation of GCG principles can be an effective and efficient solution so that the management of the Company

“

Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, sistematis, dan komprehensif, Perusahaan akan tumbuh menjadi kuat, memiliki kemampuan daya saing yang tinggi dan berkelanjutan sehingga mampu untuk beradaptasi menghadapi berbagai tantangan dari lingkungan bisnis yang dinamis.

By implementing GCG principles consistently, systematically, and comprehensively, the Company will grow to be strong, have high competitiveness and sustainable capabilities so that it is able to adapt to the challenges of the dynamic business environment.

”



efektif dan efisien sehingga pengelolaan Perusahaan dapat menjadi lebih transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Memahami hal itu, Perseroan selalu berupaya melakukan peningkatan kualitas penerapan praktik terbaik GCG secara terus menerus dengan melakukan pemutakhiran berbagai kebijakan, standar, pedoman, prosedur yang disesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keadaan lingkungan bisnis, serta perkembangan usaha dan kinerja Perusahaan

can become more transparent, professional, and accountable. Based on this understanding, the Company always strives to improve the quality of the implementation of GCG best practices by updating various policies, standards, guidelines, procedures adapted to changes in applicable laws and regulations, the state of the business environment, as well as business developments and Company performance.

PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA DI PERUSAHAAN

PT Arkora Hydro memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten, sistematis, dan berkelanjutan. Hal itu diwujudkan dengan pemenuhan perangkat kebijakan yang dapat mendukung secara sistematis penerapan dan penegakan Tata Kelola Perusahaan. Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, Perseroan berpedoman pada 5 (lima) prinsip dasar GCG, sebagai berikut:

1. Transparansi

Perseroan menjamin keterbukaan dalam mengenai pengambilan keputusan, kinerja Perusahaan, kondisi keuangan, dan informasi lain secara memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan dan tepat waktu serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tanpa mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia Perseroan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan Perusahaan secara tepat waktu, akurat dan dapat diakses oleh publik.

2. Akuntabilitas

Perusahaan bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan yang diambil dan memastikan pengelolaannya berjalan dengan baik, adil dan terukur sesuai dengan kepentingan Perseroan, Pemegang Saham, dan Pemangku Kepentingan.

3. Tanggung Jawab

Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertindak secara bertanggung jawab terkait seluruh kegiatan operasionalnya terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan.

4. Kemandirian

Perusahaan dikelola secara profesional dan bebas dari benturan kepentingan serta tanpa tekanan atau intervensi dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan serta prinsip korporasi yang sehat.

5. Keadilan

Perusahaan memastikan perlakuan yang setara dan adil dalam memenuhi hak Pemangku Kepentingan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE PRINCIPLES IN THE COMPANY

PT Arkora Hydro has a strong commitment to implementing Good Corporate Governance consistently, systematically and sustainably. This is realized by the fulfillment of policy instruments that can systematically support the implementation and enforcement of Good Corporate Governance. In implementing the principles of GCG, the Company refers to the 5 (five) basic principles of GCG, as follows:

1. Transparency

The Company ensures transparency in decision making, Company performance, financial condition, and other information that is adequate, clear, accurate, comparable and timely and easily accessible to stakeholders, without reducing the obligation to protect the Company's confidential information in accordance with the Company's policies and regulations in a timely, accurate and accessible manner to the public.

2. Accountability

The Company is responsible for all decisions and actions taken and ensures that their management runs properly, fairly and measurably in accordance with the interests of the Company, Shareholders and Stakeholders.

3. Responsibility

The Company carry out its business activities based on sound corporate principles, fulfillment of obligations to the Government in accordance with applicable laws and regulations, and act responsibly in relation to all of its operational activities towards society and the environment, so that the business can develop in a sustainable manner.

4. Independence

The Company is managed professionally and free from conflicts of interest and without pressure or intervention from any party that is not in accordance with the Company's Articles of Association, laws and regulations, and sound corporate principles.

5. Fairness

The Company ensures equal and fair treatment in fulfilling the rights of Stakeholders in accordance with the prevailing laws and regulations.

DASAR HUKUM PENERAPAN TATA KELOLA DI PERUSAHAAN

Penerapan GCG Perusahaan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* lainnya yang sesuai dan relevan dengan bidang usaha yang dijalankan.

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
7. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
9. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
10. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
11. Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik;
12. Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
13. Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
14. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Kerja Komite Audit;
15. Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
16. Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;

LEGAL BASIS FOR IMPLEMENTING CORPORATE GOVERNANCE

The implementation of the Company's GCG refers to several applicable laws and regulations as well as other best practices that are appropriate and relevant to the line of business being carried out.

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 on Disclosure of Public Information;
3. Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition;
4. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering;
5. Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 on Amendments to Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption;
6. Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition;
7. Law No. 8 of 1995 on the Capital Market;
8. Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company;
9. OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
10. OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;
11. OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public Companies;
12. OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 on Implementation of Public Company Governance Guidelines;
13. OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 on Additional Capital of Public Company by Granting Pre-emptive Rights;
14. OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Charter of the Audit Committee Work Committee;
15. OJK Regulation No. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter;
16. OJK Regulation No. 29/POJK.04/2016 on the Annual Report of Issuers or Public Companies;

17. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
18. Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
19. Peraturan OJK No. 41/POJK.04/20210 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik;
20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik;
21. Anggaran Dasar Perseroan.

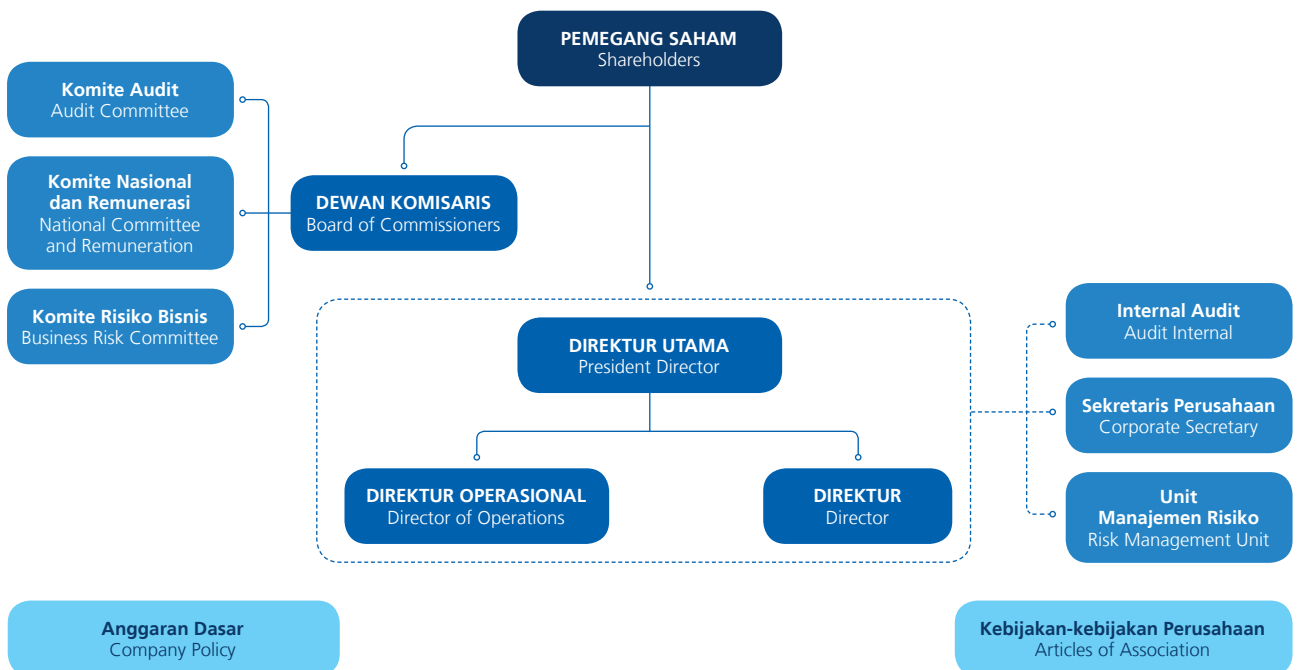
17. OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company;
18. OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies;
19. OJK Regulation No. 41/POJK.04/20210 on the Implementation of Electronic Public Offering of Equity Securities, Debt Securities and/or Sukuk;
20. Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 on the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies;
21. Company's Articles of Association.

STRUKTUR TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola Perusahaan PT Arkora Hydro Tbk mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas. Struktur umum Tata Kelola Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi yang berkedudukan sebagai organ utama dalam melakukan tugas-tugas pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha. Keseluruhan organ utama tersebut berperan dalam melaksanakan proses *check and balances* kegiatan usaha dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan secara adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

GOVERNANCE STRUCTURE

The Corporate Governance structure of PT Arkora Hydro Tbk refers to the Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. The general structure of Corporate Governance consists of the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors which are the main organs in carrying out the tasks of controlling and supervising business activities. All of these main organs play a role in carrying out the check and balances process for business activities that can be managed and accounted for fairly in accordance with applicable regulations.



PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam struktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memegang peranan sebagai organ tertinggi Perseroan yang menjadi sarana bagi para pemegang saham untuk menentukan keputusan penting yang dapat berdampak besar terhadap pengelolaan operasional Perseroan. RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mendapatkan hak yang dimilikinya dalam memperoleh keterangan yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan operasional Perusahaan sepanjang berhubungan dengan agenda acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan serta memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

Sepanjang tahun 2021 Perusahaan belum menyelenggarakan RUPS. Namun sebagai langkah awal penerapan GCG secara optimal, pada awal tahun 2022 di bulan Januari, PT Arkora Hydro Tbk telah melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan. Di dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan, Perusahaan menjalankan prosedur terbuka dengan mengambil keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Mekanisme Penyelenggaraan RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 di Jakarta. Pada pelaksanaan RUPS Tahunan, rapat dipimpin oleh Komisaris Perusahaan, lalu Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan pada setiap bahasan acara Rapat. Pimpinan Rapat atau Komisaris Utama menjawab atau menanggapi pertanyaan/catatan Pemegang Saham yang hadir. Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi selanjutnya dilakukan pemungutan suara dan hanya Pemegang Saham dan atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

General Meeting of Shareholders

In the structure of Good Corporate Governance, the General Meeting of Shareholders (GMS) plays a role as the highest organ of the Company which is a means for shareholders to determine important decisions that can have a major impact on the management of the Company's operations. The GMS is a forum for shareholders to obtain their rights in obtaining information related to the Company's business and operational activities as long as it is related to the agenda of the meeting and does not conflict with the interests of the Company and pays attention to the provisions of the Company's Articles of Association and laws and regulations.

Throughout 2021 the Company has not held a GMS. However, as a first step in optimally implementing GCG, in January 2021, PT Arkora Hydro Tbk held 1 (one) Annual GMS. In holding the Annual GMS, the Company carries out an open procedure by making meeting decisions based on deliberation for consensus between the Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

Annual GMS Mechanism

The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) was held on January 7, 2022 in Jakarta. At the Annual GMS, the meeting was chaired by the Company's Commissioner, then the Chairperson of the Meeting provided an opportunity for the Shareholders and/or their proxies to ask questions or respond to any discussion on the agenda of the Meeting. The Chairperson of the Meeting or the President Commissioner shall answer or respond to questions/notes of the present Shareholders. After all questions are answered and is responded to, then a vote will be held and only the Shareholders and or their legal proxies are entitled to cast votes.

Agenda dan Realisasi RUPS Tahunan

RUPS Tahunan untuk mengesahkan beberapa agenda yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2022 di Jakarta.

Annual GMS Agenda and Realization

The Annual GMS validated several agendas that was held on January 7, 2022 in Jakarta.

**Tabel Agenda dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun 2022 /
Table of Agenda and Decisions of the 2022 Annual GMS**

Tanggal / Date	Kehadiran / Attendance	Agenda dan Keputusan / Agenda and Resolutions	Realisasi / Realization
7 Januari 2022 / January 7, 2022	Komisaris Utama / President Commissioner: Arya Pradana Setiadharma Komisaris / Commissioner: Abhay Narayan Pande Komisaris Independen / Independent Commissioner: Drs. Indarto S.H Direktur Utama / President Commissioner: Aldo Henry Artoko Direktur / Director: Ricky Hartono Direktur Operasional / Operations Director: Ismu Nugroho	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pengesahan atas neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan serta laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang masing-masing berakhir pada: 31 Desember 2018, 31 Desember 2019, 31 Desember 2020. / Approved the validation of the Company's balance sheet and profit and loss statement as well as the Company's annual financial statements for the fiscal year ending on: December 31, 2018, December 31, 2019, December 31, 2020. Menyetujui laporan tahunan Perseroan terkait dengan pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk tahun buku yang masing-masing berakhir pada: 31 Desember 2018, 31 Desember 2019, 31 Desember 2020. / Approved the Company's annual report related to the management of the Company for the fiscal year ending on: December 31, 2018, December 31, 2019, December 31, 2020. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diterima pada tahun buku 2018, 2019, dan 2020. / Approved the determination of the use of the Company's net profit received in the 2018, 2019, and 2020 fiscal years. Menyetujui pemberian dispensasi kepada Direksi Perseroan atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2018 sampai dengan tahun 2020. / Approved the granting of dispensation to the Company's Board of Directors for the delay in holding the Annual GMS for the 2018 to 2020 fiscal years. Memberikan kuasa kepada masing-masing dan/atau setiap anggota Direksi Perseroan atau kuasanya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan dengan hak substitusi untuk, apabila diperlukan, untuk menghadap di hadapan Notaris publik dengan maksud menuangkan sebagian atau seluruh keputusan sirkuler ini dan dokumen lain yang terkait dalam bentuk akta notaris sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta menandatangani surat perjanjian atau dokumen serupa lainnya sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dimana syarat dan ketentuan dari dokumen tersebut dianggap dipenuhi oleh Direksi Perseroan, dan untuk melakukan apapun yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan sebagaimana disebutkan di atas. / Granted power of attorney to each and/or every member of the Board of Directors of the Company or their proxies either individually or jointly, and with the right of substitution to, if necessary, appear before a public Notary with the intention of stating part or all of this circular decision and other related documents in the form of a notarial deed in accordance with the applicable laws and regulations as well as signing a letter of agreement or other similar documents in connection with the aforementioned matters where the terms and conditions of the document are deemed fulfilled by the Company's Board of Directors, and to carry out whatever is required needed to achieve the objectives stated above. 	Telah terealisasi / Realized

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang memiliki tugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perusahaan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris yang diangkat merupakan orang yang memenuhi kriteria:

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Memiliki integritas dan dedikasi, memahami manajemen Perusahaan, memiliki pengetahuan di bidang usaha Perusahaan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme dan proses pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketetapan sebagai berikut:

1. Pengangkatan keanggotaan Dewan Komisaris dilakukan melalui mekanisme RUPS yang telah diatur sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020.
2. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is an organ of the Company that has the task of conducting general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association, providing advice to the Board of Directors, and ensuring that the Company implements GCG principles. The Board of Commissioners is responsible to the Shareholders in terms of supervising the policies of the Board of Directors on the Company's operations in general which refers to the business plan that has been approved by the Board of Commissioners and Shareholders, as well as ensuring compliance with all applicable laws and regulations.

Criteria for Members of the Board of Commissioners

As stated in the Company's Articles of Association, the appointed members of the Board of Commissioners are persons who meet the following criteria:

1. The Board of Commissioners consists of at least 2 (two) members of the Board of Commissioners, one of whom is appointed as the President Commissioner, if necessary one or more Vice President Commissioners can be appointed, and the other is appointed as Commissioner. The Company is required to have an Independent Commissioner in accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.
2. Those who can become members of the Board of Commissioners are Indonesian Citizens and/or Foreign Citizens who meet the requirements in accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.
3. Have integrity and dedication, understand the Company's management, have knowledge in the Company's business fields, and can provide sufficient time to carry out their duties and other requirements based on the applicable laws and regulations.

The mechanism and process for the appointment of the Board of Commissioners is carried out by complying the following provisions:

1. The appointment of the membership of the Board of Commissioners is carried out through the GMS mechanism which has been regulated in accordance with the Company's Articles of Association Deed No. 11 dated September 4, 2020.
2. The appointment of members of the Board of Commissioners does not coincide with the appointment of members of the Board of Directors.

Mekanisme Pemberhentian Dewan Komisaris

Pemberhentian keanggotaan Dewan Komisaris dilakukan melalui mekanisme RUPS yang telah diatur sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020.

Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris PT Arkora Hydro Tbk per 31 Desember 2021 berdasarkan Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Periode Jabatan / Tenure
1.	Arya Pradana Setiadharna	Komisaris Utama / President Commissioner	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020	5 tahun / 5 years
2.	Abhay Narayan Pande	Komisaris / Commissioner	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020	5 tahun / 5 years
3.	Drs. Indarto S.H	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020	5 tahun / 5 years

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Sementara tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas pokok Dewan Komisaris dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan

Mechanism of Dismissal of the Board of Commissioners

The termination of the membership of the Board of Commissioners is carried out through the GMS mechanism which has been regulated in accordance with the Company's Articles of Association Deed No. 11 dated September 4, 2020.

The Board of Commissioners Composition

The composition of the Board of Commissioners of PT Arkora Hydro Tbk as of December 31, 2021 based on Deed No. 11 dated September 4, 2020 is as follows:

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is in charge of supervising management policies, the course of management in general, both regarding the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors, as well as providing advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the Company's Long-Term Plan, Work Plan and Company Budget, the provisions of the Articles of Association and he resolutions of the GMS, as well as the prevailing laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

Meanwhile, the responsibilities and authorities of the Board of Commissioners are regulated in the Company's Articles of Association and in accordance with the prevailing laws and regulations. The main duties of the Board of Commissioners are as follows:

1. The Board of Commissioners is in charge of supervising and responsible for supervising management policies, the general course of management, both regarding the Company and the Company's business, and providing advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners is required to carry out its duties and responsibilities in good faith, full of responsibility and prudence.
2. To support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities in the supervision, the Board of Commissioners is required to establish or determine

susunan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.

3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite-Komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
5. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut.
7. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.

the composition of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and other committees as determined by the prevailing laws and regulations in the Capital Market, and is obliged to evaluate the performance of these committees at the end of each fiscal year of the Company. In the event that a Nomination and Remuneration Committee is not established, the nomination and remuneration functions as regulated in OJK regulations must be carried out by the Board of Commissioners.

3. Evaluate the performance of the Committees that assist the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
4. The Board of Commissioners has the right at any time to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors from their position, if the member of the Board of Directors is deemed to have acted contrary to this Articles of Association and the prevailing laws and regulations or neglects his/her obligations or there is an urgent reason for the Company.
5. The temporary dismissal must be notified in writing to the concerned person, accompanied by the reasons for the action.
6. Within a period of no later than 90 (ninety) days after the date of temporary dismissal, the Board of Commissioners shall hold a GMS to revoke or strengthen the temporary suspension, while members of the Board of Directors who are temporarily suspended are given the opportunity to attend the GMS to defend themselves in the GMS.
7. The GMS is chaired by the President Commissioner and in the event that the President Commissioner is absent or unable to attend for any reason, which does not need to be proven to a third party, the GMS will be chaired by another member of the Board of Commissioners, and in the event that all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend for any reason whatsoever, which does not need to be proven to a third party, the GMS shall be chaired by a person elected by and from among the shareholders and/or the proxies of the shareholders present at the relevant GMS. If the GMS as referred to in paragraph 6 of this Article is not held within 90 (ninety) days after the date of the temporary dismissal, then the temporary dismissal is null and void and the concerned person is entitled to re-occupy his/her position.

8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
9. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Anggaran Dasar Perusahaan dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat internal untuk mendukung tugasnya dalam pengambilan keputusan. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (bulan) dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Rapat Dewan Komisaris menghasilkan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan tidak mencapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang menentukan keputusan.

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris Perusahaan telah menyelenggarakan 1 (satu) kali rapat dengan rincian frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran masing-masing anggota adalah sebagai berikut:

8. If all members of the Board of Directors are temporarily dismissed and the Company does not have a member of the Board of Directors, then the Board of Commissioners is temporarily required to manage the Company, in that case temporary power to one or more of them is at their joint responsibility.
9. Provisions regarding the duties and authorities of the Board of Commissioners that have not been regulated in the Company's Articles of Association refer to the prevailing laws and regulations and the regulations in force in the Capital Market.

Board of Commissioners Manual

In carrying out their duties, the Board of Commissioners refers to the Articles of Association by referring to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 on Implementation of Public Company Governance Guidelines.

Board of Commissioners Meeting

The Board of Commissioners holds internal meetings to support its decision-making duties. The Board of Commissioners shall hold regular Board of Commissioners Meetings at least once in 2 (months) and hold regular Board of Commissioners and Board of Directors Meetings at least once in 4 (four) months, taking into account the laws and regulations and the prevailing regulations in the Capital Market sector.

Meetings of the Board of Commissioners result in decisions taken based on deliberation for consensus. If the decision does not reach consensus, then the decision is taken based on the affirmative vote of more than $\frac{1}{2}$ (half) of the number of valid votes casted at the meeting. If the votes that agree and disagree are balanced, then the Chairperson of the Board of Commissioners Meeting will determine the decision.

Throughout 2021, the Company's Board of Commissioners held 1 (one) meeting with details on the frequency of meetings and the level of attendance of each member as follows:

Tabel Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meeting

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meeting	Tingkat Kehadiran / Attendance Level	% Tingkat Kehadiran / % Attendance Rate
Arya Pradana Setiadharna	Komisaris Utama / President Commissioner	1	1	100. %
Abhay Narayan Pande	Komisaris / Commissioner	1	1	100%
Drs. Indarto S.H	Komisaris Independen/ Independent Commissioner	1	1.	100%

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2021

Board of Commissioners Meeting Agenda in 2021

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	21 Oktober 2021 / October 21, 2021	Menyetujui Perseroan untuk melakukan supply kontrak electromechanical dengan Void Hydro untuk PLTA Koro Yaentu / Approved the Company to supply electromechanical contracts with Void Hydro for the Koro Yaentu HPP

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Pada tahun 2021 Dewan Komisaris belum melakukan pengembangan pelatihan kompetensi.

Training and/or Competency Improvement of Members of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners did not participate in any competence development program in 2021.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. Kriteria evaluasi yang digunakan dalam penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait dengan perkembangan Perusahaan.

Assessment on the Board of Commissioners Performance

The assessment on the Board of Commissioners performance is carried out by the GMS. The evaluation criteria used in assessing the Board of Commissioners performance is the implementation of the functions and responsibilities of the Board of Commissioners in supervising and providing advice to the Board of Directors related to the development of the Company.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris terhadap Komite di bawah Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2021 Dewan Komisaris belum melakukan penilaian terhadap Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi karena Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk pada tanggal 4 Maret 2022.

Performance Assessment of the Board of Commissioners on the Committees under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has not assessed the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee in 2021 as the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee were established only on March 4, 2022.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen Perseroan merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota, Komisaris lainnya, Direksi atau Pemegang Saham lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan agar terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran di antara berbagai kepentingan terutama pada kepentingan pemegang saham.

INDEPENDENT COMMISSIONER

The Company's Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have financial, management, share ownership and/or family relationships with other members, Commissioners, Directors or Shareholders that may affect their ability to act independently. The existence of an Independent Commissioner is intended to create a more objective working climate and environment and place fairness among various interests, especially the interests of shareholders.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, mengatur bahwa Perseroan minimal menempatkan 1 (satu) orang Komisaris Independen atau sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Saat ini Perseroan memiliki 1 (satu) orang Komisaris Independen atau 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Saat ini, jabatan Komisaris Independen Perseroan diemban oleh Bapak Drs. Indarto S.H dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2027.

DIREKSI

Direksi merupakan organ tata kelola Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Komposisi Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dengan ketentuan paling sedikit dua orang anggota Direksi, salah satu di antaranya menjabat sebagai Direktur Utama.

Pengangkatan Direksi

Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Anggota Direksi yang diangkat merupakan orang yang memenuhi kriteria, yaitu memiliki keahlian, pengalaman, dan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan.

Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh RUPS dengan masa jabatan ditetapkan selama 5 (lima) tahun. Sesudah masa jabatan tersebut, anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pemberhentian Direksi

Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS atau keputusan serkuler dengan menyebutkan alasannya.

Komposisi Direksi

Susunan Direksi yang dimiliki Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan salah satunya diangkat sebagai Direktur Utama. Komposisi Direksi disesuaikan dengan kebutuhan dan prinsip efisiensi berdasarkan pertimbangan

Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies stipulate that the Company places at least 1 (one) Independent Commissioner or at least 30% of the total members of Board of Commissioners. Currently, the Company has 1 (one) Independent Commissioner or 30% of the total members of the Board of Commissioners which is held by Mr. Drs. Indarto S.H with a term of office until 2027.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is a corporate governance organ that is authorized and fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and represents the Company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association. The composition of the Board of Directors is adjusted to the needs of the Company with the provision that at least two members of the Board of Directors, one of whom serves as the President Director.

Appointment of Board of Directors

As stated in the Company's Articles of Association, the appointed members of the Board of Directors are individuals who meet the following criteria, namely having expertise, experience, and other requirements as stipulated in laws and regulations.

Based on the provisions contained in the Corporate Governance Code, the appointment of members of the Board of Directors is carried out by the GMS with a term of office set for 5 (five) years. After the term of office, members of the Board of Directors may be reappointed for 1 (one) term of office.

Dismissal of the Board of Directors

Members of the Board of Directors may be dismissed at any time based on the resolution of the GMS or circular resolutions by stating the reasons.

Composition of the Board of Directors

The composition of the Board of Directors owned by the Company consists of 3 (three) members, one of whom is appointed as the President Director. The composition of the Board of Directors is adjusted to the needs and efficiency

terhadap kompleksitas Perusahaan dengan memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan. Berikut adalah komposisi Direksi Perusahaan hingga 31 Desember 2021 berdasarkan Akta Nomor 11 Tanggal 4 September 2020 :

principles based on consideration of the complexity of the Company by taking into account the effectiveness of decision making. Composition of the Company's Board of Directors as of December 31, 2021 based on Deed No. 11 dated September 4, 2020:

No	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Periode Jabatan / Tenure
1.	Aldo Henry Artoko	Direktur Utama / President Director	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020	5 tahun / 5 years
2.	Ricky Hartono	Direktur / Director of Finance	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020	5 tahun / 5 years
3.	Ismu Nugroho	Direktur Operasional / Director of Operation	Akta No. 11 Tanggal 4 September 2020 / Deed No. 11 dated September 4, 2020	5 tahun / 5 years

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Adapun ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
2. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan;
3. Memastikan jalannya aktivitas dan kebijakan Perseroan sudah mengacu dan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku;
4. Merencanakan, melakukan, mengadakan, atau mengakhiri segala hubungan kemitraan strategis yang dapat berupa antara lain, usaha patungan atau perjanjian investasi, aliansi bisnis oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan;
5. Bertanggung jawab secara tanggung renteng kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Based on OJK Regulation No. 33/2014, the duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

1. Run and be responsible for the management of the Issuer or Public Company for the benefit of the Issuer or Public Company in accordance with the aims and objectives of the Issuer or Public Company stipulated in the Articles of Association.
2. Organize the annual GMS and other GMS as stipulated in the laws and regulations and articles of association.
3. Evaluate the performance of the committee at the end of each fiscal year.

The scope of duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

1. Lead and manage the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company and always strive to improve the efficiency and effectiveness of the Company;
2. Control, maintain, and manage the Company's assets for the benefit of the Company;
3. Ensure that the Company's activities and policies have referred to and are in accordance with applicable laws;
4. Plan, conduct, enter into, or terminate all strategic partnership relationships which can be in the form of, among others, joint ventures or investment agreements, business alliances by the Company and/or the Company's Subsidiaries;
5. Be jointly and severally responsible for the Company's losses caused by errors or by the Board of Directors in carrying out their duties. Members of the Board of Directors cannot be held responsible for the Company's losses if they can prove:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

- a. The loss is not due to his/her fault or negligence;
- b. Have carried out management in good faith, full of responsibility, and prudence for the interests and purposes and objectives of the Company;
- c. Do not have a conflict of interest, either directly or indirectly, over management actions that result in losses; and
- d. Have taken action to prevent the occurrence or continuation of the loss.

PT Arkora Hydro telah menetapkan kebijakan pembagian tugas masing-masing Direksi. Hal itu dilakukan guna menjamin pelaksanaan dan kesinambungan pencapaian sasaran Perusahaan pada masa mendatang yang lebih sistematis efisien dan efektif. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, yakni sebagai berikut:

PT Arkora Hydro has established a policy on the division of tasks for each Board of Directors. This is done to ensure the implementation and continuity of achieving the Company's targets in the future that are more systematic, efficient, and effective. The scope of duties and responsibilities of each Board of Directors are as follows:

Jabatan / Position	Tugas dan Wewenang / Duties And Responsibilities
Direktur Utama / President Director	Menjadi pimpinan Perseroan serta bertanggung jawab merumuskan kebijakan strategi-strategi Perseroan, keputusan bisnis Perseroan, menentukan target-target jangka panjang Perseroan dengan berkoordinasi bersama direksi lain. / Be the head of the Company and responsible for formulating the Company's strategic policies, the Company's business decisions, determining the Company's long-term targets in coordination with other directors.
Direktur Keuangan / Finance Director	Membawahi bidang akuntansi dan keuangan serta bertanggung jawab merumuskan kebijakan dan keputusan atas aspek keuangan dan pendanaan untuk operasional Perseroan. / In charge of accounting and finance and is responsible for formulating policies and decisions on financial and funding aspects for the Company's operations.
Direktur Operasi / Operations Director	Bertanggung jawab dalam operasional Perseroan untuk Pembangkit Listrik yang telah beroperasi, dan yang sedang dalam tahap pembangunan agar mencapai standar-standar yang telah ditetapkan oleh Perseroan. / Responsible for the Company's operations for Power Plants that have been operating, and which are under construction to achieve the standards set by the Company.

Rapat Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi secara rutin wajib menggelar rapat gabungan guna membahas evaluasi kinerja Perusahaan dengan fungsi terkait. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Direksi dilakukan secara berkala untuk membahas strategi-strategi, permasalahan, risiko dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan operasional Perusahaan. Rapat Direksi juga dapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan/atau Komite, untuk memberikan masukan atau menyampaikan nasihat mengenai permasalahan yang sedang dihadapi Perusahaan.

Board of Directors Meeting

Based on the Company's Articles of Association, the Board of Directors shall regularly hold joint meetings to discuss the evaluation of the Company's performance with related functions. The Board of Directors shall hold a Board of Directors Meeting periodically at least once in every month, and hold a Board of Directors meeting with the Board of Commissioners periodically at least once in 4 (four) months. Meetings of the Board of Directors are held periodically to discuss strategies, issues, risks, and other important matters related to the Company's operations. Meetings of the Board of Directors may also be attended by the Board of Commissioners and/or the Committee, to provide input or provide advice regarding the problems being faced by the Company.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

Pada periode tahun 2021, Direksi telah mengadakan rapat Direksi sebanyak 3 kali rapat. Berikut uraian kegiatan rapat Direksi yang dilakukan sepanjang tahun 2021:

Meetings of the Board of Directors are valid and have the right to make binding decisions if attended and/or represented by more than 1/2 (half) of the total members of the Board of Directors. Decisions of the Board of Directors Meeting must be taken based on deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, then the decision is taken by voting based on the affirmative vote of more than 1/2 (half) of the number of valid votes that were legally issued in the meeting. If the votes that agree and disagree are balanced, then the Chairperson of the Board of Directors Meeting will decide.

In the period of 2021, the Board of Directors held 3 meetings. The description of the activities of the Board of Directors meetings held throughout 2021 is as follows:

Tabel Rapat Direksi

Board of Directors Meeting

No	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Periode Jabatan / Tenure
Aldo Henry Artoko	Direktur Utama / President Director	3	3	100%
Ricky Hartono	Direktur / Director	3	3	100%
Ismu Nugroho	Direktur Operasional / Operations Director	3	3	100%

Agenda Rapat Direksi

Board of Directors Meeting Agenda

No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda
1	21 Januari 2021 / January 21, 2021	Menyetujui Perseroan untuk memulai tahap uji tuntas untuk fasilitas kredit PLTA Koro Yaentu dengan PT Indonesia Infrastructure Finance / Approved the Company to start the due diligence phase for the Koro Yaentu HPP credit facility with PT Indonesia Infrastructure Finance
2	26 April 2021 / April 26, 2021	Menyetujui Perseroan untuk melakukan negosiasi harga dengan PLN UID Lampung untuk PLTA Kukusan 2 (5,4 MW) / Approved the Company to negotiate prices with PLN UID Lampung for Kukusan 2 HPP (5.4 MW)
3	30 Agustus 2021 / August 30, 2021	Menyetujui Perseroan untuk melakukan supply kontrak electromechanical dengan Voith Hydro untuk PLTA Koro Yaentu / Approved the Company to carry out an electromechanical supply contract with Voith Hydro for the Koro Yaentu HPP
4	15 November 2021 / November 15, 2021	Menyetujui perseroan untuk melakukan negosiasi ulang harga dengan PLN UID Lampung untuk PLTA Kukusan 2 (5,4 MW) / Approved the Company to renegotiate the price with PLN UID Lampung for Kukusan 2 HPP (5.4 MW)

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

Sepanjang tahun 2021 Direksi belum mengikuti pengembangan pelatihan kompetensi.

Training and/or Competency Improvement for Members of the Board of Directors

The Board of Directors did not participate in any competence development program in 2021.

Penilaian Kerja Direksi

Perusahaan melakukan penilaian atas kinerja Direksi yang dilaksanakan dengan metode penilaian, yaitu penilaian kinerja Direksi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Assessment on the Board of Directors Performance

The Company assesses the Board of Directors performance which is carried out using assessment methods, namely the performance assessment of the Board of Directors by the Board of Commissioners.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014 bahwa rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam waktu 4 (empat) bulan. Namun di tahun 2021 Perusahaan belum menyelenggarakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang. Setelahnya, menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan. Kemudian, Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Nominal remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu pada aturan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah ditetapkan melalui mekanisme keputusan RUPS. Kewenangan tersebut diserahkan kepada Dewan Komisaris dengan tetap mengikuti formula dasar yang telah disetujui oleh para Pemegang Saham.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan mencakup beberapa komponen, antara lain:

1. Honorarium
2. Tunjangan
3. Fasilitas
4. Insentif
5. Kinerja

Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Based on OJK Regulation No. 33/2014, a joint meeting between the Board of Directors and the Board of Commissioners is held at least once within 4 (four) months. However, in 2021 the Company has not held a joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Procedure for determining and the amount of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, namely the Nomination and Remuneration Committee evaluates the remuneration policy based on performance, risk, fairness with the peer group, the Company's long-term goals and strategies, fulfillment of reserves as regulated in laws and regulations and the Company's potential future income. After that, submit the evaluation results and recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners to be submitted to the Company's GMS. Then, the Board of Commissioners held a meeting of the Board of Commissioners attended by the majority of the members of the Board of Commissioners and one of the members of the Board of Commissioners is an Independent Commissioner. The results of the meeting of the Board of Commissioners regarding the remuneration are stated in the minutes of the meeting and documented by the Company.

The remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors refers to the Articles of Association that have been determined through the GMS decision mechanism. The authority is delegated to the Board of Commissioners while still following the basic formula that has been approved by the Shareholders.

The remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors that has been determined includes several components as follows:

1. Honorarium
2. Allowance
3. Facilities
4. Incentives
5. Performance

Berdasarkan ketentuan tersebut, remunerasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris di tahun 2021 sebesar Rp218.035.720. Sementara remunerasi yang diberikan kepada anggota Direksi di tahun 2021 sebesar Rp2.401.580.611.

Based on these provisions, the remuneration given to members of the Board of Commissioners in 2021 amounted to Rp218,035,720. Meanwhile, the remuneration given to members of the Board of Directors in 2021 amounted to Rp2,401,580,611.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI

Hubungan Afiliasi antara Anggota Direksi, Anggota Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

Hubungan afiliasi antara Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, serta Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

AFFILIATION DISCLOSURE

Affiliation between Members of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners, and Controlling Shareholders

The affiliation between the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and Shareholders is as follows:

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Affiliation of the Board of Commissioners

Nama / Name	Jabatan / Position	Hubungan Keluarga / Family Relations					
		Anggota Direksi / Board of Directors Member		Anggota Dewan Komisaris / Board of Commissioners Member		Pemegang Saham / Shareholders	
		Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No
Arya Pradana Setiadharna	Komisaris Utama / President Commissioner	x	✓	x	✓	✓	x
Abhay Narayan Pande	Komisaris / Commissioner	x	✓	x	✓	x	✓
Drs. Indarto S.H	Komisaris / Commissioner	x	✓	x	✓	x	✓

✓ = ada / affiliated
x = tidak ada / none

Hubungan Afiliasi Direksi

Affiliation of the Board of Directors

Nama / Name	Jabatan / Position	Hubungan Keluarga / Family Relations					
		Anggota Direksi / Board of Directors Member		Anggota Dewan Komisaris / Board of Commissioners Member		Pemegang Saham / Shareholders	
		Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No
Aldo Henry Artoko	Direktur Utama / President Director	x	✓	x	✓	✓	x
Ricky Hartono	Direktur / Director	x	✓	x	✓	✓	x
Ismu Nugroho	Direktur Operasional / Operations Director	x	✓	x	✓	x	✓

✓ = ada / affiliated
x = tidak ada / none

KOMITE AUDIT

Tahun 2021 PT Arkora Hydro Tbk belum memiliki Komite Audit. Komite Audit mulai dibentuk sejak tanggal 4 Maret 2022. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan memastikan Perusahaan dikelola dengan manajemen yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dengan merujuk pada POJK Nomor 55/POJK.04/2014.

Komposisi Komite Audit

Berikut komposisi Komite Audit hingga akhir tahun 2021:

Drs. Indarto, S.H

Ketua Komite Audit (2022 – 2025)

Rincian Profil disampaikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Bab “Profil Perusahaan” pada Laporan Tahunan ini.

Anindita Wijaya Putri

Anggota Komite Audit (2022 – 2025) / Audit Committee Member (2022 – 2025)

Usia / Age	35 tahun / years old
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Indonesia
Riwayat Pendidikan / Education	S1 Bidang Akuntansi dari Macquarie University, Australia (2007) / Bachelor's Degree in Accounting from Macquarie University, Australia (2007)
Riwayat Jabatan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • 2020– 2022: Internal Control Manager PT Suntory Garuda Beverage (SGB) • 2016– 2020: Internal Control & Audit Section Head PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk • 2013–2016: Senior Consultant EY – PT Ernst & Young Indonesia
Periode dan Masa Jabatan / Period and Tenure	2022-2025

Dwithya Putri Citrarhasmi SE., AK., CA

Anggota Komite Audit (2022 – 2025) / Audit Committee Member (2022 – 2025)

Usia / Age	42 tahun / years old
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Indonesia
Riwayat Pendidikan / Education	S1 Ekonomi Universitas Indonesia (2004) / Bachelor's Degree in Economics from Universitas Indonesia (2004)
Riwayat Jabatan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • 2012–2016: Head of Finance Bank of America, N.A. Jakarta Branch • 2004 – 2012: Senior Auditor Ernest & Young – Purwantono, Suherman & Surja • 2003 – 2004: Auditor KAP Husni, Mucharam & Rasidi
Periode dan Masa Jabatan / Period and Tenure	2022-2025

AUDIT COMMITTEE

PT Arkora Hydro Tbk did not have an Audit Committee in 2021. The Audit Committee was established in March 4, 2022. The Audit Committee was established by the Board of Commissioners with the aim of assisting the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function and ensuring that the Company is managed with sound management in accordance with GCG principles by referring to POJK No. 55/POJK. 04/2014.

Audit Committee Composition

Audit Committee composition as of the end of 2021 is as follows:

Drs. Indarto, S.H

Head of Audit Committee (2022 – 2025)

Details of the profile are presented in the “Profile of the Board of Commissioners” section contained in the “Company Profile” Chapter in this Annual Report.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya yang secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan, termasuk kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi dalam proses penyusunannya;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan eksternal atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. Mendorong terbentuknya sistem pengendalian internal yang memadai dalam pengelolaan Perusahaan dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal perusahaan dan implementasinya;
6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
9. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
10. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
11. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
12. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
13. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The main task of the Audit Committee is to assist the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties which can be broadly described as follows:

1. Review the financial information that will be issued by the Company to the public and/or authorities, including financial statements, projections and other reports related to the Company's financial information, including compliance with accounting standards and policies in the process of its preparation;
2. Review compliance with laws and regulations relating to the Company's activities;
3. Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and an external accountant on the services provided;
4. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an accountant based on independence, scope of assignment and remuneration for services;
5. Encourage the establishment of an adequate internal control system in the management of the Company by evaluating and providing recommendations regarding the improvement of the company's internal control system and its implementation;
6. Review the implementation of the audit by the internal auditors and supervising the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of the internal auditors;
7. Review the risk management implementation activities carried out by the Board of Directors;
8. Review complaints related to the accounting and financial reporting processes of the Company;
9. Review the independence and objectivity of public accountants;
10. Review the adequacy of the audits conducted by public accountants;
11. Conduct examinations on allegations of errors in the decisions of the Board of Directors meeting or irregularities in the implementation of the results of the Board of Directors meeting decisions;
12. Submit a report on the results of the review to all Members of the Board of Commissioners of the Company after the completion of the report on the results of the review conducted by the Audit Committee;
13. Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest in the Company;

14. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
15. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Komite Audit terbentuk pada tanggal 4 Maret 2022 sehingga pelaksanaan tugas Komite Audit sepanjang tahun 2021 dijalankan oleh Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit

Mengacu pada Peraturan OJK No. 55/2015 bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Peraturan tersebut mengatur lebih lanjut bahwa rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

Sepanjang tahun 2022 Komite Audit belum pernah mengadakan rapat Komite Audit dikarenakan Komite Audit baru terbentuk pada tanggal 4 Maret 2022.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021 belum terdapat pelatihan pengembangan kompetensi Komite Audit karena Komite Audit terbentuk pada tanggal 4 Maret 2022.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pada tahun 2021 Perusahaan belum membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi karena fungsi tersebut dijalankan langsung oleh Dewan Komisaris. Kemudian pada tanggal 4 Maret 2022 Perusahaan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terkait kebijakan nominasi dan remunerasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dengan merujuk pada POJK Nomor 55/POJK.04/2014.

14. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information; and
15. Carry out other duties of the Board of Commissioners related to the roles and responsibilities of the Board of Commissioners.

Implementation of the Duties of the Audit Committee

The Audit Committee was only established on March 4, 2022 so that the implementation of the duties of the Audit Committee throughout 2021 is carried out by the Board of Commissioners.

Meeting Frequency and Attendance of Audit Committee Members

Referring to OJK Regulation No. 55/2015 that the Audit Committee holds regular meetings at least once in 3 (three) months. The regulation further stipulates that the Audit Committee meeting can be held if attended by more than 1/2 (half) of the total members.

Throughout 2022 the Audit Committee has never held an Audit Committee meeting as the Audit Committee was only established on March 4, 2022.

Training and/or Competency Improvement in 2021

Throughout 2021, there has been no training on competency development for the Audit Committee as the Audit Committee was only established on March 4, 2022.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Company has not established a Nomination and Remuneration Committee in 2021 as this function was carried out directly by the Board of Commissioners. Then on March 4, 2022 the Company established a Nomination and Remuneration Committee by referring to the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies. The Nomination and Remuneration Committee was established by the Board of Commissioners with the aim of assisting the Board of Commissioners in carrying out supervisory functions related to nomination and remuneration policies in accordance with GCG principles by referring to POJK No. 55/POJK.04/2014.

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi

Berikut komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk pada tahun 2022:

Drs. Indarto, S.H

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (2022 – 2025)

Rincian Profil Drs. Indarto, S.H telah diuraikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Bab “Profil Perusahaan” pada Laporan Tahunan ini.

Nomination and Remuneration Committee Composition

Composition of the Nomination and Remuneration Committee which was established in 2022 is as follows:

Head of the Nomination and Remuneration Committee (2022 – 2025)

Profile of Drs. Indarto, S.H has been presented in the “Profile of the Board of Commissioners” section contained in the “Company Profile” Chapter in this Annual Report.

Arya Pradana Setiadharma

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (2022 - 2025)

Rincian Profil Arya Pradana Setiadharma telah diuraikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Bab “Profil Perusahaan” pada Laporan Tahunan ini.

Nomination and Remuneration Committee Member (2022 – 2025)

Profile of Arya Pradana Setiadharma has been presented in the “Profile of the Board of Commissioners” section contained in the “Company Profile” Chapter in this Annual Report.

Abhay Narayan Pandhe

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (2022 - 2025)

Rincian Profil Abhay Narayan Pandhe telah diuraikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Bab “Profil Perusahaan” pada Laporan Tahunan ini.

Nomination and Remuneration Committee Member (2022 – 2025)

Profile of Abhay Narayan Pandhe has been presented in the “Profile of the Board of Commissioners” section contained in the “Company Profile” Chapter in this Annual Report.

Piagam Komite Nominasi & Remunerasi

Dalam pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi, di tahun 2021 Perusahaan belum membentuk Komite dikarenakan fungsi tersebut dijalankan langsung oleh Dewan Komisaris. Sebagai langkah penyempurnaan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, di tahun 2022 Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sedang dalam penyusunan.

Nomination & Remuneration Committee Charter

In implementing the Nomination and Remuneration function, in 2021 the Company has not yet established a Committee because the function was carried out directly by the Board of Commissioners. As a step to improve the practice of Good Corporate Governance, in 2022 the Nomination and Remuneration Committee Charter was in development process.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi & Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan

Duties and Responsibilities of the Nomination & Remuneration Committee

In accordance with POJK No. 34/POJK.04/2014, the duties, responsibilities, authorities of the Nomination and Remuneration Committee are as follows:

1. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a. Composition of positions for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - b. Policies and criteria required in the Nomination process; and

- | | |
|---|--|
| <p>c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.</p> <p>2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;</p> <p>3. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</p> <p>4. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris;</p> <p>5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat minimal sebagaimana ditentukan oleh OJK sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;</p> <p>6. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit atau Komite lainnya kepada Dewan Komisaris;</p> <p>7. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang;</p> <p>8. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;</p> <p>9. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>10. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;</p> <p>11. Memberikan rekomendasi mengenai:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Struktur remunerasi;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Kebijakan atas remunerasi; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Besaran atas remunerasi.</p> <p>12. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.</p> | <p>c. Performance evaluation policy for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.</p> <p>2. Assist the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners based on the benchmarks that have been prepared as evaluation material.</p> <p>3. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the capacity building program for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.</p> <p>4. Prepare and provide recommendations regarding the system and procedure for the selection and/or replacement of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the Board of Commissioners.</p> <p>5. Provide proposals for candidates who meet the minimum requirements as determined by the Financial Services Authority as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.</p> <p>6. Provide recommendations on independent parties who will become members of the Audit Committee or other Committees to the Board of Commissioners.</p> <p>7. Evaluate the remuneration policy based on performance, risk, fairness with peer groups, the Company's long-term goals and strategies, fulfillment of reserves as regulated in laws and regulations and the Company's potential future income.</p> <p>8. Submit evaluation results and recommendations to the Board of Commissioners regarding:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Remuneration Policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners to be submitted to the GMS; and</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Remuneration Policy for employees as a whole to be submitted to the Board of Directors.</p> <p>9. Ensure that the Remuneration policy is in accordance with applicable regulations.</p> <p>10. Conduct regular evaluations of the implementation of the Remuneration policy.</p> <p>11. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Remuneration Structure;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Policy on Remuneration; and</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Amount of Remuneration;</p> <p>12. Assisting the Board of Commissioners in assessing performance in accordance with the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners.</p> |
|---|--|

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi terbentuk pada tanggal 4 Maret 2022 sehingga pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2021 dijalankan oleh Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Mengacu pada Peraturan OJK No. 34/2014 bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Peraturan tersebut mengatur lebih lanjut bahwa rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sepanjang tahun 2021 Komite Nominasi dan Remunerasi belum pernah mengadakan rapat dikarenakan Komite Nominasi dan Remunerasi baru terbentuk pada tanggal 4 Maret 2022.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021 belum terdapat pelatihan pengembangan kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi karena Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk pada tanggal 4 Maret 2022.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perusahaan Terbuka wajib memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Memahami hal itu, PT Arkora Hydro sebagai perusahaan terbuka telah memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.02/SK-DIR/AH/III/2022.

Sekretaris Perusahaan adalah penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan diangkat dan bertanggung jawab pada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung Perusahaan dengan pihak luar seperti para investor, pelaku pasar modal, regulator dan juga para pengamat. Sekretaris Perusahaan juga berperan memfasilitasi komunikasi yang efektif dan memastikan tersedianya informasi yang memadai dan valid untuk berbagai pihak. Mengacu pada fungsinya, maka Sekretaris Perusahaan wajib

Implementation of the Duties of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee was only established on March 4, 2022 so that the duties of the Nomination and Remuneration Committee throughout 2021 were carried out by the Board of Commissioners.

Meeting Frequency and Attendance of Nomination and Remuneration Committee Members

Referring to OJK Regulation No. 34/2014, the Nomination and Remuneration Committee holds regular meetings at least once in 4 (four) months. The regulation further stipulates that the Nomination and Remuneration Committee meeting can be held if attended by a majority of the Nomination and Remuneration Committee members.

Throughout 2021 the Nomination and Remuneration Committee has never held a meeting because the Nomination and Remuneration Committee was only established on March 4, 2022.

Training and/or Competency Improvement in 2021

Throughout 2021 there has been no training on competency development for the Nomination and Remuneration Committee as the Nomination and Remuneration Committee was only established on March 4, 2022.

CORPORATE SECRETARY

Public Companies are required to have a Corporate Secretary function in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public Companies. Understanding this, PT Arkora Hydro as a public company has the function of Corporate Secretary based on the Decree of the Board of Directors No.02/SK-DIR/AH/III/2022.

The Corporate Secretary is the person in charge of the work unit that carries out the functions of the Corporate Secretary. The Corporate Secretary is appointed and is responsible to the President Director. The Corporate Secretary acts as a liaison between the Company and external parties such as investors, capital market players, regulators and observers. The Corporate Secretary also plays a role in facilitating effective communication and ensuring the availability of adequate and valid information for various parties. Referring to its function, the Corporate Secretary shall understand

memahami informasi mengenai perkembangan regulasi yang relevan dan mempunyai dampak terhadap kegiatan Perseroan, di antaranya informasi yang terkait dengan industri, korporasi, pasar modal, isu tenaga kerja, isu hukum, dan isu lainnya yang terkait dengan Perusahaan.

Secara umum tugas utama Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

information regarding relevant regulatory developments and have an impact on the Company's activities, including information related to industry, corporations, capital markets, labor issues, legal issues, and other issues related to the Company.

In general, the main duties of the Corporate Secretary are as follows:

1. Monitor the development of the capital market, especially the prevailing laws and regulations in the capital market sector;
2. Provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to comply with the provisions of the laws and regulations in the capital market sector;
3. Assist the Board of Directors and the Board of Commissioners in the implementation of corporate governance which includes:
 - a. Information disclosure to the public, including the availability of information on the Company's website;
 - b. Timely submission of reports to the Financial Services Authority;
 - c. Organizing and documenting the General Meeting of Shareholders
 - d. Organizing and documenting meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners; and
 - e. Implementation of company orientation program for the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
4. As a liaison officer between the Company and the Company's shareholders, the Financial Services Authority, and other stakeholders.

Profil Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Profile

Prisca Lumban Tobing

Usia / Age	42 tahun / 42 years old
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Indonesia
Riwayat Pendidikan / Education	S1 Bidang Manajemen Keuangan dari Institut Bisnis Indonesia (2003) / Bachelor's Degree in Financial Management from Institut Bisnis Indonesia (2003)
Riwayat Jabatan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • 2012 – sekarang / 2012-present: HRGA Manager • 2011 – 2012: HRD Supervisor PT CJ GLS Indonesia • 2011: HRD Koordinator PT Ketrosden Triasmitra / HRD Coordinator at PT Ketrosden Triasmita
Periode dan Masa Jabatan / Period and Tenure	2022 – 2027

Tugas Pelaksanaan Sekretaris Perusahaan Sepanjang 2021

Sepanjang tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

1. Membantu Direksi dalam pelaksanaan RUPS Tahunan dan Luar Biasa tahun 2021.
2. Membantu dalam penyusunan Laporan Tahunan 2021.
3. Menyelenggarakan Public Expose Tahunan.
4. Mengelola daftar pemegang saham Perseroan.
5. Melakukan keterbukaan informasi laporan keuangan kuartalan, tengah tahunan dan tahunan juga laporan rutin lainnya kepada regulator secara tepat waktu.
6. Mengikuti perkembangan peraturan terkait pasar modal.

Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan wawasan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Untuk itu, Sekretaris Perusahaan senantiasa mengikuti perkembangan pasar modal dan membangun komunikasi dengan para pemegang saham, regulator termasuk Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga berusaha untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar yang relevan dengan fungsi dan tugasnya di mana memungkinkan.

Di sepanjang tahun 2021 Sekretaris Perusahaan belum melakukan pelatihan pengembangan kompetensi. Namun di tahun 2022 Sekretaris Perusahaan mengikuti program pelatihan pengembangan kompetensi, yaitu pengetahuan mengenai Corporate Secretary yang dilakukan pada tanggal 17-18 Maret 2022 dengan biaya pelatihan sebesar Rp4.650.000.

UNIT AUDIT INTERNAL

Audit Internal merupakan pelaksana utama pengendalian internal perusahaan. Pembentukan Audit Internal PT Arkora Hydro berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi No.01/SK-DIR/II/2022 yang mengacu pada POJK No. 56/2015. Pada pelaksanaannya, Audit Internal Perseroan dipimpin oleh Kepala Audit Internal yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Unit Audit Internal memberikan keyakinan yang independen dan obyektif atas efektivitas dan integritas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola, dan memberikan konsultasi sesuai kebutuhan departemen dan unit Perusahaan yang dirancang untuk memperkuat kegiatan operasional.

Corporate Secretary Implementation Duties Throughout 2021

The Corporate Secretary has carried out his/her duties and responsibilities in accordance with the applicable laws and regulations throughout 2021, including:

1. Assist the Board of Directors in the implementation of the 2021 Annual and Extraordinary GMS.
2. Assist in the preparation of the 2021 Annual Report.
3. Organize the Annual Public Expose.
4. Manage the list of shareholders of the Company.
5. Disclosure of information on quarterly, semi-annual and annual financial reports as well as other routine reports to regulators in a timely manner.
6. Follow the development of regulations related to the capital market.

Corporate Secretary Training

The Corporate Secretary is committed to continuously improving competence and knowledge to support the implementation of his/her duties. To that end, the Corporate Secretary always monitors the development of the capital market and establishes communication with shareholders, regulators including the Financial Services Authority, and other stakeholders. In addition, the Corporate Secretary also strives to attend trainings and seminars relevant to his/her functions and duties wherever possible.

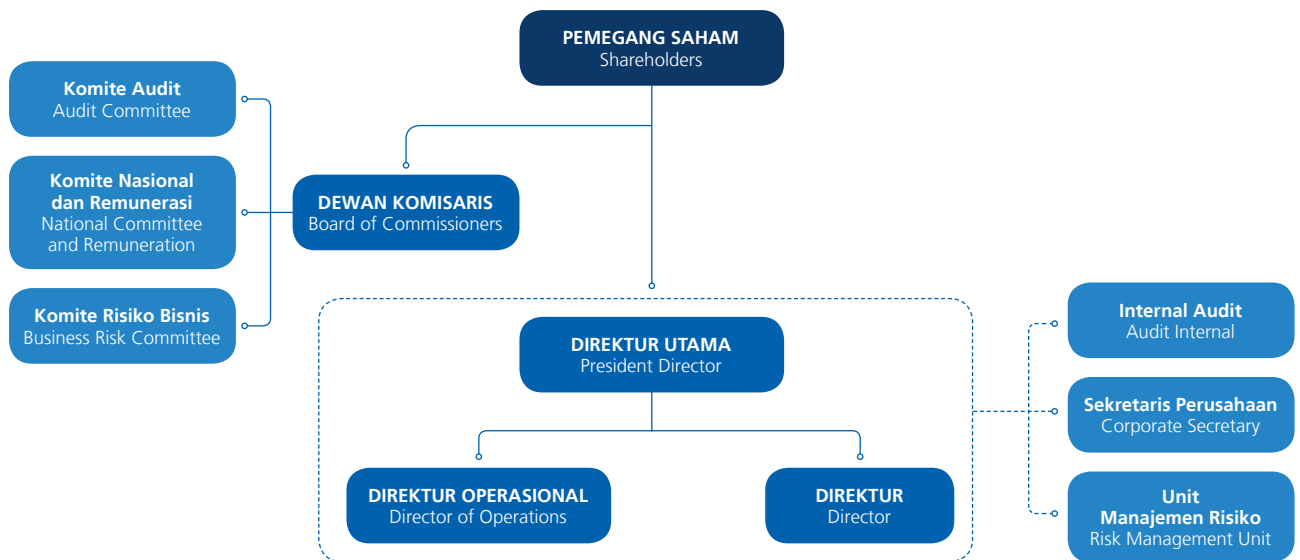
Throughout 2021 the Corporate Secretary has not conducted any competency development training. However, in 2022 the Corporate Secretary participated in a competency development training program, namely knowledge of the Corporate Secretary which was conducted on March 17-18, 2022 with a training fee of Rp4,650,000.

INTERNAL AUDIT UNIT

Internal Audit is the main implementer of the Company's internal control. The establishment of the Internal Audit of PT Arkora Hydro is based on the Decree of the Board of Directors No.01/SK-DIR/II/2022 that refers to POJK No. 56/2015. In practice, the Company's Internal Audit is led by the Head of Internal Audit who reports directly to the Board of Directors. The Internal Audit Unit provides independent and objective assurance on the effectiveness and integrity of the risk management, control and governance processes, and provides consultation according to the needs of the Company's departments and units designed to strengthen operational activities.

Profil Kepala Unit Audit Internal
Profile of Head of Internal Audit Unit
Muhammad Iqbal
Kepala Unit Audit Internal (2022-2025) / Head of Internal Audit Unit in 2022-2025)

Usia / Age	34 tahun / 34 years old
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Indonesia / Indonesian
Riwayat Pendidikan / Education	S1 Bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Gunadarma (2017) / Bachelor's Degree in Financial Management from Universitas Gunadarma (2017)
Riwayat Jabatan / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • 2018 – 2022: <i>Corporate Finance</i> PT Markasia Strategic • 2017 – 2018: <i>Finance & Accounting Analyst</i> PT Angkut Teknologi Indonesia
Periode dan Masa Jabatan / Period and Tenure	2022-2025

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal
Structure and Position of Internal Audit Unit

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal Perusahaan yang disusun berdasarkan POJK No. 56/2015, tugas dan tanggung jawab audit Internal adalah sebagai berikut :

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, Sumber Daya Manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;

Duties and Responsibilities of Internal Audit

As stated in the Company's Internal Audit Charter which was prepared based on POJK No. 56/2015, the duties and responsibilities of Internal audit are as follows:

- Develop and implement an annual internal audit plan;
- Test and evaluate the implementation of internal control and risk management systems in accordance with the Company's policies;
- Conduct audit and assessments of efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, Human Resources, marketing, information technology, and other activities;

- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Pedoman Piagam (Charter) Unit Audit Internal

Internal Audit dalam menjalankan tugasnya dibekali dengan piagam kerja (*charter*) sebagai pedoman yang mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi Internal Audit yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT Arkora Hydro No. 03/SK-KOM/AH/II/2022 tentang Pengangkatan dan/atau Pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal, tanggal 4 Maret 2022.

Keberadaan Piagam Audit Internal/*Internal Audit Charter* memiliki tujuan agar Sistem Pengendalian Internal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai evaluator, katalisator, dan konsultan internal Perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan nilai tambah bagi kelangsungan usaha Perusahaan.

Pelaksanaan Tugas Unit Audit Internal Pada Tahun 2021

Unit Audit Internal terbentuk pada tanggal 4 Maret 2022 sehingga pelaksanaan tugas Unit Audit Internal sepanjang tahun 2021 dijalankan oleh Direktur Utama.

- d. Provide improvement suggestions and objective information about the activities inspected on all levels of management;
- e. Prepare a report on audit results and submit the report to the President Director and the Board of Commissioners;
- f. Monitor, analyze, and report on the implementation of follow-up improvements that have been suggested;
- g. Cooperate with the Audit Committee;
- h. Develop a program to evaluate the quality of the internal audit activities it carries out; and
- i. Conduct special audit if needed.

Authority of the Internal Audit Unit

- a. Access all relevant information about the Company related to its duties and functions;
- b. Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee as well as members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee;
- c. Hold regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee; and
- d. Coordinate its activities with the activities of external auditors.

Internal Audit Unit Charter

In carrying out its duties Internal Audit is equipped with a work charter as a guideline that regulates the implementation of the duties and functions of the Internal Audit which is stipulated through the Decree of the Board of Directors of PT Arkora Hydro No.03/SK-KOM/AH/II/2022 on the Appointment and/or Establishment of the Internal Audit Unit and the Internal Audit Charter, dated March 4, 2022.

The existence of the Internal Audit Charter has the aim that the Internal Control System in carrying out its duties and functions as an evaluator, catalyst, and internal consultant of the Company can run effectively and efficiently and be able to provide added value for the Company's business continuity.

Implementation of Internal Audit Unit Duties in 2021

The Internal Audit Unit was only established on March 4, 2022 so that the implementation of the duties of the Internal Audit Unit throughout 2021 was carried out by the President Director.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian internal (SPI) yang dijalankan oleh Perusahaan adalah sebuah proses yang dijalankan oleh organisasi (SDM) dengan tindakan pengawasan, pencegahan, dan pengarahan. Seluruh proses kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Sistem Pengendalian Internal memiliki tujuan untuk menjamin manajemen organisasi atau Perusahaan terhindar dari risiko kegagalan dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran yang telah ditetapkan Perusahaan, termasuk keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, meningkatkan efektivitas operasional, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Evaluasi terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Pada tahun 2021 Dewan Komisaris belum melaksanakan mekanisme pengendalian internal dikarenakan Sistem Pengendalian Internal mulai terbentuk pada tanggal 4 Maret 2022.

AKUNTAN PUBLIK

Untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2021, Perusahaan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Imelda & Rekan. KAP Imelda & Rekan tidak memberikan jasa lain bagi Perusahaan selain jasa audit Laporan Keuangan Tahunan. Informasi terkait KAP yang melakukan audit Laporan Keuangan PT Arkora Hydro Tbk selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun Buku / Fiscal Year	Akuntan / Accountant	Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm	Biaya Audit / Audit Fee
2021	Theodorus Bambang	Imelda & Rekan	Rp800.000.000
2020	Theodorus Bambang	Imelda & Rekan	Rp395.000.000
2019	Theodorus Bambang	Imelda & Rekan	Rp387.000.000
2018	Henry Arifian	Imelda & Rekan	Rp385.000.000
2017	Henry Arifin	Satrio Big Any & Rekan	Rp375.000.000

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Setiap operasional bisnis tidak terlepas dari berbagai risiko, baik risiko yang berada di bawah kendali maupun risiko yang berada di luar kendali Perusahaan. Oleh karena itu PT Arkora Hydro Tbk memahami pentingnya pengelolaan risiko secara terintegrasi, optimal dan berkesinambungan. Perseroan senantiasa melaksanakan pengendalian risiko dan pengelolaan kebijakan Perusahaan secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan melakukan manajemen

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Internal Control System (SPI) run by the Company is a process carried out by the organization (HR) with supervisory, preventive, and directive actions. The entire process of these activities is carried out in accordance with the existing systems and procedures so as to support the achievement of the goals and objectives set by the Company. The objective of Internal Control System is to ensure that the management of the organization or the Company avoids the risk of failure to achieve the goals and/or targets set by the Company, including the reliability of financial reports, asset security, increasing operational effectiveness, and compliance with applicable laws and regulations.

Evaluation of the Effectiveness of the Internal Control System

In 2021 the Board of Commissioners has not implemented an internal control mechanism as the Internal Control System was only established on March 4, 2022.

PUBLIC ACCOUNTANT

To carry out an audit of the Company's Financial Statements for the 2021 Fiscal Year, the Company appointed Public Accounting Firm (KAP) Imelda & Rekan. KAP Imelda & Rekan did not provide other services to the Company apart from auditing the Annual Financial Statements. Information related to KAP auditing the Financial Statements of PT Arkora Hydro Tbk for the last 5 years is as follows:

RISK MANAGEMENT SYSTEM

Every business operation is inseparable from various risks, both risks that are under the control and risks that are beyond the control of the Company. Therefore, PT Arkora Hydro Tbk understands the importance of integrated, optimal, and sustainable risk management. The Company always carries out risk control and management of Company policies in an integrated and sustainable manner by carrying out risk management. Through risk management, the Company

risiko. Melalui manajemen risiko, Perusahaan melakukan identifikasi terhadap kemungkinan munculnya risiko-risiko baik eksternal maupun internal. Atas dasar identifikasi itu, Perusahaan akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya risiko tersebut, misalnya menggunakan asuransi yang relevan dengan transaksi, mengkaji dan/atau negosiasi kontrak sedemikian rupa sehingga kepentingan Perusahaan terlindungi secara hukum. Dengan menjalankan sistem manajemen risiko, PT Arkora Hydro Tbk dapat mewujudkan kegiatan operasi Perusahaan yang sehat dan mampu menghasilkan laba yang optimal.

Kebijakan Manajemen Risiko

Dalam rangka menciptakan dan merawat nilai yang dianut oleh Arkora Hdyro terdapat prinsip yang harus dibudidayakan oleh manajemen Perusahaan, yaitu antara lain proses manajemen risiko dilakukan secara terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, disesuaikan, inklusif, dinamis, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, memperhatikan faktor manusia dan budaya, serta dilakukan perbaikan berkelanjutan. Arkora Hdyro menjalankan pembudayaan sadar risiko melalui rangkaian kerangka kerja dan proses manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Direksi Perusahaan untuk dapat diterapkan di seluruh lini dan bagian di dalam lingkungan Perusahaan.

Penerapan manajemen risiko secara umum mengikuti arahan yang telah ditetapkan oleh kebijakan Perusahaan. Setiap bulan secara berkala, Perseroan menyusun laporan penerapan manajemen risiko untuk menjadi bahan evaluasi. Perusahaan mempunyai komitmen untuk mengungkapkan secara transparan risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai Perusahaan. Dengan demikian pemangku berkepentingan dapat memperhitungkan risiko-risiko yang relevan apabila melakukan transaksi bisnis dengan Perusahaan.

Pihak Pelaksana Manajemen Risiko di Perusahaan

Pihak yang menjalankan fungsi pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan adalah Divisi terkait yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam pelaksanaan tugasnya, Divisi terkait wajib berkoordinasi dengan Direktur Utama. Dalam penerapannya, Divisi terkait secara umum bertanggung jawab untuk menjalankan pengawasan serta memastikan bahwa kegiatan manajemen risiko telah berjalan dengan baik dan tepat, sehingga dapat menekan risiko-risiko dalam organisasi hingga ke level yang dapat diterima organisasi.

identifies the possible emergence of risks, both external and internal. On the basis of that identification, the Company will make the necessary efforts to minimize the occurrence of such risks, for example using insurance relevant to the transaction, reviewing and/or negotiating contracts in such a way that the Company's interests are legally protected. By implementing a risk management system, PT Arkora Hydro Tbk can realize the Company's healthy operations and is able to generate optimal profits.

Risk Management Policy

In order to create and maintain the values embraced by Arkora Hdyro, there are principles that must be cultivated by the Company's management, namely the risk management process that is carried out in an integrated, structured and comprehensive, adapted, inclusive, dynamic, based on the best available information, taking into account human and cultural factors, and making continuous improvements. Arkora Hdyro carries out risk awareness culture through a series of risk management frameworks and processes that have been established by the Company's Board of Directors to be implemented in all lines and divisions in the Company.

The implementation of risk management generally follows the directions set by the Company's policies. Every month, the Company compiles a report on the implementation of risk management for evaluation. The Company is committed to transparently disclosing the risks that can significantly affect the value of the Company. Therefore, stakeholders can take into account the relevant risks when conducting business transactions with the Company.

Risk Manager in the Company

The party that carries out the function of implementing risk management in the Company is the Related Division which is directly responsible to the President Director. In carrying out its duties, the Related Division is obliged to coordinate with the President Director. In its implementation, the Related Division is generally responsible for carrying out supervision and ensuring that risk management activities have been running properly and appropriately, so as to reduce risks in the organization to an acceptable level.

Risiko yang Dihadapi Perusahaan dan Upaya Mitigasi Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan selalu memperhatikan segala aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Salah satu upayanya adalah menjalani sistem manajemen risiko. Manajemen risiko menjadi bagian yang amat penting karena peran dan tanggung jawabnya bagi Perusahaan dalam pengendalian internal dan eksternal. Praktik manajemen risiko di Perusahaan sejatinya selalu diawasi dan di bawah pengendalian ketat untuk melindungi aset para pemangku kepentingan. Secara berkala, Perusahaan terus mengidentifikasi risiko yang dapat mengganggu aktivitas usaha serta mengoptimalkan sistem manajemen risikonya guna memitigasi berbagai risiko yang muncul.

Risks Faced by the Company and Risk Mitigation Efforts

In running its business, the Company always pays attention to all aspects of Good Corporate Governance. One of the efforts is to undergo a risk management system. Risk management is a very important part because of the roles and responsibilities for the Company in internal and external control. The practice of risk management in the Company is actually always monitored and under strict control to protect the assets of the stakeholders. The Company periodically identifies risks that may disrupt business activities and optimize its risk management system to mitigate various risks that arise.

Jenis Risiko / Type of Risk	Rencana Mitigasi / Mitigation Plan
Risiko Operasional / Operational Risk	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam upaya peningkatan kualitas Perusahaan Memastikan kerja sama sesuai dengan yang di persyaratkan Perusahaan. Melakukan komunikasi secara terus menerus dengan supplier untuk mendapatkan harga dan kualitas yang baik.
Risiko Keuangan / Financial Risk	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan pelaksanaan kontrak dengan supplier agar tidak terjadi fluktuasi harga. Memastikan piutang dagang dapat dikendalikan oleh Perusahaan.
Risiko Lingkungan / Environmental Risk	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan setiap kegiatan operasional tidak mencemari lingkungan di sekitar daerah operasional Perusahaan.
Risiko Teknologi / Technological Risk	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan semua alat proses produksi tidak mengalami kerusakan. Melakukan perawatan secara periodik atas alat-alat dan sistem yang tersedia di Perusahaan. Melakukan kalibrasi terhadap alat-alat produksi sehingga dipastikan keakuratannya. Memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai penggunaan sistem yang benar dan tepat.

Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Perusahaan

Pada tahun 2021, sistem manajemen risiko telah dilaksanakan secara efektif dan membantu meminimalisasi risiko yang dapat terjadi di dalam bisnis Perusahaan.

Overview of the Effectiveness of the Company's Risk Management System

In 2021, the risk management system has been implemented effectively and helped to minimize risks that may occur in the Company's business.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi sistem manajemen risiko di tahun 2021 dan tahun-tahun yang telah lalu, Direksi PT Arkora Hydro Tbk menyatakan bawah sistem manajemen

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Risk Management System

Based on the results of the identification and evaluation of the risk management system in 2021 and previous years, the Board of Directors of PT Arkora Hydro Tbk stated that the risk

risiko yang dimiliki oleh Perusahaan telah memadai baik dari aspek pengenalan, mitigasi, hingga pengendalian risiko-risiko yang ada di Perusahaan.

KODE ETIK

Tahun 2021 Perusahaan belum melakukan penyusunan Kode Etik Perseroan. Namun di tahun 2022 Perusahaan melakukan penyusunan Kode Etik Perusahaan. Hal itu dilakukan karena PT Arkora Hydro Tbk menjunjung tinggi pelaksanaan bisnis yang menganut norma dan etika. Sebagai bentuk komitmen nyata dari hal tersebut, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip GCG yang salah satunya dilakukan dengan mengupayakan seluruh aktivitas operasional yang dijalankan telah sesuai dengan norma, etika, serta kebijakan-kebijakan yang berlaku. Perusahaan memami bahwa etika bisnis merupakan standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen Perusahaan dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang profesional. Oleh karena itu, tujuan PT Arkora Hdyro menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dalam penyelenggaraan bisnis Perusahaan.

Dengan adanya kode etik, secara internal semua karyawan terikat dengan standar etis yang sama, sehingga akan mengambil kebijakan/keputusan yang sama terhadap kasus sejenis yang timbul. Kode Etik Perusahaan mengatur beberapa hal antara lain:

1. Visi, Misi, Nilai-nilai Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Asas Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. Maksud, Tujuan dan Manfaat Kode Etik;
3. Kode Etik;
4. Penegakan dan Pelaporan.

Untuk mendukung agar pelaksanaan pedoman kode etik menjadi budaya di seluruh insan Perusahaan, PT Arkora Hdyro senantiasa melakukan sosialisasi kode etik melalui kegiatan orientasi karyawan atau sejak karyawan baru menandatangani kontrak kerja. Pelanggaran terhadap kode etik dapat dianggap sebagai pelanggaran syarat ketenagakerjaan dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan jenis dan beratnya pelanggaran.

PERKARA PENTING

Sepanjang periode tahun 2021, Perusahaan tidak memiliki perkara penting atau permasalahan hukum yang menyangkut Direksi dan Dewan Komisaris maupun pejabat eksekutif lainnya yang sedang menjabat.

management system owned by the Company was adequate in aspect of recognizing, mitigating, to controlling the risks that exist in the Company.

CODE OF CONDUCT

In 2021 the Company has not prepared the Company's Code of Conduct. However, in 2022 the Company has prepared the Company's Code of Conduct. It was carried out because PT Arkora Hydro Tbk upholds business practices that adhere to norms and ethics. As a form of concrete commitment to the statement, the Company implements GCG principles, one of which is carried out by making all operational activities carried out in accordance with applicable norms, ethics, and policies. The Company understands that business ethics are standards and guidelines for all employees, including the management of the Company, based on high morals, honesty, transparency and a professional attitude. Therefore, the goal of PT Arkora Hdyro is to implement the principles of business ethics in the course of the Company's business.

With the code of conduct, all employees are bound by the same ethical standards internally, thus they will take the same policy/decision on similar cases that arise. The Company's Code of Conduct regulates several things, including:

1. Vision, Mission, Corporate Values, Good Corporate Governance, Principles of Good Corporate Governance;
2. Purpose, Objectives and Benefits of the Code of Conduct;
3. Code of Conduct;
4. Enforcement and Reporting.

To support the implementation of the code of conduct guidelines into a culture throughout the Company's personnel, PT Arkora Hdyro always disseminates the code of conduct through employee orientation activities or since new employees sign a work contract. Violation of the code of conduct can be considered a violation of the terms of employment and can be given sanctions according to the type and severity of the violation.

LEGAL CASES

There were no important cases or legal issues concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as other incumbent executive officers throughout 2021.

SANKSI ADMINISTRATIF

Pada tahun 2021, tidak terdapat sanksi administratif yang diterima oleh Perusahaan, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris. Oleh karena itu, Perusahaan tidak menyajikan informasi tentang pokok perkara/gugatan; status penyelesaian perkara/gugatan; dan pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Keterbukaan Informasi Publik

Perusahaan memahami bahwa hak dalam memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu yang senantiasa harus dihormati untuk mendukung terciptanya keteraturan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, Perusahaan berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi publik. Dengan menjalankan komitmen tersebut, Perusahaan ingin memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bisnis Perusahaan sehingga Perusahaan dapat menerapkan prinsip transparansi demi mewujudkan penerapan GCG secara optimal.

Situs Web Perusahaan

PT Arkora Hydro Tbk menyediakan sarana media informasi melalui situs web yang beralamat di www.arkora-hydro.com, yang dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Situs web tersebut telah dikelola oleh Perusahaan sejak tahun 2018. Perusahaan selalu memperbaharui informasi di dalam situs web tersebut sesuai dengan perkembangan yang terjadi di Perusahaan.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

There were no administrative sanctions received by the Company, members of the Board of Directors, and members of the Board of Commissioners in 2021. Therefore, there is no information on the subject matter of the case/claim; status of settlement of cases/claims; and its effect on the condition of the Company.

ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

Public Information Disclosure

The Company understands that the right to obtain information is part of the human rights of every individual which must always be respected to support the creation of order and harmony in social life. Therefore, the Company is committed to implementing public information disclosure. By carrying out this commitment, the Company wants to provide convenience for the public in supervising the implementation of the Company's business so that the Company can implement the principle of transparency to realize the optimal implementation of GCG.

Company Website

PT Arkora Hydro Tbk provides information media facilities through a website at www.arkora-hydro.com, which can be accessed easily by anyone, anywhere, and anytime. The website has been managed by the Company since 2018. The Company always updates the information on the website in accordance with developments in the Company.



Situs resmi Perusahaan memuat berbagai informasi yang terdiri dari menu:

The Company's official website contains various information consisting of the following menus:

MENU	ISI	CONTENT
Tentang Kami / About Us	<p>berisi tentang berbagai informasi mengenai Perusahaan dengan sub menu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Overview/Gambaran, memuat tentang profil Perusahaan. Visi dan Misi, menyampaikan informasi mengenai visi dan misi Perusahaan. Manajemen, berisi tentang informasi profil Dewan Komisaris dan Direksi. CSR/TJSL, menyampaikan informasi mengenai prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dijalankan oleh Perusahaan. 	<p>containing various information about the Company with sub menus:</p> <ol style="list-style-type: none"> Overview, containing the Company's profile. Vision and Mission, containing information regarding the vision and mission of the Company. Management, containing information on the profiles of the Board of Commissioners and the Board of Directors. CSR/TJSL, containing information regarding the principles of Social and Environmental Responsibility implemented by the Company.
Pembangkit Listrik Tenaga Air / Hydropower	<p>memuat tentang operasional bisnis Perusahaan di bidang PLTA.</p> <ol style="list-style-type: none"> Overview/Gambaran, berisi tentang informasi mengenai kegiatan bisnis Perusahaan. Sustainability, menyampaikan prinsip pembangunan keberlanjutan Perusahaan. 	<p>containing the Company's business operations in the HPP sector.</p> <ol style="list-style-type: none"> Overview, containing information regarding the Company's business activities. Sustainability, containing the principles of sustainable development of the Company.
Investor	<ol style="list-style-type: none"> Investasi Energi Hijau Informasi Pemegang Saham, mengenai informasi pemegang saham. Ikhtisar Data Keuangan, berisi tentang kondisi keuangan Perusahaan. Annual Report, informasi terkait Laporan Tahunan Perusahaan. Good Corporate Governance, memuat tentang regulasi dan Tata Kelola Perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> Investing in Green Energy Shareholder Information, containing information on shareholder. Financial Highlight, containing the Company's financial condition. Annual Report, containing information related to the Company's Annual Report. Good Corporate Governance, containing regulations and Corporate Governance.
Proyek / Project	<p>mengulas kegiatan operasional Perusahaan.</p>	<p>reviewing the Company's operational activities.</p>
Berita / News	<p>menyampaikan informasi mengenai perkembangan terbaru Perusahaan.</p>	<p>containing information regarding the latest developments of the Company.</p>
Karier / Career	<p>memuat informasi tentang lowongan kerja yang ada di PT Arkora Hydro Tbk.</p>	<p>containing information about job vacancies at PT Arkora Hydro Tbk.</p>

Media Sosial

Perusahaan memahami bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini mengalami perubahan yang begitu cepat. Oleh karenanya, PT Arkora Hydro senantiasa memiliki komitmen untuk selalu menjadi yang terdepan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang terkini dan dapat menjangkau secara luas karena banyak digunakan oleh masyarakat dari seluruh lapisan.

Social Media

The Company understands that the development of information and communication technology is currently undergoing rapid changes. Therefore, PT Arkora Hydro always is committed to always being at the forefront of adopting information and communication technology in the form of social media as a means of public communication that is the latest and can reach widely because it is widely used by people from all walks of life.

Adapun akun media sosial yang telah dimiliki oleh Perusahaan, yaitu:

1. Instagram : @arkorahydro
2. Youtube : Arkora Hydro
3. Linked In : Arkora Hydro, PT

Melalui akun-akun tersebut, Perusahaan menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan Perseroan serta pengembangan usaha dan kegiatan Perusahaan.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) merupakan mekanisme untuk menghindari dan mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran, yang tidak terbatas pada etika bisnis dan etika kerja (kode etik), Anggaran Dasar Perusahaan, Perjanjian Kemitraan, kontrak dengan pihak eksternal, rahasia perusahaan, konflik kepentingan, dan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan setiap aktivitas bisnisnya, PT Arkora Hydro dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, Perseroan mengembangkan sistem WBS untuk mengelola tindakan pelanggaran yang mungkin terjadi dalam menjalani aktivitas usaha dan ditujukan untuk menjamin segala kegiatan usaha Perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala apa pun, baik secara internal maupun eksternal. Dengan demikian dapat tercipta situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan WBS di lingkungan Perusahaan mencakup seluruh elemen Perusahaan sehingga diharapkan mampu meningkatkan aspek kepatuhan pada seluruh insan Perusahaan terhadap ketentuan, kebijakan, dan peraturan yang berlaku.

Prosedur Penyampaian Laporan Pelanggaran

Untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) berjalan optimal, Perusahaan memberikan kemudahan bagi karyawan dengan menyediakan berbagai fasilitas penyampaian laporan, yang terdiri dari kotak saran, formulir isian, serta akses email khusus untuk penyampaian laporan pelanggaran sebagai bagian dari sistem pelaporan pelanggaran Perusahaan.

The social media accounts of the Company are as follows:

1. Instagram : @arkorahydro
2. Youtube : Arkora Hydro
3. Linked In : Arkora Hydro, PT

Through these accounts, the Company delivers information related to the Company as well as the business development and activities of the Company.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Whistleblowing System (WBS) is a mechanism to avoid and minimize the possibility of violations, which are not limited to business ethics and work ethics (code of conduct), Company Articles of Association, Partnership Agreements, contracts with external parties, company secrets, conflicts of interest, and applicable regulations. In carrying out each of its business activities, PT Arkora Hydro is required to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG) and comply with the applicable laws and regulations. Therefore, the Company developed a WBS system to manage violations that may occur in carrying out business activities and is intended to ensure that all of the Company's business activities may run smoothly without any obstacles, both internally and externally. In this way, a clean and responsible work environment can be created.

The implementation of WBS in the Company covers all elements of the Company so that it is expected to be able to improve the compliance aspect of all Company personnel to the applicable provisions, policies, and regulations.

Procedure for Submission of Violation Reports

To support the optimal implementation of the Whistleblowing System (WBS), the Company provides convenience for employees by providing various report submission facilities, which consist of a suggestion box, a form, as well as access to a special email for submitting a violation report as part of the Whistleblowing System.

Pelapor harus menyertakan informasi lengkap sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat, yang mencakup indikasi, fakta pelanggaran, nama pelapor, cara melakukan pelanggaran, serta waktu dan tempat terjadinya pelanggaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan dilakukan dengan iktikad baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perlindungan bagi Pelapor

Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada pelapor terkait dengan ancaman/tindakan yang didapat akibat laporan pelanggaran serta merahasiakan identitas pelapor. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pengelola sistem pelaporan pelanggaran, pihak yang melaksanakan investigasi, maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan tersebut.

Penanganan Pengaduan dan Pihak yang Mengelola Pengaduan

Dewan Komisaris akan menindaklanjuti setiap pengaduan pelanggaran yang diterima oleh Perusahaan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran.
2. Jika kebenaran dugaan terbukti, Direksi akan menetapkan sanksi kepada pelaku pelanggaran atas masukan dari kelompok pemeriksa yang ditetapkan sesuai ketentuan Perusahaan. Apabila pelanggaran oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris terbukti, melalui mekanisme RUPS, pemegang saham akan memutuskan sanksi.

Media Pelaporan

Perusahaan menyediakan media pelaporan dugaan pelanggaran melalui website, e-mail, telepon, dan *desk* pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor, yaitu:

Telepon : (021) 29333288
 Faksimile : (021) 29333298
 Email : hydro@arkora.com
 Surat/Pos : Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 28 SCBD
 Jakarta 12190

Hasil dari Penanganan Pengaduan

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan tidak menerima pengaduan laporan dugaan pelanggaran.

The whistleblower shall include complete information as the basis for making the right decision, which includes indications, facts of the violation, the name of the reported party, how the violation was committed, as well as the time and place of the violation. This is done to ensure that reports are carried out in good faith and can be accounted for.

Protection for Whistleblowers

As a form of the Company's commitment to implementing Good Corporate Governance, the Company is obliged to provide protection and security to the whistleblower regarding the threats/actions obtained as a result of the violation report and keep the identity of the whistleblower confidential. The protection of the whistleblower also applies to the managers of the whistleblowing system manager, the party conducting the investigation, as well as the parties providing information related to the complaint.

Complaint Handling and Complaint Management

The Board of Commissioners will follow up on any complaints of violations received by the Company with the following procedures:

1. Conduct inspections to ensure truth.
2. If the truth of the allegation is proven, the Board of Directors will impose sanctions on the perpetrators of violations based on input from the group of examiners determined in accordance with the provisions of the Company. If violations by members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners are proven, through the GMS mechanism, the shareholders will decide on sanctions.

Reporting Media

The Company provides media for reporting alleged violations via website, e-mail, telephone, and complaint desk that can be used by the whistleblower, namely:

Phone : (021) 29333288
 Facsimile : (021) 29333298
 E-mail : hydro@arkora.com
 Letter/Post : Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 28 SCBD
 Jakarta 12190

Result of Complaint Handling

Throughout 2021, the Company did not receive any reports of alleged violations.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN KEBIJAKAN ANTI GRATIFIKASI

Dalam aktivitas bisnis Perusahaan pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerja sama. Dalam hubungan tersebut sering terjadi adanya gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya yang tidak dapat dihindarkan. Untuk menjaga kegiatan bisnis yang akuntabilitas dan transparan, PT Arkora Hydro menerapkan kebijakan anti korupsi dan anti gratifikasi dengan mengacu pada pedoman Anggaran Dasar Perusahaan. Untuk menjaga hubungan bisnis dengan para Pemangku Kepentingan, maka perlu diatur hal-hal yang terkait dengan Gratifikasi dan tata cara atau mekanisme pelaporannya di lingkungan Perseroan, yaitu dengan cara Perseroan menyediakan layanan penanganan pengaduan Gratifikasi.

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi

Sepanjang tahun 2021 Perusahaan tidak melaksanakan pelatihan/sosialisasi anti korupsi dan anti gratifikasi di Perusahaan.

ANTI-CORRUPTION POLICY AND ANTI-GRATIFICATION POLICY

In general, the Company's business activities are inseparable from the relationships and interactions between internal and external parties who cooperate with each other. In this relationship, gratification often occurs from one party to another, which is unavoidable. To maintain accountability and transparent business activities, PT Arkora Hydro implements an anti-corruption and anti-gratification policy by referring to the Company's articles of association. To maintain business relations with the Stakeholders, it is necessary to regulate matters related to Gratification and the procedures or reporting mechanisms in the Company, namely by the way the Company provides Gratification complaint handling services.

Anti-Corruption and Anti-Gratification Training/Socialization

The Company did not conduct training/socialization on anti-corruption and anti-gratification in the Company throughout 2021.



ARKORA HYDRO

LAPORAN KEBER- LANJUTAN

Sustainability
Report



07

LAPORAN KEBERLANJUTAN

Sustainability Report

STRATEGI KEBERLANJUTAN

PENJELASAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

[102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-56]

PT Arkora Hydro Tbk dalam menjalankan usahanya berkomitmen tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga menjamin kinerja keberlanjutan usaha di bidang ekonomi, sosial, serta lingkungan hidup. Pelaksanaan kinerja keberlanjutan yang dilakukan melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan (*Corporate Social and Environmental Responsibility*) diharapkan dapat memberikan nilai positif dan memelihara hubungan baik antara Perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Perusahaan juga melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan berorientasi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals – SDGs*). Dalam rangka mencapai hal tersebut, Perusahaan menciptakan dan berbagi nilai-nilai dengan pemangku kepentingan dan terus berupaya untuk meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan melalui berbagai kebijakan strategis terkait keberlanjutan, serta dievaluasi secara berkala efektivitasnya untuk penyempurnaan dengan kondisi dan lingkungan bisnis Perusahaan.

Adapun pelaksanaan kegiatan kinerja keberlanjutan didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

1. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Pelanggan;
3. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

SUSTAINABILITY STRATEGY

DESCRIPTION OF SUSTAINABILITY STRATEGY

[102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-56]

In running its business, PT Arkora Hydro is committed not only to generate profit but also to ensure business sustainability performance in the economic, social, and environmental fields. The implementation of sustainability performance through Corporate Social and Environmental Responsibility (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/TJSL) activities is expected to provide positive values and maintain good relations between the Company and all stakeholders.

The Company also implements sustainable development oriented to the Sustainable Development Goals (SDGs). In realizing this commitment, the Company creates and shares values with stakeholders and continues to strive to minimize adverse impacts on the environment through various strategic policies related to sustainability followed by regular implementation on its effectiveness for improving the Company's business conditions and environment.

The implementation of sustainability performance activities is based on the applicable laws and regulations, including:

1. Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety;
2. Law No. 8 of 1999 concerning Customer Protection;
3. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower;

“

Selain peningkatan pertumbuhan ekonomi, Indonesia juga berhasil menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendapatan, hingga inflasi secara bersamaan.

In addition to improving economic growth, Indonesia also managed to reduce poverty, unemployment, income gap, and inflation rates simultaneously.

”



4. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
7. Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

4. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
5. Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.
6. Government Regulation No. 47 of 2021 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies.
7. Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation.

IKHTISAR KINERJA ASPEK KEBERLANJUTAN
SUSTAINABILITY ASPECT PERFORMANCE HIGHLIGHTS
ASPEK EKONOMI
ECONOMIC ASPECT
**Perbandingan Target dan Kinerja Produksi
Production Target and Performance Comparison**
(dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain / in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian / Description	Target			Realisasi Kinerja / Performance Realization		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Pendapatan / Revenues	197.000	51.000	143.000	198.393	52.094	145.119.
Laba (Rugi) Usaha / Operating Income (Loss)	49.000	(22.000)	(8.500)	49.730	(22.962)	(8.618)
Investasi / Investment	4.000	10.000	7.000	3.874	9.752	6.379
Pembiayaan TJSL / TJSL Financing	650	250	15	669	251	17
Produksi (ton/m/buah) / Production (ton/m/item)	95.000	77.000	20.000	95.740	77.641	20.501
Jumlah produk ramah lingkungan / Number of eco-friendly products	95.000	77.000	20.000	95.740	77.641	20.501

ASPEK LINGKUNGAN HIDUP
ENVIRONMENTAL ASPECT
**Capaian Kinerja Lingkungan Hidup
Environmental Performance Achievements**

Uraian / Description	Satuan / Unit	2021	2020	2019
Energi Listrik / Electricity Usage	Juta Rupiah / Million Rupiah	83,9	93,2	133,3
Energi Air / Water Usage	Juta Rupiah / Million Rupiah	1.006,8	590,9	107,1
Pelestarian Keanekaragaman Hayati / Biodiversity Conservation	Pohon / Trees	1.065	2.129	10.647

ASPEK SOSIAL

Dana yang dikeluarkan untuk kegiatan kemasyarakatan sebesar Rp669 juta. Mencakup daerah:

1. Desa Panawa, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
2. Desa Kuku, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
3. Desa Panjoka, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

SOCIAL ASPECT

Funds allocated for community activities were recorded at Rp669 million, covering a number of regions, including:

1. Panawa Village, Garut Regency, West Java.
2. Kuku Village, Poso Regency, Central Sulawesi.
3. Panjoka Village, Poso Regency, Central Sulawesi.

**Skala Usaha
Business Scale**

Aspek / Aspect	Satuan / Unit	2021	2020	2019
Jumlah Karyawan* / Number of Employees	Orang / Employees	70	71	69
Penjualan / Sales	Rp miliar / Rp billion	198	52	145
Laba Bersih / Net Profit	Rp miliar / Rp billion	49,7	(22,9)	(8,6)
Jumlah Aset / Total Assets	Rp miliar / Rp billion	688	561	534
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	Rp miliar / Rp billion	517	440	392
Ekuitas / Equity	Rp miliar / Rp billion	171	121	142
Biaya Program TJSL / TJSL Program Cost	Rp juta / Rp million	669	251	17

*) hanya entitas induk / parent entity only

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

STRUKTUR TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

[102-18] [5a, 5b]

Pelaksanaan tata kelola Perusahaan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Tata kelola ini menjadi dasar bagi Perseroan dalam meningkatkan nilai Perseroan bagi seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan UUPT, struktur tata kelola Perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Untuk mendukung pelaksanaan kinerja keberlanjutan, Direksi membentuk beberapa unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kinerja keberlanjutan sesuai dengan pembidangan tugas masing-masing unit kerja.

PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja keberlanjutan berjalan optimal, pengelolaan penerapan keberlanjutan Perusahaan dilaksanakan oleh Direktur. Selaku penanggung jawab penerapan keberlanjutan, Direktur mengkoordinir praktik berkelanjutan yang dilaksanakan oleh divisi terkait dan mengelola lalu lintas data dan informasi terkait keberlanjutan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur dibantu oleh Divisi Engineering. Divisi ini melaksanakan rapat minimal 12 kali dalam setahun untuk memantau dan mengevaluasi program keberlanjutan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

PENILAIAN RISIKO ATAS PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

PT Arkora Hydro Tbk senantiasa berupaya menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara baik, untuk itu Perusahaan menjunjung tinggi prinsip transparansi. Sebagai wujud nyata dari pelaksanaan prinsip transparansi, Perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi dan anti gratifikasi yang sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan. Kebijakan ini kemudian diturunkan menjadi prosedur pelaksana dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas tindak korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan Perusahaan.

Prosedur pelaksanaan tersebut diantaranya, yakni Perusahaan membuat Pakta Integritas dan dilampirkan dalam surat Perjanjian Kerja Sama dengan pihak eksternal Perseroan. Selanjutnya, hasil dari penilaian ini akan dilaporkan kepada Direktur sebagai salah satu bentuk tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakannya sesuai dengan fungsionalnya.

SUSTAINABLE GOVERNANCE

SUSTAINABLE GOVERNANCE STRUCTURE

[102-18] [5a, 5b]

The implementation of corporate governance refers to the laws and regulations in Indonesia, in particular Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). This governance serves as the basis for the Company in increasing the value of the Company for all stakeholders. In accordance the Corporate Law, the corporate governance structure consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. To support the implementation of sustainability performance, the Board of Directors has established a number of work units that are responsible for implementing sustainability performance in accordance with the duties of each work unit.

PARTY IN CHARGE OF THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE FINANCE

To support the optimal implementation of sustainability performance, the management of the Company's sustainability implementation is carried out by the Director. As the party in charge of sustainability implementation, the Director carry out coordination on the sustainability practices conducted by the relevant divisions and management of information and data traffic related to sustainability. In carrying out his/her duties the Director is assisted by the Engineering Division. This division holds meetings at least 12 times a year to monitor and evaluate the sustainability program that has been established by the Company.

RISK ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE FINANCE

PT Arkora Hydro Tbk always strives to appropriately implement Good Corporate Governance (GCG) in which the Company upholds the principle of transparency. As a tangible manifestation of the implementation of the transparency principle, the Company has issued anti-corruption and anti-gratuity policy in accordance with the terms and procedures that have been determined. This policy is then reduced to implementing procedures in identifying, measuring, monitoring, and controlling risks of corruption that may occur within the Company.

The implementation procedures include, the drawing up of Integrity Pact attached to Cooperation Agreement with external parties of the Company. Results of this assessment will be reported to the Director as a form of duties and responsibilities that are carried out in accordance with their functions.

HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

[102-40, 102-42, 102-43, 102-44] [5.d]

PT Arkora Hydro Tbk memahami bahwa untuk dapat mencapai bisnis yang berkelanjutan, Perusahaan harus memiliki hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan. Berangkat dari pemahaman tersebut, Perusahaan telah mengidentifikasi pemangku kepentingan sebagai pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan terhadap Perusahaan serta dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan Perusahaan seperti karyawan, investor/pemegang saham, regulator, mitra bisnis, komunitas/asosiasi, konsumen/pelanggan, masyarakat, dan lain-lain. Identifikasi pemangku kepentingan tersebut telah dibahas dan mendapat persetujuan manajemen. Adapun pendekatan yang digunakan Perusahaan dalam melibatkan pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

Pemangku Kepentingan / Stakeholders	Metode Pendekatan / Approaching Method
Karyawan / Employees	Pelatihan dan Pendidikan, serta promosi jabatan karyawan / Employee training and Education, as well as work promotion
Investor/Pemegang Saham / Investors/Shareholders	Rapat Umum Pemegang Saham / General Meeting of Shareholders
Regulator / Regulator	Laporan sesuai dengan ketentuan regulator / Submission of reports in accordance with regulatory provisions
Mitra bisnis / Business Partners	Kontrak dan perjanjian kerja / Work contracts and agreements
Konsumen / Customers	Sarana pengaduan pelanggan / Customer complaint submission facility
Masyarakat / Public	Pelibatan tenaga kerja, sarana pengaduan masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan / Recruitment of labors, community complaint submission facility, and implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility activities

PERMASALAHAN TERHADAP PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [5e]

Sepanjang tahun 2021 Perseroan mengalami sejumlah tantangan, antara lain:

- Ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19.
- Volatilitas nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang negara lain.
- Perkembangan infrastruktur transportasi, energi, dan infrastruktur lain.
- Kualitas Sumber Daya Manusia.

Oleh sebab itu, fokus Perusahaan adalah meningkatkan kualitas produksi dan melakukan efisiensi biaya operasional sehingga penerapan keuangan berkelanjutan dapat terimplementasi dengan baik.

STAKEHOLDER RELATIONS

[102-40, 102-42, 102-43, 102-44] [5.d]

PT Arkora Hydro Tbk understands that in order to realize a sustainable business, the Company shall have a harmonious relationship with all stakeholders. Based on this awareness, the Company has identified stakeholders as parties who are involved with an interest of the Company and the capability to influence and/or be influenced by the achievement of the Company's objectives. The identified stakeholders include employees, investors/shareholders, regulators, business partners, communities/associations, consumers/customers, the society, etc. The identification of these stakeholders has been discussed and approved by the management of the Company. Approaches used by the Company to carry out stakeholder engagement are as follows:

ISSUES ON THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE FINANCE [5e]

Throughout 2021, the Company experienced a number of challenges, which include:

- Economic uncertainty due to the Covid-19 pandemic.
- Volatility of rupiah exchange rate with currencies of other countries.
- Development of transportation infrastructure, energy and other infrastructure.
- Quality of Human Resources.

For facing such challenges, the Company has determined its focus to improve the quality of production and perform operational cost efficiency so that the implementation of sustainable finance can be properly implemented.

KINERJA KEBERLANJUTAN

KEGIATAN MEMBANGUN BUDAYA KEBERLANJUTAN

PT Arkora Hydro Tbk berkomitmen untuk membangun budaya korporasi yang berdasarkan nilai-nilai keberlanjutan ekonomi, sosial, kemasyarakatan, K3, hingga pelanggan. Budaya ini mulai diperkenalkan kepada karyawan mulai dari tahap rekrutmen dan secara terus menerus dilaksanakan dalam beragam kegiatan Perusahaan.

Budaya keberlanjutan yang dibangun oleh Perusahaan diwujudkan dalam berbagai kebijakan dalam bidang keberlanjutannya yang bertujuan untuk menciptakan nilai keberlanjutan. Beberapa kegiatan membangun budaya keberlanjutan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021 diantaranya adalah efisiensi energi yang diimplementasikan dengan mematikan lampu dan pendingin udara sebelum meninggalkan kantor, serta menggunakan air untuk mencuci tangan secara wajar.

KINERJA EKONOMI [201-1]

Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi

Tahun / Year	Perbandingan Target dan Realisasi Produksi (Juta Rupiah) / Comparison of Target and Actual Production (Million Rupiah)		Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan (juta Rupiah) / Comparison of Revenue Target and Realization (millions of Rupiah)		Perbandingan Target dan Realisasi Laba/Rugi (juta Rupiah) / Comparison of Profit (Loss) Target and Realization (millions of Rupiah)	
	Target	Realisasi / Realization	Target	Realisasi / Realization	Target	Realisasi / Realization
2021	95.000	95.740	197.000	198.393	49.000	49.730
2020	77.000	77.641	51.000	52.094	(22.000)	(22.962)
2019	20.000	20.501	143.000	145.119	(8.500)	(8.618)

Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan

SUSTAINABILITY PERFORMANCE

ACTIVITIES OF BUILDING A SUSTAINABLE CULTURE

PT Arkora Hydro Tbk is committed to building a corporate culture based on the values of sustainability in the economic, social, community, OHS, and customers aspects. This culture was introduced to employees starting from the recruitment stage and is continuously implemented in various Company activities.

The sustainability culture built by the Company is manifested in various policies in the field of sustainability that aim to create sustainable value. Several activities to build a sustainability culture carried out throughout 2021 include energy efficiency which is implemented by turning off lights and air conditioning before leaving the office, and using water to wash hands properly.

ECONOMIC PERFORMANCE [201-1]

Comparison of Target and Performance of Production, Portfolio, Financing or Investment, Revenues and Profit (Loss)

Comparison of Targets and Performance of Portfolio, Financing Target or Investments in Financial Instruments or Projects of Sustainable Finance

Perbandingan Target dan Realisasi Investasi pada Proyek Keuangan Berkelanjutan (Rp juta) / Comparison of Investment Target and Realization on Sustainable Finance Projects (Rp million)

Tahun / Year	Target	Realisasi / Realization
2021	4.000	3.874
2020	10.000	9.752
2019	7.000	6.379

KINERJA LINGKUNGAN HIDUP [307]

Biaya Lingkungan Hidup

PT Arkora Hydro Tbk berkomitmen kuat untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup. Para program TJSJ dalam bidang lingkungan hidup, Perusahaan mengutamakan pada pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk meminimalisasi kemungkinan dampak negatif dari aktivitas usaha Perusahaan sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan. Pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan terhadap lingkungan hidup salah satunya adalah menjaga kelestarian lingkungan untuk mencegah timbulnya kerusakan, seperti terjadinya pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan dan lain sebagainya yang dapat mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan karyawan serta masyarakat.

Pada tahun 2021, Perusahaan telah melakukan kegiatan pelestarian lingkungan hidup, antara lain melakukan penanaman kembali pohon di area seluas 9,7 Ha dengan jumlah tanaman 10.647 pohon, 2.129 pohon, dan 1.065 pohon dengan jenis pohon pinus, puspa, kayu manis, nangka, serta peteuy. Kegiatan tersebut telah dilakukan Perusahaan sejak tahun 2019.

Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan belum memiliki kebijakan materi yang ramah lingkungan dan berdampak baik bagi kinerja keberlanjutan di bidang lingkungan hidup. Material ramah lingkungan yang digunakan oleh Perusahaan diantaranya terdapat pada bahan baku yang digunakan.

Jumlah Energi yang Digunakan [302-1] [305-1]

		Pemakaian Energi Energy Usage		
Satuan / Unit		2021	2020	2019
BBM (Bensin) / Fuel (Gasoline)	Juta Rupiah / Million Rupiah	105,9	106,1	106,3
Listrik / Electricity	Juta Rupiah / Million Rupiah	590,9	93,3	133,3

Pada tahun 2021, tagihan energi listrik Perusahaan sebesar Rp590,9 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp93,3 juta.

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE [307]

Environmental Cost

PT Arkora Hydro Tbk is strongly committed to realizing environmental sustainability. For TJSJ programs in the environmental sector, the Company prioritizes the maintenance, development, and management of the environment to minimize the possible negative impacts of the Company's business activities while also making a positive contribution to environmental conservation. One of the Company's responsibilities towards the environment is to preserve the environment for preventing damages, such as water pollution, air pollution, noise, etc. that can interfere with the health, comfort, and safety of employees and the community.

In 2021, the Company has carried out a number of environmental conservation activities, such as reforestation covering an area of 9.7 Ha with a total of 10,647 trees, 2,129 trees, and 1,065 trees consisting of pine, needlewood, cinnamon, jackfruit, and bitter bean. This activity has been carried out by the Company since 2019.

Use of Eco-Friendly Materials

Throughout 2021, the Company has no policy on the use of materials that are eco-friendly and has a positive impact on sustainability performance on the environment. Eco-friendly materials used by the Company also include raw materials.

Amount of Energy Used [302-1] [305-1]

In 2021, the Company's electricity bill was accumulated to Rp590.9 million, an increase compared to 2020 which was recorded at Rp93.3 million.

Sementara pada pemakaian energi BBM, Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp105,9 juta, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp106,1 juta. Angka tersebut memperlihatkan upaya Perusahaan dalam mengelola penggunaan BBM agar tetap dalam level yang terjaga.

Emisi yang dihasilkan oleh Perseroan berasal dari jumlah emisi yang dihasilkan dari penggunaan energi untuk menunjang pelaksanaan aktivitas operasional Perusahaan, yaitu energi listrik dan BBM. Hingga tahun 2021 Perusahaan belum melakukan pengukuran emisi dari kegiatan bisnis Perseroan dikarenakan bisnis utama Perusahaan bergerak di bidang PLTA yang memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT), yakni air sungai.

Penggunaan Air

Untuk memenuhi kebutuhan air di Perseroan, khususnya di kantor pusat Perseroan, PT Arkora Hydro menggunakan sumber air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sementara untuk kebutuhan air di daerah operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Perseroan menggunakan air sungai. Untuk biaya tagihan air di tahun 2021 mengalami peningkatan mencapai Rp1 miliar bila dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp590 juta.

Upaya dan Pencapaian Efisiensi dan Penggunaan Energi Terbarukan [103-2]

Sebagai upaya Perusahaan menjaga keberlanjutan sumber energi, Perusahaan menerapkan beberapa langkah efisiensi energi, antara lain:

1. Mematikan lampu dan pendingin udara sebelum meninggalkan kantor pusat maupun kantor lokasi.
2. Menggunakan air untuk mencuci tangan secara wajar.
3. Menggunakan kertas bekas untuk keperluan kantor, seperti drafting. Perusahaan menerapkan kebijakan penggunaan kertas bekas atau print bolak-balik.
4. Menggunakan kendaraan hemat bahan bakar.
5. Menggunakan instalasi listrik hemat energi.

Di samping itu, Perseroan selalu melakukan sosialisasi kepada setiap setiap insan Perusahaan untuk melakukan gerakan penghematan energi.

Meanwhile, in the use of fuel energy, the Company spent a total of Rp105.9 million, a decrease compared to 2020 which was recorded at Rp106.1 million. This figure represents the success of the Company's efforts in managing the use of BBM in a well-maintained condition.

The emission generated by the Company comes from the total emission generated from the use of energy to support the implementation of the Company's operational activities, namely electricity and fuel. As of 2021 the Company has not measured emissions from the Company's core business engaging in HPP that utilizes new and renewable energy (NRE), namely the river.

Water Usage

To meet the water needs of the Company, especially at the Company's head office, PT Arkora Hydro utilizes water from the Regional Drinking Water Company (PDAM). Meanwhile, for the water needs in the operational area of the Hydro Powerplant (HPP), the Company uses water sourced from the local river. Water bills in 2021 increased to Rp1 billion compared to 2020 of Rp590 million.

Efforts and Achievements of Efficiency and Use of Renewable Energy [103-2]

As part of the Company's efforts to maintain the sustainability of energy sources, the Company implements several energy efficiency measures, such as:

1. Turning off lights and air conditioners before leaving the head office or location office.
2. Using water to wash hands in an appropriate manner.
3. Utilizing used paper for the Company's use, such as drafting. The Company implements policy of using used paper and print on both sides of the paper.
4. Using fuel-efficient vehicles.
5. Using energy-efficient electrical installations.

In addition, the Company always conducts dissemination to every employee of the Company to carry out energy saving movements.

Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati

Kegiatan bisnis serta wilayah operasional Perusahaan tidak berada di daerah konservasi ataupun memiliki keanekaragaman hayati.

Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan tidak melakukan usaha konservasi keanekaragaman hayati, hal ini disebabkan oleh wilayah Perusahaan tidak berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati.

Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan

Dalam rangka mencapai pengurangan emisi yang dikonsumsi oleh Perusahaan sekaligus menghasilkan kualitas udara serta lingkungan yang berkelanjutan, Perusahaan melaksanakan beberapa upaya pengendalian emisi, yakni melakukan penanaman kembali pohon di area sekitar lokasi PLTA dan menggunakan kendaraan hemat bahan bakar.

Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis [103-1] [103-2] [103-3] [306-3]

PT Arkora Hydro Tbk merupakan Perusahaan pembangkitan tenaga listrik melalui sumber energi baru dan terbarukan yang berasal dari aliran air sehingga dalam menjalankan kegiatan dinilai lebih ramah lingkungan. Berikut jenis limbah dan efluen yang dihasilkan dari operasional bisnis Perusahaan:

Jenis Limbah / Waste Type	Satuan / Unit	2021
Limbah B3 / B3 Waste		
Oli Bekas / Used Oil	Kilogram / Kilogram	15
Limbah Non-B3 / Non-B3 Waste		
Ban Motor Bekas / Used Motor Vehicle Tire		12
Ban Mobil Bekas / Used Car Tire		82
Lampu PJU Bekas / Used PJU Lamp		19
Lampu TL Bekas / Used TL Lamp	Kilogram / Kilogram	9
Kemasan Bekas B3 / B3 Used Packaging		1,5
Limbah Elektronik (Keyboard) / Electronic Waste (Keyboard)		2
Limbah Elektronik (UPS) / Electronic Waste (UPS)		30

Hingga akhir tahun 2021, Perusahaan tidak menghasilkan limbah cair dari kegiatan bisnisnya sehingga tidak terdapat data jumlah limbah efluen yang dihasilkan pada kategori jenis limbah cair.

Impact of Operational Areas Located in Biodiverse Areas or in/near Conservation Areas

The Company's business activities and operational areas are not located in conservation areas or those having biodiversity.

Biodiversity Conservation Efforts

Throughout 2021, the Company did not carry out biodiversity conservation efforts for the Company's operational area not being located in biodiverse area or in/near conservation areas.

Emission Reduction Efforts and Achievements

To reduce emissions generated by the Company while at the same time producing a sustainable air quality and environment, the Company implements several measures of emission control, including reforestation in the surrounding area of HPP and use of fuel-efficient vehicles.

Total Amount and Intensity of Waste and Effluent Generated by Type [103-1] [103-2] [103-3] [306-3]

PT Arkora Hydro Tbk is a Company that generates electricity through new and renewable energy sources derived from water resources, resulting in eco-friendly activities. The types of waste and effluent generated from the Company's business operations is as follows:

As of the end of 2021, the Company did not generate any liquid waste from its business activities, thus, data of total effluent waste generated in the liquid waste category is not available to be disclosed.

Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen [306-2]

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan melakukan pengolahan limbah dan efluen dengan mekanisme sebagai berikut:

Waste and Effluent Management Mechanism [306-2]

Throughout 2021, the Company carried out waste and effluent management with the following mechanism:

Jenis Limbah / Waste Type	Pengelolaan Limbah / Waste Management
Limbah B3 / B3 Waste	Limbah yang terkumpul kemudian diserahkan dan dikelola oleh pihak ketiga. / Waste is collected to be handled and managed by a third party
Limbah Non-B3 / Non-B3 Waste	Menyediakan tempat sampah untuk limbah Non-B3 kemudian limbah yang terkumpul diserahkan dan dikelola oleh pihak ketiga. / Provide a trash can for Non-B3 waste then the collected waste is handed over and managed by a third party.

Tumpahan yang Terjadi

PT Arkora Hydro Tbk selalu menjaga kualitas mekanisme pembuangan limbah yang dihasilkan dari operasional Perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan sepanjang tahun 2021, tidak terdapat tumpahan yang terjadi pada proses pembuangan limbah operasional Perusahaan. Sebagai bagian dari mitigasi, Perusahaan senantiasa melatih karyawan untuk mengantisipasi kondisi darurat.

Waste Spills

PT Arkora Hydro Tbk always maintains the quality of the waste disposal mechanism generated from the Company's operations. This is evidenced by the fact that throughout 2021, there were no spills that occurred in the Company's operational waste disposal process. As part of mitigation, the Company continuously trains employees to anticipate emergency conditions.

Kepatuhan Lingkungan [103-2, 103-3, 307-1]

Perseroan senantiasa menjunjung tinggi komitmennya untuk memperhatikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan dalam menjalankan kegiatan operasional. Untuk mendukung komitmen tersebut, Perseroan berupaya untuk selalu menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku terkait pengelolaan lingkungan hidup. Keseriusan Perseroan dalam mematuhi peraturan yang berlaku tercermin dari nihilnya denda dan sanksi non-moneter yang ditujukan kepada Perseroan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Environmental Compliance [103-2, 103-3, 307-1]

The Company always upholds its commitment to paying attention to aspects of environmental sustainability and safety in carrying out its operational activities. To support this commitment, the Company strives to always maintain compliance with applicable laws and regulations related to environmental management. The Company's seriousness in complying with applicable regulations is reflected in the zero fines and non-monetary sanctions imposed to the Company for non-compliance with laws and regulations related to environmental management.

Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan

Hingga 31 Desember 2021, Perusahaan tidak menerima adanya pengaduan lingkungan hidup yang disebabkan oleh adanya aktivitas bisnis di Perusahaan.

Number and Materials of Environmental Complaints Received and Resolved

As of December 31, 2021, the Company has not received any environmental complaints caused by the Company's business activities.

ASPEK SOSIAL

Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen

Pelanggan merupakan salah satu aspek penting penunjang keberhasilan Perusahaan. Untuk itu, PT Arkora Hydro Tbk selalu memprioritaskan pengembangan program sosial terkait tanggung jawabnya terhadap pelanggan. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam bentuk

SOCIAL ASPECT

Commitment to Providing Equal Products and/or Services to Consumers

Customers are one of the most important aspects supporting the success of the Company. Therefore, PT Arkora Hydro Tbk always prioritizes the development of social programs related to its responsibilities to customers. The implementation of these responsibilities is realized in the form of providing equal

memberikan layanan serta jasa yang setara kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen ini sesuai dengan prinsip Perusahaan untuk senantiasa bersikap adil serta memberikan pelayanan dan dampak yang sebaik-baiknya bagi seluruh Pemangku Kepentingan Perusahaan.

ASPEK KETENAGAKERJAAN

Kesetaraan Kesempatan Bekerja [103-2, 404-2]

PT Arkora Hydro Tbk memberikan kesempatan bekerja secara adil kepada seluruh karyawan sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas karyawan tanpa membedakan gender, suku, ras, agama, orientasi seksual, maupun hal lainnya yang tidak berkaitan dengan kadar profesionalisme seseorang.

Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa

Dalam menjalankan bisnisnya, PT Arkora Hydro senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang terkait dengan ketenagakerjaan di Indonesia. Oleh karena itu, Perusahaan tidak memiliki tenaga kerja yang berada di bawah umur maupun yang diperkerjakan secara paksa.

Upah Minimum Regional

Sumber Daya Manusia merupakan aspek penting bagi keberlangsungan usaha Perusahaan. Memahami hal itu, PT Arkora Hydro Tbk selalu memperhatikan pemberian upah yang layak kepada karyawan Perusahaan. Setiap karyawan yang bekerja di Perusahaan mendapatkan upah yang sesuai dengan upah minimum regional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Penetapan besaran upah selain mengacu pada ketentuan peraturan Pemerintah Daerah, juga berdasarkan kinerja, kompetensi, pengalaman individu, dan faktor eksternal lainnya. Di samping mendapatkan gaji pokok, karyawan juga mendapatkan tunjangan lainnya. Perusahaan juga mengikutsertakan semua karyawan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Berikut ini adalah rincian tunjangan yang diberikan kepada karyawan pada tahun 2021

services and services to all stakeholders. This commitment is in accordance with the Company's principles to always be fair and provide the best service and impact for all the Company's Stakeholders.

LABOR ASPECT

Equal Employment Opportunity

PT Arkora Hydro Tbk provides fair employment opportunities to all employees in accordance with the competencies and capabilities of employees without any discrimination against gender, ethnicity, race, religion, sexual orientation, or other matters that are not relevant to one's professionalism.

Child Labor and Forced Labor

In running its business, PT Arkora Hydro always complies with applicable laws and regulations, including those related to employment in Indonesia. Therefore, the Company is committed to not recruit workers who are underage or who are forced to work.

Regional Minimum Wage

Human Resources is an important aspect for the sustainability of the Company's business. From this awareness, PT Arkora Hydro Tbk always pays attention in providing decent wages to the Company's employees. Every employee who works at the Company receives at least the amount of wage in accordance with the regional minimum wage set by the Regional Government. In addition to the provisions of Regional Government regulations, the amount of wage is also based on performance, competence, individual experience, and other external factors. In addition to getting a basic salary, employees also get other benefits. The company also includes all employees in the BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan programs.

Details of the benefits provided to employees in 2021 is as follows:

Bentuk Tunjangan / Form of Allowance	Karyawan Tetap / Permanent Employee	Karyawan Kontrak / Contract Employees
Tunjangan Hari Raya / Religious Day Allowance	✓	✓
Tunjangan Makan / Food Allowance	✓	✓
Tunjangan Transportasi / Transportation Allowance	✓	✓

Bentuk Tunjangan / Form of Allowance	Karyawan Tetap / Permanent Employee	Karyawan Kontrak / Contract Employees
Tunjangan Telekomunikasi / Communication Allowance	✓	✓
Tunjangan Pajak Penghasilan / Income Tax Allowance	✓	✓
Tunjangan Jabatan / Position Allowance	✓	✓
Tunjangan Operasional / Operational Allowance	✓	✓
Tunjangan <i>Shift</i> / Shift Allowance	✓	✓
Tunjangan Insentif / Incentive Allowance	✓	✓
Cuti Tahunan / Annual Leave	✓	✓
Cuti Melahirkan (khusus wanita) / Maternal Leave (female only)	✓	✓
BPJS Ketenagakerjaan	✓	✓
BPJS Kesehatan	✓	✓

Program Pensiun

Perseroan memiliki fasilitas program pensiun bagi karyawan tetap yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang meliputi jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun Karyawan. Seluruh karyawan tetap Perseroan juga dilindungi oleh BPJS Kesehatan yang melibatkan kontribusi baik dari pemberi kerja maupun masing-masing karyawan yang dihitung dari persentase gaji pokok karyawan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah di Indonesia. Hal itu dilakukan oleh Perusahaan sebagai bentuk dukungan Perseroan terhadap kesejahteraan dan apresiasi para karyawan.

Perekrutan dan Pergantian Karyawan

Untuk dapat mencapai pertumbuhan bisnis yang positif dan memiliki kemampuan menghadapi persaingan usaha, Perseroan memahami pentingnya memiliki SDM yang unggul dan berkompeten. Oleh karenanya Perseroan selalu berupaya mencari bibit unggul dengan membuka kesempatan seluas-luasnya secara transparan dan adil. Selain melakukan rekrutmen secara terbuka/transparan, Perusahaan juga melakukan proses rekrutmen internal dalam bentuk mutasi dan promosi dalam rangka memberikan kesempatan bagi karyawan internal untuk mengisi posisi yang tersedia. Perseroan terus menyempurnakan sistem rekrutmen untuk memberikan kemudahan bagi para pencari kerja, tidak terkecuali bagi mahasiswa atau pelajar yang membutuhkan *internship*.

Dalam rangka memenuhi tenaga kerja baik di kantor pusat maupun kantor lokasi, Perusahaan lebih mengutamakan calon karyawan yang berasal dari daerah lokal untuk menyerap tenaga kerja semaksimal mungkin, sepanjang memenuhi

Pension Program

The Company has prepared a pension program facility for permanent employees under the management of BPJS Ketenagakerjaan, which include Pension Plan and Employee Pension Insurance. All permanent employees of the Company are also protected by BPJS Kesehatan which involves contributions from both the employer and each employee calculated from the percentage of the employee basic salary as determined by government regulations in Indonesia. This was carried out by the Company as a form of the Company's support for the welfare and appreciation for the employees.

Employee Recruitment and Turnover

To be able to achieve positive business growth, face business competition, the Company is aware of the importance of having excellent and competent human resources. Therefore, the Company always strives to find great talents by opening the widest opportunities in a transparent and fair manner. In addition to conducting open/transparent recruitment, the Company also carries out an internal recruitment process in the form of mutations and promotions in order to provide opportunities for internal employees to fill available positions. The Company also keeps improving the recruitment system to be more accessible to jobseekers as well as students for internships.

In order to meet the needs of labors both at the head office and location offices, the Company prioritizes prospective employees from the surrounding/local areas, as long as they meet the requirements and qualification standards set by the

persyaratan dan standar kualifikasi yang dibutuhkan. Pada tahun 2021, Perusahaan merekrut karyawan baru sebanyak 2 (dua) orang untuk berbagai posisi yang seluruhnya adalah tenaga kerja lokal.

Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman

Perusahaan berupaya untuk senantiasa menciptakan kerja yang layak, sehat, dan aman bagi seluruh karyawannya. Upaya tersebut dibuktikan dengan adanya fasilitas kesehatan dan keamanan yang disediakan bagi karyawan selama di tempat kerja, diantaranya adalah memberikan jaminan kesehatan pada karyawan tetap yang meliputi alat pelindung diri (APD) dan prosedur kerja sesuai dengan HSE. Selain itu, Perusahaan juga bekerja sama dengan klinik setempat untuk memberikan perawatan bagi karyawan yang sedang sakit atau membutuhkan pertolongan pertama saat berada di lingkungan Perusahaan. Di samping itu, seluruh karyawan tetap juga mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang dihitung dari persentase gaji pokok karyawan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja [103-2, 403-9]

Arkora Hydro menyadari pentingnya Kesehatan dan Kesehatan Kerja (K3) seluruh karyawan, baik yang berada di kantor pusat maupun kantor lokasi. Untuk mendukung pelaksanaan K3, Perusahaan melakukan internalisasi dan sosialisasi budaya K3 untuk mencegah terjadinya insiden kecelakaan kerja. Hingga kini Perusahaan selalu melaksanakan perbaikan sistem K3 yang berkelanjutan demi mewujudkan tetap terjaganya pencapaian *zero accident* di lingkungan kerja Arkora Hydro.

Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai [103-2, 404-2]

SDM yang mau berinovasi menjadi penggerak roda bisnis Perusahaan. Untuk itu, diperlukan komitmen Perusahaan untuk menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai secara berkala. PT Arkora Hydro Tbk memahami hal itu sehingga senantiasa mendorong setiap karyawan untuk meningkatkan standar kompetensi secara berkesinambungan agar mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan bisnis yang cepat.

Perusahaan memberikan kesempatan sekaligus memberikan ruang bagi seluruh insan Perusahaan untuk mengembangkan kompetensinya dengan berbagai pelatihan atau pendidikan

Company. In 2021, the Company recruited a total of 2 (two) employees for various positions, in which all of whom were local workers.

Decent and Safe Working Environment

The Company strives to always create decent, healthy, and safe work for all of its employees. This effort is manifested in the provision of health and safety facilities for employees at work, including health insurance for permanent employees which include Personal Protective Equipment (PPE) and HSE-based work procedures. In addition, the Company also partners with the local clinic to provide treatment for employees who are unwell and require first aids at the Company's work environment. In addition, all permanent employees also receive BPJS Employment and Health which is calculated from the percentage of the employee's basic salary in accordance with the Labor Law.

Occupational Health and Safety [103-2, 403-9]

Arkora Hydro is aware of the importance of Occupational Health and Safety (OHS) for all employees, both at the head office and the location office. To support the implementation of OHS, the Company conducts internalization and dissemination of OHS culture to prevent accidents at work. As of today, the Company is always continuously improving the OHS system in order to maintain the achievement of zero accident in Arkora Hydro's work environment.

Employee Competency Development and Training [103-2, 404-2]

Human resources with strong motivation to carry out innovations are the driving force of the Company's business. Therefore, the Company is committed to provide training programs and employee capacity development on a regular basis. For this commitment, PT Arkora Hydro Tbk always encourages every employee to continuously improve competency standards in order to be able to adapt to technological developments and rapid changes in the business environment.

The Company provides opportunities and space for all Company personnel to develop their competencies through various training or education provided by the Company

yang disediakan oleh Perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai ini dilakukan secara rutin dan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap departemen maupun karyawan, yang secara keseluruhan dirancang oleh Departemen *Human Resource and Development* (HRD). Rincian mengenai pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai dapat dilihat pada sub bab pelatihan karyawan sepanjang 2021 pada halaman 61.

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pengembangan SDM, Perusahaan merumuskan strategi yang diterapkan secara terus menerus dengan dukungan aspek penting yang terdiri dari organisasi, manusia, dan infrastruktur. Ketiga aspek ini diperlukan Perusahaan untuk mencapai keunggulan organisasi dan SDM secara menyeluruh.

Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karier

Penilaian kinerja dan pengembangan karier di Perusahaan sangat penting dilakukan guna meningkatkan produktivitas karyawan maupun Perusahaan. Dengan adanya penilaian kinerja, karyawan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan perbaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja. Berangkat dari pemikiran tersebut, PT Arkora Hydro Tbk melaksanakan penilaian kinerja dan pengembangan karier melalui sistem HRD dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Departemen. Penilaian kinerja dilakukan secara berkala setiap tahunnya. Selama tahun 2021, penilaian kinerja individu pada setiap Departemen telah mencakup seluruh level jabatan berdasarkan KPI. Selanjutnya, pencapaian kinerja diverifikasi dan dievaluasi oleh setiap kepala di jenjangnya masing-masing. Hasil penilaian kinerja dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pemetaan kompetensi, kebutuhan pengembangan, dan promosi terutama pada level staf dan operatif.

Memberdayakan Sumber Daya Manusia

Dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2021 dan persiapan untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO), Perusahaan melakukan berbagai serangkaian transformasi demi kelancaran usaha dan menjaga performa kinerja keuangan. Dengan melakukan upaya tersebut, Perusahaan berhasil meningkatkan kapasitas produksi dan perolehan pendapatan di tahun 2021 sehingga pada tahun 2021, tidak terdapat karyawan yang kehilangan pekerjaan secara terpaksa.

internally and externally. The employee competency development and training is carried out regularly and adjusted to the needs of each department and employee, which is overall designed by the Human Resource and Development (HRD) Department. Details regarding employee training and capacity development can be seen in the employee training sub-chapter throughout 2021 on page 61.

Human Resource (HR) Development Strategy

In HR development, the Company strives to formulate strategies to be implemented continuously with the support of important aspects which consist of organization, people, and infrastructure. These three aspects are crucial for the Company to achieve organizational and HR excellence as a whole.

Performance Assessment and Career Development

Performance assessment and career development in the Company are crucial to be implemented in order to increase the productivity of employees and the Company. With the performance assessment, employees have the opportunity to take corrective action with the aim of improving performance. Based on this idea, PT Arkora Hydro Tbk carries out performance assessment and career development through the HRD system according to the needs of each Department. Every year, the Company conducts a performance assessment. Throughout 2021, individual performance assessments in each Department have covered all levels of positions based on the KPIs. Furthermore, performance achievements are verified and evaluated by each head at their respective levels. The results of the performance assessment are used as the basis for mapping competencies, development needs, and promotions, especially at the staff and operative level.

Empowering Human Resources

In dealing with various challenges in 2021 and in preparation of the Initial Public Offering (IPO), the Company carried out a number of innovations and transformations to realize smooth business and maintain financial performance. By making these efforts, the Company has succeeded in increasing production capacity and generating revenues throughout 2021. In 2021, there were no employees forced to resign from their position at the Company.

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, Perusahaan menerapkan sistem komunikasi dua arah yang bebas terbuka dan bertanggung jawab. Dengan demikian, seluruh insan Perusahaan dapat memiliki kesempatan untuk menyampaikan saran dan pendapat mengenai Perusahaan atau hubungan kerja di dalam Perusahaan dengan atasan langsung atau kepada Departemen HR setiap waktu dengan tidak mengganggu kegiatan/jam kerja.

ASPEK KEMASYARAKATAN [103-2, 403-9]

Dampak Operasi terhadap Masyarakat Sekitar

Perusahaan senantiasa mengembangkan program kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, budaya hingga lingkungan. Dampak positif program-program tersebut diantaranya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat sekitar, peningkatan kesejahteraan, dan perbaikan tingkat kesehatan masyarakat.

Pengaduan Masyarakat

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan tidak mendapatkan laporan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan di bidang lingkungan hidup.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan mengadakan kegiatan tanggung jawab sosial di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan rabat beton jalan di Desa Panawa Kabupaten Garut, Jawa Barat.
2. Pemasangan penerangan jalan umum Desa Kuku, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
3. Peningkatan jalan Desa Panjoka, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANGAN PRODUK/JASA BERKELANJUTAN

INOVASI DAN PENGEMBANGAN PRODUK/JASA KEUANGAN BERKELANJUTAN

Selama Tahun Buku, Perusahaan telah melakukan beberapa inovasi baik terkait pengembangan produk, proses produksi, proses distribusi, hingga inovasi-inovasi dalam program *Corporate Social and Environmental Responsibility* - TJSL untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan - TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Complaint Mechanism on Labor Issues

In order to create a harmonious work environment, the Company implements a two-way communication system that is free, open and responsible. Thus, all employees of the Company have the opportunity to submit suggestions and opinions regarding the Company or the working relationship within the Company with their direct superiors or to the HR Department at any time without interfering with work activities/hours.

COMMUNITY ASPECT [103-2, 403-9]

Impact of Operations on Local Communities

The Company always carry out improvements on community programs such as education, health, local economic development, culture, and the environment. The positive impacts of these programs include improving the quality of human resources (HR) of the local communities, increasing welfare, and improving the quality of public health.

Community Complaint

Throughout 2021, the Company did not receive any reports of public complaints related to violations committed by the Company in the environmental sector.

Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL) Activities

The social responsibility activities held by the Company throughout 2021 are as follows:

1. Construction of lean concrete in Panawa Village, Garut Regency, West Java.
2. Installation of public street lighting in Kuku Village, Poso Regency, Central Sulawesi.
3. Road improvement in Panjoka Village, Poso Regency, Central Sulawesi.

RESPONSIBILITY ON SUSTAINABLE PRODUCT/SERVICE DEVELOPMENT

INNOVATION AND DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE FINANCIAL PRODUCTS/SERVICES

During the Fiscal Year, the Company has made several innovations related to product development, production processes, distribution processes, and innovations in the *Corporate Social and Environmental Responsibility* - TJSL program to support the Sustainable Development Goals (SDGs).

PRODUK/JASA YANG SUDAH DIEVALUASI KEAMANANNYA BAGI PELANGGAN

Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk menawarkan layanan yang aman, sehat, dan berkualitas kepada para pelanggannya. Layanan yang ditawarkan Perusahaan dihasilkan dari proses produksi listrik yang dilakukan dengan efisien dan memperhatikan kondisi lingkungan.

DAMPAK PRODUK/JASA

Perusahaan telah melakukan penilaian pada layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Dalam setiap layanan yang dihasilkan oleh Perusahaan, efek samping yang mungkin timbul senantiasa diinformasikan kepada pelanggan secara transparan.

JUMLAH PRODUK/LAYANAN YANG DITARIK KEMBALI

Pada tahun 2021, tidak terdapat penarikan layanan maupun jasa yang dihasilkan oleh Perusahaan akibat komponen yang bermasalah. Perusahaan senantiasa melakukan antisipasi dan tindakan yang memadai untuk memastikan pelanggan tidak dirugikan.

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PRODUK DAN/ATAU JASA KEUANGAN BERKELANJUTAN

Perusahaan tidak melakukan survei tingkat kepuasan pelanggan dikarenakan produksi yang dihasilkan Perseroan berupa energi listrik dan pelanggan utama Perusahaan hanya PLN.

PRODUCTS/SERVICES EVALUATED FOR CUSTOMER SAFETY

The Company is always committed to offering safe, healthy and quality services to its customers. The services offered by the Company are generated from the electricity production process that is carried out efficiently and takes into account environmental conditions.

IMPACT OF PRODUCTS/SERVICES

The Company has carried out an assessment on the services offered to customers. In every service provided by the Company, any possible side effects are always informed to customers in a transparent manner.

NUMBER OF RECALLED PRODUCTS/SERVICES

In 2021, there were no services generated by the Company due to problematic components that were recalled. The Company always takes adequate anticipations and actions in ensuring the satisfaction of customers.

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY ON SUSTAINABLE FINANCIAL PRODUCTS AND/OR SERVICES

The Company did not conduct a survey of customer satisfaction level as the Company is engaged in the electricity generation business with the Company's only main customer being the PLN.

REFERENSI SILANG GRI STANDARD [GRI 102-55]

Cross Reference GRI Standard [GRI 102-55]

GRI Standard		Halaman / Page
GRI 102: Pengungkapan Umum 2016 / General Disclosures 2016		
Profil Organisasi / Organizational Profile		
GRI 102-1	Nama Organisasi / Name of the organization	32
GRI 102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa / Activities, brands, products, and services	36
GRI 102-3	Lokasi kantor pusat / Location of headquarters	32
GRI 102-4	Lokasi operasi / Location of operations	32, 40, 41
GRI 102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum / Ownership and legal form	32, 47, 48, 49-55
GRI 102-7	Skala organisasi / Scale of the organisation	41, 42, 43, 44, 45
GRI 102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lain / Information on employees and other workers	60, 61, 62
GRI 102-9	Rantai pasokan / Supply chain	N/A
GRI 102-11	Pendekatan atau prinsip pencegahan / Precautionary principle or approach	N/A
GRI 102-12	Inisiatif eksternal / External initiatives	N/A
GRI 102-13	Keanggotaan dalam Asosiasi / Membership in Association	40
Strategi / Strategy		
GRI 102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior / Statement from senior decision-maker	19, 29, 154
Ethics and Integrity / Ethics and Integrity		
GRI 102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku / Values, principles, standards, and norms of behaviour	19, 119
Tata Kelola / Governance		
GRI 102-18	Struktur tata kelola / Governance structure	92, 131
Keterlibatan Pemangku Kepentingan / Stakeholder Engagement		
GRI 102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan / List of stakeholder groups	132
GRI 102-42	Identifikasi dan seleksi pemangku kepentingan / Identifying and selecting stakeholders	132
GRI 102-43	Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan / Approach to stakeholder engagement	132
GRI 102-44	Topik utama dan masalah / Key topics and concerns raised	132
Praktik Pelaporan / Reporting Practice		
GRI 102-45	Daftar entitas yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasi / Entities included in the consolidated financial statements	49
GRI 102-46	Penetapan isi laporan dan batasan topik / Defining report content and topic boundaries	128
GRI 102-47	Daftar topik material / List of material topics	128
GRI 102-48	Penyajian kembali informasi / Restatements of information	N/A
GRI 102-49	Pengungkapan perubahan pada pelaporan / Changes in reporting	N/A
GRI 102-50	Periode pelaporan / Reporting period	1
GRI 102-51	Tanggal penerbitan laporan sebelumnya / Date of issuance of previous report	N/A
GRI 102-52	Siklus pelaporan / Reporting cycle	N/A
GRI 102-55	Indeks isi GRI Standards / GRI Content Index	144-146
GRI 102-56	Assurance oleh pihak eksternal / External assurance	N/A

REFERENSI SILANG GRI STANDARD [GRI 102-55]

Cross Reference GRI Standard [GRI 102-55]

GRI Standard		Halaman / Page
GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016 / Economic Performance 2016		
GRI 103-1	Penjelasan topik material dan batasannya / Explanation of the material topic and its Boundaries	132
GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya / The management approach and its components	132
GRI 103-3	Evaluasi pendekatan manajemen / Evaluation of the management approach	132
GRI 201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan / Direct economic value generated and distributed	130, 133
GRI 204: Praktik Pengadaan 2016 / Procurement Practices 2016		
GRI 103-1	Penjelasan topik material dan batasannya / Explanation of the material topic and its Boundaries	N/A
GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya / The management approach and its components	N/A
GRI 103-3	Evaluasi pendekatan manajemen / Evaluation of the management approach	N/A
GRI 204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal / Proportion of spending on local suppliers	N/A
GRI 301: Material 2016 / Materials 2016		
GRI 103-1	Penjelasan topik material dan batasannya / Explanation of the material topic and its Boundaries	134
GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya / The management approach and its components	134
GRI 103-3	Evaluasi pendekatan manajemen / Evaluation of the management approach	134
GRI 301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume / Materials used by weight or volume	134
GRI 302: Energi 2016 / Energy 2016		
GRI 103-1	Penjelasan topik material dan batasannya / Explanation of the material topic and its Boundaries	134
GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya / The management approach and its components	134
GRI 103-3	Evaluasi pendekatan manajemen / Evaluation of the management approach	134
GRI 302-1	Konsumsi energi dalam organisasi / Energy consumption within the organization	134
GRI 302-2	Intensitas Energi / Energy Intensity	135
GRI 302-4	Pengurangan Energi / Reduction of Energy Consumption	135, 136
GRI 305: Emisi 2016 / Emissions 2016		
GRI 103-1	Penjelasan topik material dan batasannya / Explanation of the material topic and its Boundaries	136
GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya / The management approach and its components	136
GRI 103-3	Evaluasi pendekatan manajemen / Evaluation of the management approach	136
GRI 305-1	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (Cakupan 1) langsung / Direct (Scope 1) GHG emissions	135, 136
GRI 306: Air Limbah (Efluen) dan Limbah 2016 / Effluents and Waste 2016		
GRI 103-1	Penjelasan topik material dan batasannya / Explanation of the material topic and its Boundaries	136
GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya / The management approach and its components	136
GRI 103-3	Evaluasi pendekatan manajemen / Evaluation of the management approach	136
GRI 306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan / Water discharge by quality and destination	136
GRI 307: Kepatuhan Lingkungan 2016 / Environmental Compliance 2016		
GRI 103-1	Penjelasan topik material dan batasannya / Explanation of the material topic and its Boundaries	137
GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya / The management approach and its components	137
GRI 103-3	Evaluasi pendekatan manajemen / Evaluation of the management approach	137
GRI 307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup / Non-compliance with environmental laws and regulations	137

GRI Standard		Halaman / Page
GRI 403: Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2018 / Occupational Health and Safety 2018		
GRI 103-1	Penjelasan topik material dan batasannya / Explanation of the material topic and its Boundaries	137
GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya / The management approach and its components	137
GRI 103-3	Evaluasi pendekatan manajemen / Evaluation of the management approach	137
GRI 403-9	Kecelakaan kerja / Work-related injuries	138, 139
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016 / Training and Education 2016		
GRI 103-1	Penjelasan topik material dan batasannya / Explanation of the material topic and its Boundaries	60, 140
GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya / The management approach and its components	60, 140
GRI 103-3	Evaluasi pendekatan manajemen / Evaluation of the management approach	60, 111, 140
GRI 404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan / Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	61
GRI 404: Pekerja Paksa atau Wajib Kerja / Forced or Compulsory Labor		
GRI 103-1	Penjelasan topik material dan batasannya / Explanation of the material topic and its Boundaries	138
GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya / The management approach and its components	138
GRI 103-3	Evaluasi pendekatan manajemen / Evaluation of the management approach	138
GRI 404-2	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan untuk insiden kerja paksa atau wajib kerja / Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor	138
GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan / Customer Health Safety 2016		
GRI 103-1	Penjelasan topik material dan batasannya / Explanation of the material topic and its Boundaries	142
GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya / The management approach and its components	142
GRI 103-3	Evaluasi pendekatan manajemen / Evaluation of the management approach	142
GRI 416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa / Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and services	142, 143

REFERENSI SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021

SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Reference On Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan / Description		Halaman / Page
I. KETENTUAN UMUM / GENERAL PROVISIONS		
1. Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Annual Report of Issuers or Public Companies is the source or important information for investors or shareholders as the basis for consideration to make decision regarding investment, as well as the supervision medium on Issuers or Public Companies.	✓
2. Seiring dengan perkembangan Pasar Modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.	2. In line with the development of Capital Market and the rising needs of investors or shareholders for information disclosure, the Board of Directors and Board of Commissioners are required to improve the quality of information disclosure through the Annual Report of Issuers or Public Companies.	✓
3. Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.	3. Annual Report that is prepared methodically and is informative may facilitate the investors or shareholders to obtain the required information.	✓
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan.	4. This Circular Letter of Financial Services Authority is a guideline for Issuers or Public Companies that must be applied in preparing the Annual Report.	✓
II. BENTUK LAPORAN TAHUNAN / FORM OF ANNUAL REPORT		
1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.	1. The Annual Report is presented in the form of printed documents and copies of electronic documents.	✓
2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	2. The Annual Report presented in the form of printed documents, is printed on light-colored A4-sized paper of good quality, is bound, and can be reproduced in good quality.	✓
3. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format PDF.	3. The Annual Report presented in the form of a copy of electronic document is the Annual Report that is converted into PDF format.	✓
III. ISI LAPORAN TAHUNAN / ANNUAL REPORT CONTENT		
1. Ketentuan Umum	1. General Provisions	✓
a. Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1) ikhtisar data keuangan penting; 2) informasi saham (jika ada); 3) laporan Direksi; 4) laporan Dewan Komisaris; 5) profil Emiten atau Perusahaan Publik; 6) analisis dan pembahasan manajemen; 7) tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; 8) tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; 9) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan 10) surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan; 	a. Annual report at least contains information about: <ol style="list-style-type: none"> 1) an overview of key financial data; 2) stock information (if any); 3) report of the Board of Directors; 4) report of the Board of Commissioners; 5) the profile of Issuers or Public Companies; 6) management discussion and analysis; 7) the profile of Issuers or Public Companies; 8) social and environmental responsibilities of the Issuers or Public Companies; 9) the audited annual financial statements; and 10) statements of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners about responsibility for the Annual Report; 	
b. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami;	b. The Annual Report can present information in the form of pictures, charts, tables, and/or diagrams by stating clear titles and/or descriptions so as to be easy to read and understand;	

Keterangan / Description		Halaman / Page
<p>2. Uraian Isi Laporan Tahunan</p> <p>a. Ikhtisar Data Keuangan Penting</p> <p>Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendapatan/penjualan; 2) laba bruto; 3) laba (rugi); 4) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; 5) total laba (rugi) komprehensif; 6) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; 7) laba (rugi) per saham; 8) jumlah aset; 9) jumlah liabilitas; 10) jumlah ekuitas; 11) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; 12) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; 13) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; 14) rasio lancar; 15) rasio liabilitas terhadap ekuitas; 16) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan 17) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya; <p>b. Informasi Saham</p> <p>Informasi Saham (jika ada) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) jumlah saham yang beredar; b) kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan d) volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; <p>Informasi pada huruf a) diungkap oleh Emiten yang merupakan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek; Informasi pada huruf b), c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek;</p> 2) Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi; b) rasio pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham; c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; d) jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan e) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; 	<p>2. Contents of Annual Report</p> <p>a. Key Financial Data Highlights</p> <p>Key Financial Data Highlights contains financial information presented in the form of comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the Issuers or Public Companies run its business activities in less than three (3) years, which at least contains:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) revenues/sales; 2) gross profit; 3) profit (loss); 4) the amount of profit (loss) that can be attributed to the owner of the parent entity and the non controlling interests; 5) total comprehensive (loss) profit; 6) the amount of comprehensive profit (loss) that can be attributed to the owner of the parent entity and the non controlling interests; 7) profit (loss) per share; 8) total assets; 9) total liabilities; 10) total equity; 11) the ratio of profit (loss) to total assets 12) the ratio of profit (loss) to equity; 13) the ratio of profit (loss) to revenues/sales; 14) current ratio; 15) liability to equity ratio; 16) liability to total assets ratio; and 17) information and other financial ratios that are relevant to the Issuers or Public Companies and the type of industry; <p>b. Share Information</p> <p>Share information (if any) at least contains:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) shares that have been issued for each quarterly period (if any) presented in the form of comparison for the last 2 (two) financial years, which at least includes: <ol style="list-style-type: none"> a) the number of outstanding shares; b) market capitalization based on prices on the Stock Exchange where the shares are listed; c) the highest, lowest, and closing share prices on the Stock Exchange where the shares are listed; and d) trading volume on the Stock Exchange where the shares are listed; <p>Information in letter a) is disclosed by the Issuer that is a Public Company whose shares are listed and not listed on Stock Exchange; Information in letters b), c) and d) is disclosed only if the Issuer is a Public Company whose shares are listed on Stock Exchange;</p> 2) In case of corporate actions, such as stock split, reverse stock, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of the shares, stock information as outlined in Figure 1) shall be added with an explanation that at least cover: <ol style="list-style-type: none"> a) the date of the execution of corporate actions; b) stock split ratio, reverse stock, stock dividends, bonus shares, and changes to the nominal value of the shares; c) the number of outstanding shares before and after the corporate actions; d) the number of convertible securities (if any); and e) the number of shares before and after the corporate actions; 	<p>6-8</p> <p>9</p> <p>9</p>

Keterangan / Description	Halaman / Page
3) Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>), dan/atau penghapusan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau penghapusan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut; dan	4) In the event of temporary suspension of stock trading (<i>suspension</i>), and/or delisting of shares in the financial year, Issuers or Public Companies shall explain the reasons of the temporary suspension of stock trading (<i>suspension</i>) and/or share delisting; and 9
4) Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau penghapusan pencatatan saham (<i>delisting</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau penghapusan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut;	5) In the event of temporary suspension of stock trading (<i>suspension</i>), and/or delisting of shares in the financial year as referred to in number 3) still continues until the end of Annual Report period, Issuers or Public Companies shall explain the actions taken to settle the temporary suspension of stock trading (<i>suspension</i>) and/or share delisting; 9
c. Laporan Direksi Laporan Direksi paling sedikit memuat: 1) uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi: a) strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; b) peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; c) proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; d) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan e) kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; 2) gambaran tentang prospek usaha; dan 3) penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	c. Board of Directors Report Report of the Board of Directors at least contains: 1) a brief description about the performance of the Issuers or Public Companies, which at least includes the following: a) strategy and strategic policy of Issuers or Public Companies; b) role of the Board of Directors in formulating strategy and strategic policy of Issuers or Public Companies; c) process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the strategy and strategic policy of Issuers or Public Companies; d) comparison between the results achieved and the target; and e) constraints faced by Issuers or Public Companies; 2) description about business prospects; 3) the implementation of governance of Issuers or Public Companies; and 20-29
d. Laporan Dewan Komisaris Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat: 1) penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik; 2) 3) pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; 4) pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; 5) pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; dan 6) frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi;	d. Board of Commissioners Report Report of the Board of Commissioners at least contain: 1) assessment of the performance of the Board of Directors regarding the management of the Issuers or Public Companies; 2) supervision of the implementation of the strategy of the Issuers or Public Companies; 3) opinion on business outlook of Issuers or Public Companies prepared by the Board of Directors 4) opinion on the implementation of governance of Issuers or Public Companies; and 5) the frequency and advice-giving method to members of the Board of Directors; 12-19
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat: 1) nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; 2) akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: a) alamat; b) nomor telepon; c) nomor faksimile; d) alamat surat elektronik; dan e) alamat Situs Web;	e. Profile of Issuers or Public Companies The profile of Issuers or Public Companies at least contains: 1) the name of Issuers or Public Companies including when there is a name change, the reason for the change, and the effective date of name changes in the financial year; 2) access to Issuers or public companies including branch office or representative office which allows the public to obtain information regarding Issuers or Public Companies, including: a) address; b) phone number; c) fax number; d) electronic mail address; and e) Website address; 31-32
3) riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	3) brief history of Issuers of Public Companies; 33-34
4) visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik;	4) vision and mission of Issuers or Public Companies; 38
5) kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	5) business activities according to the latest articles of association, business activities implemented in the fiscal year, as well as the type of goods and/or services produced; 36

Keterangan / Description		Halaman / Page
6) wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; Wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan;	6) operational areas of Issuers or Public Companies; Operational areas refer to areas or locations where operational activities are conducted or the reach of the company's operational activities territory;	58-59
7) struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;	7) the organizational structure of the Issuers or Public Companies in the form of charts, at least up to the structure of a 1 (one) level below the Board of Directors, accompanied by the name and job title;	40
8) daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan;	8) list of industrial association memberships in both national and international level related to the implementation of sustainable financing;	40
9) profil Direksi, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; b) foto terbaru; c) usia; d) kewarganegaraan; e) riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; f) riwayat jabatan, meliputi informasi: (1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; (2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan (3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	9) profile of Board of Directors, at least contains: a) name and position in accordance with the duties and responsibilities; b) latest photos; c) age; d) citizenship; e) history of education and/or certifications; f) career history, including: (1) legal basis for appointment as a member of the Board of Directors in the Issuers or Public Companies concerned; (2) the double title, both as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or members of the committee as well as other positions both inside or outside of Issuers or Public Companies. If the member of the Board of Directors does not hold double positions, the information should be disclosed; and (3) work experience and the period of time both inside and outside of Issuers or Public Companies;	44-45
g) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Direksi dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada);	g) education and/or training which have been followed in improving the competence of the Board of Directors in the financial year (if any);	n/a
h) hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan	h) affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, the majority and controlling shareholders, be it directly or indirectly, up to the ultimate owner, including the names of the affiliated parties. In case members of the Board of Directors have no affiliation, Issuers or Public Companies shall disclose it; and	44-45
i) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	i) changes in the composition of members of the Board of Directors and the reasons thereof. If there is no change in the composition of members of the Board of Directors, such information shall be disclosed;	43
10) profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatan; b) foto terbaru; c) usia; d) kewarganegaraan; e) riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; f) riwayat jabatan, meliputi informasi: (1) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; (2) dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	10) profile of the Board of Commissioners, at least contains: a) name and position; b) latest photos; c) age; d) citizenship; e) history of education and/or certifications; f) career history, including information: (1) legal basis of appointment as a member of Board of Commissioners; (2) legal basis for first-time appointment as a member of the Board of Commissioners who is not an independent Commissioner in Issuers or Public Companies concerned;	41-43

Keterangan / Description	Halaman / Page
<p>(3) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan</p> <p>(4) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;</p>	<p>(3) double positions, both as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or members of the committee as well as other positions both inside or outside of Issuers or Public Companies. If the member of the Board of Commissioners does not hold double positions, the information shall be disclosed; and</p> <p>(4) work experience and the period of time both inside and outside of Issuers or Public Companies;</p>
<p>g) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Dewan Komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada);</p>	<p>g) education and/or training which have been followed in improving the competence of the Board of Commissioners in the financial year (if any);</p> <p>n/a</p>
<p>h) hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan</p>	<p>h) affiliation with other members of the Board of Commissioners and the majority and controlling shareholders, be it directly or indirectly, up to the ultimate owner, including the names of the affiliated parties. In case members of the Board of Commissioners have no affiliation, Issuers or Public Companies shall disclose it; and</p> <p>41-43</p>
<p>i) pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada);</p>	<p>i) statement of the independence of the Independent Commissioner in terms of Independent Commissioner has served for more than 2 periods.</p> <p>n/a</p>
<p>j) perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;</p>	<p>j) changes in the composition of members of the Board of Commissioners and the reasons thereof. If there is no change in the composition of members of the Board of Commissioners, such information shall be disclosed;</p> <p>43</p>
<p>11) dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;</p>	<p>11) in the event of a change in the composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that occurs after the end of financial year until the deadline for submission of the Annual Report, the composition disclosed in the annual report shall be the last and previous composition of members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;</p> <p>✓</p>
<p>12) jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/ kontrak) dalam tahun buku. Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel;</p>	<p>12) the number of employees based on gender, position, age, education level, and employment status (permanent/ temporary) in the fiscal year. The information disclosure may be presented in tables;</p> <p>60-61</p>
<p>13) nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari:</p> <p>a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;</p> <p>b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan</p> <p>c) kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik;</p>	<p>13) the name of the shareholders and the percentage of ownership at the end of the fiscal year, which consists of:</p> <p>a) shareholders who have a 5% (five percent) or more of the shares of Issuers or Public Companies;</p> <p>b) members of the Board of Directors and members of Board of Commissioners who have shares of Issuers or Public Companies. In case all members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners do not own shares therein, the information shall be disclosed; and</p> <p>c) a group of public shareholders, i.e. the group of shareholders that each has less than 5% (five percent) of the shares of Issuers or Public Companies;</p> <p>46</p>
<p>14) persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p>	<p>14) percentage of indirect shares owned by members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies in the Issuers or Public Companies at the start and end of the fiscal year, including information on shareholders listed on the shareholder register for the interest of indirect share ownership of members of Board of Directors and Board of Commissioners; In case all members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners do not own indirect shares therein, the information shall be disclosed; and</p> <p>46-47</p>

Keterangan / Description	Halaman / Page	
15) jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: a) kepemilikan institusi lokal; b) kepemilikan institusi asing; c) kepemilikan individu lokal; dan d) kepemilikan individu asing;	15) the number of shareholders and the percentage of share ownership per end of financial year by classification: a) Ownership of local institutions; b) Ownership of a foreign institution; c) Individual local ownership; and d) Individual foreign ownership;	46
16) informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	16) information regarding the majority and controlling shareholders and Issuers or Public Companies, either directly or indirectly, up to the individual owners, presented in the form of a scheme or a chart;	47-48
17) nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada); Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut;	17) name of subsidiaries, associated companies, joint venture in which the Issuers or Public Companies have common control with the entity, together with their percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of Issuers or Public Companies (if any); For subsidiaries, information about the address of the subsidiaries is added;	49-55
18) kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada);	18) share-listing chronology, number of shares, nominal value, and the offering price from the beginning of the share listing until the end of the fiscal year as well as the name of the Stock Exchange where the shares of Issuers or Public Companies are listed, including stock split, reverse stock, dividend shares, bonus shares, and changes in share par value, implementation of securities conversion, implementation of capital addition and reduction (if any);	9
19) informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18, yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/ imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	19) other securities listing chronology other than securities as referred to in number 18, which has not matured in the fiscal year, at least covering the securities name, year of issuance, interest rate/return, maturity date, offering value, and securities rating (if any);	9
20) informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya meliputi: a) nama dan alamat; b) periode penugasan; c) informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; d) biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan e) dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan f) Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.	20) information on the use of services from Public Accountant (PA) and Public Accounting Firm (PAF) along with its network/associations/alliances, covering: a) name and address; b) period of service; c) information on the audit and/or non-audit services provided; d) audit and/or non-audit fee for each service provided in the fiscal year; and e) if the appointed PA and PAF along with its network/associations/alliances do not provide any non-audit services, the information shall be disclosed; and f) Information disclosure on the use of services from Public Accountant (PA) and Public Accounting Firm (PAF) along with its network/associations/alliances may be presented in tables.	56
21) nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP; 22) dalam hal terdapat profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (fee), dan periode penugasan; dan	21) name and address of institutions and/or professionals supporting the capital market other than PA and PAF; 22) in case there are capital market professionals that provide services on a regular basis to the Issuers or Public Companies, information about services provided, the commission (fee), and period of service shall be disclosed; and	56-57
23) penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Emiten atau Perusahaan Publik baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang memuat: a) nama penghargaan dan/atau sertifikasi; b) badan atau lembaga yang memberikan; dan c) masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (kalau ada);	23) awards and/or certification at national and international level received by Issuers or Public Companies in the last fiscal year (if any), which contains: a) The name of the award and/or certification; b) Agency or institution that grants the award; and c) The validity period of the Award and/or certification (if any);	n/a

Keterangan / Description	Halaman / Page
<p>f. Analisis dan Pembahasan Manajemen</p> <p>Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:</p> <p>1) tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:</p> <p>a) produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;</p> <p>b) pendapatan/penjualan; dan</p> <p>c) profitabilitas;</p>	<p>f. Management Discussion and Analysis</p> <p>66-67</p> <p>Management discussion and analysis explains analysis and discussion of the financial statements and other important information with an emphasis on material changes that occurred during the fiscal year, i.e. at least covering:</p> <p>1) operational overview per operating segment according to the type of industry of Issuers or Public Companies, at least explaining:</p> <p>a) the production, which includes the processes, capacity, and its development;</p> <p>b) revenues/sales; and</p> <p>c) profitability;</p>
<p>2) kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:</p> <p>a) aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;</p> <p>b) liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;</p> <p>c) ekuitas;</p> <p>d) pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan</p> <p>e) arus kas;</p>	<p>2) comprehensive financial performance that includes a comparison of financial performance in the last 2 (two) financial years, an explanation of the causes of changes and the impact of those changes, at least about:</p> <p>a) current assets, non current assets, and total assets;</p> <p>b) current liabilities, non current liabilities, and total liabilities;</p> <p>c) equity;</p> <p>d) sales/revenue, expense, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss);</p> <p>e) cash flow;</p> <p>67-70</p>
<p>3) kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;</p>	<p>3) solvency, by presenting the relevant ratio calculation;</p> <p>71-72</p>
<p>4) tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;</p>	<p>4) receivable collectability rate of Issuers or Public Companies by presenting the relevant ratio calculation;</p> <p>71</p>
<p>5) struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure</i>) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;</p>	<p>5) the capital structure and management policy on capital structure are accompanied with the basis of determination of the policies;</p> <p>72</p>
<p>6) bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:</p> <p>a) tujuan dari ikatan tersebut;</p> <p>b) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;</p> <p>c) mata uang yang menjadi denominasi; dan</p> <p>d) langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;</p>	<p>6) Discussion about material commitments for capital goods investment with explanation which at least includes:</p> <p>a) the purpose of the commitments;</p> <p>b) the expected source of funding to meet the commitments;</p> <p>c) the currency for the denomination; and</p> <p>d) the planned steps of Issuers or Public Companies to protect the risk of the position of the foreign currency;</p> <p>73</p>
<p>7) bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:</p> <p>a) jenis investasi barang modal;</p> <p>b) tujuan investasi barang modal; dan</p> <p>c) nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;</p>	<p>7) Discussion about capital goods investment which are realized in the last financial year, at least include the following:</p> <p>a) type of capital goods investment;</p> <p>b) type of capital goods investment; and</p> <p>c) the investment value of the capital goods spent;</p> <p>73-74</p>
<p>8) informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);</p>	<p>8) Information and material facts that occur after balance sheet date (if any);</p> <p>74</p>
<p>9) prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;</p>	<p>9) Business prospects of the Issuers or Public Companies associated with the condition of the industry, the economy in general and the international market accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources;</p> <p>84-85</p>
<p>10) perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:</p> <p>a) pendapatan/penjualan;</p> <p>b) laba (rugi);</p> <p>c) struktur modal (<i>capital structure</i>); atau</p> <p>d) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;</p>	<p>10) A comparison between the target/projections at the beginning of the year and the results achieved (realization), about:</p> <p>a) revenues/sales;</p> <p>b) profit (loss);</p> <p>c) capital structure; or</p> <p>d) other matters that are considered important for Issuers or Public Companies;</p> <p>82</p>

Keterangan / Description	Halaman / Page
<p>11) target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pendapatan/penjualan; b) laba (rugi); c) struktur modal (<i>capital structure</i>); d) kebijakan dividen; atau e) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; 	<p>11) Target/projections to be achieved by Issuers or Public Companies for 1 (one) year ahead, about:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) revenues/sales; b) profit (loss); c) capital structure; d) dividend policy; or e) other matters that are considered important for Issuers or Public Companies; <p style="text-align: right;">82</p>
<p>12) aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;</p>	<p>12) Aspects of the marketing of goods and/or services of Issuers or Public Companies, at least regarding marketing strategy and market share;</p> <p style="text-align: right;">84</p>
<p>13) uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; b) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; c) jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan d) jumlah dividen per tahun yang dibayar; <p>Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p>	<p>13) Description about dividends in the last 2 (two) years (if any), at least:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dividend policy; i.e. information on the percentage of total dividends paid to net profit; b) cash dividend payment date and/or the date of distribution of non cash dividends; c) the amount of the dividend per share (cash and/or non cash); and d) the amount of dividends paid per year; <p>Information disclosure may be presented in tables. If Issuers or Public Companies do not pay dividends in the last 2 (two) years, the information shall be disclosed.</p> <p style="text-align: right;">77-78</p>
<p>14) realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan b) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; 	<p>14) the Realization of the Use of Funds from Public Offering, on condition that:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in the event that during the fiscal year, Issuers have the duty of submitting the report of realization of the use of the funds, then the realization of fund from public offering shall be disclosed cumulatively until the end of the financial year; and b) in the event there is a change in use of the funds as set forth in the Regulation of the Financial Services Authority about the Report of the Realization of Use of Fund from Public Offering, then the Issuers shall explain the changes. <p style="text-align: right;">n/a</p>
<p>15) informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/ peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tanggal, nilai, dan objek transaksi; b) nama pihak yang melakukan transaksi; c) sifat hubungan Afiliasi (jika ada); d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi; e) pemenuhan ketentuan terkait; dan f) dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai dengan huruf (e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: <ul style="list-style-type: none"> (1) pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arms-length principle</i>); dan (2) peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arms-length principle</i>); 	<p>15) material information (if any), i.e. investment, expansion, divestment, merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, affiliated transaction, and transaction containing conflict of interest that occurs in the fiscal year, containing among others:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) date, value, and object of the transaction; b) names of parties to the transaction; c) nature of the affiliation (if any); d) description on the reasonableness of the transaction; e) fulfillment of the related provisions; and f) If there is an affiliation, other than disclosing the information in accordance with the letters from (a) to (e), Issuers or Public Companies shall disclose the information below: <ul style="list-style-type: none"> (1) statement from the Board of Directors that the affiliated transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliated transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by complying with the <i>arms-length principle</i>; and (2) the role of the Board of Commissioners and the Audit Committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by complying with the <i>arms-length principle</i>; <p style="text-align: right;">80-81</p>

Keterangan / Description	Halaman / Page
<p>g) untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan;</p> <p>dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.</p> <p>h) untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut;</p> <p>i) dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;</p>	<p>g) for affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out in order to generate revenues and implemented regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out in order to revenues and implemented regularly, repeatedly, and/or continuously shall be disclosed;</p> <p>in the event that such affiliated transactions or material transactions have been disclosed in the annual financial statements, the information on reference of disclosure in the annual financial statements shall be disclosed.</p> <p>h) for disclosure of affiliated transactions and/or conflict-of-interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict-of-interest transactions that have been approved by independent shareholders, information on the date of the GMS which approves the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions shall be disclosed;</p> <p>i) in case there is no affiliated transactions and/or conflict-of-interest transactions, such information shall be disclosed;</p>
<p>16) perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan</p>	<p>16) changes in provisions of laws and regulations that influence significantly to Issuers or Public Companies and its impact on the financial statements (if any); and</p>
<p>17) perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);</p>	<p>17) accounting policy changes, reasons thereof and its impact on the financial statements (if any);</p>
<p>g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:</p> <p>1) RUPS, paling sedikit memuat:</p> <p>a) informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:</p> <p>(1) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan</p> <p>(2) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan;</p> <p>b) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk keperluan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;</p>	<p>g. Issuers or Public Companies Governance Governance of Issuers or Public Companies contains, at the very least, brief description about:</p> <p>1) GMS, at least covering:</p> <p>a) information on GMS resolutions in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year, which includes:</p> <p>(1) GMS resolutions in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year which are realized in the fiscal year; and</p> <p>(2) GMS resolutions in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year which are not realized in the fiscal year;</p> <p>(3)</p> <p>b) in the event that Issuers or Public Companies use an independent party in the implementation of the GMS for the purposes of counting votes, such information shall be disclosed;</p>
<p>2) Direksi, mencakup antara lain:</p> <p>a) tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.</p> <p>b) pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Direksi;</p> <p>c) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut;</p> <p>Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.</p>	<p>2) Board of Directors, covering among others:</p> <p>a) duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; Information on the duties and responsibilities of each member of Board of Directors may be described and presented in a table format.</p> <p>b) a statement that the Board of Directors have guidelines or Board of Directors charter;</p> <p>c) policy and implementation about frequency of meetings of the Board of Directors, including joint meeting of the Board of Commissioners, and attendance rates of members of the Board of Directors in these meetings; Information on attendance rates of members of the Board of Directors in the Board of Directors meetings, joint meetings with the Board of Commissioners, or GMS may be presented in a table format.</p>

Keterangan / Description	Halaman / Page	
<p>d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:</p> <p>(1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bagi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan</p> <p>(2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);</p> <p>e) penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:</p> <p>(1) prosedur penilaian kinerja; dan</p> <p>(2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan</p> <p>(3) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p>	<p>d) trainings and/or competence development for members of the Board of Directors:</p> <p>(1) policy on trainings and/or competence development for members of the Board of Directors, including orientation program for newly appointed member of the Board of Directors in the fiscal year (if any); and</p> <p>(2) trainings and/or competence development attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);</p> <p>e) assessment of the performance of committees that support the implementation of duties of the Board of Directors in the fiscal year, which at least contains:</p> <p>(1) performance assessment procedure; and</p> <p>(2) criteria used, such as performance achievements in the fiscal year, competence and meeting attendance rate; and</p> <p>(3) if Issuers or Public Companies do not have the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Directors, such information shall be disclosed.</p>	
<p>3) Dewan Komisaris, mencakup antara lain:</p> <p>a) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;</p> <p>b) pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris;</p> <p>c) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut, termasuk kehadiran dalam RUPS;</p> <p>Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.</p> <p>e) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:</p> <p>(1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bagi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan</p> <p>(2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);</p>	<p>3) Board of Commissioners, covering, among others:</p> <p>a) duties and responsibilities of the Board of Commissioners;</p> <p>b) a statement that the Board of Commissioners has a Board of Commissioners charter;</p> <p>c) policy and implementation on the frequency of meetings of the Board of Commissioners, including joint meeting of the Board of Commissioners, and attendance rates of members of the Board of commissioners in these meetings, including the GMS attendance rate;</p> <p>Information on the attendance rate of members of the Board of Commissioners in the Board of Commissioners meeting, joint meetings with the Board of Directors, or GMS may be presented in a table format.</p> <p>e) trainings and/or competence development for members of the Board of Commissioners:</p> <p>(1) policy regarding trainings and/or competence development for members of the Board of Commissioners, including orientation program for newly appointed member of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any); and</p> <p>(2) trainings and/or competence development attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);</p>	95-100
<p>f) penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit meliputi:</p> <p>(1) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;</p> <p>(2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan</p> <p>(3) pihak yang melakukan penilaian;</p> <p>g) penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:</p> <p>(1) prosedur penilaian kinerja; dan</p> <p>(2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;</p> <p>h) dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dimuat informasi paling sedikit mengenai:</p> <p>(1) alasan tidak dibentuknya komite; dan</p> <p>(2) prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku;</p>	<p>f) assessment of performance of members of Board of Directors and Board of Commissioners, which at least covers:</p> <p>(1) performance assessment procedure implementation;</p> <p>(2) criteria used, such as performance achievements in the fiscal year, competence and meeting attendance rate; and</p> <p>(3) party conducting assessment;</p> <p>g) performance assessment of committees supporting duty implementation of Board of Commissioners, which at least covers:</p> <p>(1) performance assessment procedure; and</p> <p>(2) criteria used, such as performance achievements in the fiscal year, competence and meeting attendance rate;</p> <p>h) if the Board of Commissioners does not form Nomination and Remuneration Committee, at least the following information shall be disclosed:</p> <p>(1) the reason for not forming the committees; and</p> <p>(2) nomination and remuneration procedures in the fiscal year.</p>	99, 103

Keterangan / Description	Halaman / Page
<p>4) Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:</p> <p>a) Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris; dan</p> <p>b) Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:</p> <p>(1) Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;</p> <p>(2) Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan</p> <p>(3) Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;</p> <p>Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.</p>	<p>4) Nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least covering</p> <p>a) Nomination procedure, including short description of the nomination policy and process of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and</p> <p>b) Remuneration procedure and implementation of the Board of Directors and Board of Commissioners, among others:</p> <p>(1) Remuneration determination procedure for the Board of Directors and the Board of Commissioners;</p> <p>(2) Remuneration structure for the Board of Directors and the Board of Commissioners, i.e. salary, allowances, bonuses, etc; and</p> <p>(3) Remuneration amount for each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners;</p> <p>The information disclosure can be presented in a table format.</p>
<p>5) Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:</p> <p>a) nama;</p> <p>b) dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas Syariah;</p> <p>c) periode penugasan Dewan Pengawas Syariah;</p> <p>d) tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan</p> <p>e) frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta</p> <p>f) pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;</p>	<p>5) Sharia Supervisory Board for Issuers or Public Companies running business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, which at least contains:</p> <p>a) name;</p> <p>b) legal basis of appointment of the Sharia Supervisory Board;</p> <p>c) period of service of the Sharia Supervisory Board;</p> <p>d) duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board; and</p> <p>e) frequency and advice-giving method as well as</p> <p>f) supervision of the fulfilment of the Sharia principles in the Capital Market for Issuers and Public Companies;</p>
<p>6) Komite Audit, mencakup antara lain:</p> <p>a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;</p> <p>b) usia;</p> <p>c) kewarganegaraan;</p> <p>d) riwayat pendidikan;</p> <p>e) riwayat jabatan, meliputi informasi:</p> <p>(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;</p> <p>(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan</p> <p>(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;</p> <p>f) periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;</p> <p>g) pernyataan independensi Komite Audit;</p> <p>h) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;</p> <p>i) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan</p> <p>j) pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku</p> <p>k) sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) Komite Audit;</p>	<p>6) Audit Committee, include among others:</p> <p>a) name and position in the membership of the committee;</p> <p>b) age;</p> <p>c) citizenship;</p> <p>d) education history;</p> <p>e) career history, including:</p> <p>(1) legal basis of appointment as committee's members</p> <p>(2) concurrent position, either as members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, and/or members of committees and other positions (if any); and</p> <p>(3) work experience and the tenure, both in and outside of the Issuers or Public Companies;</p> <p>f) period and the term of office of members of the Audit Committee;</p> <p>g) statement of the independence of the Audit Committee;</p> <p>h) policy and implementation about the frequency of meetings of the Audit Committee and member of the Audit Committee attendance rates in such meetings;</p> <p>i) education and/or training which have been attended in the financial year;</p> <p>j) the implementation of the activities of the Audit</p> <p>k) Committee in the financial year according to the guidelines or charter of Audit Committee.</p>

Keterangan / Description	Halaman / Page	
<p>7) komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:</p> <p>a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;</p> <p>b) usia;</p> <p>c) kewarganegaraan;</p> <p>d) riwayat pendidikan;</p> <p>e) riwayat jabatan, meliputi informasi:</p> <p>(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;</p> <p>(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan</p> <p>(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;</p> <p>f) periode dan masa jabatan anggota komite;</p> <p>g) uraian tugas dan tanggung jawab;</p> <p>h) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;</p> <p>i) pernyataan independensi komite;</p> <p>j) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;</p> <p>k) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan</p> <p>l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;</p> <p>m) dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g), h), j), dan l) dan mengungkapkan:</p> <p>(1) alasan tidak dibentuknya komite; dan</p> <p>(2) pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;</p>	<p>7) committee or function of Nomination and Remuneration of Issuers or Public Companies, which at least include:</p> <p>a) name and position in the membership of the committee;</p> <p>b) age;</p> <p>c) citizenship;</p> <p>d) education history;</p> <p>e) career history, including:</p> <p>(1) legal basis of appointment as committee's members;</p> <p>(2) double position, either as members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, and/or members of committees and other positions (if any); and</p> <p>(3) work experience and the tenure, both inside and outside of the Issuers or Public Companies;</p> <p>f) period and the term of office of members of the committee;</p> <p>g) description of duties and responsibilities;</p> <p>h) a statement that the committee has already had committee charter;</p> <p>i) statement of independency of the committee;</p> <p>j) the policy and implementation of meeting frequency of the committee and attendance rate of members of the committee in the meeting;</p> <p>k) education and/or training attended in the fiscal year (if any); and</p> <p>l) a brief description of the implementation of the committee's activities in the fiscal year.</p> <p>m) in case Nomination and Remuneration Committee is not established, Issuers or Public Companies shall disclose it as referred to in letters g), h), j), and l) and disclose:</p> <p>(1) the reason for not forming the committee; and</p> <p>(2) party carrying out the nomination and remuneration function.</p>	<p>108-111</p>
<p>8) komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:</p> <p>a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;</p> <p>b) usia;</p> <p>c) kewarganegaraan;</p> <p>d) riwayat pendidikan;</p> <p>e) riwayat jabatan, meliputi informasi:</p> <p>(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;</p> <p>(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan</p> <p>(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;</p> <p>f) periode dan masa jabatan anggota komite;</p> <p>g) pernyataan independensi komite;</p> <p>h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan</p> <p>i) uraian tugas dan tanggung jawab;</p> <p>j) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;</p> <p>k) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan</p> <p>l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;</p>	<p>8) other committees of Issuers or Public Companies that support the implementation of functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees of Issuers or Public Companies that support the implementation of functions and duties of the Board of Commissioners, at least covering:</p> <p>a) name and position in the membership of the committee;</p> <p>b) age;</p> <p>c) citizenship;</p> <p>d) education history;</p> <p>e) career history, including:</p> <p>(1) legal basis of appointment as member of committee;</p> <p>(2) double position, either as members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, and/or members of committees and other positions (if any); and</p> <p>(3) work experience and the tenure, both inside and outside of the Issuers or Public Companies;</p> <p>f) period and the term of office of members of the Committee;</p> <p>g) statement of independency of the committee;</p> <p>h) education and/or training attended in the fiscal year (if any); and</p> <p>i) description of duties and responsibilities;</p> <p>j) statement that the committee has already had committee charter;</p> <p>k) the policy and implementation of meeting frequency of the committee and attendance rate of members of the committee in the meeting; and</p> <p>l) a brief description of the implementation of the committee's activities in the fiscal year.</p>	<p>n/a</p>

Keterangan / Description	Halaman / Page	
<p>9) Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nama; b) domisili; c) riwayat jabatan, meliputi informasi: <ul style="list-style-type: none"> (1) dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan (2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; d) riwayat pendidikan; e) pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan f) uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku; 	<p>9) Corporate Secretary, include among others:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) name; b) domicile; c) career history, including: <ul style="list-style-type: none"> (1) legal basis of appointment as Corporate Secretary; and (2) work experience and the tenure, both in and outside of the Issuers or Public Companies; d) education history e) education and/or training which have been attended in the financial year; and f) a brief description of the implementation of the tasks of the Corporate Secretary in the financial year; 	<p>111-113</p>
<p>10) Unit Audit Internal, mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nama kepala Unit Audit Internal; b) riwayat jabatan, meliputi informasi: <ul style="list-style-type: none"> (1) dasar hukum penunjukan sebagai kepala Unit Audit Internal; dan (2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; c) kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); d) pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; e) struktur dan kedudukan Unit Audit Internal; f) uraian tugas dan tanggung jawab; g) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Unit Audit Internal; dan h) uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku; 	<p>10) Internal Audit Unit includes among others:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) the name of the head of Internal Audit Unit; b) career history, including: <ul style="list-style-type: none"> (1) legal basis of appointment as the Head of Internal Audit Unit; and (2) work experience and the tenure, both in and outside of the Issuers or Public Companies; c) qualification or certification in the internal audit profession (if any); d) education and/or training which have been attended in the financial year; and e) the structure and the position of the Internal Audit Unit; f) description of duties and responsibilities; g) a statement that the Internal Audit Unit has guidelines or committee charter; and h) a brief description of the implementation of the tasks of the Internal Audit Unit in the financial year; 	<p>113-115</p>
<p>11) uraian mengenai sistem pengendalian internal (<i>internal control</i>) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan b) tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; c) pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; 	<p>11) the explanation regarding the internal control system (internal control) applied by the Issuers or Public Companies, at least about:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations; and b) review on the effectiveness of internal control systems; c) statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system; 	<p>116</p>
<p>12) sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; b) jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan c) tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; d) pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; 	<p>12) risk management system applied by the Issuers or Public Companies, at least about:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a general overview about the risk management system of Issuers or Public Companies; b) types of risk and how to manage them; and c) a general overview about the risk management system of Issuers or Public Companies; d) statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system; 	<p>116-119</p>
<p>13) perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pokok perkara/gugatan; b) status penyelesaian perkara/gugatan; dan c) pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; 	<p>13) legal cases faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of Board of Commissioners (if any), among others, include:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) the subject of case/lawsuit; b) the status of the settlement of litigation/lawsuit; and c) its influence on the condition of Issuers or Public Companies; 	<p>119-120</p>
<p>14) informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);</p>	<p>14) information about administrative sanctions imposed on the Issuers or Public Companies, member of the Board of Commissioners and Board of Directors, by the Capital Market authority and other authorities in the financial year (if any);</p>	<p>120</p>

Keterangan / Description		Halaman / Page
<p>15) informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pokok-pokok kode etik; b) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan c) pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; 	<p>15) information about the code of ethics of Issuers or Public Companies include:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) points of code of ethics; b) the form of the dissemination of the code of ethics and efforts to enforce it; and c) the statement that a code of conduct applies to members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Issuers or Public Companies; 	119
<p>16) informasi mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) atau nilai-nilai perusahaan (jika ada);</p>	<p>16) information about corporate culture or corporate values (if any);</p>	39
<p>17) uraian mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/ MSOP</i>) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program</i>); Dalam hal pemberian kompensasi berupa manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/ atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) jumlah saham dan/atau opsi; b) jangka waktu pelaksanaan; c) persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan d) harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; 	<p>17) description on the policy of the provision of merit-based long-term compensation to management and/ or employees of the Issuers or Public Companies (if any), among others in the form of management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP);</p> <p>In case the compensation is given in the form of management stock ownership program (MSOP) and/ or employee stock ownership program (ESOP), the information to be disclosed shall at least covers:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) the number of shares and/or options; b) period of implementation; c) the requirements of eligible employees and/or management; and d) the exercise price or the determination of the exercise price; 	n/a
<p>18) uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cara penyampaian laporan pelanggaran; b) perlindungan bagi pelapor; c) penanganan pengaduan; d) pihak yang mengelola pengaduan; dan e) hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi: <ul style="list-style-type: none"> (1) jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan (2) tindak lanjut pengaduan; <p>dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>), maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p>	<p>18) the explanation regarding the whistleblowing system in Issuers or Public Companies (if any), among others include:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) how to report a violation; b) protection for reporters; c) the handling of complaints; d) those who manage the complaint; and e) the result of the handling of complaints, at least include: <ul style="list-style-type: none"> (1) the number of incoming and processed complaints during the financial year; and (2) follow-up of complaints; <p>if Issuers or Public Companies do not have a whistleblowing system, the information shall be disclosed.</p>	122-123
<p>19) uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan b) pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; <p>dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud.</p>	<p>19) description on anti-corruption policy of Issuers or Public Companies, at least covering:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) programs and procedures implemented in handling corruptions, kickbacks, frauds, bribery and/or gratification in Issuers or Public Companies; and b) training/dissemination of anti-corruption to the employees of Issuers or Public Companies; <p>if Issuers or Public Companies do not have an anti-corruption policy, the information shall be disclosed.</p>	124
<p>20) penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau b) penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada); <p>pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.</p>	<p>20) the application of Code of Corporate Governance of Public Companies for Issuers who issue Equity Securities or Public Companies, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) statement concerning recommendations that have been implemented; and/or b) explanation of the recommendations not yet implemented, including the reason and the implementation alternative (if any); <p>the information disclosure may be presented in a table format.</p>	n/a

Keterangan / Description	Halaman / Page
<p>h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik</p> <p>1) informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) penjelasan strategi keberlanjutan; b) ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); c) profil singkat emiten atau perusahaan publik; d) penjelasan direksi; e) tata kelola keberlanjutan; f) kinerja keberlanjutan; g) verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; h) lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan i) tanggapan emiten atau perusahaan publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya; 	<p>h. Social and Environmental Responsibility of Issuers or Public Companies</p> <p>1) information disclosed in the social and environmental responsibility is a Sustainability Report as referred to the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Agency, Issuers, and Public Companies, at least covering:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) description of sustainability strategy b) sustainability aspects highlight (economic, social and environmental); c) short profile of issuers or public companies; d) board of directors description; e) sustainable governance; f) sustainable performance; g) written verification from an independent party, if any; h) feedback sheet for readers, if any; and i) response of issuers or public companies to the feedbacks of the previous year's report; <p style="text-align: right;">✓</p>
<p>2) laporan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai pedoman teknis penyusunan laporan keberlanjutan (<i>sustainability report</i>) bagi emiten dan perusahaan publik sebagaimana tercantum dalam lampiran ii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran otoritas jasa keuangan ini;</p>	<p>2) sustainability report as referred to in no. 1) shall be prepared in accordance with the technical guideline on the preparation of sustainability report for issuers and public companies as attached in attachment ii which is an inseparable part of this financial services authority circular letter.</p> <p style="text-align: right;">✓</p>
<p>3) informasi laporan keberlanjutan (<i>sustainability report</i>) pada angka 1 dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan direksi terkait laporan keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait laporan direksi; dan/atau b) merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada pedoman teknis penyusunan laporan keberlanjutan (<i>sustainability report</i>) bagi emiten dan perusahaan publik sebagaimana tercantum dalam lampiran ii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran otoritas jasa keuangan ini, seperti profil emiten atau perusahaan publik; 	<p>3) information on the sustainability report as stated in no. 1 can:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) be disclosed in other relevant part outside of the social and environment part, such as the board of directors statement regarding sustainability report in the part relevant to the board of directors report; and/or b) referring to the part outside the social and environmental responsibility part, by keep referring to the technical guideline for the preparation of sustainability report of issuers and public companies attached in attachment ii which is inseparable from this financial services authority circular letter, such as profile of issuers or public companies; <p style="text-align: right;">✓</p>
<p>4) laporan keberlanjutan (<i>sustainability report</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan laporan tahunan;</p>	<p>4) sustainability report as referred in no. 1 is an inseparable part of the annual report but it can be presented separately with the annual report;</p> <p style="text-align: right;">✓</p>
<p>5) dalam hal laporan keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan laporan tahunan, informasi yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan dimaksud harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan b) disusun sesuai pedoman teknis penyusunan laporan keberlanjutan (<i>sustainability report</i>) bagi emiten dan perusahaan publik sebagaimana tercantum dalam lampiran ii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran otoritas jasa keuangan ini; 	<p>5) in case sustainability report is presented separately with the annual report, the information disclosed in the sustainability report shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) contain information as referred in no 1); and b) be prepared based on the technical guideline for the preparation of sustainability report of issuers and public companies as attached in attachment ii which is inseparable from this financial services authority circular letter; <p style="text-align: right;">✓</p>

Keterangan / Description	Halaman / Page
<p>6) dalam hal laporan keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan laporan tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam laporan keberlanjutan yang disajikan terpisah dari laporan tahunan; dan</p>	<p>6) in case sustainability report is presented separately with the annual report, there shall be a statement explaining that the social and environmental responsibility has been disclosed in the sustainability report presented separately with the annual report; and</p> <p style="text-align: right;">✓</p>
<p>7) penyampaian laporan keberlanjutan (<i>sustainability report</i>) yang disajikan secara terpisah dengan laporan tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan.</p>	<p>7) sustainability report presented separately with the annual report shall be submitted together with the annual report.</p> <p style="text-align: right;">✓</p>
<p>h. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek; dan</p>	<p>h. Audited Annual Financial Statements</p> <p>The annual financial statements included in the Annual Report are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards and have been audited by Accountants. The financial statements shall include the statements of responsibility for financial statements as stipulated in the laws and regulations of Capital Market which regulate the responsibility of Board of Directors for financial statements or laws and regulations of Capital Market which regulate the periodic report of Securities Companies if the Issuers are Securities Companies; and</p> <p style="text-align: right;">✓</p>
<p>i. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	<p>i. Statements of Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners on the Responsibility for the Annual Report The statements of members of Board of Directors and Board of Commissioners on the responsibility for the Annual Report are prepared in accordance with the format of Statements of Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners on the Responsibility for the Annual Report as stipulated in the Attachment that is inseparable from this Circular Letter of Financial Services Authority.</p>

LEMBAR UMPAN BALIK

Feedback Form

Terima kasih telah membaca Laporan Keberlanjutan PT Arkora Hydro Tbk tahun 2021. Untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan Perusahaan, kami mohon kesediaan para pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik setelah membaca Laporan Keberlanjutan ini dengan memberikan tanda centang (✓) pada salah satu jawaban dan mengisi titik-titik yang tersedia, kemudian mengirimkannya kepada kami.

Thank you for reading the 2021 Sustainability Report of PT Arkora Hdyro Tbk. To improve the content of the Sustainability Report in the upcoming years, we would like to ask you to fill out this Feedback Form by ticking one of the answers and writing in the available space and return the form to us.

- | | |
|---|--|
| <p>1. Laporan Keberlanjutan ini sudah memberikan informasi yang jelas mengenai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan PT Arkora Hdyro Tbk:</p> <p style="text-align: center;">Setuju / Agree <input type="checkbox"/> Tidak Setuju / Disagree <input type="checkbox"/> Tidak tahu / Not Sure <input type="checkbox"/></p> | <p>1. This Sustainability Report provides clear information on the economic, social, and environmental performance of PT Arkora Hdyro Tbk:</p> <p style="text-align: center;">Setuju / Agree <input type="checkbox"/> Tidak Setuju / Disagree <input type="checkbox"/> Tidak tahu / Not Sure <input type="checkbox"/></p> |
| <p>2. Laporan Keberlanjutan ini sudah memberikan informasi yang jelas mengenai pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Arkora Hdyro Tbk:</p> <p style="text-align: center;">Setuju / Agree <input type="checkbox"/> Tidak Setuju / Disagree <input type="checkbox"/> Tidak tahu / Not Sure <input type="checkbox"/></p> | <p>2. This Sustainability Report provides clear information on the fulfillment of social and environmental responsibility of PT Arkora Hdyro Tbk:</p> <p style="text-align: center;">Setuju / Agree <input type="checkbox"/> Tidak Setuju / Disagree <input type="checkbox"/> Tidak tahu / Not Sure <input type="checkbox"/></p> |
| <p>3. Materi dan data dalam Laporan Keberlanjutan ini mudah dimengerti dan dipahami:</p> <p style="text-align: center;">Setuju / Agree <input type="checkbox"/> Tidak Setuju / Disagree <input type="checkbox"/> Tidak tahu / Not Sure <input type="checkbox"/></p> | <p>3. The material and data in this Sustainability Report are easy to understand:</p> <p style="text-align: center;">Setuju / Agree <input type="checkbox"/> Tidak Setuju / Disagree <input type="checkbox"/> Tidak tahu / Not Sure <input type="checkbox"/></p> |
| <p>4. Materi dan data di dalam Laporan Keberlanjutan ini lengkap:</p> <p style="text-align: center;">Setuju / Agree <input type="checkbox"/> Tidak Setuju / Disagree <input type="checkbox"/> Tidak tahu / Not Sure <input type="checkbox"/></p> | <p>4. The material and data in this Sustainability Report are complete:</p> <p style="text-align: center;">Setuju / Agree <input type="checkbox"/> Tidak Setuju / Disagree <input type="checkbox"/> Tidak tahu / Not Sure <input type="checkbox"/></p> |
| <p>5. Apakah desain, tata letak, grafis dan foto-foto dalam Laporan Keberlanjutan ini sudah bagus?</p> <p style="text-align: center;">Setuju / Agree <input type="checkbox"/> Tidak Setuju / Disagree <input type="checkbox"/> Tidak tahu / Not Sure <input type="checkbox"/></p> | <p>5. Is this Sustainability Report made with good design, layout, graphics, and pictures?</p> <p style="text-align: center;">Setuju / Agree <input type="checkbox"/> Tidak Setuju / Disagree <input type="checkbox"/> Tidak tahu / Not Sure <input type="checkbox"/></p> |

6. Informasi apa yang paling bermanfaat dari Laporan Keberlanjutan ini?

6. Which information is the most useful from this Sustainability Report?

7. Informasi apa yang dinilai kurang bermanfaat dari Laporan Keberlanjutan ini?

7. Which information is the least useful from this Sustainability Report?

8. Informasi apa yang dinilai masih kurang dari Laporan Keberlanjutan ini dan perlu ditambahkan pada Laporan Keberlanjutan mendatang?

8. Which information is lacking in this Sustainability Report and must be added in the next Sustainability Report?

Identitas Pengirim / Sender Identity

Nama / Name : _____

Email / E-mail : _____

No. Telp / Phone : _____

Identifikasi menurut kategori pemangku kepentingan / Identification of stakeholder category

(pilih salah satu / choose one)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pelanggan / Customer | <input type="checkbox"/> Mitra kerja / Business partner |
| <input type="checkbox"/> Pegawai/Organisasi Pegawai / Employee/Employee Organization | <input type="checkbox"/> Media massa / Mass media |
| <input type="checkbox"/> Pemegang saham / Shareholder | <input type="checkbox"/> Masyarakat / Public |
| <input type="checkbox"/> Pemerintah, Regulator, Legislatif / Government, Regulator, Legislative | <input type="checkbox"/> Lain-lain, sebutkan / Others, please describe |
-
-

Mohon lembar umpan balik ini dikirimkan ke:
Please return this feedback form to:

PT Arkora Hdyro Tbk

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Lot 28 SCBD Jakarta 12190

Telepon / Telephone : (021) 2933 3288
Faksimile / Facsimile : (021) 2933 3298
Email: hydro@arkora.com

TANGGAPAN TERHADAP UMPAN BALIK LAPORAN TAHUN SEBELUMNYA

Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan tahun 2021 merupakan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang pertama kali diterbitkan oleh PT Arkora Hydro Tbk sehingga sepanjang tahun 2021, PT Arkora Hdyro Tbk tidak mendapatkan tanggapan spesifik terkait Laporan Keberlanjutan 2021 untuk perbaikan laporan. Namun demikian, PT Arkora Hydro Tbk telah menyempurnakan laporan ini agar sesuai dengan panduan POJK No.51/POJK.03/2017. Perseroan berharap laporan ini dapat menjadi informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan

RESPONSE TO FEEDBACK ON THE PREVIOUS YEAR REPORT

The 2021 Annual Report and Sustainability Report are the first Annual Report and Sustainability Report to be ever published by the Company, thus, in 2021, PT Arkora Hdyro Tbk did not receive any specific response to the 2021 Sustainability Report for report improvement. Nevertheless, PT Arkora Hydro Tbk has improved this report to comply with POJK No.51/POJK.03/2017. The Company aims to provide useful information for the stakeholders through this report.

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan dan Keberlanjutan 2021 PT Arkora Hydro Tbk

The Board of Commissioners' and The Board of Directors' Statement of Responsibility for the 2021 Annual Report and Sustainability Report of PT Arkora Hydro Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan dan Keberlanjutan PT Arkora Hydro Tbk tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Keberlanjutan perusahaan.

We, the undersigned, hereby certify that all the information presented in the 2021 Annual Report and Sustainability Report of PT Arkora Hydro Tbk has been written comprehensively and that we shall assume full responsibility for the accuracy of this Company's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made correctly.

DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners



Arya Pradana Setiadharna
Komisaris Utama
President Commissioner




Abhay Narayan Pande
Komisaris
Commissioner



Drs. Indarto S.H
Komisaris
Commissioner

DIREKSI Board of Directors



Aldo Henry Artoko
Direktur Utama
President Director



Ricky Hartono
Direktur
Director



Ismu Nugroho
Direktur Operasional
Operations Director



ARKORA HYDRO

LAPORAN KEUANGAN

Financial Statements



08

Halaman Ini Sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

**PT. ARKORA HYDRO Tbk
DAN ENTITAS ANAK/
*AND ITS SUBSIDIARIES***

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
DAN INFORMASI TAMBAHAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AND SUPPLEMENTARY INFORMATION*

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020/
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2021 AND 2020

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

	<u>Halaman/ Page</u>	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		DIRECTORS' STATEMENT LETTER
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020		CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS – For the years ended December 31, 2021 and 2020
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	Consolidated Statement of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	Consolidated Statement of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	Consolidated Statement of Cash Flows
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	Notes to Consolidated Financial Statements
INFORMASI TAMBAHAN		SUPPLEMENTARY INFORMATION
Laporan Posisi Keuangan Tersendiri - Entitas Induk	65	Statement of Financial Position - Parent Only
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Tersendiri - Entitas Induk	66	Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income - Parent Only
Laporan Perubahan Ekuitas Tersendiri – Entitas Induk	67	Statement of Changes in Equity - Parent Only
Laporan Arus Kas Tersendiri - Entitas Induk	68	Statement of Cash Flows – Parent Only
Daftar Investasi dalam Entitas Anak	69	List of Investments in Subsidiaries

**PT ARKORA HYDRO Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL - TANGGAL TERSEBUT

**PT ARKORA HYDRO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY
ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

We, the undersigned:

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | Nama/ <i>Name</i>
Alamat kantor/ <i>Office address</i> | : | Aldo Henry Artoko
Office 8 Building, 21 st Floor Unit C&D
Jl. Senopati Raya #8-B Lot 28 SCBD
Jakarta |
| | Nomor telepon/ <i>Phone Number</i>
Jabatan/ <i>Position</i> | : | 021 – 29333288
Direktur Utamal/ <i>President Director</i> |
| 2. | Nama/ <i>Name</i>
Alamat kantor/ <i>Office address</i> | : | Ricky Hartono
Office 8 Building, 21 st Floor Unit C&D
Jl. Senopati Raya #8-B Lot 28 SCBD
Jakarta |
| | Nomor telepon/ <i>Phone Number</i>
Jabatan/ <i>Position</i> | : | 021 – 29333288
Direktur / <i>Director</i> |

Menyatakan bahwa:

state that:

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1. | Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ; | 1. | <i>We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements;</i> |
| 2. | Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. | <i>The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. | a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. | a. <i>All information in the consolidated financial statements information has been completely and correctly disclosed;</i> |
| | b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar; dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | | b. <i>The consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;</i> |

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anak.

4. *We are responsible for the Company and its subsidiaries' internal control system.*

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, Juli 15, 2022/July 15, 2022

Direktur Utama/
President Director

Direktur/
Director



Aldo Henry Artoko

Ricky Hartono

Laporan Auditor Independen

No. 00504/2.1265/AU.1/02/1208-3/1/VII/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT. Arkora Hydro Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT. Arkora Hydro Tbk dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditor's Report

No. 00504/2.1265/AU.1/02/1208-3/1/VII/2022

The Stockholders, Boards of Commissioners and Directors

PT. Arkora Hydro Tbk

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT. Arkora Hydro Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2021 and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity, and consolidated statements of cash flows for the years ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



Imelda & Rekan

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which are separate and independent legal entities, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo.

Imelda & Rekan

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT. Arkora Hydro Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT. Arkora Hydro Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2021, and their consolidated financial performance and their consolidated cash flows for the years ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Imelda & Rekan

Hal-Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT. Arkora Hydro Tbk dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT. Arkora Hydro (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan daftar investasi entitas induk dalam entitas anak pada tanggal 31 Desember 2021 (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Other Matters

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT. Arkora Hydro Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2021 and for the years ended, were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT. Arkora Hydro (Parent Entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2021 and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows for the years ended and list of parent entity's investment in subsidiaries as of December 31, 2021, (collectively referred to as "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

IMELDA & REKAN



Theodorus Bambang Dwi K.A

Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.1208

15 Juli 2022 / *July 15, 2022*



00504

ASET	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	6	16.168.494.520	25.315.488.123	Cash and cash equivalents
Piutang usaha pihak ketiga	7	14.456.449.975	8.461.083.586	Trade accounts receivable third party
Piutang lain-lain pihak ketiga		369.001.049	26.625.000	Other accounts receivable third parties
Biaya dibayar dimuka	8	5.125.104.364	723.126.389	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	21	2.340.109.832	1.979.365.453	Prepaid taxes
Aset keuangan dari proyek konsesi - jatuh tempo dalam satu tahun	10	15.375.516.256	13.285.463.663	Financial assets from concession project - current
Jumlah Aset Lancar		53.834.675.996	49.791.152.214	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain pihak berelasi	24	343.671.988	341.000.000	Other accounts receivable related parties
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 39.025.597.897 pada 31 Desember 2021 (31 Desember 2020: Rp 30.632.643.534)	9	147.927.115.100	153.314.934.193	Property, plant and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 39,025,597,897 at December 31, 2021 (December 31, 2020 : Rp 30,632,643,534)
Aset hak guna sewa - bersih		1.610.132.016	773.370.795	Right-of-use assets - net
Aset keuangan dari proyek konsesi - jatuh tempo lebih dari satu tahun	10	456.447.981.603	324.635.277.314	Financial assets from concession project - non-current
Uang muka pembelian aset tetap		-	10.000.000.000	Advance for purchase fixed assets
Aset tak berwujud	11	10.155.207.861	-	Intangible assets
Goodwill		275.000.000	275.000.000	Goodwill
Aset pajak tangguhan	21	-	3.048.886.560	Deferred tax assets
Aset lain-lain	12	18.019.962.138	18.408.620.836	Other assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		634.779.070.706	510.797.089.698	Total Non-current Assets
JUMLAH ASET		688.613.746.702	560.588.241.912	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha dan lainnya	13			Trade and other accounts payable
Pihak berelasi	24	24.472.527.414	35.000.000	Related parties
Pihak ketiga		1.732.804.512	1.931.136.596	Third parties
Utang pajak	21	621.004.418	551.263.061	Taxes payable
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				Current maturities of long-term liabilities
Liabilitas sewa		-	360.197.062	Lease liabilities
Pinjaman berjangka	15	16.785.000.000	14.407.470.000	Term loans
Pinjaman dari pihak berelasi	24	115.140.470.994	-	Loan from related parties
Biaya masih harus dibayar	14	4.894.661.167	838.168.621	Accrued expenses
Utang retensi	24	3.401.392.771	-	Retention payable
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>167.047.861.276</u>	<u>18.123.235.340</u>	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				Long-term liabilities - net of current maturities
Pinjaman berjangka	15	201.425.286.949	218.939.367.857	Term loans
Pinjaman dari pihak berelasi	24	96.191.948.399	171.775.808.808	Loan from related party
Liabilitas pajak tangguhan	21	48.554.392.152	25.724.821.936	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan kerja	22	4.368.637.694	5.310.185.830	Employee benefits obligations
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>350.540.265.194</u>	<u>421.750.184.431</u>	Total Non-current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		<u>517.588.126.470</u>	<u>439.873.419.771</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 50 per saham pada tanggal 31 Desember 2021 (31 Desember 2020: Rp 500.000 per saham)				Capital stock - Rp 50 par value per share at December 31, 2021 (December 31, 2020: Rp 500,000 per share)
Modal dasar - 4.639.200.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 (31 Desember 2020: 115.980 saham)				Authorized - 4,639,200,000 shares at December 31, 2021 (31 December 2020: 115,980 shares)
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.159.800.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 (31 Desember 2020: 115.980 saham)	16	57.990.000.000	57.990.000.000	Subscribed and paid-up - 1,159,800,000 shares at December 31, 2021 December 31, 2020: 115,980 shares)
Agio saham	16	92.685.000.000	92.685.000.000	Agio capital
Penghasilan komprehensif lain	22	3.194.772.653	2.665.340.813	Other comprehensive income
Saldo laba (defisit)		16.069.760.103	(32.889.354.929)	Retained earnings (deficit)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		169.939.532.756	120.450.985.884	Equity attributable to Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali		1.086.087.476	263.836.257	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas		<u>171.025.620.232</u>	<u>120.714.822.141</u>	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>688.613.746.702</u>	<u>560.588.241.912</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	2021 Rp	2020 Rp	
PENDAPATAN	17	198.393.420.289	52.094.112.325	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	18,24	<u>(89.276.246.598)</u>	<u>(22.944.234.006)</u>	COST OF REVENUES
LABA KOTOR		<u>109.117.173.691</u>	<u>29.149.878.319</u>	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban umum dan administrasi	19	(18.009.770.736)	(32.774.728.124)	General and administrative expenses
Beban keuangan	20,24	(52.055.281.926)	(38.954.596.430)	Finance cost
Penghasilan keuangan	10	33.937.739.289	24.985.404.804	Finance income
Kerugian atas selisih kurs - bersih		(1.306.948.557)	(8.235.527.910)	Loss on foreign exchange - net
Keuntungan (kerugian) lain-lain - bersih		<u>3.788.051.133</u>	<u>(4.941.445)</u>	Other gain (losses) - net
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		75.470.962.895	(25.834.510.786)	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	21	<u>(25.740.619.586)</u>	<u>2.872.939.129</u>	TAX BENEFIT (EXPENSES)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		<u>49.730.343.309</u>	<u>(22.961.571.657)</u>	NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK				OTHER COMPREHENSIVE INCOME NET OF TAX
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not reclassified subsequently to profit or loss:
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja pasti	22	718.291.973	2.350.301.987	Actuarial gain of defined benefit plan
Pajak dari keuntungan (kerugian) aktuarial	21	<u>(137.837.191)</u>	<u>(409.552.816)</u>	Tax of actuarial gain (loss)
Jumlah laba komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak		<u>580.454.782</u>	<u>1.940.749.171</u>	Total other comprehensive income for the year - net of tax
JUMLAH PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>50.310.798.091</u>	<u>(21.020.822.486)</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET INCOME (LOSS) FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		48.959.115.032	(22.628.491.437)	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali		<u>771.228.277</u>	<u>(333.080.220)</u>	Non-controlling interest
JUMLAH		<u>49.730.343.309</u>	<u>(22.961.571.657)</u>	TOTAL
JUMLAH PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		49.488.546.872	(20.764.792.768)	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali		<u>822.251.219</u>	<u>(256.029.718)</u>	Non-controlling interest
JUMLAH		<u>50.310.798.091</u>	<u>(21.020.822.486)</u>	TOTAL
LABA (RUGI) PER SAHAM	23	17	(8)	EARNINGS (LOSS) PER SHARE

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Modal disetor/ <i>Paid-up capital stock</i>	Agio saham/ <i>Agio capital</i>	Penghasilan komprehensif lain/ <i>Other comprehensive income</i>	Saldo laba (defisit)/ <i>Retained Earnings (deficit)</i>	Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk/ <i>Total equity attributable to Owners of the Company</i>	Kepentingan nonpengendali/ <i>Non-controlling interests</i>	Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i>	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Saldo per 1 Januari 2020	57.990.000.000	92.685.000.000	801.642.144	(10.260.863.492)	141.215.778.652	519.865.975	141.735.644.627	Balance as of January 1, 2020
Rugi bersih tahun berjalan	-	-	-	(22.628.491.437)	(22.628.491.437)	(333.080.220)	(22.961.571.657)	Net loss for the year
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja pasti	-	-	1.863.698.669	-	1.863.698.669	77.050.502	1.940.749.171	Actuarial gains on defined benefit obligation
Saldo per 31 Desember 2020	57.990.000.000	92.685.000.000	2.665.340.813	(32.889.354.929)	120.450.985.884	263.836.257	120.714.822.141	Balance as of December 31, 2020
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	48.959.115.032	48.959.115.032	771.228.277	49.730.343.309	Net profit for the year
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja pasti	-	-	529.431.840	-	529.431.840	51.022.942	580.454.782	Actuarial gains on defined benefit obligation
Saldo per 31 Desember 2021	<u>57.990.000.000</u>	<u>92.685.000.000</u>	<u>3.194.772.653</u>	<u>16.069.760.103</u>	<u>169.939.532.756</u>	<u>1.086.087.476</u>	<u>171.025.620.232</u>	Balance as of December 31, 2021

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	2021 Rp	2020 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan		82.113.819.067	63.595.738.855	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada:				Cash paid to:
Pemasok		(42.377.980.693)	(39.671.542.348)	Suppliers
Karyawan		(13.561.387.725)	(11.986.554.855)	Employees
Kas dihasilkan dari operasi		26.174.450.649	11.937.641.652	Cash generated from operations
Penerimaan (pembayaran) pajak penghasilan, bersih	21	(401.297.747)	(1.010.449.771)	Income tax received (paid), net
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasional		25.773.152.902	10.927.191.881	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	9	(3.005.135.271)	(951.678.000)	Acquisition of property and equipment
Penerimaan dari pendapatan bunga		164.009.380	489.737.956	Cash received from interest income
Uang muka perolehan aset tetap		-	(10.000.000.000)	Advance for purchase fixed assets
Penerimaan dari (pembayaran untuk) aset lainnya		(1.032.485.732)	710.326.230	Receipt from (payment for) of other assets
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(3.873.611.623)	(9.751.613.814)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	24	7.000.000.000	-	Proceeds loan from related party
Penerimaan pinjaman berjangka		-	238.500.000.000	Proceeds from term loans
Pembayaran pinjaman berjangka	15	(15.511.078.617)	(5.526.750.000)	Payment of term loans
Pembayaran bunga pinjaman berjangka	15	(20.386.223.632)	(17.734.286.580)	Payment of interests term loans
Pembayaran utang bank		-	(198.893.395.804)	Payments of bank loans
Pembayaran beban keuangan atas utang bank		-	(4.523.221.455)	Payment of finance cost on bank loans
Pembayaran liabilitas sewa		(2.149.232.633)	(1.601.219.700)	Payments of lease liabilities
Kas Bersih yang (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		(31.046.534.882)	10.221.126.461	Net Cash (Used for) Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(9.146.993.603)	11.396.704.528	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	6	25.315.488.123	13.918.783.595	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	6	16.168.494.520	25.315.488.123	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT. Arkora Hydro ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 5 Agustus 2010 dari Darmawan Tjoa, S.H., S.E., notaris di Jakarta. Akta Pendirian Perusahaan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-40544.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 28601 pada Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 73, tanggal 13 September 2011. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 67, tanggal 29 November 2021 dari Darmawan Tjoa, S.H., S.E., notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal dasar Perusahaan dan pemecahan nilai saham. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0068317.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 30 November 2021.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang pembangkit tenaga listrik dan melakukan penyertaan modal pada entitas lain. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2017.

Kantor pusat Perusahaan beralamat di Gedung Office 8 Lantai 21 Unit C-D, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Entitas induk terakhir dan pemegang saham Perusahaan adalah PT Arkora Bakti Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2021 jumlah karyawan yang dimiliki Perusahaan dan entitas anak adalah 129 karyawan (31 Desember 2020:127 karyawan).

Susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Arya Pradana Setiadharna	:	President Commissioner
Komisaris	:	Abhay Narayan Pande Indarto	:	Commissioners

Direktur Utama	:	Aldo Henry Artoko	:	President Director
Direktur	:	Ismu Nugroho Ricky Hartono	:	Directors

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT. Arkora Hydro (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 15 dated August 5, 2010 of Darmawan Tjoa, S.H., S.E., notary in Jakarta. The Notarial Deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his Decision Letter No. AHU-40544.AH.01.01.Year 2010 dated August 18, 2010 and was published in State Gazette No. 73, Supplement No. 28601 dated September 13, 2011. The articles of association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 67 dated November 29, 2021 of Darmawan Tjoa, S.H., S.E., notary in Jakarta concerning increase of authorized share and stock split. This change was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia through Decision Letter No. AHU-0068317.AH.01.02 Tahun 2021 dated November 30, 2021.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the purpose and objective of the Company's activities are in power plant and into capital participation in other entities. The Company started its commercial operations in 2017.

The Company's head office is located at Office 8 Building 21st Floor Unit C-D, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, South Jakarta.

Ultimate shareholder and parent company of the Company is PT Arkora Bakti Indonesia.

As of December 31, 2021, the Company and subsidiaries had 129 employees (December 31, 2020:127 employees).

The Company's management consists of the following:

	:	President Commissioner
	:	Commissioners

	:	President Director
	:	Directors

b. Entitas Anak

Rincian entitas anak pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

b. Consolidated Subsidiaries

Details of the subsidiaries at the end of the reporting period are as follows:

Nama Entitas Anak/ Name of Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis Usaha/ Nature of business	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Jumlah Aset/Total Assets Sebelum eliminasi/Before elimination	
					31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
					Rp	Rp
PT Granif Konsultan (GK)	Jakarta	Jasa konstruksi/ Construction services	75%	2011	312.576.330	137.948.212
PT Arkora Sulawesi Selatan (ASS)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Maret/March 2020	373.507.387.034	365.985.378.995
PT Arkora Hydro Sulawesi (AHS)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	157.379.821.134	16.427.988.548
PT Nosu Hydro (NH)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.856.633.863	1.857.293.863
PT Hydra Sulawesi (HS)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.996.542.437	1.997.202.437
PT Arkora Tomoni Hydro (ATH)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.997.152.500	1.915.887.179
PT Arkora Luwu Timur Mandiri (ALTM)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.916.732.854	1.917.392.854
PT Arkora Hidro Pasifik (AHP)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.994.970.136	1.995.715.136
PT Arkora Hindonesia (AH)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.510.585.486	1.511.245.486
PT Arkora Sulawesi Tengah (ASTH)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.996.152.500	1.892.018.721
PT Sulawesi Hidro Mandiri (SHM)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.928.772.181	1.929.432.181
PT Arkora Sulawesi Tenggara (AST)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.890.758.721	1.996.812.500
PT Arjuna Hidro (Arjuna)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.917.224.680	1.917.884.680
PT Tenggara Hidro (TH)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.915.227.179	1.915.887.179
PT Arkora Energi Baru (AEB)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.996.152.500	2.615.331.031
PT Arkora Atlantik (AA)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.882.866.471	1.883.526.471
PT Arkora Guna Nergi (AGN)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.996.152.500	1.996.812.500
PT Arkora Hidro Tenggara (AHT)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.993.544.757	1.994.204.757
PT Tirta Energi Lestari (TEL)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,60%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	576.273.162	576.833.162
PT Arkora Tenaga Matahari (ATM)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.250.000.000	-

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, terdapat sejumlah amendemen PSAK yang efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Penerapan atas PSAK revisi ini, tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

- **Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 (Amendemen-amandemen atas PSAK 71 Instrumen Keuangan, PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 62 Kontrak Asuransi, dan PSAK 73 Sewa)**

Pada tahun lalu, amendemen Tahap 1 membahas permasalahan terkait Reformasi Acuan Suku Bunga - amendemen atas PSAK 71, PSAK 55, dan PSAK 60. Amendemen tersebut memodifikasi persyaratan akuntansi lindung nilai yang memperbolehkan akuntansi lindung nilai untuk dilanjutkan atas lindung nilai yang terdampak selama periode ketidakpastian sebelum item lindung nilai atau instrumen lindung nilai diubah sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga.

Amendemen Tahap 2 membahas permasalahan atas dampak dari transisi suku bunga referensi (IBOR) menjadi alternatif acuan suku bunga yang baru (juga direferensikan sebagai 'suku bunga bebas risiko atau RFRs) tanpa menyebabkan dampak akuntansi yang tidak memberikan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan.

b. Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, standar, interpretasi, dan amendemen-amandemen atas PSAK yang relevan bagi Grup, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan ini diizinkan, adalah sebagai berikut:

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATION OF PSAK ("ISAK")

a. Standards, Amendments/Improvements and Interpretation to Standards Effective in the Current Year

In the current year, there are a number of amendments to PSAK effective for accounting period beginning on or after January 1, 2021. The adoption of these revised PSAK does not result in changes to the Group's accounting policies and has no material effect on the amounts reported for the current or prior years.

- **Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2 (Amendments to PSAK 71 Financial Instruments, PSAK 55 Financial Instruments: Recognition and Measurement, PSAK 60 Financial Instruments: Disclosures, PSAK 62 Insurance Contracts, and PSAK 73 Leases)**

In the prior year, Phase 1 amendments addressed issue related Interest Rate Benchmark Reform - Amendments to PSAK 71, PSAK 55 and PSAK 60. These amendments modify specific hedge accounting requirements to allow hedge accounting to continue for affected hedges during the period of uncertainty before the hedged items or hedging instruments are amended as a result of the interest rate benchmark reform.

Phase 2 amendments address issues of the effects of transitioning from interbank offered rates (IBOR) to alternative benchmark interest rates (also referred to as 'risk free rates' or RFRs) without giving rise to accounting impacts that would not provide useful information to users of financial statements.

b. Amendments to standards issued not yet adopted

At the date of authorization of these consolidated financial statements, the following amendment to PSAK relevant to the Group were issued but not yet effective:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022

- PSAK 22 (amendemen) Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual
- PSAK 57 (amendemen) Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak
- Penyesuaian Tahunan 2021 atas PSAK (amendemen PSAK 71 Instrumen Keuangan dan PSAK 73 Sewa)

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

- PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- PSAK 16 (amandemen) Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- PSAK 25 (amendemen) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi
- PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

- PSAK 74 *Kontrak Asuransi*
- PSAK 74 (amendemen) *Kontrak Asuransi: Penerapan awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif*

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan standar dan amendemen/penyesuaian standar tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak (Grup) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Pasar Modal yang berlaku yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Effective for periods beginning on or after January 1, 2022

- PSAK 22 (amendment) Business Combinations on References to the Conceptual Framework
- PSAK 57 (amendment) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts
- 2021 Annual Improvements to PSAK (amendments to PSAK 71 Financial Instruments and PSAK 73 Leases)

Effective for periods beginning on or after January 1, 2023

- PSAK 1 (amendment) Presentation of financial statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current.
- PSAK 16 (amendment) Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use
- PSAK 25 (amendment) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates
- Amendments to PSAK 1 (amendment) Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies

Effective for periods beginning on or after January 1, 2025

- PSAK 74 *Insurance Contracts*
- PSAK 74 (amendment) *Insurance Contracts: Initial application of PSAK 74 and PSAK 71 - Comparative Information*

As of the issuance date of the consolidated financial statements, the effects of adopting of these standards and amendments/improvements to standards on the consolidated financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries (Group) have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which includes Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market regulation issued by Indonesian Financial Service Authority ("OJK") No. VIII.G.7 on Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers of Public Company.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, terlepas dari apakah harga tersebut dapat diamati secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengestimasi nilai wajar dari suatu aset atau liabilitas, Grup memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Nilai wajar untuk tujuan pengukuran dan/atau pengungkapan pada laporan keuangan konsolidasian ditentukan atas dasar tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Direksi memiliki, pada saat persetujuan laporan keuangan, suatu ekspektasi yang memadai bahwa Grup memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan keberadaan operasinya untuk di masa yang akan datang. Sehingga, mereka melanjutkan penerapan dasar akuntansi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas investee; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah Perusahaan mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

b. Basis of Preparation

The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis except as explained in the accounting policies below.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Group takes into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date. Fair value for measurement and/or disclosure purposes in these consolidated financial statements is determined on such a basis

The consolidated statement of cash flows is prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The directors have, at the time of approving the financial statements, a reasonable expectation that the Group has adequate resources to continue in operational existence for the foreseeable future. Thus, they continue to adopt the going concern basis of accounting in preparing the consolidated financial statements.

c. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries. Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di-*investee*, ia memiliki kekuasaan atas investee ketika hak suara cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola pemilihan suara dalam RUPS sebelumnya.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti untuk mengendalikan entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan untuk kepentingan nonpengendali. Perusahaan juga mengatribusikan total laba komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra kelompok usaha, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasian.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous stockholders' meetings.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Kepentingan nonpengendali di entitas anak diidentifikasi secara terpisah dari ekuitas Grup yang ada. Kepentingan pemegang saham nonpengendali yang merupakan kepentingan kepemilikan yang memberikan pemiliknya hak terhadap bagian proporsional aset bersih pada saat likuidasi pada awalnya dapat diukur sebesar nilai wajar atau bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat untuk masing-masing akuisisi. Kepentingan nonpengendali lain awalnya diukur sebesar nilai wajar. Setelah akuisisi, jumlah tercatat kepentingan nonpengendali adalah jumlah kepentingan tersebut pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan nonpengendali dari perubahan selanjutnya di ekuitas.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laba rugi dihitung sebagai /perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (retained interest) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill), dikurangi liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan nonpengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan / diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk perlakuan akuntansi berikutnya dalam PSAK 71, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

d. Saldo dan Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan individu masing-masing entitas Grup diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian Grup disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately from the Group's equity therein. Those interests of non-controlling stockholders that are present ownership interests entitling their holders to a proportionate share of net assets upon liquidation may initially be measured at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the fair value of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement is made on an acquisition-by-acquisition basis. Other non-controlling interests are initially measured at fair value. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interests is the amount of those interests at initial recognition plus the non-controlling interests' share of subsequent changes in equity.

Changes in the Group's ownership interest in subsidiaries that do not result in the Group losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

When the Group loses control of a subsidiary, the gain or loss recognized in profit or loss is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), less liabilities of the subsidiary and any non-controlling interests. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 71, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a joint venture.

d. Balance and Transaction in Foreign Currencies

The individual financial statements of each entity within Group are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The consolidated financial statements of the Group are presented in Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Company and the presentation currency for the consolidated financial statements.

Dalam penyusunan laporan keuangan setiap entitas Grup, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

e. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

In preparing the financial statements of each Group entities, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Exchange differences on monetary items are recognized in profit or loss in the period in which they arise.

e. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

f. Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar. Biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan dan liabilitas keuangan ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika diperlukan, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi diakui langsung pada laba rugi.

Aset keuangan

Klasifikasi aset keuangan

Instrumen utang yang memenuhi persyaratan berikut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

- v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).
- viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

f. Financial Instrument

Financial assets and financial liabilities are recognized on the consolidated statement of financial position when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities are added to or deducted from the fair value of the financial assets and financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Financial assets

Classification of financial assets

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at amortized cost:

- the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

Biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif adalah tingkat suku bunga yang secara tepat mendiskontokan penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) tidak termasuk kerugian kredit ekspektasian, melalui umur ekspektasian dari instrumen utang, atau, jika tepat, periode yang lebih pendek, ke jumlah tercatat bruto instrumen utang pada saat pengakuan awal. Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan, termasuk estimasi kerugian kredit, ke biaya perolehan diamortisasi instrumen utang pada pengakuan awal.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah nilai aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya. Di sisi lain, jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan, sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif untuk instrumen utang yang diukur selanjutnya pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk saldo lancar ketika dampak diskonto tidak material.

Penurunan nilai aset keuangan

Grup mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") atas piutang usaha dan piutang lain-lain dan aset kontrak. Nilai kerugian kredit ekspektasian diperbarui pada tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal masing-masing instrumen keuangan.

Amortized cost and effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period.

For financial instruments other than purchased or originated credit-impaired financial assets, the effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) excluding expected credit losses, through the expected life of the debt instrument, or, where appropriate, a shorter period, to the gross carrying amount of the debt instrument on initial recognition. For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit adjusted effective interest rate is calculated by discounting the estimated future cash flows, including expected credit losses, to the amortized cost of the debt instrument on initial recognition.

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition minus the principal repayments, plus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for any loss allowance. On the other hand, the gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any loss allowance.

Interest is recognized using the effective interest method for debt instruments measured subsequently at amortized cost, except for short-term balances when the effect of discounting is immaterial.

Impairment of financial assets

The Group recognizes a loss allowance for expected credit losses ("ECL") on trade and other accounts receivable and contract assets. The amount of expected credit losses is updated at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition of the respective financial instrument.

Grup selalu mengakui ECL sepanjang umurnya untuk piutang usaha. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan diestimasi menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Grup, disesuaikan untuk faktor spesifik debitur, kondisi ekonomi umum serta penilaian atas arah kondisi kini dan perkiraan masa depan pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu atas uang jika tepat.

Untuk semua instrumen keuangan lainnya, Grup mengakui ECL sepanjang umur ketika telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Jika, sebaliknya, risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan. Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan terjadinya atau pada risiko gagal bayar sejak pengakuan awal dan bukan didasarkan pada bukti aset keuangan yang mengalami kerugian kredit pada tanggal pelaporan atau kejadian gagal bayar sebenarnya.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan baik informasi kuantitatif maupun kualitatif yang wajar dan mendukung, termasuk pengalaman historis dan informasi bersifat perkiraan masa depan, yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Secara khusus, informasi berikut diperhitungkan ketika menilai apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal:

- terdapat penurunan yang signifikan pada peringkat kredit eksternal instrumen keuangan (jika ada) atau peringkat kredit internal, baik secara aktual maupun yang diperkirakan;
- memburuknya kondisi usaha, keuangan atau ekonomi yang terjadi saat ini atau prakiraan yang akan menyebabkan penurunan signifikan atas kemampuan peminjam untuk menyelesaikan kewajiban utangnya;
- terdapat penurunan yang signifikan terhadap hasil operasi peminjam, baik secara aktual atau yang diperkirakan akan terjadi;

The Group always recognizes lifetime ECL for trade accounts receivable. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Group's historical credit loss experience, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions and an assessment of both the current as well as the forecast direction of conditions at the reporting date, including time value of money where appropriate.

For all other financial instruments, the Group recognizes lifetime ECL when there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. If, on the other hand, the credit risk on the financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the Group measures the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month ECL. The assessment of whether lifetime ECL should be recognized is based on significant increases in the likelihood or risk of a default occurring since initial recognition instead of on evidence of a financial asset being credit impaired at the reporting date or an actual default occurring.

Significant increase in credit risk

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition. In making this assessment, the Group considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort.

In particular, the following information is taken into account when assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition:

- an actual or expected significant deterioration in the financial instrument's external (if available) or internal credit rating;
- existing or forecast adverse changes in business, financial or economic conditions that are expected to cause a significant decrease in the debtor's ability to meet its debt obligations;
- an actual or expected significant deterioration in the operating results of the debtor;

- peningkatan risiko kredit secara signifikan pada instrumen keuangan lainnya dari peminjam yang sama;
- perubahan signifikan yang tidak menguntungkan baik secara aktual atau yang diperkirakan dalam lingkungan peraturan, ekonomik, atau lingkungan teknologi peminjam yang mengakibatkan perubahan signifikan atas kemampuan peminjam dalam memenuhi kewajiban utangnya.

Terlepas dari hasil penilaian di atas, Grup membuat praduga risiko kredit aset keuangan telah meningkat signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 60 hari, kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan terdukung yang menunjukkan hal sebaliknya.

Grup mengasumsikan bahwa risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika instrumen keuangan tersebut ditetapkan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Instrumen keuangan memiliki risiko kredit yang rendah jika i) instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah, ii) debitur memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam waktu dekat dan iii) memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka panjang dapat, tetapi tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

Grup secara teratur memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya jika perlu untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlahnya jatuh tempo.

Definisi gagal bayar

Grup menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 90 hari kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit

Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai termasuk data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- kesulitan keuangan yang signifikan dari penerbit atau peminjam

- significant increases in credit risk on other financial instruments of the same debtor;
- an actual or expected significant adverse change in the regulatory, economic, or technological environment of the debtor that results in a significant decrease in the debtor's ability to meet its debt obligations.

Irrespective of the outcome of the above assessment, the Group presumes that the credit risk on a financial asset has increased significantly since initial recognition when contractual payments are more than 60 days past due, unless the Group has reasonable and supportable information that demonstrates otherwise.

The Group assumes that the credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition if the financial instrument is determined to have low credit risk at the reporting date. A financial instrument is determined to have low credit risk if i) the financial instrument has a low risk of default, ii) the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and iii) adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations.

The Group regularly monitors the effectiveness of the criteria used to identify whether there has been a significant increase in credit risk and revises them as appropriate to ensure that the criteria are capable of identifying significant increase in credit risk before the amount becomes past due.

Definition of default

The Group considers that default has occurred when a financial asset is more than 90 days past due unless the Group has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

Credit-impaired financial assets

A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of that financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- significant financial difficulty of the issuer or the borrower

- pelanggaran kontrak, seperti kejadian default atau lewat jatuh tempo
- pemberi pinjaman peminjam, karena alasan ekonomi atau kontrak terkait dengan kesulitan keuangan peminjam
- telah memberikan kepada peminjam suatu konsesi yang tidak akan dipertimbangkan oleh pemberi pinjaman
- menjadi mungkin bahwa peminjam akan mengalami kebangkrutan atau reorganisasi keuangan lainnya
- hilangnya pasar aktif untuk aset keuangan itu karena kesulitan keuangan.

Kebijakan penghapusan

Grup menghapuskan aset keuangan ketika ada informasi yang menunjukkan bahwa pihak lawan berada dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihanyang realistis, contoh ketika pihak lawan dalam proses likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan. Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas paksaan dalam prosedur pemulihan Grup, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Pengukuran dan pengakuan atas ECL

Untuk aset keuangan, ECL diestimasi sebagai selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada Grup sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diekspektasi akan diterima oleh Grup, didiskontokan pada suku bunga efektif awal.

Jika Grup telah mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan pada jumlah yang sama dengan ECL sepanjang umur pada periode pelaporan sebelumnya, tetapi menentukan pada tanggal pelaporan kini bahwa kondisi untuk ECL sepanjang umur tidak lagi terpenuhi, Grup mengukur cadangan kerugian sejumlah ECL 12 bulan pada tanggal pelaporan kini.

Grup mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laba rugi untuk semua instrumen keuangan dengan menyesuaikan jumlah tercatat melalui akun penyisihan kerugian.

- a breach of contract, such as a default or past due event
- the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty
- having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider
- it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganisation
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.

Write-off policy

The Group writes off a financial asset when there is information indicating that the counterparty is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g. when the counterparty has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Company's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

Measurement and recognition of ECL

For financial assets, the ECL is estimated as the difference between all contractual cash flows that are due to the Group in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at the original effective interest rate.

If the Group has measured the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to lifetime ECL in the previous reporting period, but determines at the current reporting date that the conditions for lifetime ECL are no longer met, the Group measures the loss allowance at an amount equal to 12-month ECL at the current reporting date.

The Group recognise an impairment gain or loss in profit or loss for all financial instruments with a corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Derecognition of financial assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Group are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Group after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Group are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Financial liabilities are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

g. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Grup saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

h. Kas dan Setara Kas

Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

i. Aset Tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/ Years	Persentase/ Percentage	
Kendaraan	4	25%	Vehicles
Peralatan	4	25%	Equipment
Renovasi bangunan	3	33,33%	Building improvement
Jaringan tegangan menengah	15	6,67%	Medium voltage transmission
Bangunan proyek	30	3,33%	Project building
Turbin	15	6,67%	Turbine

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

g. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

The Group only offsets financial assets and liabilities and present the net amount in the statement of financial position where it:

- currently has a legal enforceable right to set off the recognized amount; and
- intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

h. Cash and cash equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

i. Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are stated at costs, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

The estimated useful lives, residual value and depreciation method are reviewed at each year-end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Land is stated at cost and is not depreciated.

The cost of maintenance and repairs is charged to operations as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably. When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

j. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan – kecuali Goodwill

Pada akhir setiap periode pelaporan konsolidasian, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset dengan estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dibalik, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat ketika kerugian penurunan nilai tidak diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

k. Goodwill

Goodwill timbul atas akuisisi dari suatu bisnis dicatat pada biaya perolehan yang ditetapkan pada tanggal akuisisi bisnis tersebut dikurangi akumulasi penurunan nilai, jika ada.

Construction in-progress is stated at cost and transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

j. Impairment of Non-Financial Asset – except for Goodwill

At the end of each consolidated reporting period, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

k. Goodwill

Goodwill arising on an acquisition of a business is carried at cost as established at the date of acquisition of the business less accumulated impairment losses, if any.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill dialokasikan pada setiap unit penghasil kas dari Grup (atau kelompok unit penghasil kas) yang diperkirakan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering jika terdapat indikasi bahwa unit penghasil kas tersebut mungkin mengalami penurunan nilai. Jika jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan pertama kali untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan pada unit penghasil kas dan kemudian ke aset lain dari unit penghasil kas secara prorata berdasarkan jumlah tercatat dari setiap aset dalam unit penghasil kas tersebut. Setiap kerugian penurunan nilai goodwill diakui secara langsung dalam laba rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Pada pelepasan unit penghasil kas, jumlah goodwill yang dapat diatribusikan termasuk dalam penentuan laba rugi atas pelepasan.

I. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Ketika pinjaman dengan suku bunga variabel digunakan untuk membiayai aset kualifikasian dan dilindungi nilai dengan lindung nilai arus kas yang efektif dari risiko suku bunga, bagian efektif dari derivatif tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi ke laba rugi ketika aset kualifikasian berdampak pada laba rugi. Ketika suku bunga pinjaman tetap digunakan untuk membiayai aset kualifikasian dan nilai wajarnya dilindungi nilai secara efektif dari risiko suku bunga, biaya pinjaman yang dikapitalisasi mencerminkan tingkat bunga yang dilindungi nilai.

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman spesifik yang belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each of the Group's cash-generating units (or group of cash-generating units) expected to benefit from the synergies of the combination. A cash-generating unit to which goodwill has been allocated is tested for impairment annually, or more frequently when there is an indication that the unit may be impaired. If the recoverable amount of the cash-generating unit is less than its carrying amount, the impairment loss is allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the unit and then to the other assets of the unit pro-rata on the basis of the carrying amount of each asset in the unit. Any impairment loss for goodwill is recognized directly in profit or loss in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. An impairment loss recognized for goodwill is not reversed in subsequent periods.

On disposal of a cash-generating unit, the attributable amount of goodwill is included in the determination of the profit or loss on disposal.

I. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

To the extent that variable rate borrowings are used to finance a qualifying asset and are hedged in an effective cash flow hedge of interest rate risk, the effective portion of the derivative is recognized in other comprehensive income and reclassified to profit or loss when the qualifying asset impacts profit or loss. To the extent that fixed-rate borrowings are used to finance a qualifying asset and are hedged in an effective fair value hedge of interest rate risk, the capitalized borrowing costs reflect the hedged interest rate

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

Borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

m. Sewa

Grup sebagai penyewa

Grup menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal inepsi kontrak. Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Grup merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

m. Leases

The Group as lessee

The Group assesses whether a contract is, or contains a lease, at the inception of the contract. The Group recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Group recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Group uses its incremental borrowing rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives;
- variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;
- the amount expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;
- the exercise price of purchase options, if the lessee is reasonably certain to exercise the options; and
- payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.

The lease liability is presented as a separate line in the statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

Grup mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.
- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan).
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Grup tidak melakukan penyesuaian tersebut selama periode yang disajikan.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Grup dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan.

The Group remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use assets) whenever:

- the lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.
- the lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used).
- a lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.

The Group did not make any such adjustments during the periods presented.

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Group incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 57. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Group expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

The right-of-use assets are presented as a separate line in the statement of financial position.

Grup menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Sebagai cara praktis, PSAK 73 mengizinkan penyewa untuk tidak memisahkan komponen nonsewa, dan mencatat masing-masing komponen sewa dan komponen nonsewa sebagai kesepakatan sewa tunggal. Grup tidak menggunakan cara praktis ini.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Grup merupakan penghasil tenaga listrik. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Grup diakui pada saat pengendalian barang dialihkan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan akan menjadi hak Grup dalam pertukaran barang tersebut. Grup secara umum menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah yang utama dalam pengaturan pendapatannya.

Pemenuhan kewajiban pelaksanaan diukur dengan menggunakan metode output berdasarkan unit yang diproduksi dan dikirim dalam bulan produksi. Kuantitas yang dikirim ditentukan melalui meteran pengukuran listrik di titik pengiriman.

Pendapatan terkait dengan jasa konstruksi dari perjanjian konsesi jasa diakui sepanjang waktu dan ketika kewajiban pelaksanaan terpenuhi.

Terkait pendapatan dari perjanjian jasa konsesi, Grup mengalokasikan pembayaran yang diterima untuk setiap kWh listrik yang ditransfer ke PLN: pelunasan pokok dan bunga aset keuangan dari proyek konsesi dan operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik yang disajikan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi konsolidasian. ASS menggunakan metode nilai sisa untuk mengalokasikan total pembayaran yang diterima dari PLN antara pendapatan untuk aktivitas pembiayaan dan operasi dan pemeliharaan. Penghasilan pembiayaan diakui berdasarkan pola yang mencerminkan tingkat pengembalian periodik yang konstan atas saldo aset keuangan dari proyek konsesi.

Pendapatan yang berkaitan dengan jasa operasi dan pemeliharaan diakui sepanjang waktu sesuai dengan penyerahan jasa operasi dan pemeliharaan.

Beban

Beban diakui berdasarkan saat terjadi. Beban yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak meliputi beban langsung dan tidak langsung yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak. Beban diakui pada tahun yang bersangkutan (*accrual basis*)

The Group applies PSAK 48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

As a practical expedient, PSAK 73 permits a lessee not to separate non-lease components, and instead account for any lease and associated non-lease components as a single arrangement. The Group has not used this practical expedient.

n. Revenue and Expense Recognition

The Group is electricity power producer. Revenue from contracts with the Group's customers is recognized when electricity is delivered to the customer at an amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for those electricity. The Group has generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements.

Progress towards satisfaction of the performance obligation is measured using an output method based on units produced and delivered within the production month. Quantities delivered are determined through electrical measurement meters at the delivery point.

Revenue related to construction services under a service concession arrangement is recognized over time and when the performance obligation is satisfied.

For revenue from service concession arrangement, the Group allocates the consideration that it receives for each kWh of electricity delivered to PLN into: repayment of principal and interest of financial assets from concession project and operation and maintenance of the power plant in consolidated profit or loss. ASS uses the residual value method to allocate the total consideration received from PLN between revenue for the financing and operation and maintenance activities. Finance income is recognized based on a pattern reflecting constant period rate of return on the Group's outstanding financial assets from concession project.

Revenue relating to the operation and maintenance services is recognized over time based on the delivery of the operation and maintenance services.

Expenses

Expense are recognized when incurred. Expenses incurred in the execution of the contract include direct and indirect expenses associated with contract performance. Expenses are recognized in the relevant year (*accrual basis*).

o. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak kini terutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan di laba rugi karena tidak memperhitungkan penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan tidak memperhitungkan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Liabilitas Grup untuk pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Provisi diakui untuk penentuan pajak yang tidak pasti, tetapi kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar dana kepada otoritas pajak. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik atas jumlah ekspektasian yang terhutang. Penilaian berdasarkan pada pertimbangan professional pajak dalam Grup yang didukung dengan pengalaman lalu atas aktivitas tersebut.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

o. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as reported in profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Group's liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

A provision is recognized for those matters for which the tax determination is uncertain but it is considered probable that there will be a future outflow of funds to a tax authority. The provisions are measured at the best estimate of the amount expected to become payable. The assessment is based on the judgement of tax professionals within the Group supported by previous experience in respect of such activities.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arise from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi, atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam hal kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

p. Liabilitas Imbalan Kerja

Grup memberikan imbalan kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang- Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 sebelum tahun 2021 dan Undang – Undang Cipta Kerja setelah tahun 2021. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Grup sehubungan dengan imbalan paska kerja ini.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas tidak direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

p. Employee Benefits Obligation

The Group provides post-employment benefits as required under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law") before 2021 and Omnibus Law after 2021. No funding has been made by the Group to the defined benefit plans.

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognised in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognised in other comprehensive income as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognised in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorised as follows:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup.

q. Segmen Operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap proyek.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun informasi segmen sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian.

r. Laba (Rugi) per Saham

Laba (Rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements)
- Net interest expense or income
- Remeasurement

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognised in the consolidated statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Group's defined benefit plans.

q. Operating Segment

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by "the chief operating decision maker" in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- a) that engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);
- b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- c) for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on the category of each project.

The accounting policies used in preparing segment information are the same as those used in preparing the consolidated financial statements.

r. Earnings (Loss) per Share

Basic earnings (Loss) per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3 manajemen Grup diwajibkan untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang perkiraan tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari yang melibatkan estimasi yang telah dibuat direksi, termasuk penilaian kelangsungan usaha sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 32, dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Penentuan apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa

Perusahaan dan entitas anak, PT Arkora Sulawesi Selatan (ASS) dan PT Arkora Hydro Sulawesi (AHS), telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dimana Perusahaan, ASS dan AHS akan membangun pembangkit listrik tenaga mini hydro, seperti yang ditentukan dalam kontrak. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun dari *Commercial Operating Date* (COD) untuk Perusahaan dan ASS dan 25 tahun dari COD untuk AHS.

Penyelenggaraan usaha tenaga listrik di Indonesia dikendalikan oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan setiap pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum harus memastikan ketersediaan tenaga listrik di setiap wilayah operasinya.

Manajemen mengevaluasi untuk menentukan apakah PPA termasuk dalam ruang lingkup ISAK 16, Perjanjian Konsesi Jasa atau ISAK 8, Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa (sebelum 1 Januari 2020) atau PSAK 73, Sewa (setelah 1 Januari 2020). ISAK 16 memberikan panduan atas perjanjian konsesi jasa publik ke swasta jika: (a) pemberi konsesi mengendalikan atau meregulasi jasa apa yang harus diberikan oleh operator dengan infrastruktur, kepada siapa jasa harus diberikan, dan berapa harganya dan (b) pemberi konsesi mengendalikan melalui kepemilikan, hak manfaat, atau bentuk lain atas setiap kepentingan residu signifikan dalam infrastruktur pada akhir masa perjanjian.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 3, the Group's management are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Below are the critical judgments, apart from those involving estimations, including critical judgement on going concern assessment as disclosed in Note 32, that the directors have made in the process of applying the Group's accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Determining whether an Arrangement Contains a Lease

The Company and its subsidiaries, PT Arkora Sulawesi Selatan (ASS) and PT Arkora Hydro Sulawesi (AHS), have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), whereby the Company, ASS and AHS shall construct a mini hydro power plant as specified in the contract. The agreement is valid for 15 years from Commercial Operating Date (COD) for the Company and ASS and 25 years from COD for AHS.

The electric power business in Indonesia is controlled by the Indonesian Government and is carried out by PLN, a state-owned enterprise, which serves as the holder of Electricity Business Proxy. The holder of Electricity Business Proxy and each holder of Electricity Business License for public use must ensure the adequacy of electric power supply in each of their operating areas.

Management exercised judgement to determine whether PPA is within the scope of ISAK 16, Service Concession Arrangements or ISAK 8, Determining Whether an Arrangement Contains a Lease (prior January 1, 2020) or PSAK 73, Leases (after January 1, 2020). ISAK 16 applies to public-to-private service concession arrangements if: (a) the grantor controls or regulates what services the operator must provide with the infrastructure, to whom it must provide them, and at what price and (b) the grantor controls through ownership, beneficial entitlement or otherwise any significant residual interest in the infrastructure at the end of the term of the arrangement.

Manajemen telah mengevaluasi bahwa PPA antara Perusahaan dan PLN tidak termasuk dalam ruang lingkup ISAK 16 "Perjanjian Konsesi Jasa". Dalam melakukan evaluasi, manajemen mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepemilikan atas infrastruktur pada saat akhir masa PPA;
2. Masa berlakunya PPA dibandingkan dengan umur ekonomis infrastruktur;
3. Pengendalian atas kepentingan residu atas infrastruktur setelah masa PPA berakhir.

Selanjutnya, manajemen menilai bahwa PPA tersebut merupakan perjanjian yang mengandung sewa dan diperlakukan sesuai dengan PSAK 30, Sewa.

Manajemen mengklasifikasikan sewa yang berasal dari perjanjian kontraktual dengan Perusahaan sebagai sewa operasi berdasarkan evaluasi manajemen bahwa perjanjian tidak memindahkan risiko dan hak tidak terduga secara substansial ke kepemilikan.

Penilaian manajemen berdasarkan fakta dan kondisi sesuai tanggal perjanjian dan pelaporan; penilaian kembali dapat dilakukan jika ada informasi baru yang tersedia.

Manajemen juga telah mengevaluasi bahwa PPA antara ASS dan AHS dengan PLN termasuk dalam ruang lingkup ISAK 16 "Perjanjian Konsesi Jasa" (Catatan 5).

Sumber utama ketidakpastian estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam keuangan tahun depan dijelaskan dibawah ini:

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Management has assessed that the PPA between the Company and PLN did not qualify within the scope of ISAK 16 "Service Concession Arrangements". In their assessment, management considered the following:

1. The ownership of the infrastructure at the end of PPA;
2. PPA period compared to the infrastructure's useful life;
3. Control over the residual interest of the infrastructure after the PPA.

Accordingly, management has assessed that the PPA is an arrangement that contains a lease and is accounted for under PSAK 30, Leases.

Management classifies the lease arise from contractual arrangement of the Company as operating lease based on management's evaluation that the arrangement does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

Management's assessments are based on facts and conditions available to management as of the date of agreement and at reporting date; reassessment may be made in the future when additional information is available.

Management also has assessed that the PPA between ASS and AHS with PLN qualified within the scope of ISAK 16 "Service Concession Arrangements" (Note 5).

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are discussed below:

Estimated Useful Lives of Property, Plant and Equipment

The useful life of each item of the Group's properties and equipment is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

Manfaat karyawan

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan kerja Grup.

5. PERJANJIAN KONSESI JASA

Grup telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsensi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22 "Perjanjian Konsensi Jasa: Pengungkapan" (ISAK 22) sehubungan dengan hak konsensi.

Pengaturan konsesi jasa publik ke swasta dimana: (a) pemberi mengendalikan atau mengatur layanan apa yang perusahaan sediakan dengan infrastruktur, kepada siapa ia harus memberikan layanan, dan berapa harganya, dan (b) kontrol pemberi hibah, melalui kepemilikan, hak menguntungkan atau sebaliknya, kepentingan residu signifikan dalam infrastruktur pada akhir masa perjanjian dicatat berdasarkan ketentuan ISAK 16. "Perjanjian Konsesi Jasa" infrastruktur yang digunakan dalam layanan pengaturan konsesi jasa publik ke swasta untuk seluruh masa manfaatnya (keseluruhan hidup aset) berada dalam ruang lingkup interpretasi ini jika kondisi di (a) terpenuhi.

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan fasilitas pembangkit listrik dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

ISAK 16 berlaku untuk kedua: (a) infrastruktur yang dibangun atau diperoleh perusahaan dari pihak ketiga untuk tujuan perjanjian jasa, dan (b) infrastruktur yang ada yang aksesnya diberikan pemberi kepada perusahaan untuk tujuan perjanjian jasa.

Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara PLN dan Perusahaan tidak termasuk dalam ruang lingkup ISAK 16 "Perjanjian Konsesi Jasa". Dalam melakukan evaluasi, manajemen mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Employee Benefits

The determination of provision for employment benefits is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Group's assumptions recognized as other comprehensive income and affect the recognized expense and recorded provision. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Group's provision for employment benefit.

5. SERVICE CONCESSION ARRANGEMENTS

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangements" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22) related to the concession rights.

Public-to-private service concession arrangements where: (a) the grantor controls or regulates what service the company must provide with the infrastructure, to whom it must provide them, and at what price; and (b) the grantor controls, through ownership, beneficial entitlement or otherwise, any significant residual interest in the infrastructure at the end of the term of the arrangement are accounted for under the provisions of ISAK 16. "Service Concession Arrangements" infrastructures used in a public-to-private service concession arrangement for its entire useful life (whole-of-life assets) are within the scope of this interpretation if the conditions in (a) are met.

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the hydro power generating facility to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

ISAK 16 applies to both: (a) infrastructure that the company constructs or acquires from a third party for the purpose of the service arrangement; and (b) existing infrastructure to which the grantor gives the company access for the purpose of the service arrangement.

The Power Purchase Agreement between PLN and the Company did not qualify within the the scope of ISAK 16 "Service Concession Arrangements". In their assessment, management considered the following:

- Kepemilikan atas infrastruktur pada saat akhir masa PPA;
- Masa berlakunya PPA dibandingkan dengan umur ekonomis infrastruktur;
- Pengendalian atas kepentingan residu atas infrastruktur setelah masa PPA berakhir.

Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara ASS dan AHS dengan PLN memenuhi definisi dari perjanjian konsesi jasa dimana PLN bertindak sebagai pemberi dan ASS bertindak sebagai operator. ASS dan AHS setuju untuk merancang, membiayai, membangun, memiliki dan mengoperasikan fasilitas pembangkit listrik tenaga mini hydro ("infrastruktur") dan menjual ke PLN daya yang dihasilkan sesuai syarat dan kondisi yang disepakati dalam PPA. Infrastruktur digunakan sepenuhnya untuk tujuan perjanjian konsesi jasa.

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa dengan model aset keuangan dan aset takberwujud.

Grup mengakui aset keuangan yang timbul dari perjanjian konsesi jasa ketika Grup memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas dari atau atas diskresi pemberi konsesi dan hak untuk menerima kas. Aset keuangan tersebut diukur pada nilai wajar pada saat pengakuan awal dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Grup mengakui ECL sepanjang umur ketika telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Jika, sebaliknya, risiko kredit pada aset keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan. Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan terjadinya atau pada risiko gagal bayar sejak pengakuan awal dan bukan didasarkan pada bukti aset keuangan yang mengalami kerugian kredit pada tanggal pelaporan atau kejadian gagal bayar sebenarnya.

Grup mengakui aset takberwujud yang timbul dari perjanjian konsesi jasa ketika Grup memiliki hak untuk membebaskan pengguna jasa atas penggunaan infrastruktur. Aset takberwujud yang diterima sebagai imbalan untuk menyediakan jasa konstruksi dalam perjanjian konsesi jasa diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima pada saat pengakuan awal. Selanjutnya setelah pengakuan awal, aset takberwujud diukur sebesar biaya perolehan, yang meliputi biaya pinjaman modal dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Estimasi masa manfaat aset takberwujud adalah periode sejak Grup dapat menagih pengguna atas penggunaan infrastruktur hingga akhir periode konsesi.

Jika Grup dibayar untuk jasa konstruksi sebagian dengan aset keuangan dan sebagian dengan aset takberwujud, maka setiap komponen imbalan dicatat secara terpisah dan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima.

- The ownership of the infrastructure at the end of PPA;
- PPA period compared to the infrastructure's useful life;
- Control over the residual interest of the infrastructure after the PPA.

The Power Purchase Agreement between ASS and AHS with PLN meets the definition of a service concession arrangement where PLN acts as a grantor and ASS acts as the operator. ASS and AHS agree to design, finance, construct, own and operate a hydro power generating facility (the "infrastructure") and sell to PLN the power generated therefrom on terms and conditions as agreed in the PPA. The infrastructure is used for its entire useful life for the purpose of the service concession arrangement.

The Group accounts for its service concession arrangement under financial assets and intangible asset model.

The Group recognized a financial asset arising from a service concession arrangement when it has unconditional contractual right to receive cash from or at the direction of the grantor for the construction and the right to receive cash. Such financial assets are measured at fair value on initial recognition and classified as financial assets measured at amortized cost.

The Group recognizes lifetime ECL when there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. If, on the other hand, the credit risk on the financial asset has not increased significantly since initial recognition, the Group measures the loss allowance for that financial asset at an amount equal to 12-month ECL. The assessment of whether lifetime ECL should be recognized is based on significant increases in the likelihood or risk of a default occurring since initial recognition instead of on evidence of a financial asset being credit impaired at the reporting date or an actual default occurring.

The Group recognized an intangible asset arising from a service concession arrangement when it has right to charge for the use of the infrastructure. An intangible asset received as consideration for providing construction services in a service concession arrangement is measured at fair value of the benefit received or to be received on initial recognition. Subsequent to initial recognition, the intangible assets is measured at cost, which includes capital borrowing cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. The estimated useful life of the intangible assets is the period from when the Group is able to charge the user for the use of the infrastructure to the end of the concession period.

If the Group is paid for the construction services partly by a financial asset and partly by an intangible asset, then each component of the consideration is accounted for separately and is initially recognized at the fair value of the consideration received or to be received.

Pekerjaan konstruksi ASS dimulai pada tahun 2017 dan pada tanggal 10 Maret 2020 ASS mendapatkan *Commercial Operation Date* (COD) dari PLN dan memulai kegiatan komersialnya sejak saat itu. Berdasarkan PPA, periode konsesi yang berlaku adalah 15 tahun sejak COD.

Construction works of ASS were started in 2017 and on March 10, 2020, ASS obtained Commercial Operation Date (COD) from PLN and started its commercial operation since then. Under the PPA, the valid concession period is 15 years from COD.

Pekerjaan konstruksi AHS dimulai pada bulan Februari 2021 dan tanggal operasi komersial (COD) direncanakan akan tercapai pada Januari 2023. Berdasarkan PPA, periode konsesi yang berlaku adalah 25 tahun sejak COD.

Construction works of AHS were started in February 2021 and the commercial operation date (COD) is planned to be achieved in January 2023. Under the PPA, the valid concession period is 25 years from COD.

Terkait dengan perjanjian jasa konsesi, Grup mencatat pendapatan konstruksi (Catatan 18) dan biaya konstruksi (Catatan 19).

Related to service concession arrangement, the Group recorded construction revenue (Note 18) and construction cost (Note 19).

6. KAS DAN SETARA KAS

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	31 Desember/ December 31, 2019 Rp	
Kas - Rupiah	113.728.465	77.959.762	Cash on hand - Rupiah
Bank - Pihak Ketiga Rupiah			Cash in banks - Third Parties Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	15.268.145.844	20.741.965.159	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	388.019.812	918.969.514	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	79.001.121	79.040.427	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	52.029.867	52.557.475	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	37.013.288	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk	20.497.139	12.110.300	PT Bank Permata Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	12.428.662	49.961.428	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank BTPN Tbk	12.389.391	12.511.076	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	9.496.000	10.000.000	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	365.483	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Dollar Amerika Serikat			U.S. Dollar
PT Bank Central Asia Tbk	20.723.395	33.043.001	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	11.005.683	548.654.812	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	61.323	23.903.256	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Euro			Euro
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	143.494.271	154.710.358	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	94.776	101.555	PT Bank OCBC NISP Tbk
Deposito berjangka - Pihak Ketiga Rupiah			Time deposits - Third Parties Rupiah
PT Bank Permata Tbk	-	2.600.000.000	PT Bank Permata Tbk
Jumlah	<u>16.168.494.520</u>	<u>25.315.488.123</u>	Total
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun Rupiah	-	4,00%	Interest rate per annum on time deposits Rupiah

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat saldo kas dan setara yang tidak dapat digunakan oleh Grup dan kas dan setara kas yang dijaminkan.

As of December 31, 2021 and 2020, there were no cash and cash equivalent that are not available for use by the Group nor pledged as collateral.

7. PIUTANG USAHA

Piutang usaha merupakan piutang usaha dalam mata uang Rupiah dari PLN. Tidak ada bunga yang dibebankan pada piutang usaha.

Cadangan kerugian kredit untuk piutang usaha telah diukur sejumlah ECL sepanjang umur. ECL pada piutang usaha diestimasi dengan mengacu pada pengalaman gagal bayar debitur masa lalu dan analisis posisi keuangan debitur saat ini, disesuaikan dengan faktor-faktor yang spesifik dari debitur, kondisi ekonomi umum industri di mana debitur beroperasi.

Tidak ada perubahan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan berjalan.

Seluruh nilai piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 belum jatuh tempo dan oleh karena itu, Grup menentukan bahwa piutang usaha memiliki kerugian kredit yang minimal atau tidak material.

Piutang usaha dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman berjangka (Catatan 15).

7. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE

Trade accounts receivable represents trade receivable in Rupiah from PLN. No interest is charged on trade receivables.

Allowance for credit losses for trade accounts receivable has been measured at an amount equal to lifetime ECL. The ECL on trade accounts receivable is estimated by reference to past default experience of the debtor and an analysis of the debtor's current financial position, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions of the industry in which the debtors operate.

There has been no change in the estimation techniques or significant assumptions made during the current reporting period.

All balance of trade account receivables as of December 31, 2021 and 2020 are not yet due and thus, the Group determines the trade accounts receivable are subject to minimal or immaterial credit loss.

Trade receivables are pledged as collateral for term loan (Note 15).

8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp
Biaya emisi Penawaran Umum Saham Perdana	3.900.000.000
Asuransi	937.263.850
Sewa	287.840.514
Jumlah	<u>5.125.104.364</u>

8. PREPAID EXPENSES

	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
	-	Issuance cost for Intial Public Offering of Shares
	-	Insurance
	723.126.389	Rent
Jumlah	<u>723.126.389</u>	Total

9. ASET TETAP

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

	1 Januari/ January 1, 2021 Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	
Biaya perolehan						At cost
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Tanah	5.168.126.760	-	-	-	5.168.126.760	Land
Peralatan	1.479.670.872	30.106.270	-	-	1.509.777.142	Equipment
Renovasi bangunan	473.370.157	-	-	-	473.370.157	Building improvement
Kendaraan	1.101.507.636	71.450.000	-	-	1.172.957.636	Vehicles
Jaringan tegangan menengah	15.632.374.311	-	-	-	15.632.374.311	Medium voltage transmission
Bangunan proyek	112.557.024.003	-	-	-	112.557.024.003	Project building
Turbin	46.583.825.988	2.903.579.001	-	951.678.000	50.439.082.989	Turbine
Pekerjaan dalam penyelesaian Bangunan	951.678.000	-	-	(951.678.000)	-	Construction in progress Building
Jumlah	183.947.577.727	3.005.135.271	-	-	186.952.712.998	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Peralatan	1.216.645.027	149.299.296	-	-	1.365.944.323	Equipment
Renovasi bangunan	473.370.157	-	-	-	473.370.157	Building improvement
Kendaraan	878.173.475	178.478.973	-	-	1.056.652.448	Vehicles
Jaringan tegangan menengah	2.006.324.333	1.090.430.429	-	-	3.096.754.761	Medium voltage transmission
Bangunan proyek	14.153.375.011	3.788.839.411	-	-	17.942.214.423	Project building
Turbin	11.904.755.531	3.185.906.254	-	-	15.090.661.785	Turbine
Jumlah	30.632.643.534	8.392.954.363	-	-	39.025.597.897	Total
Jumlah Tercatat	153.314.934.193				147.927.115.100	Net Carrying Value
	1 Januari/ January 1, 2020 Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Biaya perolehan						At cost
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Tanah	5.168.126.760	-	-	-	5.168.126.760	Land
Peralatan	1.479.670.872	-	-	-	1.479.670.872	Equipment
Renovasi bangunan	473.370.157	-	-	-	473.370.157	Building improvement
Kendaraan	695.037.536	-	-	406.470.100	1.101.507.636	Vehicles
Jaringan tegangan menengah	15.632.374.311	-	-	-	15.632.374.311	Medium voltage transmission
Bangunan proyek	112.557.024.003	-	-	-	112.557.024.003	Project building
Turbin	46.583.825.988	-	-	-	46.583.825.988	Turbine
Pekerjaan dalam penyelesaian Bangunan	-	951.678.000	-	-	951.678.000	Construction in progress Building
Aset sewa pembiayaan Kendaraan	406.470.100	-	-	(406.470.100)	-	Finance leased asset Vehicles
Jumlah	182.995.899.727	951.678.000	-	-	183.947.577.727	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Peralatan	1.025.340.104	191.304.923	-	-	1.216.645.027	Equipment
Renovasi bangunan	473.370.157	-	-	-	473.370.157	Building improvement
Kendaraan	595.009.345	174.091.665	-	109.072.465	878.173.475	Vehicles
Jaringan tegangan menengah	1.639.976.028	366.348.305	-	-	2.006.324.333	Medium voltage transmission
Bangunan proyek	10.630.385.600	3.522.989.411	-	-	14.153.375.011	Project building
Turbin	8.799.167.132	3.105.588.399	-	-	11.904.755.531	Turbine
Aset sewa pembiayaan Kendaraan	3.220.833	105.851.632	-	(109.072.465)	-	Finance leased asset Vehicles
Jumlah	23.166.469.199	7.466.174.335	-	-	30.632.643.534	Total
Jumlah Tercatat	159.829.430.528				153.314.934.193	Net Carrying Value

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Beban pokok pendapatan (Catatan 18)	8.070.605.841	7.105.908.015	Cost of revenues (Note 18)
Beban umum dan administrasi (Catatan 19)	322.348.522	360.266.320	General and administrative expenses (Note 19)
Jumlah	8.392.954.363	7.466.174.335	Total

Pada tanggal 31 Desember 2021, aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada PT Asuransi FPG Indonesia dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 458.516.521.920 (31 Desember 2020: Rp 499.762.169.396) terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan timbulnya kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai tercatat aset tetap Grup dengan nilai wajarnya.

Pada tanggal 31 Desember 2021, aset tetap tertentu dengan nilai buku bersih sebesar Rp 147.665.334.396 (31 Desember 2020: Rp 152.835.686.943) dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman berjangka (Catatan 15).

Jumlah biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan Grup pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 473.370.157 (31 Desember 2020: Rp 473.370.157).

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

On December 31, 2021, property, plant and equipment except land are insured with PT Asuransi FPG Indonesia with total sum insure amounting to Rp 458,516,521,920 (December 31, 2020: Rp 499,762,169,396) against fire, theft and other possible risks.

Management believes that the insurance coverages are adequate to cover possible losses on related assets insured

The management believes that the carrying amount of the Group's property, plant and equipment is not significantly different with their fair values.

On December 31, 2021, certain property, plant and equipment with net book value of Rp 147,665,335,396 (December 31, 2020: Rp 152,835,686,943) is pledged as collateral for term loan (Note 15).

Total acquisition costs of property, plant and equipment which were fully depreciated and still used by the Group at December 31, 2021 amounted to Rp 473,370,157 (December 31, 2020: Rp 473,370,157).

At December 31, 2021 and 2020, there is no temporary idle property, plant and equipment and retired from active use and not classified as held for sale.

10. ASET KEUANGAN DARI PROYEK KONSESI

10. FINANCIAL ASSETS FROM CONCESSION PROJECT

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Penerimaan kapasitas minimum masa depan:			Future minimum capacity receipts:
Kurang dari satu tahun	41.958.426.562	42.120.658.490	Not later than one year
Lebih dari satu tahun tapi kurang dari lima tahun	469.438.710.130	166.810.910.685	Later than one year but not
Lebih dari lima tahun	<u>1.056.280.478.656</u>	<u>375.668.076.133</u>	Later than five years
Jumlah	1.567.677.615.348	584.599.645.307	Total
Dikurangi:			Less:
Pendapatan keuangan yang belum diterima	(799.457.019.314)	(246.678.904.330)	Unearned financial revenue
Jumlah yang belum ditagihkan	<u>(296.397.098.175)</u>	<u>-</u>	Amounts not yet due
Nilai kini penerimaan kapasitas masa depan	471.823.497.859	337.920.740.977	Present value of future capacity receipts
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(15.375.516.256)</u>	<u>(13.285.463.663)</u>	Less current maturity
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>456.447.981.603</u>	<u>324.635.277.314</u>	Long-term portion

Grup mencatat penghasilan keuangan dari aset keuangan sebagai berikut:

The Group recorded financial income from the financial assets as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Penghasilan keuangan	<u>33.793.555.410</u>	<u>24.495.666.848</u>	Finance income

Manajemen mengestimasi cadangan kerugian aset keuangan dari proyek konsesi sejumlah ECL sepanjang umur, dengan mempertimbangkan pengalaman gagal bayar historis dan prospek masa depan industri pelanggan. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat cadangan penurunan nilai untuk aset keuangan dari proyek konsesi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Management estimates the loss allowance on financial assets from concession project at an amount equal to lifetime ECL, taking into account the historical default experience and the future prospects of the customer's industry. Management assessed that there is no ECL allowance should be made for financial assets from concession project as at December 31, 2021 and 2020.

11. ASET TAK BERWUJUD

11. INTANGIBLE ASSET

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Biaya perolehan	10.155.207.861	-	Cost
Akumulasi amortisasi	-	-	Accumulated amortization
Bersih	<u>10.155.207.861</u>	<u>-</u>	Net

Aset tak berwujud merupakan hak konsesi yang timbul dari Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara AHS, entitas anak dengan PLN yang memenuhi definisi dari perjanjian konsesi jasa (Catatan 5).

Intangible asset represents concession right arising from Power Purchase Agreement between AHS, a subsidiary with PLN that meets the definition of a service concession arrangement (Note 5).

Aset tak berwujud akan diamortisasi pada periode tahap 2 sesuai Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara AHS dengan PLN (Catatan 25) yang dimulai dari tahun ke-21 sejak tanggal operasi komersial sampai dengan akhir periode konsesi.

Intangible asset will be amortized at phase 2 as stated in Power Purchase Agreement between AHS with PLN (Note 25) which is started from year 21th from commercial operation date until the end of the concession period.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tak berwujud pada tanggal 31 Desember 2021.

Management believes that there is no impairment in intangible assets as of December 31, 2021.

12. ASET LAIN-LAIN

12. OTHER ASSETS

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Beban ditangguhkan	16.362.617.062	15.501.275.760	Deferred charges
Uang jaminan	<u>1.657.345.076</u>	<u>2.907.345.076</u>	Security deposit
Jumlah	<u>18.019.962.138</u>	<u>18.408.620.836</u>	Total

Beban ditangguhkan sebagian besar merupakan beban terkait dengan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTMH).

Deferred charges mostly represent costs incurred for the Mini Hydro Power Plant (PLTMH).

13. UTANG USAHA DAN LAINNYA

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp
Pihak berelasi (Catatan 25)	24.472.527.414
Pihak ketiga	<u>1.732.804.512</u>
Jumlah	<u><u>26.205.331.926</u></u>

Utang usaha dan lainnya terutama timbul dari utang terkait konstruksi pembangkit listrik tenaga mini hydro (Catatan 24d).

Semua utang usaha dan lainnya dalam mata uang Rupiah.

Periode kredit pembelian adalah 30 hari. Bunga tidak dibebankan atas utang usaha dan lainnya.

13. TRADE AND OTHERS ACCOUNTS PAYABLE

	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
	35.000.000	Related party (Note 25)
	<u>1.931.136.596</u>	Third parties
Jumlah	<u><u>1.966.136.596</u></u>	Total

Trade and others accounts payable are mostly derived from payable related with construction of mini hydro power plant (Note 24d).

All trade and other accounts payable in Rupiah.

The average credit period on purchases is 30 days. No interest charge on the trade and other accounts payable.

14. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp
Jasa profesional	3.900.000.000
Bunga pinjaman	149.178.718
Lain-lain	<u>845.482.449</u>
Jumlah	<u><u>4.894.661.167</u></u>

14. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
	387.000.000	Professional fees
	241.226.889	Interest from loan
	<u>209.941.732</u>	Others
Jumlah	<u><u>838.168.621</u></u>	Total

15. PINJAMAN BERJANGKA

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp
PT Indonesia Infrastructure Finance	218.962.171.383
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	<u>(751.884.434)</u>
Jumlah	<u><u>218.210.286.949</u></u>
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u><u>(16.785.000.000)</u></u>
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u><u>201.425.286.949</u></u>

15. TERM LOANS

	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
	234.473.250.000	PT Indonesia Infrastructure Finance
	<u>(1.126.412.143)</u>	Unamortized transaction cost
Jumlah	<u><u>233.346.837.857</u></u>	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u><u>(14.407.470.000)</u></u>	Less current maturities
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u><u>218.939.367.857</u></u>	Long-term term loan net of current maturities

Perusahaan

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 10 Desember 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dengan jumlah maksimal Rp 90.000.000.000, dengan jangka waktu maksimal selama 12 tahun yang akan jatuh tempo pada bulan Juni 2030. Pinjaman ini digunakan untuk melunasi seluruh pinjaman kepada BCA dan membiayai tambahan belanja modal Perusahaan dan entitas anak.

The Company

Based on the Senior Note Credit Facility dated December 10, 2019, the Company obtained long-term credit facility from PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) with maximum loan facility amounting to Rp 90,000,000,000 with period maximum of 12 years and will be matured in June 2030. This loan facility is used to refinance existing loan to BCA and to finance additional capital expenditure of the Company and its subsidiaries.

Tingkat bunga per tahun sebesar JIBOR ditambah margin sebesar 5,5%.

ASS

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 10 Desember 2019, ASS memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Indonesia Infrastructure Finance dengan jumlah maksimal Rp 150.000.000.000, dengan jangka waktu maksimal selama 12 tahun yang akan jatuh tempo pada bulan September 2031. Pinjaman ini digunakan untuk melunasi seluruh pinjaman kepada BCA dan pembayaran penalti ke PLN atau pembayaran pencadangan penalti.

Tingkat bunga per tahun sebesar JIBOR ditambah margin sebesar 6%.

Pinjaman Perusahaan dan ASS tersebut dijamin dengan:

- Hak tanggungan atas tanah dan bangunan terkait dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro Perusahaan dan ASS ("Proyek")
- Jaminan fidusia atas peralatan dan aset bergerak terkait dengan proyek Perusahaan dan ASS
- Jaminan fidusia atas hasil pembayaran asuransi yang berkaitan dengan proyek Perusahaan dan ASS
- Jaminan gadai atas rekening bank Perusahaan dan ASS terkait Proyek;
- Jaminan fidusia atas Piutang sehubungan dengan proyek Perusahaan dan ASS
- Jaminan perusahaan dari PT Arkora Bakti Indonesia, ACEI Singapore Holding Private Ltd., dan untuk fasilitas pinjaman kepada ASS, termasuk jaminan perusahaan dari Perusahaan
- Dokumen Pengalihan Perjanjian Pokok Proyek untuk Tujuan Penjaminan
- Jaminan gadai atas saham setiap pemegang saham penerima pinjaman.
- Surat kesanggupan dari PT Arkora Bakti Indonesia dan ACEI Singapore Holding Private Ltd. untuk menanggung seluruh *cash deficiency* dan *cost overrun* sehubungan dengan Proyek dengan cara memberikan pinjaman dan/atau meningkatkan modal.

Berdasarkan fasilitas pinjaman ini, Perusahaan dan ASS harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari IIF untuk beberapa hal, termasuk di antaranya perubahan struktur permodalan dan kepemilikan, perubahan kegiatan usaha dan pembayaran dividen.

Annual interest rate is JIBOR plus margin 5.5%.

ASS

Based on the Senior Note Credit Facility dated December 10, 2019, ASS obtained long-term credit facility from PT Indonesia Infrastructure Finance with maximum loan facility amounting to Rp 150,000,000,000 with period maximum of 12 years and will be matured in September 2031. This loan facility is used to refinance existing loan to BCA and for payment of penalty to PLN or any penalty accrual.

Annual interest rate is JIBOR plus margin 6%.

These loan facility of the Company and ASS are secured by:

- Mortgage of land and building related to the Company and ASS' Mini Hydro Power Plant projects ("Projects")
- Fiduciary security over equipment and moveable assets related to the Company and ASS' Projects
- Fiduciary security over insurance proceed related to the Company and ASS' Projects
- Fiduciary security over bank statements related to the Company and ASS' Projects
- Fiduciary security over receivables related to the Company and ASS' Projects
- Corporate guarantee from PT Arkora Bakti Indonesia, ACEI Singapore Holding Private Ltd., and for loan facility to ASS, including corporate guarantee from the Company
- All material contracts related to the Projects
- Collateral of the shares for each shareholder of the recipient of the loans.
- Letter of Understanding (LoU) from PT Arkora Bakti Indonesia and ACEI Singapore Holding Private Ltd. to fund and finance cash deficiency and cost overrun related to the Projects by giving additional loan and/or capital injection.

Based on these credit facilities, the Company and ASS must obtain written approval from IIF for several matter, including changes in capital structure and ownership, changes in business activities and dividend payment.

Perusahaan dan ASS juga harus memenuhi ketentuan rasio keuangan sebagai berikut:

- rasio *Debt to Equity* maksimal 2.5 di mana perhitungan Debt tidak termasuk pinjaman kepada ACEI;
- rasio *Debt Service Coverage* minimal 1.20

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan dan ASS telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh perjanjian fasilitas pinjaman ini.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga Perusahaan dan ASS untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp 35.897.302.249 (31 Desember 2020: Rp 23.261.036.580).

The credit facilities above require the Company and ASS to maintain certain financial ratios as follows:

- Debt to Equity ratio maximum 2.5 times, which the debt is not included loan from ACEI;
- Debt Service Coverage Ratio minimum 1.20

As of December 31, 2021 and 2020, the Company and ASS meet the financial ratio as required by the loan facilities.

Total payment of term loans and interest of the Company and ASS for the year ended December 31, 2021 amounted to Rp 35,897,302,249 (December 31, 2020: Rp 28,589,586,487).

16. MODAL SAHAM

Nama pemegang saham/ <i>Name of stockholders</i>	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Jumlah/ <i>Total</i> Rp
PT Arkora Bakti Indonesia	695.880.000	60,00%	34.794.000.000
ACEI Singapore Holdings Private Ltd.	463.920.000	40,00%	23.196.000.000
Jumlah/Total	1.159.800.000	100,00%	57.990.000.000

Berdasarkan Akta Notaris No. 67 tertanggal 29 November 2021 Darmawan Tjoa, S.H., S.E., notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui:

- Peningkatan modal dasar Perusahaan dari sebesar Rp 57.990.000.000 (115.980 lembar saham) menjadi Rp 231.960.000.000 (4.639.200.000 lembar saham).
- Pemecahan nilai saham dari Rp 500.000 per lembar saham menjadi Rp 50 per lembar saham, sehingga total saham modal yang ditempatkan dan disetor penuh menjadi 1.159.800.000 lembar saham.

16. CAPITAL STOCK

31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>			
Nama pemegang saham/ <i>Name of stockholders</i>	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Jumlah/ <i>Total</i> Rp
PT Arkora Bakti Indonesia	69.588	60,00%	34.794.000.000
ACEI Singapore Holdings Private Ltd.	46.392	40,00%	23.196.000.000
Jumlah/Total	115.980	100,00%	57.990.000.000

Based on Notarial Deed No. 67 dated November 29, 2021 of Darmawan Tjoa, S.H., S.E., notary in Jakarta, the Company's stockholders agreed to :

- Increase the Company's subscribed capital from Rp 57,990,000,000 (115,980 shares) to Rp 231,960,000,000 (4,639,200,000 shares).
- Stock split from Rp 500,000 per share to Rp 50 per share, therefore total subscribed and paid in capital shares become to 1,159,800,000 shares.

Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0068317.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 30 November 2021.

This change was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia through Decision Letter No. AHU- AHU-0068317.AH.01.02 Tahun 2021 dated November 30, 2021.

Agio saham merupakan agio saham dari penerbitan saham atas kelebihan dari jumlah sebenarnya yang diterima untuk jumlah nilai nominal saham ditempatkan.

Agio capital represents excess of actual amount received to par value amount of shares subscribed.

17. PENDAPATAN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
	Rp	Rp	
Jasa konstruksi (Catatan 5)	142.514.403.770	5.381.941.540	Construction services (Note 5)
Penjualan listrik	47.428.726.400	40.582.449.600	Sale of electricity
Jasa lainnya	<u>8.450.290.119</u>	<u>6.129.721.185</u>	Other services
Jumlah	<u>198.393.420.289</u>	<u>52.094.112.325</u>	Total

Seluruh pendapatan Grup dilakukan dengan PT Perusahaan Listrik Negara di wilayah Indonesia. Pendapatan jasa konstruksi dan jasa lainnya diakui sepanjang waktu sedangkan penjualan listrik diakui pada waktu tertentu.

All of the Company's revenue are conducted with PT Perusahaan Listrik Negara in Indonesia. Construction services revenue and other services are recognized overtime while sale of electricity are recognized point in time. .

Rincian pelanggan pihak ketiga dengan transaksi lebih dari 10% dari jumlah pendapatan konsolidasian pada periode yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

Revenue to the following third party customer represented more than 10 % of the total consolidated revenues of the respective period:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
	Rp	Rp	
PT Perusahaan Listrik Negara	197.054.517.289	52.094.112.325	PT Perusahaan Listrik Negara

18. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
	Rp	Rp	
Beban konstruksi (Catatan 5)	69.440.251.975	5.110.669.027	Construction cost (Note 5)
Penyusutan (Catatan 9)	8.070.605.841	7.105.908.015	Depreciation (Note 9)
Beban operasi dan pemeliharaan	6.916.215.667	5.871.951.861	Operation and maintenance expenses
Beban proyek	3.770.835.306	3.739.134.137	Project site expense
Asuransi	597.782.809	598.816.819	Insurance
Subkontraktor	-	445.492.546	Subcontractor
Lain-lain	<u>480.555.000</u>	<u>72.261.600</u>	Others
Jumlah	<u>89.276.246.598</u>	<u>22.944.234.006</u>	Total

Rincian pembelian dengan transaksi lebih dari 10% dari jumlah pendapatan konsolidasian pada periode yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

Purchase represented more than 10 % of the total consolidated revenues of the respective period:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
	Rp	Rp	
PT Arkora Indonesia	31.736.144.066	5.000.000.000	PT Arkora Indonesia
Voith Hydro Privat Limited, India	2.072.769.570	2.803.187.100	Voith Hydro Privat Limited, India
PT Voith Hydro Indonesia	<u>169.504.420</u>	<u>1.110.718.071</u>	PT Voith Hydro Indonesia
Jumlah	<u>33.978.418.056</u>	<u>8.913.905.171</u>	Total

19. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2021
	Rp
Gaji, tunjangan dan imbalan kerja	6.689.393.073
Beban pajak	2.443.561.610
Jasa profesional	1.680.126.351
Penyusutan aset hak guna sewa	952.274.353
Pencarian dan survey lokasi	1.180.795.638
Sewa gedung	588.900.002
Perjalanan dinas	387.533.780
Penyusutan (Catatan 9)	322.348.522
Perbaikan dan pemeliharaan	860.135.006
Denda dari PLN	-
Lain-lain	2.904.702.401
Jumlah	18.009.770.736

19. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2020
	Rp
Salaries, allowances and employee benefits	9.655.469.740
Tax expense	2.718.923.711
Professional fee	1.086.576.759
Depreciation right-of-use assets	2.013.832.667
Search dan survey location	3.976.797.595
Rent building	-
Travel	410.403.532
Depreciation (Note 9)	360.266.320
Repair and maintenance	755.018.339
Penalties from PLN	9.316.900.357
Others	2.480.539.105
Total	32.774.728.124

20. BEBAN KEUANGAN

	2021
	Rp
Bunga atas pinjaman dari pihak-pihak berelasi	31.294.530.585
Bunga atas pinjaman dari IIF	20.760.751.341
Bunga atas utang bank	-
Bunga atas liabilitas sewa	-
Jumlah	52.055.281.926

20. FINANCE COST

	2020
	Rp
Interest loans from related parties	15.019.661.820
Interest on term loan from IIF	17.734.286.580
Interest on bank loan	6.142.792.321
Interest on lease liabilities	57.855.709
Total	38.954.596.430

21. PAJAK PENGHASILAN

a. Pajak dibayar di muka

	31 Desember/ December 31, 2021
	Rp
Lebih bayar pajak penghasilan badan	
Perusahaan	1.242.989.522
Entitas anak	958.301.678
Pajak pertambahan nilai	138.818.632
Jumlah	2.340.109.832

21. INCOME TAXES

a. Prepaid taxes

	31 Desember/ December 31, 2020
	Rp
Overpayment of corporate income tax	
The Company	1.353.537.874
Subsidiary	446.455.579
Value added tax	179.372.000
Total	1.979.365.453

b. Utang pajak

	31 Desember/ December 31, 2021
	Rp
Pajak penghasilan	
Pasal 4(2)	111.383.733
Pasal 21	93.832.990
Pasal 23	102.989.546
Pajak pertambahan nilai	312.798.150
Jumlah	621.004.418

b. Taxes payables

	31 Desember/ December 31, 2020
	Rp
Income tax	
Article 4(2)	95.424.664
Article 21	103.346.412
Article 23	121.584.943
Value added tax	230.907.042
Total	551.263.061

c. Beban (manfaat) pajak

Beban (manfaat) pajak Grup terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp
Pajak tangguhan Perusahaan	2.959.280.968
Entitas anak	<u>22.781.338.618</u>
Jumlah	<u>25.740.619.586</u>

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba (rugi) fiskal sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	75.470.962.895
Rugi (laba) sebelum pajak entitas anak	<u>(82.622.093.560)</u>
Rugi sebelum pajak Perusahaan	<u>(7.151.130.664)</u>
Perbedaan temporer:	
Beban imbalan kerja	(262.206.373)
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	<u>(6.830.191.400)</u>
Jumlah	<u>(7.092.397.773)</u>
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:	
Beban bunga	31.294.530.585
Amortisasi suku bunga efektif atas pinjaman	(9.418.347.241)
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(71.474.539)
Lain-lain	<u>(399.563.883)</u>
Jumlah	<u>21.405.144.922</u>
Laba (rugi) sebelum akumulasi rugi fiskal	<u>7.161.616.484</u>
Akumulasi rugi fiskal yang telah disesuaikan dengan Surat Ketetapan Pajak	
2016	(12.474.889.409)
2017	(5.581.310.847)
2018	(32.642.629.827)
2019	(8.013.965.038)
2020	<u>(13.605.134.362)</u>
Rugi fiskal	<u>(65.156.312.999)</u>

c. Tax expenses (benefit)

Tax expenses (benefit) of the Group consists of:

	31 Desember/ December 31, 2020 Rp
Deferred tax The Company	1.206.863.925
Subsidiaries	<u>(4.079.803.054)</u>
Total	<u>(2.872.939.129)</u>

Current Tax

The reconciliation between profit (loss) before tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable profit (loss) is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020 Rp
Profit (loss) before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income	(25.834.510.786)
Loss (profit) before tax of subsidiaries	<u>12.408.075.301</u>
Loss before tax of the Company	<u>(13.426.435.485)</u>
Temporary differences:	
Employee benefits	1.337.529.906
Difference between commercial and fiscal depreciation	<u>(12.792.487.348)</u>
Total	<u>(11.454.957.442)</u>
Non-deductible expenses (non-taxable income):	
Finance cost	15.019.661.820
Amortization on effective interest rate on loan	(3.447.422.678)
Interest income subject to final tax	(508.346.805)
Others	<u>212.366.228</u>
Total	<u>11.276.258.565</u>
Profit (loss) before fiscal loss carryforward	<u>(13.605.134.362)</u>
Accumulated fiscal losses adjusted based on Tax Assessment Letters	
2016	(12.474.889.409)
2017	(5.581.310.847)
2018	(37.531.080.911)
2019	(8.013.965.038)
2020	<u>-</u>
Fiscal losses	<u>(77.206.380.567)</u>

Sesuai peraturan perpajakan, kerugian fiskal tersebut dapat ditangguhkan ke tahun berikutnya dan dikompensasikan kepada penghasilan kena pajak yang terjadi selama lima tahun sesudah kerugian fiskal tersebut.

Rugi fiskal dan lebih bayar pajak penghasilan badan Grup tahun pajak 2018-2020 sudah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak ("SPT") yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pajak. Laba (rugi) pajak tahun pajak 2018-2020 menjadi dasar dalam pengisian SPT Pajak Penghasilan Badan Tahunan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan.

Surat Ketetapan Pajak

Pada bulan September 2020, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak lebih bayar untuk pajak penghasilan badan tahun buku 2018 sebesar Rp 453.922.648 dan juga mendapatkan surat tagihan denda pajak pertambahan nilai periode Januari - Desember 2018 sebesar Rp 602.256.864 menyebabkan Perusahaan menjadi kurang bayar sebesar Rp 148.334.216. Tidak terdapat perbedaan antara jumlah lebih bayar pajak badan dengan jumlah yang dilaporkan sebelumnya dalam surat pemberitahuan pajak badan, akan tetapi terdapat koreksi atas rugi fiskal dari Rp 37.531.080.911 yang dilaporkan sebelumnya menjadi Rp 32.642.629.827. Perusahaan setuju dengan hasil surat ketetapan pajak ini.

Pada bulan Maret 2021, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak lebih bayar untuk pajak penghasilan badan tahun buku 2019 sebesar Rp 355.581.481. Tidak terdapat perbedaan antara jumlah lebih bayar pajak badan dengan jumlah yang dilaporkan sebelumnya dalam surat pemberitahuan pajak badan, akan tetapi terdapat koreksi atas rugi fiskal dari Rp 22.108.904.979 yang dilaporkan sebelumnya menjadi Rp 8.013.965.038. Perusahaan setuju dengan hasil surat ketetapan pajak ini.

Perubahan tarif pajak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ("Perppu No. 1/2020") mulai berlaku pada 31 Maret 2020. Perppu 1/2020 menyesuaikan tarif pajak penghasilan badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi 22% yang berlaku untuk Tahun Pajak 2020 dan 2021 dan 20% berlaku untuk Tahun Pajak 2022 dan selanjutnya.

Selanjutnya pada bulan Oktober 2021, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di mana tarif pajak penghasilan badan dalam negeri ditetapkan menjadi sebesar 22% berlaku untuk tahun Pajak 2022 dan selanjutnya.

According to tax regulation, such losses may be carried forward and applied against taxable income in any of the five years following the year in which the fiscal loss was incurred.

Fiscal loss and overpayment of corporate income tax of the Group for fiscal year 2018-2020 are in accordance with the corporate tax returns filed with the Tax Service Office and tax assessment letters issued by Tax Office. Taxable income (loss) fiscal year 2018-2018 are in accordance with annual corporate tax return filed with the tax authority.

Tax Assessment Letter

In September 2020, the Company received tax assessment confirming overpayment of corporate income tax fiscal year 2018 amounted to Rp 453,922,648 and received penalty letter for VAT period January - December 2018 amounted Rp 602,256,864. There is no difference on overpayment of corporate income tax with the amount reported previously in its annual corporate income tax return. However, there is a correction of fiscal loss from Rp 37,531,080,911 as reported previously to Rp 32,642,629,827. The Company agrees with the tax assessment result.

In March 2021, the Company received tax assessment confirming overpayment of corporate income tax fiscal year 2019 amounted to Rp 355,581,481. There is no difference on overpayment of corporate income tax with the amount reported previously in its annual corporate income tax return. However, there is a correction of fiscal loss from Rp 22,108,904,979 as reported previously to Rp 8,013,965,038. The Company agrees with the tax assessment result.

Changes in statutory tax rates

Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2020 on State Financial Policy and Stability of Financial Systems for the Management of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and/or Counter the Threat to National Economy and/or Stability of Financial Systems ("Perppu No. 1/2020") took effect on March 31, 2020. Perppu 1/2020 reduced the income tax rates for domestic corporations and permanent establishments to 22% applicable for fiscal years 2020 and 2021 and further reduction to 20% applicable for fiscal year 2022 and thereafter.

Subsequently in October 2021, Government and Indonesia's parliament approved the Harmonized Tax Law in which the income tax rates for domestic corporations is set to 22% applicable for fiscal years 2022 and thereafter.

Pajak Tangguhan

Rincian dari aset (liabilitas) pajak tangguhan
Grup adalah sebagai berikut:

	Perusahaan				Entitas Anak				
	1 Januari/ January 1, 2020 Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to income for the year Rp	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income Rp	Penyesuaian perubahan tarif pajak/ Change in tax rate adjustment Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to income for the year Rp	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income Rp	Penyesuaian perubahan tarif pajak/ Change in tax rate adjustment Rp	
Aset tetap	(6.391.633.993)	(2.814.347.217)	-	1.534.176.546	(7.671.804.664)	(1.502.642.108)	143.799.759	(9.030.647.013)	The Company Property and equipment
Liabilitas imbalan kerja	1.296.308.441	294.256.579	(374.152.197)	(254.345.459)	962.067.364	(57.685.402)	55.049.995	867.533.276	Employee benefits obligations
Rugi fiskal	9.725.228.234	33.395.626	-	-	9.758.623.860	(1.575.555.627)	(22.247.585)	8.160.820.648	Fiscal losses
Sub-jumlah	4.629.902.682	(2.486.695.012)	(374.152.197)	1.279.831.087	3.048.886.560	(3.135.883.137)	176.602.169	(2.293.089)	Sub-total
Entitas Anak									Subsidiaries
Penyesuaian jasa konsesi	(29.781.541.732)	(2.125.807.822)	-	6.149.563.603	(25.757.785.951)	(18.892.805.947)	(3.905.645.172)	(48.556.237.070)	Concession service adjustment
Liabilitas imbalan kerja	12.317.361	60.467.752	(35.400.619)	(4.420.479)	32.964.015	17.710.167	(597.666)	4.138.006	Employee benefits obligations
Sub-jumlah	(29.769.224.371)	(2.065.340.070)	(35.400.619)	6.145.143.124	(25.724.821.936)	(18.875.095.780)	(3.906.242.838)	(48.552.099.064)	Sub-total
Jumlah	(25.139.321.689)	(4.552.035.082)	(409.552.816)	7.424.974.211	(22.675.935.375)	(22.010.978.917)	(3.729.640.669)	(48.554.392.152)	Total
Aset pajak tangguhan	4.629.902.682				3.048.886.560			-	Deferred tax asset
Liabilitas pajak tangguhan	(29.769.224.371)				(25.724.821.936)			(48.554.392.152)	Deferred tax liabilities

Rugi fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa lima tahun mendatang sejak kerugian fiskal terjadi. Manajemen berpendapat bahwa akumulasi kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dengan laba fiskal masa mendatang dan oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 2021 aset pajak tangguhan diakui atas rugi fiskal sebesar Rp 8.160.820.648 (31 Desember 2020: Rp 9.758.623.860).

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian rugi akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Deferred Tax

The details of the Group's deferred tax assets
(liabilities) is as follows:

The fiscal loss can be utilized against the taxable income for a period of five years subsequent to the year the fiscal loss was incurred. Management believes that probable future taxable profits will be available to utilize accumulated fiscal losses, hence, as of December 31, 2021, deferred tax of Rp 8,160,820,648 (December 31, 2020: Rp 9,758,623,860), were recognized on such fiscal losses.

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rate to loss before tax is as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	75.470.962.895	(25.834.510.786)	Profit (loss) before tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Rugi (laba) sebelum pajak entitas anak	(82.622.093.560)	12.408.075.301	Loss (profit) before tax of subsidiaries
Rugi sebelum pajak Perusahaan	(7.151.130.664)	(13.426.435.485)	Loss before tax of the Company
Pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif	(1.573.248.747)	(2.953.815.807)	Income tax at effective tax rate
Pengaruh pajak atas (beban) manfaat yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal			Tax effect of non-deductible expenses (non-taxable income)
Beban bunga	6.884.796.729	3.304.325.600	Finance cost
Amortisasi suku bunga efektif atas pinjaman	(2.072.036.393)	(758.432.989)	Amortization of effective interest rate on loan
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(15.724.399)	(111.836.297)	Interest income subject to final tax
Lain - lain	(87.904.053)	46.720.570	Others
Perubahan tarif pajak	(176.602.169)	(1.279.831.087)	Change in tax rate
Rugi fiskal yang tidak digunakan	-	2.959.733.934	Unutilized fiscal loss
Beban pajak Perusahaan	2.959.280.968	1.206.863.925	Tax expense of the Company
Beban (manfaat) pajak entitas anak	22.781.338.618	(4.079.803.054)	Tax expense (benefit) of subsidiaries
Jumlah beban (manfaat) pajak - bersih	25.740.619.586	(2.872.939.129)	Total tax expense (benefit) - net

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Grup menghitung dan mencatat estimasi imbalan pasca kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 yang berlaku sebelum tahun 2021 dan Undang-Undang Cipta Kerja setelah tahun 2021.

Program kewajiban imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

	2021 Rp	2020 Rp	
Biaya jasa kini	718.110.694	1.334.560.148	Current service cost
Biaya jasa lalu	(1.124.977.880)	-	Past service cost
Biaya bunga	227.328.729	439.082.895	Interest costs
Komponen beban imbalan pasca kerja yang diakui dalam laba rugi	<u>(179.538.457)</u>	<u>1.773.643.043</u>	Components of Post-employment benefit cost recognized in profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti-neto :			Remeasurement on the net defined benefit liability :
Keuntungan aktuarial			Actuarial gain from change
atas perubahan asumsi demografik	-	(1.862.507)	in demographic assumptions
(Keuntungan) kerugian aktuarial			Actuarial (gain) loss from change
atas perubahan asumsi penyesuaian	-	1.372.048.239	in experience adjustment
(Keuntungan) kerugian aktuarial			Actuarial (gain) loss from change
atas perubahan asumsi keuangan	(907.441)	(3.720.487.719)	in financial assumptions
Dampak karena penyesuaian pengalaman	(717.384.532)	-	Effect of experience adjustment
Komponen beban imbalan pasca kerja yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	<u>(718.291.973)</u>	<u>(2.350.301.987)</u>	Components of post-employment benefit costs recognized in other comprehensive income

Biaya jasa lalu sebesar Rp 1.124.977.880 terkait perubahan estimasi imbalan pasca kerja yang sebelumnya pada tahun 2021 menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 sedangkan setelah tahun 2021 menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja.

22. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATIONS

The Group calculates and records estimated employment benefits as required Under Labor Law No. 13/2003 before 2021 and Omnibus Law after 2021.

The defined benefit plan typically expose the Group to actuarial risk such as interest risk and salary risk.

Interest risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Amounts recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income in respect of the benefits are as follows:

Past service cost amounting to Rp 1,124,977,880 related to the changes in the estimated employment benefits which are before 2021 uses Under Labor Law No. 13/2003 and after 2021 uses Omnibus Law.

Jumlah liabilitas imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan yang timbul dari liabilitas Grup sehubungan dengan imbalan kerja adalah nilai kini dari liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The amounts included in the statement of financial position arising from the Group's obligations in respect of these employee benefit obligation are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Saldo awal nilai kini liabilitas	5.310.185.830	5.886.844.774	Opening defined benefit obligation
Biaya jasa kini	718.110.694	1.334.560.148	Current service cost
Biaya bunga	(1.124.977.880)	439.082.895	Interest cost
Biaya jasa lalu	227.328.729	-	Past service cost
Pembayaran imbalan dari pemberi kerja	(43.717.706)	-	Benefit payments from employer
Kerugian aktuarial dari perubahan asumsi keuangan	-	-	Actuarial loss from change in financial assumption
Pengukuran kembali liabilitas	<u>(718.291.973)</u>	<u>(2.350.301.987)</u>	Remeasurement on the net defined
Saldo akhir nilai kini liabilitas	<u>4.368.637.694</u>	<u>5.310.185.830</u>	Closing defined benefit obligation

Perhitungan imbalan pasca kerja pada tahun 2021, dan 2020 dihitung Kantor Konsultan Aktuaria yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Asumsi utama aktuaris yang digunakan oleh Grup adalah sebagai berikut:

The cost providing employee benefits in 2021 and 2020 were calculated by Actuarial Consulting Office which is registered in Financial Services Authority. The actuarial valuation used by the Group was carried out using the following key assumptions:

	2021	2020	
Tingkat diskonto	7,25% per tahun/per year	7,25% per tahun/per year	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5% per tahun/per year	5% per tahun/per year	Salary increment rate
Tingkat kematian	100% TMI2019/100% TMI2019	100% TMI2019/100% TMI2019	Mortality rate
Tingkat cacat	10% dari TMI2019/10% of TMI2019	10% dari TMI2019/10% of TMI2019	Disability rate
Tingkat pensiun normal	57 tahun/57 years	57 tahun/57 years	Normal retirement rate

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

	31 Desember/ December 31, 2020		31 Desember/ December 31, 2020		
	+1% Rp	-1% Rp	+1% Rp	-1% Rp	
Tingkat diskonto	(354.453.965)	423.924.966	(411.962.155)	495.630.503	Discount Rate
Tingkat kenaikan gaji	481.122.815	(406.912.707)	543.052.195	(267.532.200)	Salary Increment Rate

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode projected unit credit pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognized in the statement of financial position.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan sebesar 8,57 tahun per 31 Desember 2021(31 Desember 2020: 8,41 tahun)

The average duration of the benefit obligation at are is 8.57 years at December 31, 2021 (December 31, 2020:8.41 years).

23. LABA (RUGI) PER LEMBAR SAHAM

23. EARNINGS (LOSS) PER SHARE

	2021 Rp	2020 Rp	
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	48.959.115.032	(22.628.491.437)	Net profit (loss) for the year attributable to the owners of the Company
Rata-rata tertimbang jumlah saham	2.928.495.000	2.928.495.000	Weighted average number shares
Laba (rugi) bersih per saham dasar	17	(8)	Basic earnings (loss) per share

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham dasar telah disesuaikan untuk mencerminkan pengaruh dari pemecahan nilai nominal saham menjadi Rp 25 per saham sesuai dengan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perusahaan tanggal 4 Maret 2022 (Catatan 33a) dan penawaran umum perdana saham (Catatan 33g).

The weighted average number of shares for the computation of basic earnings per share has been adjusted to reflect the effect of the stock split from to Rp 25 per share in accordance with Circular Resolution of Shareholders dated March 4, 2022 (Note 33a) and initial public offering (Note 33g).

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan tidak memiliki saham biasa yang berpotensi dilutif.

For the year ended December 31, 2021 and 2020, the Company does not have dilutive potential ordinary shares.

24. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

24. RELATED PARTIES TRANSACTION

Sifat Pihak Berelasi

Nature of Relationship

Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat hubungan dengan pihak berelasi/ <i>Relationship with the related parties</i>	Transaksi yang signifikan <i>Significant transactions</i>
PT Arkora Bakti Indonesia (ABI)	Entitas induk terakhir dan pemegang saham Perusahaan/ <i>Ultimate shareholder and parent of the Company</i>	Pemberi pinjaman/ <i>loan</i>
ACEI Singapore Holdings Private Ltd (ACEI)	Pemegang saham Perusahaan/ <i>Shareholder of the Company</i>	Pemberi pinjaman/ <i>loan</i>
PT Arkora Indonesia	Pemegang saham PT Arkora Bakti Indonesia/ <i>Shareholder of PT Arkora Bakti Indonesia</i>	Kontraktor pembangkit listrik tenaga mini hydro di AHS dan ASS, entitas anak/ <i>Contractor of mini hydro power plant at AHS and ASS, subsidiaries</i>
Graha Sasra Aditya Zen	Direktur Utama dari GK, entitas anak/ <i>the President Director of GK, a subsidiary</i>	-
Aldo Henry Artoko, Arya Pradana Setiadharna, Ardi Dwinanta Setiadharna	Manajemen kunci Perusahaan/ <i>Key management personnel</i>	-
Aldo Henry Artoko, Rene Adhibrata, Priska Ammiliika	Pemilik saham PT Arkora Indonesia/ <i>Shareholders of PT Arkora Indonesia</i>	pemilik aset tertentu yang dijadikan sebagai jaminan utang bank/ <i>the owner of certain assets pledged as collateral for bank loan</i>

Transaksi Pihak Berelasi

- a. Grup menyediakan manfaat pada komisaris dan direktur Grup sebagai berikut:

	2021	2020
	Rp	Rp
Imbalan kerja jangka pendek		
Komisaris	218.035.720	216.224.496
Direktur	2.401.580.611	1.900.992.467
Jumlah	<u>2.619.616.331</u>	<u>2.117.216.963</u>

- b. Piutang lain-lain

	2021	2020
	Rp	Rp
Piutang lain-lain		
Aldo Henry Artoko	181.000.000	181.000.000
Arya Pradana Setiadharna	80.000.000	80.000.000
Ardi Dwinanta Setiadharna	80.000.000	80.000.000
Lainnya	2.671.988	-
Jumlah	<u>343.671.988</u>	<u>341.000.000</u>
Persentase terhadap total aset konsolidasian	<u>0,05%</u>	<u>0,06%</u>

Aldo Henry Artoko, Arya Pradana Setiadharna dan Ardi Dwinanta Setiadharna memiliki modal yang belum disetor kepada entitas anak.

- c. Pinjaman dari pihak berelasi

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
	Rp	Rp
Pokok pinjaman		
ACEI	114.152.000.000	112.840.000.000
ABI	7.000.000.000	-
Akrual bunga		
ACEI	90.062.086.060	58.935.808.808
ABI	118.333.333	-
Jumlah	211.332.419.393	171.775.808.808
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(115.140.470.994)</u>	<u>-</u>
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>96.191.948.399</u>	<u>171.775.808.808</u>
Persentase terhadap total liabilitas konsolidasian	<u>40,83%</u>	<u>39,05%</u>

Transaction with Related Parties

- a. The Group provides benefits to the commissioners and directors of the Group as follows:

	2021	2020
	Rp	Rp
Short-term employee benefits		
Commissioners	218.035.720	216.224.496
Directors	2.401.580.611	1.900.992.467
Total	<u>2.619.616.331</u>	<u>2.117.216.963</u>

- b. Other accounts receivables

	2021	2020
	Rp	Rp
Other accounts receivable		
Aldo Henry Artoko	181.000.000	181.000.000
Arya Pradana Setiadharna	80.000.000	80.000.000
Ardi Dwinanta Setiadharna	80.000.000	80.000.000
Others	2.671.988	-
Total	<u>343.671.988</u>	<u>341.000.000</u>
Percentage to total consolidated asset	<u>0,05%</u>	<u>0,06%</u>

Aldo Henry Artoko, Arya Pradana Setiadharna and Ardi Dwinanta Setiadharna have unpaid capital to subsidiaries.

- c. Loan from related parties

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
	Rp	Rp
Principal loan		
ACEI	114.152.000.000	112.840.000.000
ABI	7.000.000.000	-
Accrued interest		
ACEI	90.062.086.060	58.935.808.808
ABI	118.333.333	-
Total	211.332.419.393	171.775.808.808
Less current maturity	<u>(115.140.470.994)</u>	<u>-</u>
Long-term loan net of current maturities	<u>96.191.948.399</u>	<u>171.775.808.808</u>
Percentage to total consolidated liabilities	<u>40,83%</u>	<u>39,05%</u>

ACEI

Pada tanggal 2 Oktober 2015, PT Arkora Bakti Indonesia (sebagai sponsor), ACEI Singapore Holdings Private Ltd. (sebagai investor) dan Perusahaan menandatangani perjanjian *Note Agreement*.

Perusahaan akan menjual kepada investor dan investor akan membeli surat utang dengan jumlah keseluruhan sebesar US\$ 12.500.000 dengan menerbitkan 8 surat utang sebesar US\$ 1.562.500 per surat utang. Surat utang ini akan dikenakan bunga sebesar 14% per tahun dengan jangka waktu selama 5 tahun dari tanggal penerbitan.

Pada tanggal 16 Mei 2017 perjanjian ini diamandemen untuk perubahan jumlah keseluruhan sebesar US\$ 12.500.000 dengan menerbitkan 25 surat utang sebesar US\$ 500.000 per surat utang.

Pada tanggal 5 Juni 2017 Perusahaan menerbitkan sebanyak 8 surat utang dengan nilai keseluruhan sebesar US\$ 4.000.000 (Tahap 1). Surat utang ini akan dikenakan bunga sebesar 14% per tahun dari jumlah terutang (termasuk bunga yang belum dibayar) dengan jangka waktu selama 5 tahun dari tanggal penerbitan.

Pada tanggal 23 Maret 2018 Perusahaan menerbitkan sebanyak 8 surat utang dengan nilai keseluruhan sebesar US\$ 4.000.000 (Tahap 2). Surat utang ini akan dikenakan bunga sebesar 14% per tahun dari jumlah terutang (termasuk bunga yang belum dibayar) dengan jangka waktu selama 5 tahun dari tanggal penerbitan.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan kepemilikan saham Perusahaan di semua entitas anak, kecuali saham Perusahaan di PT Arkora Sulawesi Selatan, PT Arkora Hydro Sulawesi, PT Sulawesi Hidro Mandiri, PT Arjuna Hidro dan PT Arkora Tenaga Matahari.

ABI

Pada tanggal 28 Oktober 2021, PT Arkora Bakti Indonesia dan PT Arkora Hydro, menandatangani perjanjian kredit dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp 12.000.000.000 dengan bunga sebesar 10% per tahun dan jangka waktu jatuh tempo adalah 1 tahun sejak tanggal perjanjian.

Pada tanggal 31 Desember 2021, nilai pinjaman kepada PT Arkora Bakti Indonesia masing-masing sebesar Rp 7.000.000.000 (31 Desember 2020: Nihil).

- d. Pada tanggal 25 Februari 2016, PT Arkora Indonesia dan ASS menandatangani perjanjian *Civil and Metal Works* PLTMH Tomasa, dengan nilai kontrak sebesar Rp 134.881.659.000.

Pekerjaan atas proyek PLTMH Tomasa telah diselesaikan pada tanggal 31 Oktober 2019.

ACEI

On October 2, 2015, PT Arkora Bakti Indonesia (as sponsor), ACEI Singapore Holdings Private Ltd. (as investor) and the Company signed *Note Agreement*.

The Company shall sell to investor and investor shall purchase the Note amounting to US\$ 12,500,000 in aggregate by issuing 8 notes payable amounting to US\$ 1,562,500 per Note. The Note will bear interest at 14% per annum with a term of 5 years from the issuance of note.

On May 16, 2017, the agreement was amended for the change the Note amounting to US\$ 12,500,000 in aggregate by issuing 25 notes payable amounting to US\$ 500,000 per note.

On June 5, 2017 the Company issued 8 notes amounting to US\$ 4,000,000 (Phase 1). The Note will bear interest at 14% per annum from outstanding amount (including unpaid interest) with a term of 5 years from the issuance of note.

On March 23, 2018 the Company issued 8 notes amounting to US\$ 4,000,000 (Phase 2). The Note will bear interest at 14% per annum from outstanding amount (including unpaid interest) with a term of 5 years from the issuance of note.

These loan facilities are secured by the Company's shares ownership in all of its subsidiaries, except for shares ownership in PT Arkora Sulawesi Selatan, PT Arkora Hydro Sulawesi, PT Sulawesi Hidro Mandiri, PT Arjuna Hidro and PT Arkora Tenaga Matahari.

ABI

On October 28, 2021, PT Arkora Bakti Indonesia and PT Arkora Hydro have signed loan agreement with maximum principal amount of Rp 12,000,000,000 with interest 10% per annum and with a term of 1 year from the date of agreement.

As of December 31, 2021, the amount of loan payable to PT Arkora Bakti Indonesia amounting to Rp 7,000,000,000 (December 31, 2020: Nil).

- d. On February 25, 2016, PT Arkora Indonesia and ASS have signed agreement about *Civil and Metal Works* of PLTMH Tomasa with contract amount of Rp 134,881,659,000.

The construction of PLTMH Tomasa has been completed on October 31, 2019.

Pada tanggal 7 Desember 2020, PT Arkora Indonesia dan AHS, entitas anak menandatangani perjanjian *Civil and Metal Works* PLTMH Koro Yaentu Mini Hydro, dengan nilai kontrak sebesar Rp 158.412.292.000.

On December 7, 2020, PT Arkora Indonesia and AHS, a subsidiary have signed Civil and Metal Works agreement of PLTMH Koro Yaentu Mini Hydro with contract amount of Rp 158,412,292,000.

Biaya konstruksi terkait dengan perjanjian ini dicatat sebagai beban pokok pendapatan sebagai berikut:

The construction costs related to this agreement were recorded at cost of revenue as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Biaya konstruksi	<u>68.027.855.551</u>	-	Construction cost
Persentase terhadap beban pokok pendapatan konsolidasian	<u>76,20%</u>	-	Percentage to consolidated cost of revenue

Utang usaha dan lainnya kepada PT Arkora Indonesia pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 24.472.527.414 (31 Desember 2020: Rp 35.000.000).

The amount trade and other accounts payable to PT Arkora Indonesia as of December 31, 2021 amounting to Rp 24,472,527,414 (December 31, 2020: Rp 35,000,000).

Persentase utang usaha dan lainnya terhadap total liabilitas konsolidasian masing-masing sebesar 4,73% pada tanggal 31 Desember 2021 (31 Desember 2020: 0.01%)

Percentage of trade and other accounts payable to total consolidated liabilities is 4.73% (December 31, 2020: 0.01%).

- e. Utang retensi kepada PT Arkora Indonesia adalah sebesar Rp 3.401.392.771 pada tanggal 31 Desember 2021 (31 Desember 2020: Nihil).

- e. Retention payable to PT Arkora Indonesia amounting to Rp 3,401,392,771 as of December 31, 2021 (December 31, 2020: Nil).

Persentase utang retensi terhadap total liabilitas konsolidasian sebesar 0,66% pada tanggal 31 Desember 2021 (31 Desember 2020: Nihil)

Percentage of retention payable to total consolidated liabilities is 0.66% as of December 31, 2021 (December 31, 2020: Nil).

25. IKATAN

25. COMMITMENTS

- a. Pada tanggal 19 Juli 2012, Perusahaan dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan ketersediaan tenaga listrik rata-rata sebesar 39.492.278 kWh/tahun atau setara dengan *capacity factor* sebesar 70% di Garut, Jawa Barat. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun dari *Commercial Operating Date* (COD). Pada tanggal 23 Oktober 2014, perjanjian ini diadendum dengan mengubah ketersediaan tenaga listrik rata-rata menjadi sebesar 47.400.992 kWh/tahun atau setara dengan *capacity factor* sebesar 74,02%.

- a. On July 19, 2012, the Company and PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with average availability for electric power of 39,492,278 kWh/ year or equal with capacity factor amounted 70% at Garut, West Java. The agreement is valid for 15 years from Commercial Operating Date (COD). On October 23, 2014, the agreement was amended by changing the average availability for electric power to 47,400,992 kWh/year or equal with capacity factor amounted 74.02%.

Pada tanggal 28 September 2016, perjanjian ini diadendum dengan mengubah harga beli tenaga listrik menjadi Rp 1.100 per kWh untuk tahun ke 1 sampai dengan tahun ke 8 dari COD, dan Rp 850 per kWh untuk tahun ke 9 sampai dengan tahun ke 15.

On September 28, 2016, the agreement was amended by changing power purchase price to Rp 1,100 per kWh for the year 1 to year 8 from COD, and Rp 850 per kWh for the year 9 to year 15.

- b. Pada tanggal 30 September 2014, PT Arkora Sulawesi Selatan (ASS), entitas anak dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan ketersediaan tenaga listrik rata-rata sebesar 61.424 GWh/tahun atau setara dengan *capacity factor* sebesar 70,2% di Sulawesi Tengah. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun dari *Commercial Operating Date* (COD).
- c. Pada tanggal 21 Oktober 2020, PT Arkora Hydro Sulawesi (AHS), entitas anak dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan kapasitas 10MW. Perjanjian ini berlaku selama 25 tahun dari *Commercial Operating Date* (COD).
- d. Pada tanggal 1 November 2021, AHS dan Voith Hydro Privat Limited, India menandatangani perjanjian kontrak untuk suplai peralatan elektro-mekanikal untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro Yaentu dengan nilai kontrak sebesar US\$ 2.330.000. Waktu penyelesaian kontrak adalah delapan belas bulan untuk mencapai komisioning semua unit sejak tanggal dimulainya kontrak.
- e. Pada tanggal 22 Desember 2021, AHS dan PT Voith Hydro Indonesia menandatangani perjanjian kontrak onshore untuk penyediaan, transportasi dan layanan pemasangan dan komisioning peralatan elektro-mekanikal untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro Yaentu dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.815.000.000.
- f. Pada tanggal 28 Desember 2021, AHS PT Indonesia Infrastructure Finance dan PT Bank Central Asia Tbk menandatangani perjanjian pengelolaan kas dan rekening, dimana PT Indonesia Infrastructure Finance memberikan fasilitas pinjaman dengan jumlah pokok hingga Rp 194.500.000.000 kepada AHS dengan jangka waktu maksimal selama 19 tahun dimana PT Bank Central Asia Tbk sebagai agen penjamin dan penampung.
- b. On September 30, 2014, PT Arkora Sulawesi Selatan (ASS), a subsidiary and PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with average availability for electric power of 61,424 GWh/year or equal with capacity factor amounted 70.2% at Central Sulawesi. The agreement is valid for 15 years from Commercial Operating Date (COD).
- c. On October 21, 2020, PT Arkora Hydro Sulawesi (AHS), a subsidiary and PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with capacity of 10MW. The agreement is valid for 25 years from Commercial Operating Date (COD).
- d. On November 1, 2021, AHS entered into contract agreement with Voith Hydro Privat Limited, India for supply of electro-mechanical equipment of Yaentu Mini Hydro Power Plant project with total contract amounting to US\$ 2,330,000. Time for completion of the contract shall be eighteen months to attain the commissioning of all unit from the commencement date of the contract.
- e. On December 22, 2021, AHS entered into contract agreement with PT Voith Hydro Indonesia for onshore supply, inland transportation and service for erection and commissioning of electro-mechanical equipment of Yaentu Hydro Power Plant project with total contract amounting to Rp 5,815,000,000.
- f. On December 28, 2021, AHS, PT Indonesia Infrastructure Finance and PT Bank Central Asia Tbk entered into cash and account management agreement, whereby PT Indonesia Infrastructure Finance provides a loan facility with a principal amount up to Rp 194,500,000,000 with period maximum of 19 years to AHS wherein PT Bank Central Asia Tbk is the guarantor and custodian agent.

Tingkat bunga per tahun sebesar JIBOR ditambah margin.

Interest rate per year is JIBOR plus margin

Pinjaman AHS tersebut dijamin dengan:

- Hak tanggungan atas tanah dan bangunan terkait dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro AHS.
- Jaminan fidusia atas peralatan dan aset bergerak terkait dengan Proyek AHS.
- Jaminan fidusia atas hasil pembayaran asuransi yang berkaitan dengan Proyek AHS.
- Jaminan fidusia atas Piutang sehubungan dengan Proyek AHS.
- Jaminan gadai atas saham ASS, Perusahaan dan PT Sulawesi Hidro Mandiri
- Surat kesanggupan yang diberikan ASS, PT Arkora Bakti Indonesia, ACEI dan PT Arkora Hydro
- Jaminan Perusahaan dari PT Arkora Bakti Indonesia, ACEI dan PT Arkora Hydro

Fasilitas pinjaman di atas mengharuskan AHS memenuhi ketentuan rasio keuangan sebagai berikut:

- rasio *Debt to Equity* AHS maksimal 3
- rasio *Debt Service Coverage* minimal 1.20

Berdasarkan fasilitas pinjaman ini, AHS harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari IIF untuk beberapa hal, termasuk di antaranya perubahan struktur permodalan dan kepemilikan, perubahan kegiatan usaha dan pembayaran dividen.

Pada tanggal 31 Desember 2021, fasilitas pinjaman ini belum digunakan oleh AHS.

The loan facility of AHS is secured by:

- Mortgage of land and building related to the AHS' Mini Hydro Power Plant projects ("Projects")
- Fiduciary security over equipment and moveable assets related to the AHS' Projects
- Fiduciary security over insurance proceed related to the AHS' Projects
- Fiduciary security over receivables related to the AHS' Projects
- Shares collateral of ASS, the Company and PT Sulawesi Hidro Mandiri
- Letter of understanding from ASS, PT Arkora Bakti Indonesia, ACEI dan PT Arkora Hydro
- Corporate guarantee from PT Arkora Bakti Indonesia, ACEI and PT Arkora Hydro

The credit facilities above require the AHS to maintain certain financial ratios as follows:

- Debt to Equity ratio AHS maximum 3 times
- Debt Service Coverage Ratio minimum 1.20

Based on these credit facilities, AHS must obtain written approval from IIF for several matter, including changes in capital structure and ownership, changes in business activities and dividend payment.

As of December 31, 2021, this loan facility has not been used by AHS.

26. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Grup memiliki aset moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2021		31 Desember / December 31, 2020			
	Mata uang asing/ Foreign Currencies	Ekuivalen/ Equivalent in Rp	Mata uang asing/ Foreign Currencies	Ekuivalen/ Equivalent in Rp		
Aset					Assets	
Bank dan setara kas	EURO	8.904	143.589.047	8.933	154.811.913	Cash in banks and cash equivalent
	US\$	2.228	31.790.401	42.935	605.601.069	
Jumlah Aset			175.379.448		760.412.982	Total Assets
Liabilitas					Liability	
Pinjaman dari pihak berelasi	US\$	14.311.725	204.214.086.060	12.178.363	171.775.808.808	Loan from a related party
Liabilitas bersih			(204.038.706.612)		(171.015.395.826)	Net liabilities

26. MONETARY ASSET AND LIABILITY DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY

At December 31, 2021 and 2020, the Group had monetary assets in foreign currencies, as follows:

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kurs konversi yang digunakan Grup adalah sebagai berikut:

The conversion rates used by the Group on December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
Mata uang			Foreign currencies
1 US\$	14.269	14.105	US\$ 1
1 EURO	16.127	17.330	EUR 1

27. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Tabel berikut ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

27. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

The following table explains changes in the Group's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Group's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	1 Januari/ January 1, 2021	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ financing cash flow	Beban bunga Interest expenses	Perubahan transaksi non-kas/ non-cash change	31 Desember/ December 31, 2021	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pinjaman berjangka	233.346.837.857	(35.897.302.249)	20.760.751.341	-	218.210.286.949	Term loans
Liabilitas sewa	360.197.062	(2.149.232.633)	-	1.789.035.571	-	Lease liabilities
Pinjaman dari pihak berelasi	171.775.808.808	7.000.000.000	31.244.610.585	1.312.000.000	211.332.419.393	Loan from related parties
Jumlah	<u>405.482.843.727</u>	<u>(31.046.534.882)</u>	<u>52.005.361.926</u>	<u>3.101.035.571</u>	<u>429.542.706.342</u>	

	1 Januari/ January 1, 2020	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ financing cash flow	Beban bunga Interest expenses	Perubahan transaksi non-kas/ non-cash change	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Utang bank	197.307.784.815	(203.416.617.259)	6.142.792.321	(33.959.877)	-	Bank loans
Pinjaman berjangka	-	215.238.963.420	17.734.286.580	373.587.857	233.346.837.857	Term loans
Liabilitas sewa	1.890.550.543	(1.601.219.700)	57.855.709	13.010.510	360.197.062	Lease liabilities
Pinjaman dari pihak berelasi	148.508.098.092	-	15.019.661.820	8.248.048.896	171.775.808.808	Loan from a related party
Jumlah	<u>347.706.433.450</u>	<u>10.221.126.461</u>	<u>38.954.596.430</u>	<u>8.600.687.386</u>	<u>405.482.843.727</u>	

28. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN NONKAS

	2021	2020
	Rp	Rp
Penambahan pinjaman dari pihak berelasi melalui penambahan akrual bunga dan perubahan selisih kurs	32.556.610.585	23.267.710.716

28. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NON-CASH INVESTING AND FINANCING ACTIVITIES

Increase in loan from related party through additional accrued interest and change in foreign exchange

29. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN

	Aset keuangan pada biaya perolehan yang diamortisasi/ <i>Financial asset at amortized cost</i>	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortized</i>
	Rp	Rp
31 Desember 2021		
<u>Aset keuangan</u>		
Bank dan setara kas	16.054.766.055	-
Piutang usaha - pihak ketiga	14.456.449.975	-
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	343.671.988	-
Pihak ketiga	369.001.049	-
Aset keuangan dari proyek konsesi	471.823.497.859	-
<u>Liabilitas keuangan</u>		
Utang usaha dan lainnya		
Pihak berelasi	-	24.472.527.414
Pihak ketiga	-	1.732.804.512
Pinjaman berjangka	-	218.210.286.949
Pinjaman dari pihak berelasi	-	211.332.419.393
Biaya masih harus dibayar	-	4.894.661.167
Utang retensi	-	3.401.392.771
Jumlah	<u>503.047.386.926</u>	<u>464.044.092.206</u>
	Rp	Rp
31 Desember 2020		
<u>Aset keuangan</u>		
Bank dan setara kas	25.237.528.361	-
Piutang usaha - pihak ketiga	8.461.083.586	-
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	341.000.000	-
Pihak ketiga	26.625.000	-
Aset keuangan dari proyek konsesi	337.920.740.977	-
<u>Liabilitas keuangan</u>		
Utang usaha dan lainnya		
Pihak berelasi	-	35.000.000
Pihak ketiga	-	1.931.136.596
Pinjaman berjangka	-	233.346.837.857
Pinjaman dari pihak berelasi	-	171.775.808.808
Biaya masih harus dibayar	-	838.168.621
Jumlah	<u>371.986.977.924</u>	<u>407.926.951.882</u>

29. CATEGORIES AND CLASSES OF FINANCIAL INSTRUMENTS

	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortized</i>
	Rp
December 31, 2021	
<u>Financial assets</u>	
Cash in banks and cash equivalent	-
Trade accounts receivable - third party	-
Other accounts receivable	
Related parties	-
Third parties	-
Financial assets from concession project	-
<u>Financial liabilities</u>	
Trade and other accounts payable	
Related parties	24.472.527.414
Third parties	1.732.804.512
Term loans	218.210.286.949
Loan from related parties	211.332.419.393
Accrued expenses	4.894.661.167
Retention payable	3.401.392.771
Total	<u>464.044.092.206</u>
	Rp
December 31, 2020	
<u>Financial assets</u>	
Cash in banks and cash equivalent	-
Trade accounts receivable - third party	-
Other accounts receivable	
Related parties	-
Third parties	-
Financial assets from concession project	-
<u>Financial liabilities</u>	
Trade and other accounts payable	
Related parties	35.000.000
Third parties	1.931.136.596
Term loans	233.346.837.857
Loan from related party	171.775.808.808
Accrued expenses	838.168.621
Total	<u>407.926.951.882</u>

30. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

a. Manajemen risiko modal

Grup mengelola modalnya untuk memastikan mereka dapat mempertahankan kelangsungan usaha disamping memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham melalui optimalisasi saldo liabilitas dan ekuitas.

Struktur modal Grup terdiri dari utang bank dan pinjaman dari pihak berelasi yang saling hapus dengan kas dan setara kas dan ekuitas pemegang saham yang terdiri dari modal saham, agio saham dan laba (defisit).

Direksi Grup secara berkala melakukan struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari revidi ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

30. FINANCIAL RISK AND CAPITAL MANAGEMENT

a. Capital risk management

The Group manages its capital to ensure that it will be able to continue as a going concern while maximizing the return to stakeholders through the optimization of debt and equity balance.

The capital structure of the Group consists of bank loans and loan from related party, offset by cash and cash equivalents and equity shareholder consist of capital stock, agio capital and retained earnings (deficit).

The Directors of the Group periodically review the Group's capital structure. As part of this review, the Directors consider the cost of capital and related risk.

Tidak terdapat perubahan terhadap eksposur risiko modal Grup dimana risiko ini telah dikelola dan diukur.

b. Manajemen risiko mata uang asing

Grup terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama karena transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing atas pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing.

Analisis sensitivitas mata uang asing

Grup terutama terkspos terhadap Dollar Amerika Serikat ("USD").

Jika Rupiah menguat atau melemah sebesar 1% terhadap USD dengan semua variabel lainnya, maka laba sebelum pajak untuk periode berjalan akan meningkat/menurun sebesar Rp 2.041.822.957 per 31 Desember 2021 (Desember 31 2020: Rp 1.711.702.077). 1% adalah tingkat sensitivitas yang digunakan ketika melaporkan secara internal risiko mata uang asing kepada para karyawan kunci, dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup item mata uang asing moneter yang ada dan menyesuaikan translasinya pada akhir periode untuk perubahan 1% dalam nilai tukar mata uang asing.

Menurut pendapat manajemen, analisis sensitivitas tidak representatif dari risiko valuta asing melekat karena eksposur pada akhir periode pelaporan tidak mencerminkan eksposur selama tahun berjalan.

c. Manajemen risiko tingkat bunga

Grup terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Grup meminjam dana dengan tingkat bunga tetap dan mengambang. Risiko ini dikelola oleh Grup dengan mempertahankan gabungan yang tepat antara pinjaman suku bunga tetap dan mengambang.

Eksposur Grup terhadap suku bunga dalam aset keuangan dan liabilitas keuangan dirinci dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.

Untuk utang dengan suku bunga mengambang, Grup akan memulai diskusi dengan IIF terkait dengan perubahan atas suku bunga acuan yang baru.

There has been no change to the Group's exposure to capital risk or the manner in which these risks are managed and measured.

b. Interest rate risk management

The Group is exposed to the effect of foreign currency exchange rate fluctuation mainly because of foreign currency denominated transactions from term loans denominated in foreign currencies.

Foreign currency sensitivity analysis

The Group is mainly exposed to the U.S. Dollar ("USD").

If the Rp had strengthened or weakened by 1% against USD with all other variables held constant, profit before tax of the period would have been increase /decrease Rp 2,041,822,957 as of December 31, 2021, (December 31, 2020: Rp 1,711,702,077) The 1% is the sensitivity rate used when reporting foreign currency risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their translation at the period end for a 1% change in foreign currency rates.

In management's opinion, the sensitivity analysis is unrepresentative of the inherent foreign exchange risk because the exposure at the end of the reporting period does not reflect the exposure during the year.

c. Interest rate risk management

The Group is exposed to interest rate risk because entities in the Group borrow funds at both fixed and floating interest rates. The risk is managed by the Group by maintaining an appropriate mix between fixed and floating rate borrowings.

The Group's exposures to interest rates on financial assets and financial liabilities are detailed in the liquidity risk management section of this note.

For the Group's floating rate debt, the Group will start discussions with IIF for the new benchmark interest rate.

d. Manajemen risiko likuiditas

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk manajemen Grup dan pendanaan jangka pendek, menengah dan panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel risiko likuiditas dan suku bunga

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan dengan periode pembayaran yang disepakati Grup. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang tak terdiskonto dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal di mana Grup dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup arus kas bunga dan pokok. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal terawal di mana Grup mungkin akan diminta untuk membayar.

	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ Weighted average effective interest rate	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 sampai 5 tahun/ 1 to 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/Total	
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	
31 Desember 2021						December 31, 2021
Tanpa bunga						Non-interest bearing
Utang usaha dan lainnya						Trade and other accounts payable
Pihak berelasi		24.472.527.414	-	-	24.472.527.414	Related parties
Pihak ketiga		1.732.804.512	-	-	1.732.804.512	Third parties
Utang retensi		3.401.392.771	-	-	3.401.392.771	Retention payable
Biaya masih harus dibayar		4.894.661.166	-	-	4.894.661.166	Accrued expenses
Instrumen tingkat bunga variable						Variable interest rate instruments
Pinjaman berjangka	JIBOR plus 5,5% - 6%	35.549.391.422	169.458.105.207	119.102.883.149	324.110.379.778	Term loans
Instrumen tingkat bunga tetap						Fixed interest rate instruments
Pinjaman dari pihak berelasi	10%-14%	124.181.279.305	114.472.184.536	-	238.653.463.842	Loan from related parties
		<u>194.232.056.590</u>	<u>283.930.289.743</u>	<u>119.102.883.149</u>	<u>597.265.229.483</u>	
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ Weighted average effective interest rate	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 sampai 5 tahun/ 1 to 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/Total	
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	
31 Desember 2020						December 30, 2020
Tanpa bunga						Non-interest bearing
Utang usaha dan lainnya						Trade and other accounts payable
Pihak berelasi		35.000.000	-	-	35.000.000	Related parties
Pihak ketiga		1.931.136.596	-	-	1.931.136.596	Third parties
Biaya masih harus dibayar		838.168.621	-	-	838.168.621	Accrued expenses
Instrumen tingkat bunga variable						Variable interest rate instruments
Pinjaman berjangka	JIBOR plus 5,5% - 6%	35.877.584.558	168.119.175.205	156.547.279.333	360.544.039.096	Term loans
Liabilitas sewa	5,9%	361.935.000	-	-	361.935.000	Lease liabilities
Instrumen tingkat bunga tetap						Fixed interest rate instruments
Pinjaman dari pihak berelasi	14%	-	236.326.215.972	-	236.326.215.972	Loan from related party
		<u>39.043.824.775</u>	<u>404.445.391.177</u>	<u>156.547.279.333</u>	<u>600.036.495.285</u>	

d. Liquidity risk management

Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Directors, which has established an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short-, medium- and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

Liquidity and interest risk tables

The following tables detail the Group's remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment periods. The tables have been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Group can be required to pay. The tables include both interest and principal cash flows. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Group may be required to pay.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Kecuali aset finansial dari proyek konsesi (Catatan 10) manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik karena mempunyai jangka waktu pendek atau menggunakan tingkat suku bunga pasar.

Nilai wajar aset finansial dari proyek konsesi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp 471.823.497.859 (31 Desember 2020: Rp 337.920.740.977).

Nilai wajar instrumen keuangan diatas, ditentukan melalui analisis arus kas yang didiskonto dengan menggunakan tingkat diskonto yang setara dengan tingkat pengembalian yang berlaku bagi instrumen keuangan yang memiliki syarat dan periode jatuh tempo yang sama.

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan posisi keuangan

Tingkatan nilai wajar adalah sebagai berikut:

- Pengukuran nilai wajar Level 1 adalah yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Pengukuran nilai wajar Level 2 adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga); dan
- Pengukuran nilai wajar Level 3 adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Nilai wajar aset finansial dari proyek konsesi termasuk dalam Level 3.

e. Fair value Measurements

Fair value of financial instruments carried at amortized cost

Except for the financial asset from concession project (Note 10), management consider that the carrying amounts of the Company's financial assets and financial liabilities recognized in the financial statements approximate their fair values because they have either short-term maturities or carry market interest rate.

The fair value of financial assets from concession project as of December 31, 2021 is Rp 471,823,497,859 (December 31, 2020: Rp 337,920,740,977).

The fair value for the above financial instruments, was determined by discounting estimated cash flows using discount rates for financial instruments with similar term and maturity.

Fair value measurement hierarchy of the Company's financial statement

The fair value hierarchy are as follows:

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and
- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The fair value of financial asset from concession project falls into Level 3.

31. SEGMENT OPERASI

Pengambil keputusan dalam operasional utama adalah Direksi. Direksi memeriksa kinerja Grup dari sudut pandang geografis yang terdiri dari 3 segmen yang dapat dilaporkan: pembangkit listrik tenaga mini hydro 7,4 MW di Cikopo (Jawa Barat), pembangkit listrik tenaga mini hydro 10 MW di Tomasa (Sulawesi Tengah) dan pembangkit listrik tenaga mini hydro 10 MW di Yaentu (Sulawesi Tengah).

31. OPERATING SEGMENTS

The chief operating decision-maker has been identified as the members of Board of Directors. The Board of Directors examine the Group's performance from a geographic perspective which consists of 3 reportable segments: 7.4 MW mini hydro powerplant in Cikopo (West Java), the 10 MW mini hydro power plant in Tomasa (Sulawesi Tengah) and the 10 MW mini hydro power plant in Yaentu (Central Sulawesi).

	31 December / December 31, 2021						
	Cikopo Rp	Tomasa Rp	Yaentu Rp	Lainnya/ Others Rp	Eliminasi/ Elimination	Total/ total Rp	
PENDAPATAN	47.428.726.400	7.111.387.119	142.514.403.770	1.338.903.000	-	198.393.420.289	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	12.919.778.956	6.916.215.667	69.440.251.975	-	-	89.276.246.598	COST OF REVENUES
LABA KOTOR	34.508.947.444	195.171.452	73.074.151.795	1.338.903.000	-	109.117.173.691	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	11.989.667.975	1.405.804.578	3.009.507.955	1.604.790.227	-	18.009.770.736	OPERATING EXPENSES
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN							
Penghasilan keuangan	71.474.539	27.798.793.727	6.066.522.582	948.441	-	33.937.739.289	Finance income
Amortisasi suku bunga efektif atas pinjaman	9.418.347.241	(5.845.985.765)	(3.572.361.476)	-	-	-	Amortization effective interest rate on loan
Beban keuangan	(38.825.084.381)	(13.230.197.545)	-	-	-	(52.055.281.926)	Finance cost
Keuntungan (kerugian) atas selisih kurs	(1.302.666.026)	(4.321.266)	38.735	-	-	(1.306.948.557)	Gain (loss) on foreign exchanges
Keuntungan (kerugian) lain-lain - bersih	967.518.493	2.959.652.416	-	(139.119.776)	-	3.788.051.133	Other gain (losses) - net
TOTAL PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(29.670.410.134)	11.677.941.567	2.494.199.841	(138.171.335)	-	(15.636.440.060)	TOTAL OTHER INCOME (EXPENSES)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(7.151.130.664)	10.467.308.441	72.558.843.680	(404.058.562)	-	75.470.962.895	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	(2.959.280.968)	(1.218.812.544)	(21.562.526.074)	-	-	(25.740.619.586)	TAX EXPENSES
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(10.110.411.632)	9.248.495.898	50.996.317.606	(404.058.562)	-	49.730.343.309	NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK							OTHER COMPREHENSIVE (LOSS) PROFIT NET OF TAX
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							Items that will not reclassified subsequently to profit or loss:
(Kerugian) keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja pasti	417.721.279	208.811.408	-	91.759.286	-	718.291.973	Actuarial gain (loss) of defined benefit plan
Pajak dari keuntungan (kerugian) aktuarial	(91.898.681)	(45.938.510)	-	-	-	(137.837.191)	Tax of actuarial gain (loss)
Jumlah laba komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	325.822.598	162.872.898	-	91.759.286	-	580.454.782	Total other comprehensive (loss) profit for the year - net of tax
JUMLAH PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(9.784.589.035)	9.411.368.796	50.996.317.606	(312.299.276)	-	50.310.798.091	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							NET PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk						48.959.115.032	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali						771.228.277	Non-controlling interest
JUMLAH						49.730.343.309	TOTAL
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk						49.488.546.872	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali						822.251.219	Non-controlling interest
JUMLAH						50.310.798.091	TOTAL
INFORMASI LAINNYA							OTHER INFORMATION
Aset segmen	275.441.960.454	373.507.387.034	157.379.821.134	31.896.207.896	(149.611.629.815)	688.613.746.702	Segment assets
Liabilitas segmen	325.258.573.491	218.582.497.495	82.229.635.459	5.367.993.696	(113.850.573.671)	517.588.126.470	Segment liabilities

PT. ARKORA HYDRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT. ARKORA HYDRO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020 AND FOR
THE YEARS ENDED (Continued)

	31 December / December 31, 2020						
	Cikopo Rp	Tomasa Rp	Yaentu Rp	Lainnya/ Others Rp	Eliminasi/ Elimination	Total/ total Rp	
PENDAPATAN	40.582.449.600	11.511.662.725	-	-	-	52.094.112.325	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	12.010.329.853	10.933.904.453	-	-	-	22.944.234.006	COST OF REVENUES
LABA KOTOR	28.572.119.747	577.758.572	-	-	-	29.149.878.319	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	15.335.267.905	14.117.572.726	1.971.649.538	1.350.237.955	-	32.774.728.124	OPERATING EXPENSES
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN							
Penghasilan keuangan	428.635.546	24.555.679.968	788.813	300.477	-	24.985.404.804	Finance income
Amortisasi suku bunga efektif atas pinjaman	3.447.422.679	(3.447.422.679)	-	-	-	-	Amortization effective interest rate on loan
Beban keuangan	(23.138.863.777)	(15.816.412.653)	-	-	-	(38.954.596.430)	Finance cost
Keuntungan (kerugian) atas selisih kurs	(8.123.479.670)	(112.048.240)	-	-	-	(8.235.527.910)	Gain (loss) on foreign exchanges
Keuntungan (kerugian) lain-lain - bersih	722.317.896	(556.802.901)	-	(170.456.440)	-	(4.941.445)	Other gain (losses) - net
TOTAL PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(26.663.287.327)	4.622.993.496	788.813	(170.456.963)	-	(22.209.660.981)	TOTAL OTHER INCOME (EXPENSES)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(13.426.435.485)	(8.916.820.658)	(1.970.860.725)	(1.520.393.918)	-	(25.834.510.786)	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	(1.206.863.925)	4.079.803.054	-	-	-	2.872.939.129	TAX BENEFIT (EXPENSES)
LABA (RUGI) USAHA TAHUN BERJALAN	(14.633.299.410)	(4.837.017.604)	(1.970.860.725)	(1.520.393.918)	-	(22.961.571.657)	PROFIT (LOSS) CURRENT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK							OTHER COMPREHENSIVE (LOSS) PROFIT NET OF TAX
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
(Kerugian) keuntungan aktuarial atas program lindung nilai pensiun	2.248.933.369	177.003.095	-	(75.634.477)	-	2.350.301.987	Actuarial gain (loss) of defined benefit plan
Pajak dan keuntungan (kerugian) aktuarial	(449.786.674)	(35.400.619)	-	75.634.477	-	(409.552.816)	Tax of actuarial gain (loss)
Jumlah laba komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	1.799.146.695	141.602.476	-	-	-	1.940.749.171	Total other comprehensive (loss) profit for the year - net of tax
JUMLAH KERUGIAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(12.834.152.715)	(4.695.415.128)	(1.970.860.725)	(1.520.393.918)	-	(21.020.822.486)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR
RUGI TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							NET LOSS FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk						(22.628.491.437)	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali						(333.080.220)	Non-controlling interest
JUMLAH						(22.961.571.657)	TOTAL
JUMLAH KERUGIAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS) PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk						(20.764.792.768)	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali						(256.029.718)	Non-controlling interest
JUMLAH						(21.020.822.486)	TOTAL
INFORMASILAINNYA							OTHER INFORMATION
Aset segmen	268.698.771.323	365.985.378.995	16.427.988.548	30.051.428.349	(120.575.325.303)	560.588.241.912	Segment assets
Liabilitas segmen	287.925.118.708	220.471.910.470	10.877.505.953	4.609.873.810	(84.010.989.170)	439.873.419.771	Segment liabilities

32. KONDISI USAHA

Pada tanggal 31 Desember 2021, saldo liabilitas lancar Grup melebihi saldo aset lancar sebesar Rp 118.424.185.279 yang terutama disebabkan oleh pinjaman dari ACEI, pemegang saham, sebesar Rp 108.022.137.660 yang akan jatuh tempo pada bulan Juli 2022. Rencana manajemen adalah dana yang diperoleh dari Penawaran Saham Umum Perdana (IPO) sebagian akan digunakan untuk pelunasan pinjaman kepada ACEI. Pada tanggal 30 Juni 2022, Perusahaan telah mendapat pernyataan efektif dari OJK dan melakukan pencatatan atas sahamnya di BEI pada tanggal 8 Juli 2022 (Catatan 33g).

Berdasarkan kondisi tersebut, manajemen Grup telah membuat penilaian atas kemampuan Grup untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan yakin bahwa Grup memiliki sumber daya untuk melanjutkan bisnis di masa mendatang. Selanjutnya, manajemen telah menilai bahwa tidak terdapat ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian tetap disusun atas dasar kelangsungan usaha.

32. BUSINESS CONDITION

As of November 30, 2021, the Group's current liabilities exceeded its current assets by Rp 118,424,185,279 which was mainly due to loan from ACEI, its shareholder, of Rp 108,022,137,660 which will be due in July 2022. Management's plan is to use the proceed from Initial Public Offering ("IPO") to partially pay the loan from ACEI. On June 30, 2022, the Company received the effective statement from OJK and listed its shares in IDX on July 8, 2022 (Note 33g).

Based on these conditions, the Group's management has made an assessment of the Group's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Group has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, management has assessed that there are no material uncertainties that may cast significant doubt upon the Group's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perusahaan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 12 tertanggal 4 Maret 2022 oleh Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan memutuskan antara lain untuk:

- Menyetujui pengunduran diri seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dan memberikan pelepasan dan pembebasan penuh kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan dari tindakan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan yang dilakukannya atas nama Perusahaan termuat dalam laporan keuangan dan laporan tahunan Perusahaan serta telah sesuai dengan: (i) kewenangannya masing-masing, (ii) ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, dan (iii) peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini;

- Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang baru, terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Sirkuler ini sampai penutupan RUPS Tahunan berikutnya. Susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

Arya Pradana Setiadharna
Abhay Narayan Pande
Drs. Indarto, S.H.

President Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner

Direktur Utama
Direktur

Aldo Henry Artoko
Ismu Nugroho
Ricky Hartono

President Director
Directors

Jabatan Komisaris Independen mulai berlaku setelah saham-saham Perusahaan tercatat di bursa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek di mana saham Perusahaan dicatatkan.

The role of Independent Commissioner shall be effective after shares of the Company is listed in the stock exchange in accordance with Capital Market prevailing laws and regulation and stock exchange regulation where shares of the Company is listed.

- Menyetujui pemecahan nilai saham dari sebelumnya sebesar Rp 50 per lembar saham menjadi sebesar Rp 25 per lembar saham.
- Menyetujui perubahan maksud dan tujuan Perusahaan serta menyesuaikan kegiatan usaha utama dan penunjang Perusahaan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

- Approve the stock split from the previous amount of Rp 50 (fifty Rupiah) per share to Rp 25 (twenty-five Rupiah) per share.
- Approve changes in the Company's purposes and objectives and adjust the Company's main and supporting business activities in accordance with the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics No. 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields.

33. EVENT AFTER REPORTING PERIOD

- a. Based on Circular Resolution of Shareholders in lieu of extraordinary meeting of shareholders of the Company that was notarized through Notarial Deed No. 21 dated March 4, 2022 of Sugih Haryati S.H, M.Kn., notary in Jakarta, the Company's stockholders, among other, agreed to:

- Approve the resignation of all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners and provide full release and discharge to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners from actions conducted within their capacity as members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (acquit et de charge) so long as the actions conducted on behalf of the Company are reflected in the Company's financial statement and annual statement and have been in accordance with: (i) their respective authority, (ii) provisions of the Articles of Association of the Company, and (iii) prevailing laws and regulations, since the date of this Circular Resolution

- Approve the appointment of the new members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, from the effective date of this Circular Resolution until the subsequent Annual GMS. The composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are as follows:

- Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia, serta mencatatkan saham-saham tersebut dalam daftar pemegang saham Perusahaan pada Biro Administrasi Efek Perusahaan.
 - Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
 - a. Perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Arkora Hydro Tbk.
 - b. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perusahaan paling banyak 773.200.000 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu) saham baru atau 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perusahaan ("Saham Baru") melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dengan harga dan jumlah saham yang akan ditetapkan oleh Direksi Perusahaan dan suara bulat Dewan Komisaris Perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perusahaan dicatatkan.
 - c. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perusahaan dengan ini menyetujui dan menyatakan mengesampingkan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum Perdana tersebut.
 - d. Pencatatan seluruh saham Perusahaan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham (selain pemegang saham masyarakat) Perusahaan pada BEI, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Approve the Company's plan to conduct Initial Public Offering and list such the Company shares at PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), approve to list the Company's shares in Collective Custody that is conducted according to prevailing Capital Market laws and regulations, specifically Kustodian Sentral Efek Indonesia Regulations, as well as to list such shares in the Register of Shareholders of the Company to the Company's Securities Administration Bureau.
 - Approve in relation to the Initial Public Offering:
 - a. The change of status of the Company form a private company to a public company, and approve change of the Company's name to PT Arkora Hydro Tbk;
 - b. The issuance of reserved shares of the Company at a maximum of 773,200,000 (seven hundred seventy three million two hundred thousand) new shares or 25% (twenty five percent) of the entire issued and paid-up capital of the Company ("New Shares") through the Initial Public Offering to the public at price and amount of shares determined by the Board of Directors of the Company and the unanimous vote of the Board of Commissioners by taking into account prevailing laws and regulation including Capital Market regulations and Stock Exchange Regulations that is applicable where the Company's shares are listed.
 - c. in relation to such decision, the Shareholders of the Company hereby further approve and states to waive their pre-emptive right to purchase the new shares to be sold in such Initial Public Offering.
 - d. The listing of all Company shares after the Initial Public Offering over shares offered and sold to the public through the capital market, as well as shares that are owned by the Shareholders (other than public shareholders) of the Company to BEI, as well as to approve registration of shares of the Company in Collective Custody that is conducted in accordance with prevailing Capital Market laws and regulations, specifically Kustodian Sentral Efek Indonesia Regulation.

- Menyetujui penyisihan laba bersih untuk cadangan Perusahaan, senilai Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) atau setara dengan 3,45% (tiga koma empat lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perusahaan;
- b. Pada tanggal 14 Maret 2022, Perusahaan, PT Asripower Prima dan pemegang saham PT Asripower Prima menandatangani Perjanjian Pemesanan Saham Bersyarat, di mana Perusahaan akan memesan dan mengambil bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh PT Asripower Prima dengan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh PT Asripower Prima dan para pemegang saham PT Asripower Prima dan disetujui oleh Perusahaan. Jumlah saham baru yang akan diterbitkan oleh PT Asripower Prima adalah sebanyak 34.000 lembar saham atau sebesar 54,85% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor PT Asripower Prima setelah penerbitan saham baru dengan nilai sebesar Rp 34.000.000.000.
- c. Pada tanggal 24 Maret 2022, PT Arkora Energi Baru, entitas anak, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan kapasitas 2 x 2,7 MW. Perjanjian ini berlaku selama 25 tahun sejak *Commercial Operating Date* (COD).
- d. Pada tanggal 5 April 2022, IIF selaku pemberi pinjaman berjangka (Catatan 15) telah memberikan persetujuan penghapusan pembatasan pembayaran dividen Perusahaan dan penghapusan pembatasan perubahan struktur permodalan Perusahaan dengan syarat bahwa ABI dan ACEI secara bersama-sama tetap menjaga kepemilikannya secara langsung dalam Perusahaan lebih dari 50% dari jumlah saham Perusahaan.
- Pada tanggal 27 April 2022, IIF selaku pemberi pinjaman berjangka telah memberikan persetujuan pelepasan jaminan atas gadai saham Perusahaan tanpa syarat apapun.
- Pada tanggal 25 Mei 2022, IIF selaku pemberi pinjaman berjangka telah memberikan persetujuan penghapusan pembatasan pembayaran dividen ASS dan AHS.
- e. Pada tanggal 28 April 2022, seluruh saldo piutang atas setoran modal entitas anak (Catatan 24b) telah diterima pelunasannya dari Aldo Henry Artoko, Arya Pradana Setiadharna, dan Ardi Dwinanta Setiadharna.
- f. Pada tanggal 24 Mei 2022, ACEI, ABI dan Perusahaan setuju untuk memperpanjang jatuh tempo surat-surat utang Tahap 1 (Catatan 24c) menjadi 15 Juli 2022.
- Approve the net profit allowance for the Company's reserve, in the amount of Rp 2,000,000,000 (two billion Rupiah) or equivalent to 3.45% (three point four five percent) of the total issued and paid-up capital of the Company;
- b. On March 14, 2022, the Company, PT Asripower Prima and shareholders of PT Asripower Prima signed a Conditional Share Subscription Agreement, in which the Company will subscribe new shares to be issued by the PT Asripower Prima with several prerequisites that must be met by PT Asripower Prima and the shareholders of PT Asripower Prima and approved by the Company. The number of new shares to be issued by PT Asripower Prima is 34,000 shares or 54.85% of the total issued and paid-up capital of PT Asripower Prima after the issuance of new shares with a value of Rp 34,000,000,000.
- c. On March 24, 2022, PT Arkora Energi Baru, a subsidiary, and PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with with capacity of 2 x 2.7 MW. The agreement is valid for 25 years from Commercial Operating Date (COD).
- d. On April 5, 2022, IIF as the lender of term loan (Note 15) has approved the removal of restriction on the Company's dividend payment and the removal of restriction on changes to the Company's capital structure on the condition that ABI and ACEI jointly maintain their direct ownership in the Company of more than 50 % of the total shares of the Company.
- On April 27, 2022, IFF as lender of term loan has approved to release the collateral for the pledge of the Company's share without any condition.
- On May 25, 2022, IIF as lender of term loan has approved the removal of restriction on the ASS and AHS' dividend payment.
- e. As of April 28, 2022, all outstanding receivable for unpaid share capital to subsidiaries (Note 24b) have been received from Aldo Henry Artoko, Arya Pradana Setiadharna, and Ardi Diwnanta Setiadharna.
- f. On May 24, 2022, ACEI, ABI and the Company agree to extend the maturity date of notes Phase 1 (Note 24c) to July 15, 2022.

- g. Pada tanggal 30 Juni 2022, Perusahaan memperoleh pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dalam suratnya No. S-117/D.04/2022 untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 607.486.000 saham (20,74% dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham) dengan harga penawaran Rp 300 per saham. Pada tanggal 8 Juli 2022, Perusahaan mendapatkan persetujuan pencatatan efek di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dari Direksi BEI.

- g. On June 30, 2022, the Company received the effective statement from the Board of Commissioners of the Financial Services Authority ("OJK") in its Letter No. S-117/D.04/2022 to conduct an Initial Public Offering of 607,486,000 shares (20,74% of total shares issued and fully paid-up after initial public offering) with exercise price of Rp 300 per share. On July 8, 2022, the Company received approval for the listing of its shares on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") from the Board of Directors of the IDX.

34. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi keuangan tersendiri Entitas Induk hanya menyajikan informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan daftar investasi entitas induk dalam entitas anak.

Informasi keuangan tersendiri Entitas Induk disajikan pada halaman 65 sampai dengan 69. Informasi keuangan tersendiri Entitas Induk mengikuti kebijakan akuntansi yang digunakan dalam membuat laporan keuangan konsolidasian seperti yang dijelaskan di Catatan 3, kecuali investasi pada entitas anak yang dicatat dengan menggunakan metode biaya.

35. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 1 sampai 64 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur Utama untuk diterbitkan kembali pada tanggal 15 Juli 2022.

34. SUPPLEMENTARY INFORMATION

The financial information of the Parent Entity only comprise statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows information and list of investments in subsidiaries.

Financial information of the Parent Entity only, are presented on pages 65 to 69. These Parent Entity only financial information follow the accounting policies used in the preparation of the consolidated financial statements that are described in Note 3, except for the investments in subsidiaries which are accounted using the cost method.

35. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements on pages 1 to 64 were the responsibilities of the management, and were approved for reissued by the President Director and authorized for issue on July 15, 2022.

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	6.291.326.893	10.070.276.146	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	5.512.802.200	4.663.127.000	Trade accounts receivable
Piutang lain-lain	70.125.000	26.625.000	Other receivables
Biaya dibayar dimuka	4.287.472.483	100.213.482	Prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	1.242.989.522	1.353.537.874	Prepaid taxes
Jumlah Aset Lancar	17.404.716.098	16.213.779.502	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Investasi pada entitas anak	35.984.000.000	34.735.000.000	Investments in subsidiaries
Piutang lain-lain dari pihak berelasi	70.804.604.490	59.036.934.045	Due from related parties
Aset tetap - bersih	147.665.334.397	152.917.626.964	Property, plant and equipment - net
Aset hak guna sewa - bersih	1.610.132.013	773.370.795	Right-of-use assets - net
Beban ditangguhkan	1.572.028.380	1.572.028.380	Deferred charges
Aset pajak tangguhan	-	3.048.886.560	Deferred tax assets
Aset lain-lain	401.145.076	401.145.076	Other assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	258.037.244.356	252.484.991.821	Total Non-current Assets
JUMLAH ASET	275.441.960.454	268.698.771.323	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang usaha dan lainnya			Trade accounts payable
Pihak berelasi	25.607.618.547	24.358.618.548	Related parties
Pihak ketiga	-	748.782	Third parties
Utang pajak	73.351.009	115.504.601	Taxes payables
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			Current maturities of long-term liabilities
Pinjaman berjangka	6.885.000.000	6.370.650.000	Term loan
Pinjaman dari pihak berelasi	115.140.470.994	-	Loan from related parties
Liabilitas sewa	-	360.197.062	Lease liabilities
Biaya masih harus dibayar	4.522.386.965	688.989.900	Accrued expenses
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	152.228.827.515	31.894.708.893	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun			Long-term liabilities - net of current maturities
Pinjaman berjangka	72.892.171.410	79.842.600.000	Term loan
Pinjaman dari pihak berelasi	96.191.948.399	171.725.808.808	Loan from related parties
Liabilitas pajak tangguhan	2.293.089	-	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan kerja	3.943.333.075	4.462.001.007	Employee benefits obligation
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	173.029.745.973	256.030.409.815	Total Non-current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	325.258.573.488	287.925.118.708	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 500.000 per saham			Capital stock - Rp 500,000 par value per share
Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh - 115.980 saham	57.990.000.000	57.990.000.000	Authorized, subscribed and paid-up - 115,980 shares
Agio saham	92.685.000.000	92.685.000.000	Agio capital
Komponen ekuitas lain	(95.543.905.966)	(74.738.229.351)	Other component of equity
Penghasilan komprehensif lainnya	2.661.749.663	2.335.927.065	Other comprehensive income
Defisit	(107.609.456.731)	(97.499.045.099)	Deficit
Jumlah Ekuitas	(49.816.613.035)	(19.226.347.385)	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	275.441.960.454	268.698.771.323	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Disajikan menggunakan metode biaya/ Presented using *cost method*

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
	Rp	Rp	
PENDAPATAN	47.428.726.400	40.582.449.600	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	<u>(12.919.778.956)</u>	<u>(12.010.329.853)</u>	COST OF REVENUES
Laba kotor	<u>34.508.947.444</u>	<u>28.572.119.747</u>	Gross profit
BEBAN USAHA			OPERATING EXPENSES
Beban umum dan administrasi	(11.989.667.975)	(15.335.267.905)	General and administrative expenses
Beban keuangan	(38.825.084.381)	(23.138.183.777)	Finance cost
Pendapatan keuangan	71.474.539	428.635.546	Finance income
Amortisasi suku bunga efektif atas pinjaman	9.418.347.241	3.447.422.679	Amortization effective interest rate on loan
Kerugian atas selisih kurs - bersih	(1.302.666.026)	(8.123.479.670)	Loss on foreign exchange - net
Keuntungan lain-lain - bersih	<u>967.518.493</u>	<u>722.317.896</u>	Other gain - net
RUGI SEBELUM PAJAK	(7.151.130.664)	(13.426.435.485)	LOSS BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	<u>(2.959.280.968)</u>	<u>(1.206.863.925)</u>	TAX EXPENSE
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	<u>(10.110.411.632)</u>	<u>(14.633.299.410)</u>	LOSS FOR THE YEAR
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK			OTHER COMPREHENSIVE INCOME NET OF TAX
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			Items that will not reclassified subsequently to profit or loss:
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja pasti	<u>325.822.598</u>	<u>1.799.146.695</u>	Actuarial gain on defined benefit plan
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>(9.784.589.035)</u>	<u>(12.834.152.715)</u>	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR

*) Disajikan menggunakan metode biaya/ Presented using *cost method*

	Modal disetor/ <i>Paid-up capital stock</i>	Agio saham/ <i>Agio capital</i>	Komponen ekuitas lainnya/ <i>Other component equity</i>	Penghasilan komprehensif lain/ <i>Other comprehensive income</i>	Defisit/ <i>Deficit</i>	Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i>	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Saldo per 1 Januari 2020	57.990.000.000	92.685.000.000	(57.444.348.744)	536.780.370	(82.865.745.689)	10.901.685.937	Balance as of January 1, 2020
Jumlah rugi tahun berjalan	-	-	-	-	(14.633.299.410)	(14.633.299.410)	Total loss for the year
Perbedaan atas nilai wajar piutang lain-lain dari pihak berelasi	-	-	(17.293.880.607)	-	-	(17.293.880.607)	Fair value difference on due from related parties
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja pasti	-	-	-	1.799.146.695	-	1.799.146.695	Actuarial gain on defined benefit obligation
Saldo per 31 Desember 2020	57.990.000.000	92.685.000.000	(74.738.229.351)	2.335.927.065	(97.499.045.099)	(19.226.347.385)	Balance as of December 31, 2020
Jumlah rugi tahun berjalan	-	-	-	-	(10.110.411.632)	(10.110.411.632)	Total loss for the year
Perbedaan atas nilai wajar piutang lain-lain dari pihak berelasi	-	-	(20.805.676.615)	-	-	(20.805.676.615)	Fair value difference on due from related parties
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja pasti	-	-	-	325.822.598	-	325.822.598	Actuarial gain on defined benefit obligation
Saldo per 31 Desember 2021	<u>57.990.000.000</u>	<u>92.685.000.000</u>	<u>(95.543.905.966)</u>	<u>2.661.749.663</u>	<u>(107.609.456.731)</u>	<u>(49.816.613.035)</u>	Balance as of December 31, 2021

*) Disajikan menggunakan metode biaya/ Presented using *cost method*

	2021 Rp	2020 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	46.579.051.200	37.575.612.800	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada:			Cash paid to:
Pemasok	(6.559.782.763)	(8.425.535.946)	Suppliers
Karyawan	(8.778.440.474)	(8.333.837.066)	Employees
Kas dihasilkan dari operasi	31.240.827.963	20.816.239.788	Cash generated from operations
Penerimaan (pembayaran) pajak penghasilan, bersih	110.548.352	(563.994.192)	Income tax received (paid), net
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasional	31.351.376.315	20.252.245.596	Net Cash Proceed from Operating Activities
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	(2.930.935.271)	(951.678.000)	Acquisition of property, plant and equipment
Penambahan piutang kepada pihak berelasi	(23.154.999.818)	(44.925.948.289)	Addition receivable to related party
Penerimaan pendapatan bunga	71.474.539	428.635.546	Cash received from interest income
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(26.014.460.550)	(45.448.990.743)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	7.000.000.000	-	Proceeds loan from related party
Pembayaran utang bank	-	(52.035.128.621)	Payment of bank loan
Pembayaran bunga bank	-	(1.171.855.854)	Payment of interests bank loan
Pembayaran liabilitas sewa	(2.149.232.633)	(1.447.740.000)	Payments of lease liabilities
Penerimaan pinjaman berjangka	-	90.000.000.000	Proceeds from term loan
Pembayaran pinjaman berjangka	(6.436.078.590)	(3.786.750.000)	Payment of term loan
Pembayaran bunga pinjaman berjangka	(7.530.553.796)	(6.782.102.638)	Payment of interests term loan
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(9.115.865.019)	24.776.422.887	Net Cash Provided by Financing Activities
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(3.778.949.254)	(420.322.260)	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA AWAL TAHUN	10.070.276.146	10.490.598.406	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA AKHIR TAHUN	6.291.326.893	10.070.276.146	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

*) Disajikan menggunakan metode biaya/ Presented using *cost method*

Rincian investasi pada entitas anak dengan metode biaya adalah sebagai berikut:

Details of investments in subsidiaries at cost are as follows:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis Usaha/ Nature of Business	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp
PT Granif Konsultan	Jakarta	Jasa dan Pembangunan/ Service and Developing	75%	2011	600.000.000	600.000.000
PT Arkora Sulawesi Selatan	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Maret/March 2020	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Nosu Hydro	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Hydra Sulawesi	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Arkora Tomoni Hydro	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Arkora Luwu Timur Mandiri	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Arkora Hidro Pasifik	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Arkora Hydro Sulawesi	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Arkora Hidronesia	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Arkora Sulawesi Tengah	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Sulawesi Hidro Mandiri	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Arkora Sulawesi Tenggara	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Arjuna Hidro	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Tenggara Hidro	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Arkora Energi Baru	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Arkora Atlantik	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Arkora Guna Nergi	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Arkora Hidro Tenggara	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.980.000.000	1.980.000.000
PT Tirta Energi Lestari	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,60%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	475.000.000	475.000.000
PT Arkora Tenaga Matahari	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.249.000.000	-
Jumlah/ <i>Total</i>					<u>35.984.000.000</u>	<u>34.735.000.000</u>

2021

LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEBERLANJUTAN
ANNUAL REPORT AND SUSTAINABILITY REPORT

ARKORA HYDRO

Renewable Energy For A Better Future



ARKORA HYDRO

PT ARKORA HYDRO Tbk

21st Floor Unit C & D, Office 8 Building
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Lot 28 SCBD
Jakarta 12190, Indonesia

P. +62 (021-29333-288; 021-29333-299)

F. +62 (021-29333-298)

E. hydro@arkora.com

www.arkora-hydro.com

LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEBERLANJUTAN
ANNUAL REPORT AND SUSTAINABILITY REPORT

2021